

ISSN 1978-5003
Terakreditasi
Berdasarkan Keputusan Kepala LIPI
No. 329/E/2016/24 Maret 2016

JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA



Vol. 21 No. 2 (Juli - Desember 2017)

Masyarakat Miskin, TIK dan Peningkatan Ekonomi

(Survei pada Masyarakat Anggota PNM terkait Pola Penggunaan TIK dan Peningkatan Ekonomi)

Hasyim Ali Imran

Representasi Ideologi Aparatur Negara dalam Media

(Studi Konstruksi Realitas Wartawan Humas Pemda DKI mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam Pemberitaan Website beritajakarta.com)

Launa

E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)

Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih

Valence Issue dan Surveillance Media

(Content Analysis Surat kabar mengenai Valence Issue Melalui Headline-nya pada Edisi Juli 2017)

Felix Tawaang

Network Society, Internet, dan Aktivitas Komunikasi Masyarakat

(Survei Aktifitas Komunikasi Masyarakat Melalui Social Network Websites di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)

Muhammad Rustam

Bahasa dan Kekuasaan

(Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu)

Karman

Komunikasi Kelompok, Diskursif dan Public Space

(Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP Daerah Provinsi Bengkulu)

Ari Cahyo Nugroho

Realitas Penelitian Komunikasi Berbasis Internet

(Sebuah Tinjauan)

Bambang Mudjiyanto

Televisi dan Masyarakat Perkotaan

(Survei Kebiasaan Menonton TV Masyarakat Kelurahan Tammamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)

Rukman Pala

DITERBITKAN OLEH :
BALAI PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA JAKARTA

JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA

ISSN : 1978-5003

Terakreditasi

Berdasarkan Keputusan Kepala LIPI

No. 329/E/2016/24 Maret 2016

Terbit dua edisi dalam setahun, edisi 1 Juni dan edisi 2 Desember.

Penanggung Jawab :

Kepala BPPKI Jakarta

Ketua Dewan Penyunting :

Prof. (Ris) Dr. Gati Gayatri, M.A., APU

(Ilmu Komunikasi-Jurnalistik-PPS MIK UPDM(B) Jakarta)

Anggota Dewan Penyunting :

Prof. (Ris) Drs. Rusdi Muchtar, M.A.

(LIPI)

Dr. Udi Rusadi, MS

(Ilmu Komunikasi - Dosen PPS MIK Universitas Indonesia)

Dr. Ahmad Mulyana, M.Si

(Ilmu Komunikasi - Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta)

Penyunting Pelaksana/Staf Dewan Penyunting :

Drs. Hasyim Ali Imran, M.Si

(Ilmu Komunikasi - Peneliti Utama Bidang *Media and Network Society*)

Asisten Penyunting Pelaksana :

Drs. Bambang Mudjiyanto, M.Si.

(Ilmu Komunikasi - Peneliti Utama Bidang *Media and Network Society*)

Dewi Hernikawati, S.Si, M.Ti;

(Peneliti Muda Bidang TIK Lainnya)

Marudur Pandapotan Damanik, ST,M.Eng.

(Peneliti Muda Bidang Teknik Sistem Informasi)

Desain Grafis/Setting

Gunawan

Sekretariat/Administrasi :

1. Drs. Abdul Ghofar, MPd

2. Felix Tawaang, S.H.

3. Ari Cahyo Nugroho, S.Sos

Mitra Bestari Edisi ini :

-Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A.

(Program Doktorat Ilmu Komunikasi Usahid Jakarta; Kepakaran Bidang Ilmu Komunikasi)

Ir. Dana Indra Sensuse, MLIS, PhD

(Staf Akademik Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia; Kepakaran Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Drs. M. Jamiluddin Ritonga, MS

(Dosen Metodologi Penelitian di Universitas Esa Unggul Jakarta,
dan Konsultan Komunikasi; Kepakaran Bidang Metodologi Ilmu Komunikasi)

Dr. Halomoan Harahap, M.Si

(Dosen FIKOM di Universitas Esa Unggul Jakarta; Kepakaran Bidang Ilmu Komunikasi)

Eko Nugroho, S.Sos, M.Si

(Dosen FIKOM di UPDM(B) Jakarta;

Kepakaran Bidang Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif))

Alamat Redaksi :

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta

Jalan Pegangsaan Timur No. 19-B, Jakarta 10320

Telp/Fax : (021) 31922337

<https://jurnal.kominfo.go.id/indexphp/jksm>

JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA

Vol. 21 No. 2 (Juli - Desember 2017)

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI	iii
Lembar Abstrak	v
Masyarakat Miskin, TIK dan Peningkatan Ekonomi (Survei pada Masyarakat Anggota PNPM terkait Pola Penggunaan TIK dan Peningkatan Ekonomi) Hasyim Ali Imran	127 - 149
E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau) Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih	151 - 164
Network Society, Internet, dan Aktivitas Komunikasi Masyarakat (Survei Aktivitas Komunikasi Masyarakat melalui <i>social Network websites</i> di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan) Muhammad Rustam.....	165 -180
Komunikasi Kelompok, Diskursif dan <i>Public Space</i> (Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP Daerah Provinsi Bengkulu) Ari Cahyo Nugroho	181 - 192
Televisi dan Masyarakat Perkotaan (Survei Kebiasaan Menonton TV Masyarakat Kelurahan Tammamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan) Rukman Pala	193 - 201
Representasi Ideologi Aparatur Negara dalam Media (Studi Konstruksi Realitas Wartawan Humas Pemda DKI mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam Pemberitaan Website beritajakarta.com) Launa	203 - 223

Valence Issue dan Surveillance Media

(Content Analysis Surat kabar mengenai *Valence Issue* melalui Headline-nya pada Edisi Juli 2017)

Felix Tawaang 225 - 234

Bahasa dan Kekuasaan

(Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu)

Karman 235 - 246

Realitas Penelitian Komunikasi Berbasis Internet

(Sebuah Tinjauan)

Bambang Mudjiyanto 247 - 258



DARI REDAKSI

Memasuki semester kedua tahun ini, JSKM hadir melalui edisinya yang ke 21 (2). Dua topik menjadi materi sajian dalam edisi dimaksud. Topik pertama berkaitan dengan riset menyangkut fenomena masyarakat terkait *ICT* dan kedua berkaitan dengan masyarakat dan media konvensional. Untuk melengkapi sajian edisi ini maka dua Karya Tulis Ilmiah (KTI) non riset mendukung sajian dua topik sebelumnya.

Sebagai pembuka topik pertama disajikan KTI dari Hasyim Ali Imran. Tulisannya berjudul 'MASYARAKAT MISKIN, TIK DAN PENINGKATAN EKONOMI (Survai pada Masyarakat Anggota PNPM terkait Pola Penggunaan TIK dan Peningkatan Ekonomi)'. Disusul KTI dari Marudur dan Erisva dengan judul 'E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)'. Lalu KTI Muhammad Rustam disajikan melalui judul 'NETWORK SOCIETY, INTERNET, DAN AKTIVITAS KOMUNIKASI MASYARAKAT(Survai Aktivitas Komunikasi Masyarakat melalui social Network websites di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). Topik ini diakhiri dengan penyajian KTI dari Ari Cahyo Nugroho melalui judul 'KOMUNIKASI KELOMPOK, DISKURSIF DAN PUBLIC SPACE(Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP Daerah Provinsi Bengkulu).

Untuk topik kedua maka sebagai pembuka disajikan KTI dari Rukman Pala dengan judul 'TELEVISI DAN MASYARAKAT PERKOTAAN(Survai Kebiasaan Menonton TV Masyarakat Kelurahan Tammamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)'. Menyusul pemaparan KTI dari Launa dengan judul 'REPRESENTASI IDEOLOGI APARATUR NEGARA DALAM MEDIA(Studi Konstruksi Realitas wartawan Humas Pemda DKI mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan Website beritajakarta.com)'. Topik ini diakhiri dengan sajian KTI dari Felix Tawaang dengan judul 'VALENCE ISSUE DAN SURVEILLANCE MEDIA.

Untuk melengkapi sajian edisi ini maka topik non riset disajikan karya dari Karman. Tulisannya yang menyangkut bahasa dan kekuasaan disajikan melalui judul 'BAHASA DAN KEKUASAAN(Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu)'. Sementara KTI menyangkut metode penelitian dipaparkan KTI dari Bambang Mudjiyanto dengan judul 'REALITAS PENELITIAN KOMUNIKASI BERBASIS INTERNET(Sebuah Tinjauan)'.
Demikianlah, semoga sajian JSKM kali semakin sesuai dengan harapan pembaca.

Tim Redaksi

**JURNAL
STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA**

ISSN : 1978-5003

Terakreditasi

Berdasarkan Keputusan Kepala LIPI

No. 329/E/2016/ 24 Maret 2016

Vol. 21 (2)

Desember 2017

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya.

- **Hasyim Ali Imran**
- **POOR COMMUNITY, ICT AND ECONOMIC IMPROVEMENT (Survey of PNPB Member Community on ICT Use Pattern and Economic Improvement)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 127 – 149**

ABSTRACT

Background phenomenon of efforts to improve the economy of the poor related to the use of internet research attempt to answer Pattern of ICT Usage of PNPB Mandiri in Rural Area. Including a matter of Member Economic Level and the strength of the relationship between them. The findings show on the dimensions of Selectivity, Involvement and utilization, the phenomenon shows the existence of diverse activities among respondents. Theoretically this is relevant to the assumption of Levy and Windahl (1985) that the audience members are active. This is possible because of antecedent variable factors such as demographics. The second problem, the findings show that in relation to goods in the form of ICT products in general each respondent tends to be less familiar with ICT issues. Associated with the phenomenon of the period of ownership of a number of goods in the relationship of Internet use, the symptoms indicate that the ownership generally tend to have owned respondents in the moments before using the internet. Statistically related to the relation of internet usage pattern (in general) and ownership of goods did not happen significantly. This is contrary to the theoretical assumptions concerning positive relationships related to Internet use and economic improvement. Methodologically, such relationships occur, among other things, because of extraneous variable factors. Regarding the variable relationship of Use Patterns With Economic Improvement, usage patterns in all dimensions have no significant tributary relationship with Economic Improvement. This becomes an empirical phenomenon that contradicts theoretical assumptions. Such relationships are possible because of extraneous and intervening variables.

Keywords: Poor People, ICTs; Economic Improvement

- **Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih**
- **E-GOVERNMENT AND ITS APPLICATION IN LOCAL GOVERNMENT (Case Study Towards Information Quality on Bengkalis Regency Website, Riau Province)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 151 – 164**

ABSTRACT

The information and communication technology (ICT) development today has created website, an effective information medium that connects to the Internet network so that it can be accessed at any time. Do not want to miss, government

organizations are also utilizing website technology as one of its services in providing information to the public. However, the information contained on the website should have a good quality so that the information conveyed can be useful. This study aims to measure the quality of information on Bengkalis Regency websites based on dimensions of information quality concept. Observation of four websites in Bengkalis Regency conducted along with in-depth interview to each managers. The results obtained that the information available on these websites has met the good information quality, although there are some deficiencies such as the existence of links that refers to a blank page, some unlisted information dating, and the lack of network quality assurance to ensure the availability of information.

Keywords: Information quality, Website, Bengkalis

- **Muhammad Rustam**
- **NETWORK SOCIETY, INTERNET, AND PEOPLE COMMUNICATION ACTIVITY (Survey of Community Communication Activities through social Network websites in Village Tamalanrea Indah District Tamalanrea of Makassar City in South Sulawesi Province)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 165 – 180**

ABSTRAK

Network Society merupakan salah satu konsep yang banyak digagas para ahli untuk menggambarkan fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui penggunaan information and communication technology (ICT) atau dikenal juga dengan teknologi komunikasi dan informatika (TIK). Penelitian ini ingin memahami terkait fenomena aktivitas komunikasi individu masyarakat dalam konteks Network Society. Fenomena aktivitas yang dimaksud adalah fenomena ragam kebiasaan beraktivitas, ragam sasaran aktivitas, tingkat keseringan beraktivitas, dan keterkaitan karakteristik individu pengguna social network websites dengan ragam aktivitas. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dan melalui metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya. Populasi penelitian adalah para penduduk berusia dewasa di 9 RW dan 40 RT di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea. Populasi penduduk di wilayah dimaksud sebanyak 14.055 jiwa. Sampling size penelitian ini menggunakan Aksidental Sampling, yakni sebesar 150. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hubungan usia kategori MDGs dengan jenis kebiasaan, secara statistik tidak ada hubungan yang berarti terkait usia MDGs responden dengan akses internet. (2) Hubungan tingkat pendidikan dengan jenis kebiasaan, secara statistik terkait hubungan di antara kedua variabel ini tidak menunjukkan ada signifikansi yang berarti. Dengan kata lain secara statistik tingkat pendidikan individu cenderung tidak menentukan jenis kebiasaan dalam akses media sosial.

Kata Kunci : Network Society, Internet; Aktivitas Komunikasi.

- Ari Cahyo Nugroho
- **GROUP COMMUNICATION, DISCURSIVE AND PUBLIC SPACE (A case study of a phenomenon the existence of Discursive environment KIP Area of Bengkulu Province**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 181 – 192**

ABSTRACT

The qualitative research approach of this case study method wants to know the existence of 'discursive' phenomenon in the institution of KIP (D) of Bengkulu Province. The focus of the problem is the existence of discursive phenomena and the existence of 'discursive' publication activities. The result is the existence of phenomenon of 'discursive' activity in the KIPD environment of Bengkulu Province which show the indication of 'dualism' in practice. This phenomenon arises primarily with regard to a typology of six configurations of organization power is produced. In relation to the existence of the publication of 'discursive' activities, it shows that the KIPD is still not trying to adapt to its environment. In line with that also the KIPD is still relatively less likely to maximize the function of KIPD as a public space or a public place. Looking at some of the weaknesses of KIPD related to its function as a public space, then in a peractis way to maximize its function, the manager of KIPD needs to reduce the influence of 'dualism' factor in discursive activities activity of discursive activity. In addition, KIPD should maximize the publication of 'discursive' activities of KIPD by improving adaptation efforts with its environment, especially as with the media. In relation to these efforts, it is necessary to understand more about the nature of the existence of KIPD in relation to Public Sphere Habermas's normative theory. For academics who are interested in similar issues then to understand more about the phenomenon of existence in question would be necessary to conduct further research with ethnographic methods.

Keywords: Group Communication, Discursive; Public Space; Existence

- Rukman Pala
- **TELEVISION AND URBAN PEOPLE (Survey on Public TV Watching Habit in TammamaungVillage Community Sub-district Panakkukang Makassar City South Sulawesi Province)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 193 – 201**

ABSTRACT

Network Society is one of the many concepts initiated by experts to describe the phenomenon of community communication activity through use of information and communication technology (ICT) or also known as communication and informatics technology (ICT). This research wants to understand related phenomenon of individual communication activity of society in context Network Society. The phenomenon of activity in question is phenomenon of various activity habits, range of activity targets, level of frequency of activity, and linkage of individual characteristics of users of social network websites with various activities. This research uses positivistic paradigm and through survey method as its data collection technique. The study population were adult residents at 9 RW and 40 RT in Tamalanrea Indah Village, Tamalanrea District. Population population in the region referred to as many as 14,055 inhabitants. Sampling size of this study using accidental sampling, which is 150. Conclusions from this study indicate that (1) the age relationship of MDGs category with type of habit,

statistically there is no significant relationship related to age of MDGs respondents with internet access. (2) The correlation between education level and type of habit, statistically related to the relationship between these two variables does not indicate any significant significance. In other words statistically the educational level of the individual tends not to determine the type of habit in social media access.

Keywords: Network Society, Internet, Communication Activity.

- Launa
- **REPRESENTATION OF STATE APPARATUS IDEOLOGY IN MEDIA (Study of Construction Reality Pemprov DKI Public Relation Journalist about Environment in Beritajakarta.com website News)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 203 - 223**

ABSTRACT

This research is basically trying to find the ideology represented by state apparatus (Jakarta Public Relation journalist) through the construction of reality about the environment of Local Government of DKI in news on beritajakarta.com website. From the results of the analysis related to the 'Minor Theme' (frame) and Government Apparatus Discourse, it is concluded that although journalists seem to position Jakarta Provincial Government as a 'positive' party in the construction of reality, they occasionally seem to attempt to position the parties in outside the Provincial Government of DKI in the discourse. Then it is related to the 'Government' interest (DKI) versus 'Public Interest', it is concluded that in reality construction the reporters tend to be more in favor of the Jakarta Provincial Government as their 'master'. Then related to the "Apparatus Ideology Behind the News on the environment of the Local Government of DKI in beritajakarta.com website", then starting from the argument concerning the concept of governance and government, it can be identified and interpreted that: the apparatus ideology behind the news, it seems more representative ideology of government rather than the ideology of governance. Thus, the dominant ideology behind the news on beritajakarta.com website it is a government ideology. Thus, journalists of the state apparatus seem to be more concerned with the interest of the Jakarta Government than the citizens/the public of DKI Jakarta.

Keywords: Representation; Ideology; Media; Ideology of Media; State Apparatus

- Felix Tawaang
- **VALENCE ISSUE AND SURVEILLANCE MEDIA (Content Analysis of the newspaper on the Valence Issue through its Headline in July 2017 Edition)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2) , halaman 225 – 234**

ABSTRACT

This research is basically trying to find answers about the phenomenon of valence issue in the agenda of the Newspaper. Referring to the analysis and discussion of the valence phenomenon both in the context of physical Content and Content (actor) presumably it shows the phenomenon of emphasis by media organizations. The mass media emphasizes certain issues and according to the findings it appears that the

four newspapers tend not to be as much emphasized on the issues of the environment. The phenomenon of this phenomenon itself has been assumed by the agenda setting theory, that what is considered important by the reader in view of the editor then that is made object of emphasis by the media. Thus among the media has a relative meaning of 'interest' on various issues. On the other hand, the findings related to the valence phenomenon also serve as evidence that the variation phenomena occurring in terms of valence among the four newspapers has also mirrored the results of the media organization's calculations in its encoding process.

Keywords: Media; Media Agenda; Surveillance; Headline; Newspaper, Valence.

- Karman
- **LANGUAGE AND POWER**
(Symbolic Instrument To Power in Bourdieu)
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2),**
halaman 235 – 246

ABSTRACT

Many scientists position and tend to one of two opposing positions in epistemology: idealism-materialism, rationalism-empiricism, subjectivism-objectivism, micro-macro, agency-structure, freedom-determinism. Bourdieu escaped out of the debate by introducing habitus which agency and structure merge with. It encompasses languages, which are important as a symbolic system and capital. Languages don't only transmit message but also make-up symbolic instrument to power and keep dominating. This article deals with the usage of language as

an instrument to power, and discusses about languages as capital and habitus besides as power mechanism, namely symbolic instrument system i.e., structuring-structures, structured-structures, domination instrument. This mechanism results in two syntheses regarding symbolic system: structuring symbols and structured symbols. We conclude bourdieu's concepts of capitals have key role in class differentiation and class struggle although don't emphasize economic capital. Economic one is important because of its conversability into other capitals. New technology (internet) gives an implication that economic capital is not always dominant anymore. Social capital can be dominant and important one because it can be changed into other capital.

Keywords: Language, power, symbolic instrument.

- Bambang Mudjiyanto
- **REALITY OF INTERNET BASED COMMUNICATIONS RESEARCH (An Overview)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2),**
halaman 247 - 258

ABSTRACT

KTI examines the problem of communication research implementation of quantitative and qualitative approach which is based on the internet. From the discussion shows that the internet is a very rich source of data for the purposes of conducting research with quantitative approach and qualitative approach. Making internet as a source of research data, awareness of the various channels of communication that exist in the medium of the Internet becomes very necessary.

Keywords: Reality; Communication Research; Internet.

**JURNAL
STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA**

ISSN : 1978-5003

Terakreditasi

Berdasarkan Keputusan Kepala LIPI

No. 329/E/2016/ 24 Maret 2016

Vol. 21 (2)

Desember 2017

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya.

- **Hasyim Ali Imran**
- **MASYARAKAT MISKIN, TIK DAN PENINGKATAN EKONOMI (Survai pada Masyarakat Anggota PNP Mandiri Perdesaan. Termasuk soal Tingkat Ekonomi anggota dan kekuatan hubungan diantara keduanya. Temuan menunjukkan pada dimensi Selektifitas, Keterlibatan dan pemanfaatan, fenomenanya memperlihatkan adanya aktivitas beragam di kalangan responden. Secara teoritis ini relevan dengan asumsi Levy dan Windahl (1985) bahwa anggota khalayak itu aktif. Ini dimungkinkan karena faktor variabel anteseden seperti demografi. Persoalan kedua, temuan memperlihatkan bahwa terkait dengan barang berupa produk TIK pada umumnya setiap responden cenderung kurang akrab dengan persoalan TIK. Terkait dengan fenomena ‘masa kepemilikan sejumlah barang dalam hubungan penggunaan Internet, gejalanya mengindikasikan bahwa kepemilikan itu umumnya cenderung sudah dimiliki responden pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Secara statistik menyangkut keterkaitan pola penggunaan internet (secara umum) dan kepemilikan barang tidak terjadi secara signifikan. Ini bertentangan dengan asumsi-asumsi teoritis menyangkut hubungan positive terkait penggunaan internet dan peningkatan ekonomi. Secara metodologis hubungan demikian terjadi diantaranya mungkin karena faktor variabel *extraneous*. Menyangkut Hubungan variabel Pola Penggunaan dengan Peningkatan Ekonomi, pola penggunaan dalam semua dimensi tidak memiliki hubungan (*two tail*) yang signifikan dengan Peningkatan Ekonomi. Ini menjadi fenomena empirik yang kontradiktif dengan asumsi teoritik. Hubungan demikian sangat dimungkinkan terjadi karena variabel *extraneous* dan *intervening*.**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 127 – 149**

ABSTRAK

Berlatarbelakangkan fenomena upaya peningkatan ekonomi masyarakat miskin terkait penggunaan internet penelitian berupaya menjawab Pola Penggunaan *ICT* anggota PNP Mandiri Perdesaan. Termasuk soal Tingkat Ekonomi anggota dan kekuatan hubungan diantara keduanya. Temuan menunjukkan pada dimensi Selektifitas, Keterlibatan dan pemanfaatan, fenomenanya memperlihatkan adanya aktivitas beragam di kalangan responden. Secara teoritis ini relevan dengan asumsi Levy dan Windahl (1985) bahwa anggota khalayak itu aktif. Ini dimungkinkan karena faktor variabel anteseden seperti demografi. Persoalan kedua, temuan memperlihatkan bahwa terkait dengan barang berupa produk TIK pada umumnya setiap responden cenderung kurang akrab dengan persoalan TIK. Terkait dengan fenomena ‘masa kepemilikan sejumlah barang dalam hubungan penggunaan Internet, gejalanya mengindikasikan bahwa kepemilikan itu umumnya cenderung sudah dimiliki responden pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Secara statistik menyangkut keterkaitan pola penggunaan internet (secara umum) dan kepemilikan barang tidak terjadi secara signifikan. Ini bertentangan dengan asumsi-asumsi teoritis menyangkut hubungan positive terkait penggunaan internet dan peningkatan ekonomi. Secara metodologis hubungan demikian terjadi diantaranya mungkin karena faktor variabel *extraneous*. Menyangkut Hubungan variabel Pola Penggunaan dengan Peningkatan Ekonomi, pola penggunaan dalam semua dimensi tidak memiliki hubungan (*two tail*) yang signifikan dengan Peningkatan Ekonomi. Ini menjadi fenomena empirik yang kontradiktif dengan asumsi teoritik. Hubungan demikian sangat dimungkinkan terjadi karena variabel *extraneous* dan *intervening*.

Kata-Kata Kunci : Masyarakat Miskin; TIK ; Peningkatan Ekonomi

- **Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih**
- **E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 151 – 164**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menciptakan teknologi website, sebuah media informasi efektif

yang terhubung ke jaringan internet sehingga dapat diakses setiap saat. Tidak ingin ketinggalan, organisasi pemerintahpun kini memanfaatkan teknologi ini sebagai salah satu layanannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun informasi yang terdapat pada website seyogyanya memiliki nilai kualitas yang baik agar informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan dimensi kualitas informasi. Pengamatan terhadap 4 (empat) website di lingkungan Pemkab Bengkalis dilakukan beserta wawancara mendalam kepada masing-masing pengelolaanya. Hasil yang diperoleh bahwa informasi yang tersedia di website Pemkab Bengkalis sudah memenuhi kualitas informasi yang baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti adanya tautan (*link*) ke halaman kosong, sebagian penanggulan informasi yang belum tercantum, dan belum adanya jaminan kualitas jaringan untuk memastikan ketersediaan informasi.

Kata kunci: Kualitas informasi; Website; Bengkalis

- **Muhammad Rustam**
- **NETWORK SOCIETY, INTERNET, DAN AKTIVITAS KOMUNIKASI MASYARAKAT (Survai Aktivitas Komunikasi Masyarakat melalui *social Network websites* di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)**
- **Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2), halaman 165 – 180**

ABSTRAK

Network Society merupakan salah satu konsep yang banyak digagas para ahli untuk menggambarkan fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui penggunaan *information and communication technology (ICT)* atau dikenal juga dengan teknologi komunikasi dan informatika (TIK). Penelitian ini ingin memahami terkait fenomena aktivitas komunikasi individu masyarakat dalam konteks *Network Society*. Fenomena aktivitas yang dimaksud adalah fenomena ragam kebiasaan beraktivitas, ragam sasaran aktivitas, tingkat keseringan beraktivitas, dan keterkaitan karakteristik individu pengguna *social network websites* dengan ragam aktivitas. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dan melalui metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya. Populasi penelitian adalah para penduduk berusia dewasa di 9 RW dan 40 RT di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea. Populasi penduduk di wilayah dimaksud sebanyak 14.055 jiwa. *Sampling size* penelitian ini menggunakan *Aksidental Sampling*, yakni sebesar 150. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hubungan usia kategori MDGs dengan jenis kebiasaan, secara statistik tidak ada hubungan yang berarti terkait usia MDGs responden dengan akses internet. (2) Hubungan tingkat pendidikan dengan jenis kebiasaan, secara statistik terkait hubungan di antara kedua variabel ini tidak menunjukkan ada signifikansi yang berarti. Dengan kata lain secara statistik

tingkat pendidikan individu cenderung tidak menentukan jenis kebiasaan dalam akses media sosial.

Kata Kunci : Network Society, Internet; Aktivitas Komunikasi.

- Ari Cahyo Nugroho
- KOMUNIKASI KELOMPOK, *DISKURSIF* DAN *PUBLIC SPACE* (Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP Daerah Provinsi Bengkulu)
- *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol 21 (2), halaman 181 – 192

ABSTRAK

Penelitian pendekatan kualitatif metode studi kasus ini ingin mengetahui eksistensi fenomena ‘diskursif’ di lingkungan lembaga KIP (D) Provinsi Bengkulu. Fokus permasalahan yaitu eksistensi fenomena diskursif dan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’. Hasilnya eksistensi fenomena aktifitas ‘diskursif’ di lingkungan KIPD Provinsi Bengkulu di antaranya menampilkan indikasi ‘dualisme’ dalam prakteknya. Fenomena ini muncul terutama berkaitan dengan *a typology of six configurations of organization power is produced*. Terkait dengan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’, memperlihatkan bahwa KIPD dimaksud masih kurang berusaha beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu pula pihak KIPD secara relatif masih cenderung kurang memaksimalkan fungsi KIPD sebagai *a public space or a public place*. Melihat sejumlah kelemahan KIPD terkait fungsinya sebagai *public space*, maka secara peraktis guna pemaksimalan fungsinya tadi, pihak pengelola KIPD perlu mengurangi pengaruh-pengaruh faktor ‘dualisme’ dalam aktifitas pemfasilitasian aktifitas diskursif. Selain itu pihak KIPD perlu memaksimalikan publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD dengan cara meningkatkan upaya-upaya adaptasi dengan lingkungannya, terutama seperti dengan pihak media. Terkait upaya dimaksud kiranya perlu untuk memahami lebih jauh mengenai hakikat eksistensi KIPD terkait dengan teori normatif *Public Sphere* Habermas. Bagi akademisi yang tertarik persoalan serupa maka untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena eksistensi dimaksud kiranya perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode etnografi.

Kata-kata kunci : Komunikasi Kelompok; Diskursif; Public Space; Eksistensi

- Rukman Pala
- TELEVISI DAN MASYARAKAT PERKOTAAN (Survei Kebiasaan Menonton TV Masyarakat Kelurahan Tammamaung kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)
- *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol 21 (2), halaman 193 – 201

ABSTRAK

Network Society merupakan salah satu konsep yang banyak digagas para ahli untuk menggambarkan fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui penggunaan *information and communication technology (ICT)* atau dikenal juga dengan teknologi komunikasi dan informatika (TIK). Penelitian ini ingin memahami terkait fenomena aktivitas komunikasi individu masyarakat dalam konteks *Network Society*. Fenomena aktivitas yang dimaksud adalah fenomena ragam kebiasaan beraktivitas, ragam sasaran aktivitas, tingkat keseringan beraktivitas, dan keterkaitan karakteristik individu pengguna *social network websites* dengan ragam aktivitas. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dan melalui metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya. Populasi penelitian adalah para penduduk berusia dewasa di 9 RW dan 40 RT di Kelurahan Tamalanrea

Indah, Kecamatan Tamalanrea. Populasi penduduk di wilayah dimaksud sebanyak 14.055 jiwa. *Sampling size* penelitian ini menggunakan *Aksidental Sampling*, yakni sebesar 150.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hubungan usia kategori MDGs dengan jenis kebiasaan, secara statistik tidak ada hubungan yang berarti terkait usia MDGs responden dengan akses internet. (2) Hubungan tingkat pendidikan dengan jenis kebiasaan, secara statistik terkait hubungan di antara kedua variabel ini tidak menunjukkan ada signifikansi yang berarti. Dengan kata lain secara statistik tingkat pendidikan individu cenderung tidak menentukan jenis kebiasaan dalam akses media sosial.

Kata Kunci : Network Society; Internet; Aktivitas Komunikasi.

- Launa
- REPRESENTASI IDEOLOGI APARATUR NEGARA DALAM MEDIA (Studi Konstruksi Realitas wartawan Humas Pemda DKI mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan Website beritajakarta.com)
- *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol 21 (2), halaman 203 - 223

ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan ideologi yang direpresentasikan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitasnya mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Dari hasil analisis terkait dengan “Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah disimpulkan bahwa meskipun wartawan tampak lebih banyak memposisikan pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang ‘positif’ dalam konstruksi realitasnya, namun mereka sekali-sekali terlihat juga berupaya memposisikan pihak-pihak di luar Pemprov DKI dalam pewacanaannya. Kemudian terkait dengan “Kepentingan (*interest*)” Pemerintah (Pemprov DKI) versus “Kepentingan (*interest*) Publik”, disimpulkan bahwa dalam konstruksi realitas wartawan pihak wartawan cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pihak Pemprov DKI sebagai “tuannya”. Kemudian terkait dengan “Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com,” maka bertolak dari argumentasi menyangkut konsep *Governance* dan *Government*, kiranya dapat diidentifikasi dan dimaknai bahwa : Ideologi Aparatur di balik pemberitaan itu, tampaknya lebih merepresentasikan ideologi *government* dari pada ideologi yang *Governance*. Dengan demikian, ideologi yang dominan di balik pemberitaan di website beritajakarta.com itu adalah ideologi yang berifat *Government*. Jadi, wartawan aparaturnegara tampaknya lebih mementingkan *interest* pihak Pemda DKI dari pada pihak warga/publik DKI Jakarta.

Kata-kata kunci : Representasi ; Ideologi; Media; Ideologi Media; Aparatur Negara.

- Felix Tawaang
- VALENCE ISU DAN SURVEILLANCE MEDIA (*Content Analysis* Surat kabar mengenai *Valence Issue* melalui *Headline*-nya pada Edisi Juli 2017)
- *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol 21 (2) , halaman 225 – 234

ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan jawaban mengenai fenomena *valence issue* dalam peng-agendaan Surat kabar Ibu kota. Mengacu pada analisis dan diskusi

terhadap fenomena valence baik dalam konteks Konten fisik dan Konten (aktor) kiranya itu memperlihatkan fenomena penekanan oleh organisasi media. Media massa memberi penekanan pada isu-isu tertentu dan sesuai temuan tadi tampak di antara keempat surat kabar itu cenderung tidak sama penekanannya atas isu-isu yang ada di lingkungannya. Keterjadian fenomena ini sendiri memang sudah diasumsikan oleh teori agenda setting, bahwa apa yang dianggap penting oleh pembaca dalam pandangan redaksi maka itulah yang dijadikan objek penekanan oleh pihak media. Dengan demikian di antara sesama media memiliki makna 'kepentingan' yang relatif atas berbagai issue. Di sisi lain, temuan terkait fenomena *valence* dimaksud juga menjadi bukti bahwa fenomena variasi yang terjadi dalam hal *valence* di antara keempat surat kabar tadi juga menjadi cermin hasil perhitungan pihak organisasi media dalam proses encoding-nya.

Kata-kata kunci : Media; Agenda Media; Surveillance; Headline; Surat kabar.

- Karman
- BAHASA DAN KEKUASAAN
(Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu)
- Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2),
halaman 235 – 246

ABSTRAK

Banyak ilmuwan memosisikan atau cenderung kepada salah satu dari dua posisi yang bertentangan dalam diskursus epistemologi, seperti idealisme-materialisme, rasionalisme-empirisme, subjektivisme-objektivisme, mikro-makro, agensi-struktur, kebebasan-determinisme. Bourdieu -ilmuan sosial Prancis- keluar dari perdebatan tersebut dan mengadirkan konsep *habitus* yang meleburkan agensi dan struktur. *Habitus* mencakup bahasa, yang berperan sebagai sistem simbolik dan kapital. Ia bukan hanya bagian dalam transmisi pesan saja tetapi juga sebagai instrumen/mekanisme simbolik untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan dominasi. Artikel ini akan membahas

bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen simbolik untuk memperoleh kekuasaan. Artikel ini juga mendiskusikan bahasa sebagai kapital dan *habitus*, selain sebagai mekanisme kekuasaan, yaitu sistem instrumental simbolik yang mencakup struktur-yang-menstruktur, struktur-yang-distruktur, instrumen dominasi. Mekanisme ini menghasilkan dua sintesa tentang sistem simbolik: "*structuring symbols*" dan "*structured symbols*". Kami menyimpulkan bahwa walaupun tidak menekankan aspek ekonomi, kapital Bourdieu mempunyai peran penting dalam pertarungan kelas dan perbedaan kelas. Kapital ekonomi memegang perang penting karena dapat dikonversi ke kapital lainnya. Perkembangan teknologi internet memberikan implikasi bahwa kapital ekonomi tidak selalu dominan. Kapital sosial justru menjadi kapital yang dominan dan dapat dipertukarkan dengan kapital lainnya.

Kata-kata Kunci: Bahasa, kekuasaan, instrumen simbolik.

- Bambang Mudjiyanto
- REALITAS PENELITIAN KOMUNIKASI BERBASIS INTERNET (Sebuah Tinjauan)
- Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21 (2),
halaman 247 - 258

ABSTRAK

KTI ini menelaah persoalan pelaksanaan penelitian komunikasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lokusnya berbasis internet. Dari hasil bahasan memperlihatkan bahwa internet merupakan sumber data yang sangat kaya bagi keperluan pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Menjadikan internet sebagai sumber data penelitian maka kesadaran akan berbagai saluran komunikasi yang ada pada medium internet menjadi sangat diperlukan.

Kata-kata kunci : Realitas; Penelitian Komunikasi; Internet.

MASYARAKAT MISKIN, TIK DAN PENINGKATAN EKONOMI
(Survei pada Masyarakat Anggota PNPM terkait Pola Penggunaan TIK
dan Peningkatan Ekonomi)

POOR COMMUNITY, ICT AND ECONOMIC IMPROVEMENT
(Survey of PNPM Member Community on ICT Use Pattern and Economic Improvement)

Hasyim Ali Imran

Peneliti bidang *media and network society* pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta, Jln. Pegangsaan Timur 19 B Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia;

Telp : 31922337, Sipi.mario@gmail.com;

(Naskah diterima 7 Agustus 2017; direvisi menurut catatan redaksi 30 Agustus 2017; disetujui terbit oleh PR 29 September 2017.

ABSTRACT

Background phenomenon of efforts to improve the economy of the poor related to the use of internet research attempt to answer Pattern of ICT Usage of PNPM Mandiri in Rural Area. Including a matter of Member Economic Level and the strength of the relationship between them. The findings show on the dimensions of Selectivity, Involvement and utilization, the phenomenon shows the existence of diverse activities among respondents. Theoretically this is relevant to the assumption of Levy and Windahl (1985) that the audience members are active. This is possible because of antecedent variable factors such as demographics. The second problem, the findings show that in relation to goods in the form of ICT products in general each respondent tends to be less familiar with ICT issues. Associated with the phenomenon of 'the period of ownership of a number of goods in the relationship of Internet use, the symptoms indicate that the ownership generally tend to have owned respondents in the moments before using the internet. Statistically related to the relation of internet usage pattern (in general) and ownership of goods did not happen significantly. This is contrary to the theoretical assumptions concerning positive relationships related to Internet use and economic improvement. Methodologically, such relationships occur, among other things, because of extraneous variable factors. Regarding the variable relationship of Use Patterns With Economic Improvement, usage patterns in all dimensions have no significant tributary relationship with Economic Improvement. This becomes an empirical phenomenon that contradicts theoretical assumptions. Such relationships are possible because of extraneous and intervening variables.

Key Words: Poor People, ICTs; Economic Improvement

ABSTRAK

Berlatarbelakangkan fenomena upaya peningkatan ekonomi masyarakat miskin terkait penggunaan internet penelitian berupaya menjawab Pola Penggunaan *ICT* anggota PNPM Mandiri Perdesaan. Termasuk soal Tingkat Ekonomi anggota dan kekuatan hubungan diantara keduanya. Temuan menunjukkan pada dimensi Selektifitas, Keterlibatan dan pemanfaatan, fenomenanya memperlihatkan adanya aktivitas beragam di kalangan responden. Secara teoritis ini relevan dengan asumsi Levy dan Windahl (1985) bahwa anggota khalayak itu aktif. Ini dimungkinkan karena faktor variabel anteseden seperti demografi. Persoalan kedua, temuan memperlihatkan bahwa terkait dengan barang berupa produk TIK pada umumnya setiap responden cenderung kurang akrab dengan persoalan TIK. Terkait dengan fenomena 'masa kepemilikan sejumlah barang dalam hubungan penggunaan Internet, gejalanya mengindikasikan bahwa kepemilikan itu umumnya cenderung sudah dimiliki responden pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Secara statistik menyangkut keterkaitan pola penggunaan internet (secara umum) dan kepemilikan barang tidak terjadi secara signifikan. Ini bertentangan dengan asumsi-asumsi teoritis menyangkut hubungan positive terkait penggunaan internet dan peningkatan ekonomi. Secara metodologis hubungan demikian terjadi diantaranya mungkin karena faktor variabel *extraneous*. Menyangkut Hubungan variabel Pola Penggunaan dengan Peningkatan Ekonomi, pola penggunaan dalam semua dimensi tidak memiliki hubungan (*two tail*) yang signifikan dengan Peningkatan Ekonomi. Ini menjadi fenomena empirik yang kontradiktif dengan asumsi teoritik. Hubungan demikian sangat dimungkinkan terjadi karena variabel *extraneous* dan *intervening*.

Kata-Kata Kunci : Masyarakat Miskin, TIK ; Peningkatan Ekonomi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Persoalan kemiskinan menjadi wacana yang menguat pada Desember 2006, yakni saat Pemerintah mendapatkan tekanan yang berat dari publik yang mengatakan Presiden telah berbohong dengan menyatakan angka kemiskinan turun, yang dikutip dari naskah Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2005 dan menuduh pemerintah sengaja menyembunyikan angka kemiskinan terbaru dari BPS. (http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=267).

Setelah melalui proses yang serius dan panjang sebagai bentuk reaksi pemerintah atas tekanan yang berat dari publik sebelumnya, terkait hal ini akhirnya Pemerintah menetapkan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan-masyarakat.

Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum.

Terkait dengan *Information and Communication Technology (ICT)* sendiri, dalam hubungannya dengan masyarakat desa sebagaimana tercermin dari salah satu program PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, oleh WSIS (2005) sebagaimana tertuang dalam *Plan of Action*-nya, desa dijadikan urutan pertama yang daerahnya harus dikonektivitaskan oleh negara-negara anggota WSIS, termasuk Indonesia¹.

Terkait target utama upaya perwujudan *information society* di lingkungan pedesaan Indonesia, dalam realitanya banyak sudah langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah, terutama program-program yang berhubungan dengan masalah *rural digital divide*. Salah satu diantaranya yang paling aktual yaitu menyangkut program PLIK dan MPLIK.²

Dengan diterapkannya sejumlah kebijakan seperti MPLIK, PLIK dan lain-lain seperti Telecenter, *Mobil Community Acces Point (MCAP)* dan Desa Pintar (baca : TIK), kiranya ini menjadi bukti bahwa Bangsa Indonesia *commit* terhadap kesepakatan yang sudah disetujuinya bersama ratusan bangsa lainnya di dua pertemuan WSIS. Perwujudan komitmen ini tentunya dimaksudkan dalam rangka proses perwujudan target WSIS itu sendiri, yakni terkoneksasinya 50 % penduduk dunia pada tahun 2015 dan 100 % pada tahun 2025. Jadi, semua mengarah pada capaian perwujudan target WSIS.

Berdasarkan fenomena keterkaitan persoalan kemiskinan, upaya koneksitas daerah pedesaan dan indikasi peningkatan ekonomi sebelumnya, riset ini akan berupaya untuk lebih jauh menelusnya. Obyek studi riset adalah para anggota PNPM Mandiri Perdesaan. Permasalahannya akan difokuskan pada fenomena keterkaitan antara masyarakat miskin, ICT (TIK) dan ekonomi. Dengan fokus tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan menjadi :

1) Bagaimana Pola Penggunaan TIK di kalangan anggota PNPM Mandiri Perdesaan? ; 2)

¹ Desa menjadi target karena dengan *information society* yang nota bene sarat dengan *ICT*, dianggap dapat mengembangkan perekonomian masyarakat. Asumsi-asumsi ini antara lain dikemukakan oleh : McNamara¹, *ICT* dapat berperan sebagai hal yang menentukan dalam menopang pembangunan individu, masyarakat dan bangsa. Sementara menurut WSIS (2003)¹ *ICT* dinilai sangat penting dalam pengembangan agenda karena *ICTs* diantaranya dapat digunakan dalam admistrasi public, bisnis, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Lebih khusus lagi, diantaranya *ICT* juga disebutkan dapat berperan dalam membantu pengurangan kemiskinan (Duncombe 2001)¹, dan memperluas peluang pembangunan ekonomi (Prosser 1997,¹ World Bank 1998¹).

² MPLIK ([Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan](#)) misalnya, program ini baru diterapkan sejak 2010 lalu. MPLIK merupakan program yang digarap oleh Telkom dan Kominfo. MPLIK sendiri merupakan bentuk kepedulian Telkom terhadap pembangunan di Indonesia dalam melakukan penetrasi Internet di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) di setiap kecamatan kepulauan terpencil. MPLIK termasuk dalam Kajian Efektifitas Program Pendampingan Pemanfaatan Layanan KPU/USO|Program KPU (Kewajiban Pelayanan Universal) atau USO (Universal Service Obligation) adalah program pemerintah yang dilaksanakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian (Kominfo). Program tersebut bertujuan mempercepat pemerataan akses telekomunikasi dan informasi untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi, melalui penyediaan layanan dalam bentuk warung internet mobile yang difungsikan sebagai sebagai penyedia layanan internet gratis yang beroperasi ditempat-tempat umum.

Bagaimana Tingkat Ekonomi masyarakat Pedesaan ?; 3) Seberapa kuat hubungan antara Pola Penggunaan TIK dengan Peningkatan Ekonomi anggota PNPM Mandiri Perdesaan?

B. Signifikansi

Secara akademis hasil riset ini diharapkan dapat melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya terkait dengan fenomena keterkaitan penggunaan produk ICT dengan peningkatan ekonomi anggota masyarakat miskin. Secara praktikal diharapkan dapat menjadi masukan dalam melihat dan memahami persoalan ICT dalam hubungannya dengan masyarakat miskin pedesaan.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

Dari hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa telaahan menyangkut keterkaitan pola penggunaan TIK dengan peningkatan ekonomi masyarakat desa secara spesifik hampir belum pernah dilakukan oleh berbagai pihak. Namun pihak yang mencoba berupaya menelaah persoalan tersebut secara implisit masih dapat dijumpai dan itupun tidak banyak yang berupaya melakukannya.

Dalam kaitan itu, diantaranya dilakukan oleh Anand Chand; David Leeming; Edo Stork; Alan Agassi dan Randall Biliki (2007) melalui penelitian di Kepulauan Solomon. Judul penelitiannya sendiri yaitu, "*The Impact of ICT on Rural Development in Solomon Islands: the PFnet Case*". Penelitian mereka bertujuan untuk *to examine the impact of Internet on lives of poor grass root rural people in the Solomon*. Dengan menggunakan PFNet sebagai kasus, hasilnya memperlihatkan bahwa 1) PFNet membantu mengurangi kesenjangan digital.; 2) PFNet membantu para petani menghubungi pihak pemerintah yang berwenang dalam bidang pertanian atau menghubungi LSM terkait; 3) Wiraswastawan di desa menggunakan layanan PFNet dalam membangun perjanjian dengan pelanggan di Honiara dan kota lainnya dan membantu dalam melakukan kegiatan bisnis terkait; 4) Pendidikan merupakan alasan utama yg kedua menggunakan layanan PFNet; 5) bekisar 6 % orang menggunakan layanan PFNet terkait masalah kesehatan. Para pengguna umumnya dokter, perawat, pekerja kesehatan yang mengirimkan email tentang hasil pemeriksaan medis, diagnosis, saran kesehatan, dsb.

Dari sejumlah temuan tersebut secara implisist tampak bahwa hanya dua yang bersinggungan dengan aktifitas ekonomi, yakni membangun perjanjian dengan pelanggan dan melakukan kegiatan bisnis. Jadi jelas tidak secara spesifik mempelajari persoalan keterkaitan pola penggunaan TIK dengan masalah peningkatan ekonomi responden.

Telaahan lain yang mencoba mempelajari masalah TIK dan masyarakat pedesaan namun tidak spesifik, yaitu seperti yang dilaksanakan oleh -Rizky Qinthara Syahriar ;dan Ary Syahriar., dengan judul telaah mereka "Peran Teknologi Informasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia". Telaahan mereka ini sendiri berupa makalah yang disampaikan di suatu forum, jadi bukan penelitian. Telaahan mereka menyangkut fenomena TIK dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang dalam pembahasannya tampak dilakukan terlalu longgar. Dapat disimpulkan, kajian mereka ini sifatnya bukan melihat fenomena pola penggunaan TIK dalam kaitan peningkatan ekonomi.

Kemudian, menyangkut *Yemile Mizrahi* (World Bank Institut) , karyanya berupa hasil makalah tinjauan literatur. Bahasanya sendiri menyangkut indikator peningkatan kemampuan dalam pembangunan pada level makro yang salah satu diantaranya faktor terkait dengan TIK itu ia masukkan menjadi salah satu indikator peningkatan kemampuan dalam pembangunan. Dengan demikian, TIK masih dilihat sebagai indikator peningkatan kemampuan dalam pembangunan, namun belum sampai kepada upaya melihatnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masalah ekonomi pedesaan.

Terakhir yaitu telaah yang disampaikan melalui makalah berjudul "Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa". Makalah yang disampaikan MG Ana Budi Rahayu ini merupakan hasil tinjauan literatur. Penulis ini mencoba fokus pada persoalan pemberdayaan masyarakat dalam kaitan pembangunan nasional. Jadi, tidak terlihat upaya menelaahnya dari segi peningkatan ekonomi dalam kaitan penggunaan produk TIK.

Berdasarkan hasil literatur review sebelumnya memperlihatkan bahwa *state of the arts* menyangkut studi pola penggunaan TIK (baca : internet) dalam hubungan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan, masih jauh dari sentuhan peneliti atau para akademisi. Sementara penelitian ini sendiri akan mencoba menelaah persoalan dimaksud lebih jauh dengan fokus pada fenomena pola penggunaan TIK dan kaitannya dengan fenomena peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, bisa jadi penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mencoba mempelajari fenomena dimaksud.

B. Konsep-Konsep Teoritik

1. Pola Penggunaan

Pola Penggunaan mengandung arti suatu cara atau kebiasaan dalam menggunakan sesuatu, yang dalam hal ini menyangkut media produk TIK berupa internet. Konsep penggunaan sendiri, dalam terminologi ilmu komunikasi merupakan salah satu konsep teoritik dalam model teori *Uses and Gratification*.

Sebagai salah satu konsep teoritik, maka dengan konsep penggunaan dalam pendekatan *Uses and Gratification*, seperti banyak dikatakan akademisi³ itu menandakan adanya aktifitas pada khalayak pengguna media. Terkait dengan ini, Choi *et al* mengatakan bahwa pendekatan khalayak aktif sangat konsisten dengan karakteristik khalayak internet, yang memiliki beragam pilihan isi atau konten dan ruang yang luas dalam pola penggunaan (Choi *et al.*).

Sementara, aktifitas khalayak itu sendiri mengandung arti bahwa anggota khalayak itu mengarahkan dirinya sendiri pada proses komunikasi. Aktifitas khalayak tersebut, selanjutnya dikatakan Levy dan Windahl (1985) dibagi ke dalam dua dimensi. Pertama, dimensi orientasi khalayak, terdiri dari tiga level, yakni selektifitas, keterlibatan dan pemanfaatan. Sedang dimensi kedua urutan komunikasi, membedakan aktifitas berdasarkan saat terjadinya : sebelum, selama, dan sesudah terpaan media. Jadi, dalam mengamati aktifitas khalayak dalam hubungannya dengan media, secara garis besar dapat dilakukan melalui dua cara, pertama menurut dimensi orientasi dan kedua menurut dimensi urutan komunikasi.

Jika pengertian konsep penggunaan sebelumnya dihubungkan dengan persoalan penelitian ini, yang mempermasalahakan “Bagaimana Pola Penggunaan TIK di lingkungan Masyarakat Pedesaan?”, maka terkait konsep aktifitasnya Levy dan Windahl, fenomenanya dapat ditelusuri melalui dua dimensi, yaitu dimensi orientasi khalayak dan dimensi urutan komunikasi.

Sementara itu, Katz, Gurevitch dan Hass dalam mendefinisikan penggunaan media dalam kaitannya dengan aktifitas khalayak mencakup: (1) isi media : berita, opera sabun, drama tv, dll. (2) jenis media : misalnya cetak atau elektronik (3) terpaan media dan situasinya : di rumah atau di luar rumah, sendiri atau dengan orang lain. Dengan demikian diketahui bahwa menelaah fenomena aktifitas penggunaan media dapat dilakukan terhadap tiga bagian besar, yakni melalui unsur isi media, jenis media dan terpaan media dan situasinya. Jadi aktifitas khalayak itu dimaksudkan lebih difokuskan terhadap ketiga hal dimaksud. Jika ini dikaitkan dengan konsep aktifitas Levy dan Windahl dalam konteks dimensi pertama (orientasi khalayak), maka ini berarti berupaya melihat fenomena khalayak dalam mengarahkan aktifitasnya pada penggunaan media. Pengarahan aktifitas penggunaan media dimaksud menyangkut fase-fase :

- a. Selektivitas, menyangkut** : 1) Isi media (internet) yang diseleksi
2) Jenis media (jenis *channel* dalam internet) yang dipilih
3) Terpaan Media (kekerapannya dalam menggunakan/ mengakses) dalam kaitan aktifitas ekonomi
- b. Keterlibatan, menyangkut** : Ruang dan waktu yang disediakan individu untuk mengkonsumsi isi media.
- c. Pemanfaatan, menyangkut** : arah pemanfaatan isi/konten yang diakses :

³ Hal dimaksud diantaranya dikatakan Tan (1981 : 297), bahwa the mass media uses and gratifications itu penekanannya terletak pada aktifitas khalayak dalam menggunakan media dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

- untuk bahan dokumentasi; bahan diskusi; bahan dasar pertanyaan; bahan referensi ; bahan diskusi, bahan untuk membuat email dan sejenisnya yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi.

Sementara jika mengacu pada dimensi kedua, yakni menyangkut urutan komunikasi, misalnya pada aktifitas *sebelum* dan *selama* terjadinya terpaan media, maka terkait dengan ini, dalam konteks aktifitas *sebelum*, penelitian ini akan menelaahnya dari segi motif yang melatar belakangi pengguna internet dalam berkomunikasi melalui internet. Kemudian, jika dimensi aktifitas *selama* terjadinya terpaan media ini dihubungkan dengan konsep penggunaannya Katz, Gurevitch dan Hass, maka dimensi ini secara rinci akan ditelaah melalui : 1) isi media : ragam konten yang *diupload* dan *didownload* melalui internet 2) jenis media : medium internet, terkait dengan alat-alat dan sumber-sumber untuk kepentingan melakukan aktifitas komunikasi seperti melalui chat room, blog, e-mail, dll.yang terfasilitasi di internet; 3) terpaan media dan situasinya: frekuensi akses dalam seminggu; durasi rata-rata per penggunaan internet; kebiasaan menggunakan internet (tempat; waktu).

2. Tingkat Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat dalam realita, memperlihatkan ragam pendefinisian. Pendefinisian itu ada yang bersifat makro dan ada yang mikro. Yang bersifat makro itu diantaranya dikemukakan Rita Indrayani (<http://ritaindrayani.blogspot.com/2012/02/ekonomi-mikro-dan-makro>).

Menurutnya Indikator ekonomi dalam skala makro itu dilihat dari : 1. Pendapatan nasional; 2. Produksi nasional; 3. Konsumsi nasional; 4. Tabungan; 5. Investasi nasional; 6. Inflasi; 7. Pertumbuhan ekonomi; 8. Perdagangan internasional; 9. Masalah pengangguran; dan 10. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sementara PBB menetapkan *Human Poverty Index* (HPI) yang salah satu parameternya adalah kelayakan standar hidup (*a decent standard of living*) yang diukur berdasarkan kelayakan akses individu terhadap seluruh peluang ekonomi (<http://politik.kompasiana.com/2012/03/14/>).

Dari segi mikro, ada yang melihatnya dari sisi penataan-ruang, artinya masalah peningkatan ekonomi itu dilihat dari sisi tata ruang. Ada lagi yang melihat peningkatan itu dari segi menurunnya jumlah anggota masyarakat penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pemerintah, misalnya seperti yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Cimahi (http://cigugurtengah.cimahikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62:indikator-keberhasilan-bidang-ekonomi-masyarakat).

Diketahui pula ada yang menjadikan indikator peningkatan itu dari segi bertambahnya jumlah orang yang beragama Islam melakukan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Hal ini seperti yang dikatakan pihak Kanwil Kemenag Provinsi Riau beberapa waktu lalu. (Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau. Tahun 2012). Lebih jauh, ada yang menelaah masalah peningkatan tersebut secara lebih rinci lagi. Ini misalnya seperti yang dilakukan oleh Bastiantito melalui risetnya di Kabupaten Bone Bolango. Dalam risetnya itu dia melihat peningkatan ekonomi masyarakat itu dari empat indikator, yakni dari segi : 1) Sumber peningkatan ekonomi dalam rumah tangga nelayan (meliputi : a. Dari pendapatan nelayan; b. Peran istri dalam rumah tangga; c. Peran anak dalam rumah tangga; d. Dari harta kekayaan-pribadi;2) Sistem penanganan hasil pendapatan (meliputi : a. Untuk modal usaha; b. Ditabung (saving); c. Investasi; d. Pemenuhan kebutuhan dalam keluarga; 3) Siklus kebutuhan dalam keluarga (mencakup: a. Terpenuhi dengan baik;b. Meningkatkan; c. Stabil; d. Menurun; 4) Peran individu dalam keluarga untuk peningkatan ekonomi (mencakup : a. Peran aktif suami; b. Peran aktif istri; c. Peran aktif anak; dan d. Istri dan anak tidak pernah berperan aktif sama sekali).

Melihat beberapa pendefinisian mengenai indikator peningkatan ekonomi masyarakat sebelumnya, kiranya itu mengindikasikan bahwa masalah tersebut memiliki ragam sudut pandang. Sudut pandang itu tampak cenderung mengikuti arah kepentingan yang menjadi target si pembuat definisi. Jadi sifatnya tampak begitu labil, tidak ada yang standard.

Sejalan dengan itu, penelitian ini juga akan mengarahkan masalah peningkatan ekonomi tersebut dari segi sudut pandangnya sendiri. Untuk itu, maka dalam penelitian ini akan ditelusuri dari segi kepemilikan barang oleh masyarakat dalam kaitan penggunaan TIK (internet). Gejala yang demikian sendiri diantaranya dapat diamati dengan mempertanyakan kepemilikan barang itu pada saat sebelum dan sesudah menggunakan internet. Semakin banyak barang yang dimiliki pada saat setelah menggunakan internet dibandingkan dengan sebelum menggunakan internet, maka diasumsikan sebagai telah terjadi peningkatan ekonomi. Demikian pula sebaliknya.

3. Hubungan Pola Penggunaan dan Tingkat Ekonomi

Fenomena kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (baca : TIK atau ICT) di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dari beberapa literatur diketahui telah banyak berperan dalam meningkatkan kualitas peradaban umat manusia, terutama dalam hubungannya dengan aktifitas kehidupan di bidang komunikasi dan informasi. Telepon, gramofon, film, video, radio dan televisi, kiranya menjadi contoh wujud produk TIK yang dulu begitu besar perannya dalam keseharian kehidupan masyarakat. Namun, wujud produk TIK tersebut menjadi kuno atau *old ICT* (Obayelu, Elijah dan Ogunlade, 2007) ketika perkembangan Iptek yang pesat dan canggih berhasil mewujudkan produk ICT modern yang mampu melakukan revolusi digital⁴ melalui medium internet sebuah teknologi yang dirintis pertama kali oleh kalangan militer Amerika Serikat pada tahun 60-an.

Dengan kemampuan teknologi ini dalam hal fasilitasi aktifitas komunikasi dan informasi, dengan mana sangat jauh berbeda dengan kemampuan yang dimiliki oleh medium konvensional yang ada sebelumnya, menjadikannya sebagai masalah menarik oleh banyak kalangan. Dari kalangan akademisi misalnya, maka dengan berangkat dari fenomena kehidupan masyarakat di Amerika Serikat dalam kaitan ICT (Adebayo . 2007) , Bell melalui bukunya *The Coming of Post industrial Society* (1973), menyebut masyarakat yang demikian dengan masyarakat pasca industri. Kemunculan masyarakat yang demikian kata Bell akan mencakup terjadinya suatu transformasi besar dalam dasar masyarakat. Masyarakat ini berbeda dengan masyarakat industri yang bertumpu pada harta benda, di mana lebih menekankan pengetahuan, khususnya pengetahuan teoritis. Sebagai tambahan pada dan dalam hubungan dengan perubahan itu, masyarakat pasca industri memberi suatu penekanan baru kepada waktu luang. Orang memperoleh bentuk-bentuk pendidikan yang maju bukan saja untuk kegunaan sosial yang penting, tapi juga untuk peningkatan kesenangan dan intelektual. (Sanderson. 2000 : 606).

Menurut Sanderson, pasca publikasi opini Bell melalui bukunya tadi, ungkapan masyarakat pasca industri jadi sering dimunculkan dan diterima dalam . sejumlah buku teks sosiologi dan karya-karya lainnya. Sejalan dengan terus berkembangnya ICT, seiring itu pula peristilahan terhadap masyarakat pasca industri yang disebut Bell tadi, terus mengalami perubahan dan penambahan jumlah konsep. Diantaranya ada yang mengkonseptualisirnya menjadi *post-modern society* , *knowledge society*, *Telematic Society*, *Information Revolution*, *informational capitalism*, *transnational network capitalism*, *knowledge industry* dan *network society*. Dalam perkembangannya, konsep ICT yang sebelumnya hanya dikenal akrab di kalangan negara-negara Utara yang memang telah mendahului fase-fase awal pertumbuhan dan perkembangan ICT, karena kemampuannya dalam melakukan *digital revolution*, menyebabkannya jadi dipandang sebagai *enabler* utama dalam upaya mencerdaskan, meningkatkan kesejahteraan,

⁴ *The digital revolution, fired by the engines of Information and Communication Technologies, has fundamentally changed the way people think, behave, communicate, work and earn their livelihood. It has forged new ways to create knowledge, educate people and disseminate information. It has restructured the way the world conducts economic and business practices, runs governments and engages politically. It has provided for the speedy delivery of humanitarian aid and healthcare, and a new vision for environmental protection. It has even created new avenues for entertainment and leisure (ITU 2005).*, dalam Bill Martin, dalam "The Information Society and the Digital Divide: Some North-South comparisons", dalam, international journal of education and development using ICT ; Vol 1(4) 2005. taken on March, 31, 07 by hasyim ali imran; in : <http://ijedict.dec.uwi.edu/-viewarticle.php?id=128&layout=html>.

mengurangi kemiskinan dan mengurangi keterisolasian antar sesama masyarakat dunia⁵. Sebagai *enabler* utama, ICT karenanya menjadi problem utama bagi kebanyakan negara-negara Selatan yang umumnya masih tergolong sebagai *developing country* (Butkevicien, 2007). Ini terutama ketika kepentingan *ICT enabling* tadi dikaitkan dengan konsep *information society*, yang oleh 178 negara dalam pertemuan WSIS di Jenewa dan Tunis memang disepakati untuk segera diwujudkan dengan cara mengkoneksasi 50 % masyarakat dunia pada 2015 dan 100 % pada 2025.

Mengenai kepentingan *ICT enabling* dalam proses mewujudkan *information society* sendiri, berdasarkan literatur diketahui telah banyak mendapat pengakuan berbagai kalangan yang memandang positif terhadap ICT. Menurut McNamara (2000) ICT dapat berperan sebagai hal yang menentukan dalam menopang pembangunan individu, masyarakat dan bangsa. Sementara menurut WSIS (2003) ICT dinilai sangat penting dalam pengembangan agenda karena *ICTs* diantaranya dapat digunakan dalam admistrasi public, bisnis, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Lebih khusus lagi, diantaranya ICT juga disebutkan dapat berperan dalam membantu pengurangan kemiskinan (Duncombe 2001) dan memperluas peluang pembangunan ekonomi (Prosser 1997, World Bank 1998). Dengan pemanfaatan ICT, menurut Ellis (2000, p.31), "*Access to information provides people with the opportunity "to undertake production, engage in labour markets, and participate in reciprocal exchanges" with other people.* (akses terhadap informasi itu akan memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan proses produksi, berhubungan dengan pasar tenaga kerja, dan saling berpartisipasi dalam pertukaran " dengan orang lain). Sebuah studi terbaru menemukan bahwa adanya suatu hubungan di antara *access to mobile phones and economic growth, with its impact more significant in developing (berkembang) than developed countries (negara maju)* (Waverman, Mesch & Foss . 2005b).

C. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1. Definisi Konsep

-**Pola penggunaan** media dimaksudkan sebagai **suatu cara atau kebiasaan** dalam menggunakan internet dengan mana fenomenanya akan dipelajari dengan cara mengacu pada **konsep aktifitas Levy dan Windahl** dalam konteks **dimensi pertama** (orientasi khalayak). ; -**Peningkatan Ekonomi** Masyarakat dimaksudkan sebagai suatu **perubahan keadaan kepemilikan barang** di kalangan anggota masyarakat (penerima manfaat langsung PNPM) antara pada masa sebelum menggunakan internet dan setelah menggunakan internet. Gejala yang demikian sendiri diantaranya dapat diamati dengan mempertanyakan kemilikan barang itu pada saat sebelum dan sesudah menggunakan internet.

2. Operasionalisasi Konsep

Variabel Mayor	Variabel Minor	Indikator	Skala
Pola Penggunaan	a. Selektivitas-internet, menyangkut : 1) Isi media (internet) yang diseleksi	1) Jenis isi yang terseleksi	-Nominal
	2) Jenis media (jenis <i>channel</i> dalam internet) yang dipilih	2) Jenis <i>channel</i> yang terseleksi dalam pemilihan	-Nominal

⁵ Terkait dengan ini, sebagai *enabler* ICT dinilai dapat memainkan peran sangat besar dalam mempercepat proses globalisasi dan menjadikan ekonomi dunia lebih terpadu (Odedra-Straub & Straub 1995). *Information technologies play a part in development: with modernization, it can be seen as a potential means to close the gap among nations* (Goldstein & O'Connor 2000); with globalization, it is viewed as an important component for nations to participate in the economic process (Odedra-Straub & Straub 1995, UNDP 2001).

	3) Terpaan Media (kekerapannya dalam menggunakan-/mengakses) dalam kaitan aktifitas ekonomi	3) frekuensi dan durasi Akses dalam periode tertentu	-Ordinal
	b. Keterlibatan 1) Tempat biasa mengakses	Pilihan dari sejumlah alternatif menyangkut tempat	Nominal
	c. Pemanfaatan : 1) Jenis informasi yang biasa dipilih	Pilihan dari sejumlah alternatif terkait ragam jenis konten	Nominal
Peningkatan Ekonomi	Kepemilikan Barang pada saat sebelum dan sesudah menggunakan internet.	Perbandingan banyaknya jumlah item barang yang dimiliki antara sebelum dan setelah menggunakan internet. Barang-barang itu berupa : Perangkat Sound System; Perangkat Audio Visual; Kendaraan roda empat; Personal Computer (PC); Telepon Selular; Smartphone (Iphone/Blackberry/Android); Tablet (Ipad, Galaxy Tab dan sejenisnya; House Hold Things (Kulkas, mesin cuci, dsb); Buku tabungan; Kartu kredit; Aksesoris berharga (emas, berlian, dll); dan Kepesertaan asuransi.	Ordinal

D. Metode Penelitian

Penelitian ini berbasis pada paradigma positivistik. Dengan begitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian bersifat deskriptif yang tujuannya juga untuk mendeskripsikan hasil elaborasi sejumlah faktor yang diduga saling berkaitan dalam hubungan variabel Pola Penggunaan dan Peningkatan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survai. Survai dilakukan terhadap anggota masyarakat yang terpilih sebagai responden secara proporsional. Anggota masyarakat dimaksud yaitu anggota masyarakat yang ikut menjadi anggota kelompok **BPMPD/Bapermas (Pengelola PNPM)** yang dilayani Kementerian Kesra melalui program PNPM.

Jumlah kelompok yang dilayani saat ini (Data BPMPD/Bapermas = Pengelola PNPM) (populasi), berdasarkan data Pokja Pengendali PNPM Mandiri Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebarannya di provinsi yang termasuk wilayah kerja BPPKI Jakarta adalah sbb. :

$$\begin{array}{r}
 \text{Provinsi Jambi} = 7.774 \\
 \text{Provinsi Babel} = 957 \\
 \text{Provinsi Bengkulu} = 2.294 \\
 \hline
 \text{-----} + \\
 11.025
 \end{array}$$

Jumlah sampel atas populasi yang demikian menurut tabel Krecjie sama dengan antara populasi 10 000 dengan 15 000 dengan sampel sebesar 370 dan 375. Jadi besar sampel $11.025 = 370 + 375 = 745/2 = 372,5 = 373$ (dibulatkan). Sejalan dengan ini, maka besaran sampel secara proportional di tiap provinsi menjadi sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 1) \text{ Jambi } \frac{7.774}{11.025} \times 373 = 263 \\
 2) \text{ Babel } \frac{957}{11.025} \times 373 = 32 \\
 3) \text{ Bengkulu } \frac{2294}{11.025} \times 373 = 78 +
 \end{array}$$

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang reliabelitasnya sudah diuji sebelumnya. Tingkat penerimaan reliabelitas mengacu pada nilai Cronbach alfa, yakni minimal sebesar 0,80. Terhadap data yang terkumpul melalui penggunaan kuesioner, juga dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan terhadap variabel yang memiliki jawaban multidimensional. Data diolah dengan menggunakan komputer melalui program SPSS. Pengujian hipotesis untuk mengetahui asosiasi variabel pola penggunaan dengan variabel peningkatan ekonomi dilakukan dengan menggunakan rumus *Pearson Chi-Square (2-sided)* pada α 0.05.

E. Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian

1. Potret Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, di Jambi, Benghulu dan Pangkal Pinang. Dari hasil observasi dan *depth interview* di kalangan informan pada tiga lokasi penelitian dapat digambarkan potret tentang lokasi penelitian terkait eksistensi PNPM dan internet.

Pada lokasi Jambi, di mana letaknya di PNPM : 1) Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, Provinsi Jambi dan 2) Kecamatan Rimba Tengah; Kecamatan Pasar Muaro Bungo; Kecamatan Bathin 3' Kec Muaro Dani kabupaten Muaro Bungo.

Di PNPM Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, Provinsi Jambi, maka Letak lokasinya jauh dari perkotaan. Selain itu Jauh dari jangkauan internet. PNPM ini berbetuk koperasi simpan pinjam. Aktifitas yang bersifat infrastruktur, yaitu seperti perbaikan jalan.

Sekain itu para anggota PNPM Tak pernah dapat pengajaran internet. Pendidikan anggotanya rata rata SD dan SMP. Umumnya anggota sudah tua-tua dan lemah dalam urusan internet. Yang mampu mengisi kuesioner biasanya pengurus PNPM , umumnya mereka berpendidikan tinggi.

Para anggota memang umumnya tahu eksistensi PNPM. Mereka sering menghadiri rapat-rapat kalau diundang. Dalam pandangan mereka, urusan PNPM itu dianggap sebagai urusan pengurus saja, bukan urusan anggota PNPM. Urusan PNPM juga dianggap sebagai urusan pemerintah bukan urusan anggota, seperti sosialisasi PNPM dilakukan oleh RT dan pihak lurah. Urusan PNPM dianggap sebagai urusan orang-orang pintar.

Sementara itu PNPM di Kecamatan Rimba Tengah; Kecamatan Pasar Muatro Bungo; Kecamatan Bathin 3' , Kecamatan Muaro Dani, Kabupaten Muaro Bungo, lokasi-lokasinya memang sudah dekat dengan pusat pemerintahan. Selain itu, -akses internetpun sudah ada. Secara umum para anggota sudah sudah akrab dengan internet. Mereka sudah sadar akan kegunaan internet , terutama pengurusnya.

Anggota penerima PNPM umumnya ibu-ibu rumah tangga. Bentuk PNPM biasanya berupa bentuk usaha koperasi simpan pinjam. Para anggota-anggotapun sudah sadar akan kegunaan internet. Namun dalam pengakuan mereka, mereka tidak mendapatkan PLIK dan MPLIK pada hal mereka menginginkan.

Meraka juga mengaku aktif dalam menggunakan internet. Namun mereka tidak tahu-menahu bahwa ada masalah PNPM itu di internet. Anggota PNPM tidak peduli dengan masalah PNPM di Internet karena mereka sendiri menganggap bahwa masalah itu merupakan urusan pengurus, bukan menjadi urusan anggota.

Kemudian di Bengkulu. Di kota ini ada dua PNPM yang dijadikan obyek, yaitu PNPM di Kelurahan Padang Jaya, Kabupaten Arga Makmur dan di Desa Air Tesi , Kecamatan Seberang Musi Kabu[at]aten Kepahiang, Bermani Hilir, Prop Bengkulu.

Di Kelurahan Padang Jaya, Kabupaten Arga Makmur, maka : PNPM -nya berbentuk usaha/koperasi simpan pinjam. Aktifitas fisiknya berupa pembangunan irigasi dan pendirian sekolah PAUD. Dari segi etnis, maka mereka bersuku suku reja' jawa dengan komunikasi berbahasa jawa dan rejang.

Lokasi PNPM-nya jauh dari pusat kota Bengkulu, berjarak sekitar 62 km. Keramaian terjadi melalui aktifitas Pasar. Disebut pasar pekan. Pasar "pekan berlangsung satu minggu sekali. Secara geografis letaknya di tengah-tengah hutan. Namun demikian sudah ada aliran listrik PLN, akan tetapi belum terdapat jaringan internet. Mereka yang umumnya bekerja sebagai petani karet dan sawit ini, mengaku Belum pernah terlibat pengajaran internet.

Masih di Provinsi Bengkulu, maka PNPM obyek keduanya yaitu di Desa Air Tesi, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Bermani Hilir, Prop Bengkulu. Di lokasi ini, maka PNPM-nya juga berbentuk Koperasi Simpan Pinjam Perempuan. Aktifitas program PNPM-nya berupa aktifitas fisik seperti perbaikan jalanan.

Prasarana di kolaksi yang tergolong terisolir ini tampaknya masih relatif minim. Meski sudah terdapat aliran listrik/PLN namun belum ada jaringan internet. Dengan pendidikan yang umumnya antara SD dan SMP dan bekerja sebagai petani, mereka sebagian besar mengaku bahwa di samping mereka awam sekali dengan internet dan tidak pernah ikut pendidikan internet, juga tidak tahu program PNPM dan hal ini menurut mereka karena kurangnya sosialisasi.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan menjadi sbb., : 1) Bagaimana Pola Penggunaan TIK di kalangan anggota PNPM Mandiri Perdesaan? ; 2) Bagaimana Tingkat Ekonomi masyarakat Pedesaan? ; 3) Seberapa kuat hubungan antara Pola Penggunaan TIK dengan Peningkatan Ekonomi anggota PNPM Mandiri Perdesaan?

2. Identitas Responden

Dalam sub bab ini akan disajikan hasil penelitian menyangkut identitas responden. Sajiannya akan dimulai dari masalah jenis kelamin dan diakhiri dengan masalah pendapatan responden.

Menyangkut masalah jenis kelamin responden, temuan penelitian memperlihatkan fenomena yang cenderung sama di setiap lokasi penelitian. Kesamaan itu ditandai oleh lebih besarnya proporsi jenis kelamin kaum perempuan di setiap lokasi. Proporsinya masing-masing berkisar 61 hingga 68 persen. (lihat tabel 1).

Mengenai kategori usia responden menurut kategori MDGs, temuan memperlihatkan kecenderungan yang sama di setiap lokasi penelitian. Mereka itu sebagian besar merupakan responden yang tergolong generasi Xers (lahir 1965 – 1982). Jadi, mereka itu merupakan generasi yang sejatinya memang relatif tidak akrab dengan masalah TIK. Proporsi mereka di setiap lokasi mencapai antara 59 hingga 61 persen. (lihat tabel 2).

Selanjutnya menyangkut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan responden. Menurut data tabel tiga (lihat tabel 3), responden yang terbanyak yaitu responden yang menamatkan pendidikannya pada tingkat SLTA. Ini muncul di setiap lokasi penelitian. Dengan demikian responden berpendidikan SLTA menjadi yang dominan di setiap lokasi

Menyangkut jenis pekerjaan yang disandang responden sebagaimana diperlihatkan data tabel empat (lihat tabel 4), jenis pekerjaan yang menjadi modus di setiap lokasi cenderung berbeda. Kalau di Jambi, dengan variasi jenis pekerjaan terbanyak, maka yang menjadi modus itu ibu rumah tangga (26,6%). Sementara di Bengkulu dan Babel itu modusnya sama, yaitu pedagang. Di Bengkulu proporsinya 33,3% dan di Babel 59,4%.

Selanjutnya menyangkut agama yang dipeluk responden. Menyangkut hal ini, temuan menunjukkan gejala yang sama di setiap lokasi. Kesamaannya ditandai dengan dominannya pemeluk agama Islam di tiap lokasi. Proporsinya mencapai seratus persen di setiap lokasi penelitian. Sementara pemeluk agama lainnya seperti protestan dan budha, proporsinya relatif kecil. (lihat tabel 5).

Kemudian mengenai jenis media TIK yang dimiliki responden. Data mengenai hal ini disajikan dalam tabel 6 berikut. Dari tabel dimaksud data memperlihatkan bahwa variasi pemilikan media paling banyak muncul di Jambi dan Bengkulu. Jumlah pemilikannya relatif hampir sama. Berbeda dengan di Babel, jumlah pemilikan medianya relatif sedikit dibandingkan dua lokasi sebelumnya. Selanjutnya, jumlah media terbanyak dimiliki responden di Jambi yaitu handphone/HP (90,5%), disusul responden yang memiliki fix telepon yaitu 86,3 %. Sementara media-media lainnya seperti komputer PC dan Laptop proporsinya berkisar 1-18 %. Dengan demikian, handphone media yang menonjol di lokasi ini. Kemudian di Bengkulu, media yang terbanyak dimiliki responden yaitu fix telepon (53.8 %). Lalu HP, responden yang memilikinya sebanyak 46.2 %. Jadi,

dua media inilah yang relatif banyak dimiliki oleh responden di Bengkulu. Sementara media-media lainnya seperti komputer, email jumlah pemilikannya berkisar 1-23 %. Sedangkan di Babel, seperti sudah disinggung sebelumnya, jumlah ragam media yang dimiliki di sini lebih sedikit dibanding dua lokasi sebelumnya. Dari variasi yang sedikit ini, maka media yang paling banyak (65,6 %) dimiliki responden yaitu handphone/HP. Lalu fix telepon, yang memilikinya mencapai 50 %. Sementara media lainnya berkisar 6 hingga 25 %. (lihat tabel 6).

Mengenai pendapatan responden per bulannya, modusnya cenderung berbeda di setiap lokasi penelitian. Di Jambi dan Babel modusnya cenderung sama, >1,5 juta-2 juta. Berdasarkan data tabel tujuh, responden yang teridentifikasi berpendapatan demikian, proporsinya mencapai 27.8 % di Jambi dan 31.3 % di Babel. Sementara di Bengkulu, jumlah pendapatan per bulannya lebih rendah, yaitu 1 juta-1,5 juta dan responden berpendapatan demikian proporsinya lebih banyak yaitu 29.5 %. Dengan demikian, dari segi tingkat pendapatan, responden di tiga lokasi penelitian dapat dikatakan didominasi oleh orang-orang yang berpendapatan kurang memadai. (lihat tabel 7).

2. Pola Penggunaan Internet

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa pola penggunaan internet dalam penelitian ini, fenomenanya akan dipelajari dari tiga dimensi, yaitu dimensi selektifitas, keterlibatan dan pemanfaatan. Selanjutnya, hasil penelitiannya akan disajikan secara bertahap. Pertama akan disajikan menyangkut pola selektifitas. Kemudian menyusul pola keterlibatan dan akhirnya akan disudahi dengan penyajian hasil penelitian mengenai pola pemanfaatan.

a. Selektifitas

Sebelum lebih jauh memahami responden dalam hubungannya dengan internet, penelitian ini memulainya dengan mempertanyakan mereka dalam kaitan keterlibatannya dengan internet. Terkait dengan ini, hasil penelitian (tabel 8) menunjukkan adanya fenomena yang relatif berbeda di tiga lokasi penelitian. Di Jambi, responden sebagian besarnya (68,8%) mengaku tidak pernah mengakses internet. Sementara di Babel, proporsi mereka yang mengaku pernah mengakses internet jumlahnya lebih banyak (56,3%). Demikian juga halnya di Bengkulu, juga lebih banyak (52,6%) yang pernah mengakses.

Selanjutnya, dari mereka yang mengaku pernah mengakses internet tadi, diketahui pula bahwa jenis informasi yang pertama kali mereka lihat saat mengakses internet itu, baik di Jambi, Bengkulu dan Babel, yaitu jenis informasi bidang ekonomi yang terbanyak. Jenis-jenis bidang informasi lainnya, meski masih bisa ditemui namun kisarannya antara 2,4 % hingga 24,4 %. (Lihat tabel 9).

Kemudian, setelah melihat jenis-jenis bidang informasi pertama ketika mengakses internet, maka responden melanjutkan kebiasaan mereka dalam mencari informasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis informasi yang biasa mereka cari setelah mengakses informasi bidang pertama, yaitu jenis informasi ekonomi (72.0%) dan hiburan (54.9%) jika di Jambi. Sementara di Bengkulu juga sama, yakni bidang informasi ekonomi (53.7%) dan hiburan (48.8 %). Sedang di Babel, bidang informasi yang biasa dicari yaitu bidang ekonomi (38.9 %) dan pekerjaan (38.9 %). (lihat tabel 10).

Khusus menyangkut informasi bidang ekonomi yang biasa mereka cari tadi, maka jenis informasi bidang ekonomi yang sering diakses responden yaitu 'Informasi mengenai suatu produk barang'. Fenomena ini terjadi secara serupa di tiga lokasi penelitian. Di Jambi proporsinya sebesar 67.5 %; di Bengkulu sebanyak 43.9 % dan di Babel menjadi yang terbesar, yakni 72.2 %. Sementara, informasi ekonomi terkait mengenai proyek pemberdayaan masyarakat sendiri, proporsinya relatif kecil, dan bahkan pada kalangan responden di Babel tidak ada yang mengakses sama sekali. Hal ini tentu menjadi janggal mengingat kepentingan mereka sangat tinggi terhadap informasi tersebut sehubungan kalangan responden ini adalah individu yang tergabung menjadi anggota PNPM. (lihat tabel 11). Selanjutnya, dari segelintir mengakses

informasi menyangkut proyek pemberdayaan masyarakat tadi, diketahui bahwa yang biasa mereka akses itu adalah menyangkut pemberdayaan masyarakat desa. (lihat tabel 12).

Selanjutnya, terkait dengan pola berkomunikasi responden melalui internet, terutama dalam kaitan urusan informasi proyek pemberdayaan masyarakat, tampaknya responden sangat sedikit yang melakukan pola tersebut. Terlihat hanya enam responden yang mengakses informasi proyek pemberdayaan masyarakat tersebut. Dari keenam responden ini, tiga diantaranya dilakukan oleh responden di Jambi. Pola berkomunikasi mereka biasanya dilakukan melalui aktifitas *e-mail*; *chatroom* menggunakan Facebook; dan dengan cara melihat-lihat *blog* atau *websites*.. Sedang tiga responden lagi yakni di Bengkulu, melakukannya melalui *chatroom* menggunakan Facebook. Sementara tidak satupun diketahui yang melakukan komunikasi melalui internet tersebut pada kalangan responden di Babel.

Kemudian, ketika terjadi kesepakatan transaksi bisnis melalui internet dalam hubungan informasi mengenai suatu produk barang.jasa, para responden melakukan pembayaran biasanya ditempuh dengan cara Transfer antar bank paling banyak, yakni dilakukan 41.7 % responden di Jambi. Cara-cara lain yaitu Bayar langsung melalui internet (dengan kredit atau kartu debit) dan Kartu kredit melalui telepon yang proporsinya masing-masing sebesar 18.3 %. Cara-cara lain seperti Internet Banking dan Pembayaran saat pengiriman (COD) prporosi yag biasa melakukannya antara 1.7 – 10.0 %. Sementara responden di Bengkulu , cara pembayaran yang banyak dilakukan mereka yaitu dengan cara transfer antar bank (28.6%); cukup banyak juga yang melakukan dengan cara bayar langsung melalui internet (dengan kredit atau kartu debit (23.8 %); dengan cara Pembayaran saat pengiriman (COD) (14.3%) dan dengan cara Bayat tunai 4.8 %. Sedang pada responden di Babel, cara pembayaran yang biasa mereka lakukan yaitu melalui Pembayaran saat pengiriman (COD) dan Transfer antar bank yang proporsinya masing-masing sebesar 33.3 %. Seang cara-cara lainnya yaitu dengan menggunakan Kartu kredit melalui telepon dan Internet Banking yan proporsinya masing-masing sebesar 13.3 %.

Mengenai media atau perangkat yang biasa mereka gunakan untuk mengakses internet, hasil penelitian memperlihatkan fenoemena yang relatif berbeda di antara tiga lokasi. Kalau di Bengkulu (48.8%) dan Babel (50.0%) cenderung menggunakan Telepon selular (HP), maka di Jambi mereka lebih banyak yang menggunakan laptop (36.6%).

Selanjutnya, menyangkut saluran yang biasa mereka gunakan saat berkomunikasi melalui internet, fenomenanya menunjukkan data yang cenderung sama di tiga lokasi penelitian, di mana saluran yang banyak digunakan yaitu melalui *Chat room* pada situs Facebook. Bedanya yaitu, kalau di Jambi polanya diikuti menggunakan saluran E-mail, maka di Bengkulu diikuti oleh penggunaan saluran *chat room* menggunakan *Yahoo Messenger* dan *chat room* menggunakan *BBM*. Sementara di Babel pola itu diikuti oleh penggunaan saluran *Website* tertentu. (lihat tabel 16) .

Dalam aktifitas mereka itu diketahui pula bahwa ada diantara mereka itu yang pernah mengakses *websites/blog* milik pemerintah. *Websites/blog* pemerintah yang biasa mereka pilih untuk diakses adalah web-nya milik Pemprov Jambi. Website ini merupakan web terbanyak diakses responden (7.3%). *Websites-websites* lainnya masing-masing biasa diakses oleh responden sebanyak antara 1.2 – 2.4 %. Namun. Sebagian besar mereka itu bukanlah responden yang biasa mengakses situs pemerintah. Proporsi mereka ini mencapai 81.7 %.) (lihat tabel 17).

Mereka ini diketahui pula bahwa dalam dua minggu terakhir saat penelitian ini dilakukan, mengakses internet antara 1 – 4 kali. Responden di Jambi dan Bengkulu, dalam dua minggu terakhir terbanyak yaitu antara 3 – 4 kali. Sementara di Babel terbanyak yaitu antara 1-2 kali dalam dua minggu terkahir, yakni dilakukan oleh 72.2 % responden.

Dalam kaitan intensitas melakukan aktifitas ekonomi melalui internet dalam dua minggu terakhir, penelitian menemukan gejala yang sama di tiga lokasi penelitian,

di mana responden kebanyakan melakukannya antara 1 – 2 kali dalam dua minggu terakhir saat penelitian ini dilakukan. (lihat tabel 19).

b. Keterlibatan

Dalam kaitan intensitas melakukan aktifitas ekonomi melalui internet dalam dua minggu terakhir, penelitian menemukan gejala yang sama di tiga lokasi penelitian, di mana responden kebanyakan melakukannya antara 1 – 2 kali dalam dua minggu terakhir saat penelitian ini dilakukan.

Terkait dimensi keterlibatan tersebut, penelitian ini mempelajarinya dari dua sisi, pertama menyangkut tempat yang biasa digunakan untuk mengakses internet dan kedua menyangkut waktu yang disediakan untuk mengakses internet. Menyangkut tempat yang biasa digunakan responden untuk mengakses internet, temuan menunjukkan bahwa kebanyakan mereka itu melakukannya di rumah sendiri, baik di Jambi, Bengkulu maupun di Babel. Tempat-tempat lainnya, meski ada juga tetapi tidak banyak responden yang melakukannya, proporsinya antara 5.6 % hingga 18.3 %. (lihat tabel 20). Mengenai waktu yang mereka sediakan untuk mengakses internet, yakni antara kurang dari 1 jam hingga tiga jam. Di Bengkulu dan Babel, terbanyak menyediakan waktunya selama kurang dari satu jam. Sementara di Jambi lebih banyak yang menyediakan waktunya antara 1 – 3 jam.

c. Pemanfaatan

Dalam kaitan intensitas melakukan aktifitas ekonomi melalui internet dalam dua minggu terakhir, penelitian menemukan gejala yang sama di tiga lokasi penelitian, di mana responden kebanyakan melakukannya antara 1 – 2 kali dalam dua minggu terakhir saat penelitian ini dilakukan. (lihat tabel 19).

Terkait dimensi pemanfaatan, penelitian ini mengamatinya secara terbatas, yakni hanya dalam kaitan pemanfaatan konten yang berhubungan masalah PNPM saja. Ini dilakukan karena penelitian ini memfokuskan respondennya pada anggota komunitas penerima langsung program PNPM. Mengacu pada pengertian ini, penelitian ini menemukan bahwa dari 373 responden, hanya sedikit saja (4,02%) diantaranya yang mengaku sebagai pemanfaat konten internet itu dalam kepentingan aktifitas PNPM. Kemudian dari mereka ini, selanjutnya diketahui bahwa konten menyangkut PNPM yang paling banyak dimanfaatkan adalah untuk kegunaan bahan dokumentasi (33 %), disusul yang penggunaannya untuk bahan dasar pertanyaan (27%); sementara yang dimanfaatkan untuk bahan referensi dan bahan untuk membuat proposal yang masing-masing persentasinya sebesar 20 %.

3. Tingkat Ekonomi masyarakat Pedesaan (Komunitas PNPM)

Yang dimaksud dengan peningkatan ekonomi masyarakat dalam penelitian seperti sudah dibatasi sebelumnya, yaitu sebagai suatu perubahan keadaan kepemilikan barang di kalangan anggota masyarakat (penerima manfaat langsung PNPM) antara pada masa sebelum menggunakan internet dan setelah menggunakan internet. Gejala yang demikian sendiri diantaranya dapat diamati dengan mempertanyakan kepemilikan barang itu pada saat sebelum dan sesudah menggunakan internet. Dengan demikian perbandingan banyaknya jumlah item barang yang dimiliki antara sebelum dan setelah menggunakan internet, dapat diketahui.

Namun sebelum melangkah ke masalah dimaksud, penelitian ini pertama-tama mempertanyakan masalah kepemilikan barang-barang pada responden. Dari sini diketahui barang apa saja yang sudah mereka miliki (khususnya produk TIK). Mengenai hal ini datanya disajikan dalam tabel 23. Berdasarkan tabel dimaksud diketahui bahwa ada sebanyak sembilan jenis barang yang mereka miliki itu. Dari sejumlah jenis tersebut, maka yang paling banyak dimiliki yaitu *hand phone* (79.1%) dan sangat banyak juga yang memiliki telepon (fix) (76.4%). Sementara pada jenis-jenis barang lainnya, seperti “Tablet (Ipad, Galaxy Tab dan sejenisnya)”, komputer dan lainnya, proporsi responden yang tidak memilikinya itu sangat dominan, yakni cenderung berkisar antara 81.8%-98.7%.

Melihat distribusi data tabel di maksud kiranya dapat diartikan bahwa dalam kaitan TIK pada umumnya responden tampaknya cenderung masing-masing kurang akrab dengan persoalan TIK itu. Itu terlihat dari masih dominannya mereka itu yang tidak memiliki sejumlah produk-produk TIK seperti “Tablet” dan “Faximile”.

Selanjutnya, terkait dengan fenomena ‘masa kepemilikan sejumlah barang dalam hubungan penggunaan Internet’. Datanya disajikan dalam tabel 24 berikut. Berdasarkan distribusi data tabel 24 dimaksud maka gejalanya mengindikasikan bahwa kepemilikan itu umumnya cenderung sudah dimiliki responden pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Perbedaannya tampak pada jumlah responden yang mengaku sudah memiliki tadi. Jumlah responden yang ‘pengakunya’ cenderung banyak terjadi pada sejumlah jenis barang saja, di Jambi yaitu seperti televisi (271); telepon selular (238). Termasuk juga jenis barang lainnya yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu seperti perangkat *sound system* (146) ; Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah) (184).

Fenomenanya juga tampak cenderung sama di dua lokasi riset lainnya, di mana umumnya atau bagian terbesar responden itu cenderung sudah memiliki barang-barang tadi pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Fenomena responden yang mengaku memiliki barang-barang tadi setelah menggunakan internet, proporsinya dari tiga lokasi riset berkisar 0.4 % (tv) hingga 53.3 % (Smartphone (Iphone/Blackberry/Android).

Tabel 24
Responden Menurut Masa Kepemilikan Sejumlah Barang Terkait Penggunaan Internet

Lokasi	Nama Barang	Masa kepemilikan				Total	
		Sebelum menggunakan internet		Setelah menggunakan internet			
		f	%	f	%	f	%
Prov. Jambi	Televisi	260	99.6	1	0.4	261	100.0
	Perangkat Sound System	143	97.9	3	2.1	146	100.0
	Perangkat Audio Visual	66	94.3	4	5.7	70	100.0
	Kendaraan roda empat	32	80.0	8	20.0	40	100.0
	Personal Computer (PC)	54	84.4	10	15.6	64	100.0
	Telepon Selular	227	95.4	11	4.6	238	100.0
	Smartphone (Iphone/Blackberry/Android)	7	46.7	8	53.3	15	100.0
	Tablet (Ipad, Galaxy Tab dan sejenisnya)	8	100.0			8	100.0
	Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah)	177	96.2	7	3.8	184	100.0
	House Hold Things (Kulkas, mesin cuci, dsb)	106	89.1	13	10.9	119	100.0
	Buku tabungan	96	90.6	10	9.4	106	100.0
	Kartu kredit	8	61.5	5	38.5	13	100.0
	Aksesoris berharga (emas, berlian, dll)	64	91.4	6	8.6	70	100.0
Kepesertaan asuransi	26	81.3	6	18.8	32	100.0	
Prov. Bengkulu	Televisi	73	98.6	1	1.4	74	100.0
	Perangkat Sound System	47	100.0			47	100.0
	Perangkat Audio Visual	26	96.3	1	3.7	27	100.0
	Kendaraan roda empat	12	100.0			12	100.0
	Personal Computer (PC)	27	87.1	4	12.9	31	100.0

	Telepon Selular	71	98.6	1	1.4	72	100.0
	Smartphone (Iphone/Blackberry/Android)	10	90.9	1	9.1	11	100.0
	Tablet (Ipad, Galaxy Tab dan sejenisnya)						
	Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah)	61	100.0			61	100.0
	House Hold Things (Kulkas, mesian cuci, dsb)	61	98.4	1	1.6	62	100.0
	Buku tabungan	39	100.0			39	100.0
	Kartu kredit	7	100.0			7	100.0
	Aksesoris berharga (emas, berlian, dll)	26	100.0			26	100.0
	Kepesertaan asuransi	5	100.0			5	100.0
Prov. Bangka Belitung	Kepemilikan "Televisi" oleh responden	32	100.0			32	100.0
	Kepemilikan "Perangkat Sound System" oleh responden	16	100.0			16	100.0
	Kepemilikan "Perangkat Audio Visual" oleh responden	14	100.0			14	100.0
	Kepemilikan "Kendaraan roda empat" oleh responden	1	100.0			1	100.0
	Kepemilikan "Personal Computer (PC) oleh responden	3	75.0	1	25.0	4	100.0
	Kepemilikan "Telepon Selular" oleh responden	30	100.0			30	100.0
	Kepemilikan "Smartphone (Iphone/Blackberry/Android)" oleh responden	2	100.0			2	100.0
	Kepemilikan "Tablet (Ipad, Galaxy Tab dan sejenisnya)" oleh responden						
	Kepemilikan "Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah)" oleh responden	24	100.0			24	100.0
	Kepemilikan "House Hold Things (Kulkas, mesian cuci, dsb)" oleh responden	26	96.3	1	3.7	27	100.0
	Kepemilikan "Buku tabungan" oleh responden	27	100.0			27	100.0
	Kepemilikan "Kartu kredit" oleh responden						
	Kepemilikan "Aksesoris berharga (emas, berlian, dll)" oleh responden	19	95.0	1	5.0	20	100.0
	Kepemilikan "Kepesertaan asuransi" oleh responden						

Sumber : Dimodifikasi berbasis data out put SPSS BPPKI Jakarta

4. Hubungan Tingkat Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Komunitas PNPM) dengan Masa sebelum dan sesudah Penggunaan Internet

Yang dimaksud dengan peningkatan ekonomi masyarakat dalam penelitian iseperti sudah dibatasi sebelumnya, yaitu sebagai suatu perubahan keadaan kepemilikan

barang di kalangan anggota masyarakat (penerima manfaat langsung PNPM) antara pada masa sebelum menggunakan internet dan sesudah menggunakan internet.

Seperti sudah disinggung sebelumnya, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui keterkaitan masalah kepemilikan barang-barang dengan masalah pola penggunaan internet. Tujuan dari maksud tersebut yaitu untuk mengetahui kebenaran asumsi para ahli di mana disebutkan dengan *ICT* (TIK) dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk mengetahui kebenaran asumsi tersebut, penelitian ini mencoba melihatnya dari segi keterkaitan pola penggunaan internet dan kepemilikan barang. Pola penggunaan (secara umum) pertama dilihat dari sisi pernah atau tidaknya menggunakan internet dan kepemilikan barang dilihat dari masanya, yaitu masa sebelum menggunakan internet dan masa sesudah menggunakan internet. Hasil penelitian mengenai hal ini disajikan dalam tabel 24 sebelumnya.

Secara statistik menyangkut keterkaitan pola penggunaan (secara umum) dan kepemilikan barang sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, hasilnya disajikan pada tabel 24a berikut. Dari data tabel 24a dimaksud tampak bahwa nilai χ^2 observasi yang bersifat dua sisi, pada semua hubungan bernilai sebesar .000. Nilai mana jumlahnya sangat jauh berbeda dengan nilai χ^2 pada distribusi teoritis dengan α 0.05 yang sebesar 5.991. Dengan perbandingan ini maka secara statistik jelas bahwa Hubungan antara Kepemilikan Barang dan Masa Penggunaan Internet itu tidak memiliki hubungan secara signifikan.

Tabel 24a
Statistik Hubungan Kepemilikan Barang dan Masa Penggunaan Internet

Kepemilikan Barang dan Masa Penggunaan Internet	Test statistik	df	α 0.05	Asymp. Sig. (2- sided)	Signifikansi	
					Ya	Ti- dak
Televisi dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Sound system dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Audio Visual dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Kendaraan roda empat dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Personal Komputer dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Telepon Seluler dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Smartphone (Iphone/blackberry/android) dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Tablet (Ipad/Galaxy tab,sejenisnya) dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah) dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Hous Hold Things (Kulkas, mesin cuci, sdb) dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Buku tabungan dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Kartu kredit dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991

Asesoris berharga dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991
Kepesertaan asuransi dan Masa Penggunaan Internet	Pearson Chi-Square (2-sided)	2	v	.000		5.991

Sumber : Dimodifikasi berbasis data out put SPSS BPPKI Jakarta

5. Hubungan Pola Penggunaan dengan Peningkatan Ekonomi

Sesuai definisi operasional sebelumnya, pola penggunaan dalam riset ini secara teoritis dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi Selektifitas, Keterlibatan dan dimensi pemanfaatan. Terkait dengan ini maka uji statistik terkait pola penggunaan dalam hubungannya dengan Peningkatan Ekonomi, akan dilakukan berdasarkan ketiga dimensi tadi. Hasilnya disajikan dalam tabel 25a berikut. Dari tabel dimaksud maka diperoleh data bahwa Hubungan Statistik Variabel Pola Penggunaan dalam konteks Selektifitas dengan Peningkatan Ekonomi (terkait pada semua jenis barang), nilai χ^2 observasinya semuanya berada di bawah nilai χ^2 teoritis yang pada α 0.05 terendah sebesar 10.070 (df 5) dan tertinggi sebesar 19.675 (df11). Ini berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kedua variabel.

a. Selektifitas

Tabel 25a
Hubungan Statistik Selektifitas dengan Peningkatan Ekonomi

Informasi pertama kali dilihat saat akses internet * Masa kepemilikan Barang	Pearson Chi-Square	df	α	Signifikansi	
				Ya	Tidak
Televisi	.765	11	0.05		19.675
Perangkat Sound System	.991	10	0.05		18.307
Perangkat Audio Visual	.133	8	0.05		15.507
Kendaraan roda empat	.206	7	0.05		14.067
Personal Computer (PC)	.768	9	0.05		16.919
Telepon Selular	.010	11	0.05		19.675
Smartphone(Iphone/Blackberry/Android)	.147	8	0.05		15.507
Tablet (Ipad, Galaxy Tab dan sejenisnya)	.594	6	0.05		12.592
Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah)	.015	10	0.05		18.307
Kulkas, mesian cuci, dsb	.574	9	0.05		16.919
Buku tabungan	.841	11	0.05		19.675
Kartu kredit	.421	5	0.05		10.070
Aksesoris berharga (emas, berlian, dll)	.102	10	0.05		18.307
Kepesertaan asuransi	.558	7	0.05		14.067

Sumber : Dimodifikasi berbasis data out put SPSS BPPKI Jakarta

b. Keterlibatan

Dari tabel 25b maka diperoleh data bahwa Hubungan Statistik variabel Pola Penggunaan (Keterlibatan) dengan Peningkatan Ekonomi (terkait pada semua jenis barang), nilai χ^2 observasinya (di bawah 1) semuanya juga berada di bawah nilai χ^2 teoritis yang pada α 0.05 terendah sebesar 5.991 (df 2) dan tertinggi sebesar 7.815 (df3). Dengan demikian secara statistik ini dapat diartikan bahwa antara variabel Pola Penggunaan dalam konteks Keterlibatan dengan Peningkatan Ekonomi diantara keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Tabel 25b
Hubungan Statistik Keterlibatan dengan Peningkatan Ekonomi

Informasi pertama kali dilihat saat akses internet * Masa kepemilikan Barang	Pearson Chi-Square	df	α	Signifikansi	
				Ya	Tidak
Televisi	.211	3	0.05		7.815
Perangkat Sound System	.247	3	0.05		7.815
Perangkat Audio Visual	.833	3	0.05		7.815
Kendaraan roda empat	.881	3	0.05		7.815
Personal Computer (PC)	.186	3	0.05		7.815
Telepon Selular	.853	3	0.05		7.815
Smartphone(Iphone/Blackberry/Android)	.574	2	0.05		5.991
Tablet (Ipad, Galaxy Tab dan sejenisnya)	.540	2	0.05		5.991
Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah)	.149	2	0.05		5.991
Kulkas, mesian cuci, dsb	.011	2	0.05		5.991
Buku tabungan	.449	2	0.05		5.991
Kartu kredit	.179	2	0.05		5.991
Aksesoris berharga (emas, berlian, dll)	.430	2	0.05		5.991
Kepesertaan asuransi	.109	2	0.05		5.991

Sumber : Dimodifikasi berbasis data out put SPSS

c. Pemanfaatan

Dari tabel 25c maka diperoleh data bahwa Hubungan Statistik Pola Penggunaan (Pemanfaatan) dengan Peningkatan Ekonomi (terkait pada semua jenis barang), nilai χ^2 observasinya (di bawah 1) semuanya juga berada di bawah nilai χ^2 teoritis yang pada α 0.05 terendah sebesar 5.991 (df 2) dan tertinggi sebesar 18.307 (df 10). Dengan demikian secara statistik ini dapat diartikan bahwa antara variabel Pola Penggunaan dalam konteks Pemanfaatan dengan Peningkatan Ekonomi secara statistik diantara keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Tabel 25c
Hubungan Statistik Pemanfaatan dengan Peningkatan Ekonomi

Informasi pertama kali dilihat saat akses internet * Masa kepemilikan Barang	Pearson Chi-Square	df	α	Signifikansi	
				Ya	Tidak
Televisi	.999	2	0.05		5.991
Perangkat Sound System	.999	2	0.05		5.991
Perangkat Audio Visual	.650	8	0.05		15.507
Kendaraan roda empat	.829	8	0.05		15.507
Personal Computer (PC)	.807	10	0.05		18.307
Telepon Selular	.598	10	0.05		18.307
Smartphone(Iphone/Blackberry/Android)	.395	7	0.05		14.067
Tablet (Ipad, Galaxy Tab dan sejenisnya)	.198	7	0.05		14.067
Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah)	.506	10	0.05		18.307
Kulkas, mesian cuci, dsb	.902	10	0.05		18.307
Buku tabungan	.840	9	0.05		16.919

Kartu kredit	.285	5	0.05		11.070
Aksesoris berharga (emas, berlian, dll	.985	9	0.05		16.919
Kepesertaan asuransi	.445	7	0.05		14.067

Sumber : Dimodifikasi berbasis data out put SPSS

F. Diskusi

Permasalahan penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Pola Penggunaan TIK di kalangan anggota PNPM Mandiri Perdesaan? ; 2) Bagaimana Tingkat Ekonomi masyarakat Pedesaan ?; dan 3) Seberapa kuat hubungan antara Pola Penggunaan TIK dengan Peningkatan Ekonomi anggota PNPM Mandiri Perdesaan?

Berdasarkan penyajiandan analisis hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa terkait permasalahan pertama temuan menunjukkan bahwa pada dimensi Selektifitas, Keterlibatan dan pemanfaatan, fenomenanya memperlihatkan adanya aktivitas yang beragam di kalangan responden. Dari dimensi selektivitas diantaranya ditandai dengan adanya keragaman dalam kebiasaan mencari jenis informasi. Dari segi dimensi keterlibatan, diantaranya juga ditandai dengan adanya keragaman tempat dalam mengakses internet. Sementara dari segi dimensi pemanfaatan, ditandai dengan adanya ragam pemanfaatan/pemilihan konten yang berhubungan dengan masalah PNPM. Dengan fenomena ini, secara teoritis kiranya memang relevan dengan apa yang diasumsikan oleh Levy dan Windahl (1985) sebelumnya terkait dengan konsep *activity*. Dengan konsep tersebut mengandung arti bahwa anggota khalayak itu mengarahkan dirinya sendiri pada proses komunikasi. Keragaman aktivitas tadi sendiri, dalam konteks aktivitas yang nota bene dikembangkan Levy dan Windahl berdasarkan model *theori uses and gratification*, keterjadiannya dimungkinkan karena faktor variabel anteseden seperti demografi.

Terkait dengan persoalan kedua, temuan memperlihatkan bahwa terkait dengan barang berupa produk TIK pada umumnya Komunitas PNPM cenderung masing-masing kurang akrab dengan persoalan TIK. Itu terlihat dari masih dominannya mereka itu yang tidak memiliki sejumlah produk-produk TIK seperti "Tablet" dan "Faximile".

Selanjutnya, terkait dengan fenomena 'masa kepemilikan sejumlah barang dalam hubungan penggunaan Internet', maka gejalanya mengindikasikan bahwa kepemilikan itu umumnya cenderung sudah dimiliki responden pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Perbedaannya tampak pada jumlah responden yang mengaku sudah memiliki tadi. Jumlah responden yang 'pengakunya' cenderung banyak terjadi pada sejumlah jenis barang saja, di Jambi yaitu seperti televisi (271); telepon selular (238). Termasuk juga jenis barang lainnya yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu seperti perangkat *sound system* (146) ; Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah) (184). Fenomenanya juga tampak cenderung sama di dua lokasi riset lainnya, di mana umumnya atau bagian terbesar responden itu cenderung sudah memiliki barang-barang tadi pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Fenomena responden yang mengaku memiliki barang-barang tadi setelah menggunakan internet, proporsinya dari tiga lokasi riset berkisar 0.4 % (tv) hingga 53.3 % (Smartphone (Iphone/Blackberry/Android).

Secara statistik menyangkut keterkaitan pola penggunaan internet (secara umum) dan kepemilikan barang sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, nilai χ^2 observasi yang sifatnya dua sisi, pada semua hubungan nilainya sebesar .000. Nilai mana jumlahnya sangat jauh berbeda dengan nilai χ^2 pada distribusi teoritis dengan α 0.05 yang sebesar 5.991. Dengan perbandingan tersebut secara statistik ini berarti bahwa Hubungan antara Kepemilikan Barang dan Masa Penggunaan Internet itu tidak terjadi secara signifikan. Ini pada gilirannya berarti bahwa temuan secara statistik riset ini bertentangan dengan asumsi-asumsi teoritis sebelumnya menyangkut hubungan positive terkait penggunaan internet dan peningkatan ekonomi sebagai mana banyak dikemukakan para pihak seperti Duncombe (2001); Prosser (2000); dan World Bank (1998). Secara metodologis hubungan yang demikian memang sangat dimungkinkan terjadi dalam realita statistik. Diantara pemungkin itu misalnya terkait dengan faktor variabel extraneous. Variabel extraneous dalam kaitan uji hubungan antara variabel

Kepemilikan Barang dan Masa Penggunaan Internet dalam riset ini sendiri misalnya seperti variabel-variabel yang berkaitan dengan *setting* masyarakat anggota komunitas PNPM.

Selanjutnya terkait dengan Hubungan variabel Pola Penggunaan Dengan Peningkatan Ekonomi. Sesuai definisi operasional sebelumnya, pola penggunaan dalam riset ini secara teoritis dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi Selektifitas, Keterlibatan dan dimensi pemanfaatan. Terkait dengan ini maka uji statistik terkait pola penggunaan dalam hubungannya dengan Peningkatan Ekonomi, dilakukan berdasarkan ketiga dimensi tadi. Temuannya menunjukkan bahwa Hubungan Statistik Variabel Pola Penggunaan dalam konteks Selektifitas dengan Peningkatan Ekonomi (terkait pada semua jenis barang), nilai χ^2 observasinya semuanya berada di bawah nilai χ^2 teoritis yang pada α 0.05 di mana terendah sebesar 10.070 (df 5) dan tertinggi sebesar 19.675 (df11). Ini berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kedua variabel. (lihat tabel 25a).

Menyangkut Hubungan Statistik variabel Pola Penggunaan (Keterlibatan) dengan Peningkatan Ekonomi (terkait pada semua jenis barang), nilai χ^2 observasinya (di bawah 1) semuanya juga berada di bawah nilai χ^2 teoritis yang pada α 0.05 terendah sebesar 5.991 (df 2) dan tertinggi sebesar 7.815 (df3). Dengan demikian secara statistik ini dapat diartikan bahwa antara variabel Pola Penggunaan dalam konteks Keterlibatan dengan Peningkatan Ekonomi diantara keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan. (lihat Tabel 25b).

Terakhir menyangkut Hubungan Statistik terkait variabel Pemanfaatan dengan variabel Peningkatan Ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa nilai χ^2 observasinya (di bawah 1) semuanya juga berada di bawah nilai χ^2 teoritis yang pada α 0.05 terendah sebesar 5.991 (df 2) dan tertinggi sebesar 18.307 (df 10). Dengan demikian secara statistik ini dapat diartikan bahwa antara variabel Pola Penggunaan dalam konteks Pemanfaatan dengan Peningkatan Ekonomi secara statistik tidak memiliki hubungan yang signifikan. (lihat tabel 25c)

Temuan statistik terkait hubungan variabel Pola Penggunaan (tiga dimensi) dengan variabel Peningkatan Ekonomi sebelumnya yang nota bene menghasilkan hubungan yang tidak signifikan di antara kedua variabel, kiranya itu menjadi fenomena empirik yang bertentangan dengan asumsi-asumsi teoritis sebagaimana dikemukakan banyak pihak seperti Duncombe (2001); Prosser (2000); dan World Bank (1998). Secara metodologis hubungan yang demikian memang sangat dimungkinkan terjadi dalam realita statistik. Untuk kasus riset ini, keterjadiannya mungkin karena disebabkan oleh faktor-faktor variabel *extraneous*. Selain itu mungkin juga disebabkan oleh faktor variabel *intervening*. Variabel *extraneous* dalam kaitan uji hubungan antara variabel Pola Penggunaan Dengan Peningkatan Ekonomi tadi misalnya terkait dengan persoalan potret komunitas anggota PNPM. Potret komunitas PNPM dalam riset ini sendiri, berdasarkan hasil observasi diantaranya menampakkan bahwa mereka itu merupakan kalangan yang relatif serba kekurangan terkait dengan ICT. Kekurangan itu misalnya seperti domisili mereka yang terisolir, tidak ada akses internet, bersikap apatis terhadap eksistensi PNPM, tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan internet, pendidikan yang umumnya SD dan SLTP dan lain sejenisnya.

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Permasalahan penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Pola Penggunaan TIK di kalangan anggota PNPM Mandiri Perdesaan?; 2) Bagaimana Tingkat Ekonomi masyarakat Pedesaan?; dan 3) Seberapa kuat hubungan antara Pola Penggunaan TIK dengan Peningkatan Ekonomi anggota PNPM Mandiri Perdesaan?

Berdasarkan penyajian dan analisis hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa terkait permasalahan pertama temuan menunjukkan bahwa pada dimensi Selektifitas, Keterlibatan dan pemanfaatan, fenomenanya memperlihatkan adanya aktivitas yang beragam di kalangan responden. Dari dimensi selektivitas diantaranya ditandai dengan adanya keragaman dalam kebiasaan mencari jenis informasi. Dari segi dimensi keterlibatan, diantaranya juga ditandai dengan adanya keragaman tempat dalam mengakses internet. Dari segi dimensi pemanfaatan ditandai dengan adanya ragam pemilihan konten yang berhubungan dengan masalah PNPM. Fenomena ini secara teoritis relevan dengan asumsi Levy dan Windahl (1985) bahwa anggota

khalayak itu mengarahkan dirinya sendiri pada proses komunikasi. Keragaman aktivitas tadi sendiri, dalam konteks aktivitas yang nota bene dikembangkan Levy dan Windahl berdasarkan model *theori uses and gratification*, keterjadiannya dimungkinkan karena faktor variabel antededen seperti demografi.

Terkait dengan persoalan kedua, temuan memperlihatkan bahwa terkait dengan barang berupa produk TIK pada umumnya Komunitas PNPM cenderung masing-masing kurang akrab dengan persoalan TIK. Itu terlihat dari masih dominannya mereka itu yang tidak memiliki sejumlah produk-produk TIK seperti "Tablet" dan "Faximile".

Selanjutnya, terkait dengan fenomena 'masa kepemilikan sejumlah barang dalam hubungan penggunaan Internet', maka gejalanya mengindikasikan bahwa kepemilikan itu umumnya cenderung sudah dimiliki responden pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Jumlah responden yang 'pengakunya' cenderung banyak terjadi pada sejumlah jenis barang saja, di Jambi yaitu seperti televisi; telepon selular. Termasuk juga jenis barang lainnya yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu seperti perangkat *sound system*; Benda tidak bergerak (Sebidang tanah, sawah, rumah). Fenomenanya juga tampak cenderung sama di dua lokasi riset lainnya, di mana bagian terbesar responden itu cenderung sudah memiliki barang-barang tadi pada saat-saat sebelum menggunakan internet. Fenomena responden yang mengaku memiliki barang-barang tadi setelah menggunakan internet, proporsinya dari tiga lokasi riset berkisar 0.4 % (tv) hingga 53.3 % (Smartphone (Iphone/Blackberry/Android)).

Secara statistik menyangkut keterkaitan pola penggunaan internet (secara umum) dan kepemilikan barang tidak terjadi secara signifikan. Temuan secara statistik riset ini bertentangan dengan asumsi-asumsi teoritis menyangkut hubungan positive terkait penggunaan internet dan peningkatan ekonomi. Secara metodologis hubungan yang demikian diantaranya mungkin terkait dengan faktor variabel extraneous. Variabel extraneous misalnya seperti variabel-variabel yang berkaitan dengan *setting* masyarakat anggota komunitas PNPM.

Menyangkut Hubungan variabel Pola Penggunaan Dengan Peningkatan Ekonomi., maka pola penggunaan dalam semua dimensi tidak memiliki hubungan (*two tail*) yang signifikan dengan Peningkatan Ekonomi. itu menjadi fenomena empirik yang bertentangan dengan asumsi-asumsi teoritis sebagaimana dikemukakan banyak pihak seperti Duncombe (2001); Prosser (2000); dan World Bank (1998). Secara metodologis hubungan yang demikian memang sangat dimungkinkan terjadi dalam realita statistik. Untuk kasus riset ini, keterjadiannya mungkin karena disebabkan oleh faktor-faktor variabel *extraneous*. Selain itu mungkin juga disebabkan oleh faktor variabel intervening. Variabel *extraneous* dalam kaitan uji hubungan antara variabel Pola Penggunaan Dengan Peningkatan Ekonomi tadi misalnya terkait dengan persoalan potret komunitas anggota PNPM.

Ucapan Terimakasih : Penulis mengucapkan terimakasih kepada pimpinan BPPKI Jakarta yang telah mengizinkan datanya untuk penulis jadikan sebagai bahan karya tulis ilmiah ini. Demikian juga kepada tim redaksi JSKM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam edisi JSKM kali ini.

Daftar Pustaka

- Adebayo, 2007. "Awareness, access and usage of information and communication technologies between female researchers and extensionists". *international journal of education and development using ICT* ; Vol 3(1), dalam : <http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=282&layout=html>.
- Butkevicien, Egl. "Social dimensions of ICT diffusion in rural communities". Diakses Juli 3 2007.
- Baran, Stanley J dan Dennis K . Davis "Mass Communication Theory, Foundation, Ferment and Future", Six Edition. Hlm : 153, dalam http://books.google.co.id/books?id=jpokJDPWt_MC&pg=PA153&lpg=PA153&dq=individual+differences+theorymelvin+de+fleur&source=bl&ots=6x4Q6oUqBJ&sig=VD1Tju_11ZRwcHzmnIrbhkSQxtE&hl=id&sa=X&ei=C5OAUomhAonwrQec34Ew&redir_esc=y#v=onepage&q=individual%20differences%20theory-melvin%20de%20fleur&f=false diakses 11 Nov 2013)

- Chand, Anand ; David Leeming; Edo Stork; Alan Agassi dan Randall Biliki .”The Impact of ICT on Rural Development in Solomon Islands: the PFnet Case”, http://www.usp.ac.fj/jica/ict_research/pfnet_case_study/pfnet_intro.html :
- Chaniago, Junaidi, “Uji Chi Square dengan SPSS dan Cara membaca Out Put-nya”, dalam <http://sarahocrena.blogspot.com/2012/02/uji-chi-square-dengan-spss-dan-cara.html>, diakses 6 November 2013.
- Cigugurtengah.Cimahikota. “Indikator-Keberhasilan-Bidang-Ekonomi-Masyarakat”. Dalam <http://cigugurtengah.cimahikota.go.id>.
- Choi; Watt; Dekkers dan Park. Tanpa tahun. Motives of Internet Uses, Crosscultural Perspectives, The US- The Netherlands and South Korea, <http://www-unix.oit.umass.edu/~comm-dept/resources/bib.Htm> 1).
- Duncombe, R. A. 2001. *Information, Technology, and Small, Medium and Micro Enterprise Development in Botswana*. Doctor of Philosophy Thesis. Institute for Development Policy and Management, dalam : Erwin A. Alampay, “Beyond access to ICTs: Measuring capabilities in the information society”, dalam, international journal of education and development using ICT ; Vol 2(3) 2006, <http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=196&layout=html> .:
- Ellis F. (2000) *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*, Oxford University Press, dalam Erwin A. Alampay, “Beyond access to ICTs: Measuring capabilities in the information society”, dalam, international journal of education and development using ICT ; Vol 2(3) 2006, <http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=196&layout=html> .:
- Goldstein & O'Connor 2000); dalam Odedra-Straub & Straub 1995, UNDP 2001).
- Hartono, Yuli , 2011. “Aktifitas komunikasi masyarakat Melalui situs jejaring sosial”. Dalam Jurnal Studi Komunikasi dan Media No. 15 (2) , Jakarta, BPPKI Balibang SDM Kementerian Kominfo.
- Imran, Hasyim Ali, “Literasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Masyarakat Pedesaan”, dalam [sulhanihermawan](http://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2012/03/contoh_riset-kuantitatif.pdf), http://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2012/03/contoh_riset-kuantitatif.pdf, diakses 4 Nopember 2013.
- Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau. Tahun 2012. “Kakan Kemenag Rohul : Penigkatan Kurban Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat”. [Kemenag.go.id](http://kemenag.go.id). Diakses 11 Pebruari 2012.
- Karman, 2013, Riset Penggunaan Media dan Perkembangannya Kini, JSKM Vol 17 (1), Jakarta, BPPKI Jakarta Badan Litbang Kemkominfo.
- Levy, Mark dan Sven Windahl. 1985 “The Concept of Audience Activity”, dalam Rosengren, Werner dan Palmgreen (eds) *Media Gratification Research*. Beverly Hill Sage, Hal 109-122
- Martin, Bill . “The Information Society and the Digital Divide: Some North-South comparisons”, dalam, *International Journal Of Education And Development Using Ict* ; Vol 1(4) 2005. taken on March, 31, 07 by hasyim ali imran; in : <http://ijedict.dec.uwi.edu/-viewarticle.php?id=128&layout=html>.
- McNamara, K.S. 2000. 'Why be Wired? The Importance of Access to Information and Communication Technologies', *TechKnowLogia*, March/April 2000. Knowledge Enterprise, Inc.
- Obayelu A., Elijah dan Ogunlade, I. “Analysis of the uses of information and communication technology for gender empowerment and sustainable poverty alleviation in Nigeria”, dalam **International journal of education and development using ICT** ; Vol 2(3) 2006. *accessed on March, 07. 2007* by hasyim ali imran; in : <http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=172&layout=html>.
- Prosser, T. 2000 *The Law and Regulators*, Clarendon Press Oxford., dalam Erwin A. Alampay, “Beyond access to ICTs: Measuring capabilities in the information society”, dalam, international journal of education and development using ICT ; Vol 2(3) 2006, <http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=196&layout=html> .:
- Sanderson, Stephen K. , 1991, Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, edisi kedua, terjemahan, Farid Wajidi dan S. Meno, cetakan ketiga, 2000, Jakarta, Raja Grafindo Persada, PT., hal. 606.
- Suyatno,” Uji Asosiasi “, dalam [www. Goobokee.org/membaca out put korelasi spss](http://www.Goobokee.org/membaca_out_put_korelasi_spss) . , diakses 12 Nopember 2013.

PENATAAN-RUANG-DAN-IMPLIKASINYA-TERHADAP-PENINGKATAN-EKONOMI-
MASYARAKAT-DI-KECAMATAN-KUPANG-TIMUR.

,(<http://politik.kompasiana.com/2012/03/14/>

Tanpa Nama. Uses And Gratification Theory-dalam, <http://communicationtheory.org/uses-and-gratification-theory/>, accessed, August, 24, 2015).

Waverman, Mesch & Foss as cited in The Economist 2005b, dalam Erwin A. Alampay, “*Beyond access to ICTs: Measuring capabilities in the information society*”, International journal of education and development using ICT ; Vol 2(3) 2006, <http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=196&layout=html> .:

World Bank .1998. *World Development Report 1998/99: Knowledge for development*. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. Oxford University Press., dalam : Erwin A. Alampay, “Beyond access to ICTs: Measuring capabilities in the information society”, dalam, international journal of education and development using ICT ; Vol 2(3) 2006, <http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=196&layout=html> .:

World Summit on the Information Society (WSIS) (2003). *Declaration of Principles*. 12 December. Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E

Teori Atribusi – *Attribution Theory*

Attribution theory atau teori atribusi menyediakan suatu kerangka kerja untuk memahami bagaimana orang-orang menjelaskan dirinya dan perilaku orang lain. Entri ini melihat kembali proses atribusi dan menyelidiki pentingnya atribusi untuk menentukan sukses tidaknya mengelola konflik dalam hubungan interpersonal. Selain itu, atribusi digunakan untuk menentukan sikap-sikap stigma orang-orang dan perilaku diskriminatif yang diakhiri dengan informasi tentang dasar-dasar kesalahan atribusi dan teori persepsi diri.

Dasar teori atribusi adalah orang akan melakukan sesuatu karena alasan tertentu. Dengan kata lain, orang memiliki berbagai alasan untuk mengembangkan kesan mereka terhadap orang lain. **Fritz Heider** tertarik pada bagaimana seorang individu mengembangkan sebuah kesan terhadap orang lain. Kesan-kesan ini dibangun dan dikembangkan melalui 3 (tiga) tahapan proses yaitu pengamatan perilaku, determinasi apakah perilaku disengaja, dan kategorisasi perilaku yang termotivasi secara internal dan eksternal.

**E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)**

**E-GOVERNMENT AND ITS APPLICATION IN LOCAL GOVERNMENT
(Case Study Towards Information Quality on Bengkalis Regency Website, Riau Province)**

Marudur Pandapotan Damanik

BPPKI Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Jl. Pegangsaan Timur No. 19B Jakarta Pusat
marudur.p.d@kominfo.go.id

Erisva Hakiki Purwaningsih

Puslitbang SDPPPI – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat
eris001@kominfo.go.id

(Naskah diterima 5 Juni 2017; direvisi menurut catatan redaksi 5 Oktober 2017;
disetujui terbit oleh PR 8 Oktober 2017)

ABSTRACT

The information and communication technology (ICT) development today has created website, an effective information medium that connects to the Internet network so that it can be accessed at any time. Do not want to miss, government organizations are also utilizing website technology as one of its services in providing information to the public. However, the information contained on the website should have a good quality so that the information conveyed can be useful. This study aims to measure the quality of information on Bengkalis Regency websites based on dimensions of information quality concept. Observation of four websites in Bengkalis Regency conducted along with in-depth interview to each managers. The results obtained that the information available on these websites has met the good information quality, although there are some deficiencies such as the existence of links that refers to a blank page, some unlisted information dating, and the lack of network quality assurance to ensure the availability of information.

Keywords: *Information quality, Website, Bengkalis*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menciptakan teknologi website, sebuah media informasi efektif yang terhubung ke jaringan internet sehingga dapat diakses setiap saat. Tidak ingin ketinggalan, organisasi pemerintah pun kini memanfaatkan teknologi ini sebagai salah satu layanannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun informasi yang terdapat pada website seyogyanya memiliki nilai kualitas yang baik agar informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan dimensi kualitas informasi. Pengamatan terhadap 4 (empat) website di lingkungan Pemkab Bengkalis dilakukan beserta wawancara mendalam kepada masing-masing pengelolanya. Hasil yang diperoleh bahwa informasi yang tersedia di website Pemkab Bengkalis sudah memenuhi kualitas informasi yang baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti adanya tautan (*link*) ke halaman kosong, sebagian penanggalan informasi yang belum tercantum, dan belum adanya jaminan kualitas jaringan untuk memastikan ketersediaan informasi.

Kata kunci: *Kualitas informasi, Website, Bengkalis*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Permasalahan

Terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 menjadi titik awal penerapan e-government di Indonesia. Inpres tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam organisasi pemerintah guna penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. E-government diharapkan dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi, serta terbentuknya jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan berbagai instansi pemerintah dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses informasi dan proses layanan. Sejak saat itu berbagai organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mulai bergerak dalam memanfaatkan TIK untuk mengimplementasikan e-government di daerahnya.

Langkah awal penerapan e-government menurut Inpres No. 3 tahun 2003 dimulai dengan membangun situs web pada setiap instansi pemerintahan. Situs web dimaksudkan sebagai portal informasi *online* bagi siapapun yang membutuhkan informasi terkait tugas dan fungsi instansi.

Keberadaan situs web menjadi perangkat yang strategis dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dimana salah satu pemanfaatannya adalah sebagai *online public relation* (Wiratmo, Irfan, & Kuwatono, 2017), sebab situs web menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui jaringan internet. Terlebih dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatnya rasa ingin tahu publik terhadap aktivitas pemerintah, maka keberadaan website sangat dibutuhkan. Website dapat dimanfaatkan sebagai media promosi produk-produk lokal daerah, pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, ataupun sebagai media untuk menyampaikan usulan, kritik dan keluhan.

Namun permasalahan penetrasi internet di Indonesia salah satunya adalah sebaran akses dan infrastruktur TIK yang belum merata. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2015 jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) pada wilayah Pulau Sumatera dan Jawa jauh lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia (KEMKOMINFO, 2016). Demikian pula akses internet umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan dan wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi yang baik. Kesenjangan infrastruktur seperti ini dapat berujung kepada kesenjangan dalam memperoleh informasi akibat sebagian besar masyarakat di daerah perdesaan, wilayah perbatasan negara, dan kawasan timur Indonesia masih banyak yang belum dapat menikmati layanan TIK. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di wilayah Pulau Bengkalis sebagai salah satu kawasan perbatasan laut di Indonesia. Secara geografis, Pulau Bengkalis menjadi salah satu pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Malaysia. Mengingat posisinya yang sangat strategis dimana berada pada belahan selat yang paling ramai dilayari, sesungguhnya Pulau Bengkalis menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Namun layaknya kawasan perbatasan lainnya, literasi TIK masyarakat Pulau Bengkalis masih terkonsentrasi pada wilayah pusat kota, sedangkan di wilayah pesisir ketertinggalan teknologi cukup terasa. Oleh karena itu BAPPENAS menetapkan wilayah Pulau Bengkalis sebagai salah satu lokasi prioritas dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sejak tahun 2012 (BAPPENAS, 2015).

Dalam upaya mengantisipasi kesenjangan informasi di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah setempat harus proaktif menyediakan informasi dalam situs web. Keberadaan situs web mampu menutupi keterbatasan pemerintah untuk melaksanakan diseminasi informasi sehingga masyarakat tidak mengalami kesenjangan informasi (Masyhur, 2014). Dengan tersedianya informasi yang berkualitas diharapkan masyarakat akan terdorong untuk menggunakan dan memanfaatkan internet secara positif untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan e-government dalam perspektif kualitas informasi yang tersedia pada website Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan mengidentifikasi kekurangan yang ditemukan pada website Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dapat mengurangi nilai kualitas informasi.

Signifikansi

Secara akademis hasil penelitian ini melengkapi kajian-kajian mengenai analisis dan evaluasi e-government dan kualitas informasi dalam konteks website organisasi pemerintahan. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan untuk mengembangkan portal informasi dalam website organisasi pemerintahan, dan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian lanjutan khususnya di bidang teknologi informasi.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Literatur

Penelitian terkait evaluasi penerapan e-government melalui analisis situs web instansi pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Umumnya tujuan mengevaluasi situs web e-government adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan situs web instansi pemerintah sehingga pengambil keputusan dapat menentukan upaya dan langkah-langkah perbaikan. Dari studi literatur yang dilakukan diketahui bahwa terdapat berbagai metode, pendekatan dan kriteria pengukuran dalam mengevaluasi situs

web e-government. Panopoulou, Tambouris, & Tarabanis (2008) mengevaluasi website otoritas Yunani menggunakan 4 (empat) kategori, yaitu karakteristik umum, e-content, e-service, dan e-participation. Penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi 262 situs web pemerintah lokal dan regional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sitokdana (2015), evaluasi website menggunakan kriteria transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-government. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan bantuan *software* aplikasi sebagai instrumen pengukuran, seperti yang dilakukan oleh Masyhur (2014). Penggunaan *software* lebih efisien karena dapat melakukan evaluasi website dengan lebih cepat, terotomatisasi, dan menilai lebih objektif dibandingkan dengan manusia (Bauer & Scharl, 2000). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada kriteria evaluasi yang digunakan. Pada penelitian ini evaluasi website e-government menggunakan pendekatan kualitas informasi sebagai alat analisis situs web Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1.
Tinjauan penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu	Metode	Hasil Penelitian
Evaluation instruments for e-government websites (Henriksson, Yi, Frost, & Middleton, 2006)	Pendekatan kuantitatif, menggunakan kuesioner untuk mendata sejumlah organisasi pemerintah di Australia	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kriteria pengukuran website insntasi e-government. Kriteria pengukuran yang digunakan yaitu <i>Security/Privacy, Usability, Content, Services, Citizen Participation</i> , dan <i>Features</i> .
A framework for evaluating web sites of public authorities(Panopoulou et al., 2008)	Studi kasus pada website otoritas Yunani di tingkat lokal dan regional.	Penelitian ini bertujuan untuk menguji kerangka evaluasi yang diajukan, dan mengevaluasi website pemerintah otoritas Yunani. Kerangka evaluasi terdiri atas empat kategori pengukuran: Karakteristik umum, <i>E-content, E-services</i> , dan <i>E-participation</i> .
Evaluation of government e-tax websites: an information quality and system quality approach (Saha, Nath, & Salehi-Sangari, 2012)	Kuantitatif, Studi kasus pada website e-tax.	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi website dan menguji karakteristik variabel kualitas sistem dan kualitas informasi pada website e-tax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan, kebaharuan, kecukupan substansi merupakan kriteria utama yang menjelaskan variabel kualitas informasi.
Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia (Masyhur, 2014)	Metode survei menggunakan teknik observasi pada sejumlah website Pemerintah Provinsi.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis website pemerintah pada aspek kinerja <i>page speed</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata <i>page speed grade</i> sebesar 59% di <i>grade E</i> (sangat rendah).
Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura(Sitokdana, 2015)	Kualitatif deskriptif. Studi terhadap 5 (lima) website Pemerintah Daerah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas website menggunakan indikator a.l: transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-gov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dan kualitas website yang terbaik adalah website Pemkot Surabaya. Hal ini selaras dengan hasil survei Pemingkatan E-gov Indonesia (PEGI) bahwa kondisi e-government di Pulau Jawa lebih baik dari daerah lainnya di Indonesia.

B. Konsep Teoritik

1. E - Government

Definisi dari e-government telah banyak diutarakan oleh berbagai sumber. Beberapa ahli mendefinisikan berbeda namun merujuk kepada makna yang sama, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengelola pemerintahan dan menyediakan layanan publik. Pemanfaatan TIK dalam konteks ini mencakup penggunaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan komputer untuk memfasilitasi komunikasi dan proses bisnis organisasi. Melalui e-government, penyediaan informasi dan pelayanan pemerintah dapat digelar secara daring (*online*) melalui jaringan internet dan media digital lainnya. Karakteristik jaringan internet dan media digital memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan e-government kapanpun dan dimanapun sepanjang waktu. E-government juga memungkinkan adanya interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan publik untuk saling berbagi informasi. Dalam tingkat yang lebih tinggi, layanan e-government mampu mengakomodir jenis pelayanan transaksional yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Secara umum penerapan e-government bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah serta untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas.

Untuk mengimplementasikan e-government, Gartner Group mengusulkan empat tahap model kematangan e-government yaitu presensi, interaksi, transaksi, dan transformasi (Baum & Maio, 2000). Deskripsi masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

1. *Presence*, pemerintah menggunakan TIK untuk menyediakan informasi dasar. Tahap ini ditandai dengan pemanfaatan website lembaga pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi keperintahan, misalnya program-program pemerintah, informasi persyaratan perizinan, dan sebagainya.
2. Interaktif, yaitu tahap dimana e-government mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tahap ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, informasi, maupun tanggapan secara *online*.
3. Transaktif, yaitu tahap dimana e-government memungkinkan pelayanan publik dan layanan transaksional (pembayaran) secara *online*.
4. Transformatif, e-government memungkinkan adanya hubungan timbal balik yang memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak, memberikan pelayanan yang lebih *citizen-centric*, pemerintahan yang responsif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsep e-government memungkinkan terbentuknya hubungan (relasi) antara entitas yang terlibat, yaitu

1. Government to Citizen (G2C). Relasi ini bertujuan membangun berbagai portofolio teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan interaksi dengan masyarakat. Aplikasi e-government G2C berupaya membangun kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan dan pelayanan sehari-hari.
2. Government to Business (G2B). Lingkungan bisnis dalam suatu pemerintahan bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam hal ini aplikasi e-government G2B bertujuan untuk membuka akses informasi dan pelayanan kepada entitas-entitas bisnis sehingga interaksi antara bisnis dan pemerintah berlangsung lebih lancar dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya.
3. Government to Government (G2G). Relasi G2G merupakan bertujuan membangun hubungan antar lembaga pemerintah dalam berbasis teknologi informasi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi. Bentuk penerapan G2G antara lain basis data terpadu yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah secara bersama-sama.
4. Government to Employee (G2E). Hubungan Government to Employee (G2E) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang bekerja di berbagai institusi. Bentuk dari hubungan G2E dapat berupa aplikasi kepegawaian,

sistem peningkatan kompetensi, ataupun sistem pengelolaan gaji dan kesejahteraan pegawai.

Dalam hal penyediaan informasi secara *online* melalui e-government, instansi pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang berkualitas sesuai dengan kriteria kualitas informasi dalam sebuah media informasi. Penyediaan informasi yang berkualitas merupakan hal yang penting sebab hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal ini pula yang menjadikan DeLone & McLean (1992) berpendapat bahwa kualitas informasi merupakan salah satu faktor keberhasilan sistem informasi, termasuk dalam lingkup e-government

2. Kualitas Informasi

Menurut Jogiyanto (1990), informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Davis yang dikutip oleh Kadir (2003) menyebutkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Dari definisi di atas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa informasi merupakan data yang memiliki nilai tersendiri dan manfaat tertentu bagi penerimanya, sebab sebuah data mungkin saja bernilai dan bermanfaat untuk seseorang namun tidak bermanfaat bagi yang lainnya.

Manfaat informasi dapat diperoleh apabila informasi tersebut berkualitas. Kualitas informasi bermakna suatu tingkatan dimana informasi tersebut memberikan nilai oleh penggunaanya (O'Brien, 2005). Kualitas informasi secara umum merupakan konsep multi-dimensional yang terdiri dari berbagai atribut dan karakteristik. Untuk mengukur kualitas dan nilai suatu informasi, cukup banyak indikator penilaian yang digunakan oleh para ahli, demikian pula terdapat beberapa karakteristik informasi yang menentukan nilai informasi itu sendiri (Sutabri, 2005). Wang & Strong (1996) berpendapat bahwa kualitas informasi diukur melalui sejumlah dimensi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Intrinsik, Kontekstual, Representasional, dan Aksesibilitas. Selengkapnya seperti pada tabel 2.

Tabel 2.
Dimensi Kualitas Informasi menurut Wang & Strong (1996)

Dimensi Kualitas Informasi	Definisi
Intrinsik	
Akurasi	Data benar, tepat, bebas dari kesalahan
Objektivitas	Objektif, tidak berat sebelah
Kepercayaan	Informasi dapat dipercaya
Reputasi	Sumber atau data memiliki reputasi
Kontekstual	
Relevansi	Informasi menarik, dapat dimanfaatkan
Nilai tambah	Informasi memberikan manfaat lebih
Kebaharuan	Informasi terbaru,
Kelengkapan	Lingkup informasi, kedalaman data
Jumlah informasi	Kuantitas informasi
Representasional	
Interpretasi	Dapat diinterpretasi, bahasa jelas
Mudah dipahami	Informasi jelas, mudah dimengerti
Ringkas	Data tersaji dengan baik, singkat-padat
Konsisten	Format penyajian data konsisten
Aksesibilitas	
Kemudahan akses	Data selalu tersedia, dapat diakses.
Keamanan	Data aman dari kebocoran

Knight & Burn(2005) mengkompilasi sejumlah dimensi kualitas informasi yang berasal dari berbagai literatur seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3.
Dimensi Kualitas Informasi menurut Knight & Burn (2005)

Dimensi Kualitas Informasi	Definisi
Akurasi	Informasi bebas dari kesalahan
Konsistensi	Tidak bertentangan dengan informasi sebelumnya
Keamanan	Informasi tertentu dibatasi dengan tepat
Kebaharuan	Informasi diperbaharui setiap waktu/sesuai kebutuhan
Kelengkapan	Tidak ada bagian informasi yang hilang
Ringkas	Informasi singkat padat dan tepat
Kehandalan	Informasi dapat diandalkan
Keterjangkauan	Informasi mudah untuk didapatkan
Ketersediaan	Informasi dapat diakses setiap saat
Objektivitas	Informasi tidak bias dan tidak berat sebelah
Relevansi	Bermanfaat dan dapat digunakan untuk saat tertentu
Kemudahan penggunaan	Informasi jelas dan mudah digunakan
Jumlah data	Jumlah informasi yang tersedia untuk diakses
Kepercayaan	Informasi dapat dipercaya dan kredibel
Navigasi	Informasi mudah ditemukan dan dihubungkan ke informasi lain
Reputasi	Informasi menjadi rujukan terpercaya
Manfaat	Informasi membantu kelancaran tugas-tugas
Efisiensi	Informasi memudahkan tugas-tugas
Nilai tambah	Informasi memberikan manfaat lebih

Sumber: Knight & Burn(2005)

Tingkat kualitas informasi adalah hal yang sulit diukur. Kualitas sebuah informasi tidak bisa dinilai secara independen oleh satu orang untuk orang lain. Rieh (2002) berpendapat bahwa pengguna informasi hanya bisa menilai kualitas informasi untuk dirinya sendiri, sehinggahal inimenimbulkan penilaian subjektif sehingga suatu informasi dapat bernilai untuk seseorang namun tidak bagi orang lain.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Arikunto (2002) menyebutkan bahwa studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu fenomena atau gejala-gejala tertentu. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam proses penyediaan informasi dalam sebuah website pemerintah, maka metode studi kasus dianggap lebih tepat untuk dilakukan.

Pengumpulan data dilaksanakan pada tahun 2014, dan mengambil tempat di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena Bengkalis merupakan salah satu daerah prioritas pengembangan wilayah perbatasan oleh BAPPENAS. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap: *Pertama*, dengan melakukan observasi pada 4 (empat) website yang dimiliki Pemkab Bengkalis dan SKPD-nya. *Kedua*, dengan melakukan wawancara mendalam kepada masing-masing pengelola website. Keempat website tersebut adalah website utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan tiga website SKPD yang ditentukan secara *purposive* yang dianggap mewakili Sekretariat, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalisseperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Daftar website sampel penelitian dan subjek penelitian

No.	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Website utama Pemkab Bengkalis Kasubbag Telematika, Sandi, dan Telekomunikasi, Bagian PDE	Observasi website dan wawancara mendalam

2.	Website Bagian Humas Kasubbag Peliputan & Dokumentasi	Observasi website dan wawancara mendalam
3.	Website Dinas Perhubungan & Kominfo Pengelola: Kabid Perhubungan Udara & Kominfo	Observasi website dan wawancara mendalam
4.	Website Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabid Sistem Informasi	Observasi website dan wawancara mendalam

Kerangka analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitas informasi. Shankar & Watts (2003) berpendapat bahwa penilaian tingkat kualitas informasi bersifat kontekstual. Hal ini berarti menilai kualitas suatu informasi perlu mempertimbangkan konteks dan tujuan penggunaan informasi itu sendiri, dengan kata lain dimensi kualitas informasi akan berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Untuk studi ini, peneliti menentukan 5 (lima) dimensi yang sesuai untuk menganalisis kualitas informasi dalam konteks website e-government. Dimensi tersebut yaitu akurasi, kelengkapan, kebaharuan, relevansi, dan ketersediaan.

Setelah data diperoleh, data kemudian dianalisis menggunakan model analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008), yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu dengan memilah dan memilih hal-hal pokok dan relevan dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk mempertajam, menggolongkan dan membuang data yang tidak diperlukan.
2. Penyajian data, yaitu dengan tujuan untuk mempermudah dalam melihat gambaran data secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan.
3. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan. Proses verifikasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian. Dari mulai awal pengumpulan data, peneliti terus menerus menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, persamaan, dan dugaan-dugaan, serta dituangkan dalam kesimpulan sementara. Sedangkan penarikan kesimpulan akhir dilakukan dengan merumuskan sebuah jawaban dari data yang telah direduksi dan disajikan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

D. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Website Kabupaten Bengkulu

Website Pemerintah Kabupaten Bengkulu memiliki *domainbengkalis.kab.go.id* yang berada di bawah pengelolaan Bagian PDE (Pengolahan Data Elektronik) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu. Website ini merupakan induk dari seluruh website yang dimiliki oleh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkulu, dimana PDE memberikan *subdomain* bagi SKPD ingin mengelola website sendiri. Menurut Kepala Subbagian Telematika, Sandi dan Telekomunikasi, website Pemerintah Kabupaten Bengkulu sudah ada sejak tahun 2002, dan telah mengalami dua kali perubahan dimana perubahan terakhir dilaksanakan pada tahun 2013. Perubahan dilakukan dari berbagai aspek termasuk desain website dan konten untuk meningkatkan kualitas website dan informasi yang ada di dalamnya.

Konten yang ada pada website utama Kabupaten Bengkulu bersifat statis dan umum, seperti struktur pemerintahan, satuan kerja, perizinan, objek wisata, data-data hasil sensus, dan sebagainya. Informasi yang ada di dalamnya berisi kompilasi data dari berbagai SKPD serta informasi statis yang biasanya diperbaharui per semester atau per tahun. Halaman depan website memiliki beberapa menu yaitu Informasi, Agenda, Berita, Download, Galeri foto, Kontak, SIM, dan Peluang investasi. Selain mengakses melalui menu, beberapa tautan (*link*) juga tersedia langsung pada halaman *website* untuk mengunduh berbagai artikel, *polling* mengenai kualitas website, *headline* beberapa berita kewilayahan, serta tautan menuju ke sejumlah website Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara visual, website ditunjukkan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Halaman website Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Website kedua yang menjadi sampel penelitian adalah website Website Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dikelola oleh Bagian Humas yang berada di bawah Sekretariat Daerah Pemkab Bengkalis. Website ini dapat diakses melalui alamat humas.bengkaliskab.go.id. Berita-berita mengenai kegiatan resmi Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah adalah fokus dari informasi pada website Humas. Berita-berita tersebut ditulis dan dikirim langsung oleh staf Bagian Humas Pemkab Bengkalis yang secara khusus ditugaskan sebagai peliput berita pada saat kegiatan berlangsung. Kepala Seksi Peliputan Bagian Humas dalam wawancara menjelaskan, selain ditampilkan di website Humas, berita-berita tersebut juga dimuat pada beberapa surat kabar harian lokal di Kabupaten Bengkalis. Dengan begitu, masyarakat luas dapat mengetahui kegiatan para pemimpin daerahnya serta *event-event* yang ada di daerahnya. Tampilan halaman depan website Humas ditunjukkan seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Halaman website Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Website ketiga yang menjadi sampel adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis yang dapat diakses pada alamat dishubkominfo.bengkaliskab.go.id. Website ini dikelola secara mandiri oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis. Secara umum lingkup tugas Dishubkominfo terbagi pada dua bidang yaitu transportasi dan telekomunikasi.

Berdasarkan rumusan visi dan misinya, Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis memiliki tugas dan fungsi menjamin keselamatan dan kelancaran transportasi darat, laut, dan udara dengan mewujudkan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika yang tepat guna dan tepat sasaran agar dapat meningkatkan pembangunan dan pendapatan daerah demi mewujudkan masyarakat sejahtera. Menu yang bisa diakses pada website ini antara lain: Profil, Produk Hukum, Perizinan, IP Camera, Galeri Foto, Hubungi Kami, dan Transportasi. Tampilan halaman depan website Dishubkominfo ditunjukkan seperti pada gambar 3.

**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BENGKALIS**
 Jl. Pramuka Bengkalis Telp : (0766) - 21865 Fax : (0766) - 21865

Halaman Depan Profil Produk Hukum >> Perizinan IP Camera Galeri foto Hubungi Kami Transportasi

Selamat Datang
 Dinas Perhubungan
 Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkalis

Keselamatan dan kelancaran Transportasi, Menunjang Pembangunan dan Peningkatan Pendapatan Daerah

- Izin Frekuensi Radio dan TV
- Izin Perangkat dan Frekuensi Radio Konsesi
- Izin IORG
- Izin Membangun Menara/Tower
- Izin Warung/ Toko Seluler
- Izin Wartel Dan Warnet
- Izin Jasa Titiplan
- Izin Usaha Pembuatan Kapal
- Izin SIUPPER
- Izin Trayek**
- Izin Spanduk
- Izin Usaha Angkutan/KK
- Izin Pengoperasian Menarat

IZIN TRAYEK (ANGKUTAN UMUM)

Persyaratan	Waktu (HK)	Biaya	Keterangan
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).	1 Hari	Mobil penumpang umum sampai 8 tempat duduk=Rp.10.000,-	Masa Berlaku : 1 (satu) tahun

Gambar 3. Halaman website Dishubkominfo Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Website keempat yang menjadi sampel penelitian adalah website Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang dapat diakses pada alamat bpmp2t.bengkaliskab.go.id. BPMP2T Kabupaten Bengkalis adalah satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi mempromosikan potensi Kabupaten Bengkalis dan memberikan informasi investasi bagi khalayak. Disamping itu BPMP2T juga melaksanakan konsep perizinan satu pintu untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai perizinan. Menu yang bisa diakses pada website BPMP2T antara lain Profil, Peluang Investasi, Layanan Perizinan, Produk Hukum, Berita, Galeri Foto, Agenda, dan Kontak. Tampilan halaman depan website seperti ditunjukkan pada gambar 4.

Home Profil Peluang Investasi Layanan Perizinan Produk Hukum Berita Galeri Foto Agenda Hubungi

bpmp2t.bengkaliskab.go.id

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BENGKALIS**

30 Oktober 2014, 20:07:46

Pencarian... Go

KATA-KATA MUTIARA
 Kehati-hatian dalam menilai pendapat orang lain adalah ciri kematangan jiwa. (Rohmattullah)

Senin Malam, Bengkalis Expo Resmi Dibuka
 Jumat, 17 Oktober 2014 - 16:18:42

Jumat, 17 Oktober 2014 - 16:15:30

Gambar 4. Halaman website BPMP2T Pemerintah Kabupaten Bengkalis

2. Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis

Berikut ini akan diuraikan kualitas informasi website Kabupaten Bengkalis berdasarkan dimensi kualitas informasi.

Dimensi Akurasi

Dimensi akurasi informasi menunjukkan sejauh mana informasi yang disediakan adalah informasi yang benar, penyajian fakta yang jujur, bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi yang akurat adalah hal yang sangat penting dalam penyajian informasi, sebab kesalahan dalam memberikan data dan fakta dapat membuat hilangnya kepercayaan terhadap sumber informasi, terlebih jika sumber informasi tersebut adalah organisasi pemerintah.

Dari pengamatan yang dilakukan, website Pemkab Bengkalis menunjukkan bahwa informasi yang disediakan dapat dijamin kebenarannya. Pencantuman foto-foto pada informasi berita kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan tersebut memang berlangsung. Demikian pula berita yang diperoleh dari surat kabar selalu mencantumkan sumber berita untuk memastikan bahwa berita tersebut bukan berita bohong.

Demikian juga dokumen-dokumen yang dapat diunduh umumnya berasal dari dokumen resmi yang diterbitkan secara sah oleh instansi pemerintah, seperti Ringkasan DPA, APBD dan RKA yang memang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ataupun dokumen Bengkalis Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis.

Dimensi Kelengkapan

Kelengkapan informasi diukur dari seberapa banyak informasi yang disampaikan dan tidak ada informasi yang hilang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa informasi yang tersedia di website Pemkab Bengkalis dan SKPD-nya sudah cukup lengkap. Misalnya, terdapat dokumen-dokumen yang biasanya memerlukan proses birokrasi yang cukup rumit untuk diperoleh, namun di website Pemkab Bengkalis dokumen-dokumen tersebut bebas untuk diunduh, seperti dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini menunjukkan penggunaan website di Pemkab Bengkalis telah meningkatkan transparansi proses pemerintahan dengan sangat baik.

Walaupun begitu masih terdapat sebagian kecil informasi yang belum lengkap pada masing-masing website. Seperti pada website Dishubkominfo, menu IP Camera yang seharusnya menampilkan video streaming kondisi lalu lintas di beberapa titik masih belum bisa diakses. Pada website BPMP2T terdapat link Berita International namun hanya menampilkan halaman kosong.

Demikian pula pada website resmi Pemkab Bengkalis, masih terdapat kesalahan navigasi pada submenu SIMPETA yang terletak pada menu SIM dimana link tersebut membawa pengguna pada halaman Download. Selain kesalahan pada aspek navigasi tautan, informasi yang dirasa kurang lengkap juga ditemukan pada website Humas dimana tidak ditemukan informasi mengenai organisasi seperti visi dan misi, uraian tugas dan fungsi, serta struktur organisasi.

Dimensi Kebaharuan

Dimensi kebaruan diartikan sejauh mana informasi diperbaharui setiap waktu atau setiap kali ada perubahan pada informasi itu sendiri. Website Pemkab Bengkalis dan SKPD-nya memiliki jenis informasi yang diperbaharui setiap waktu seperti informasi berita kegiatan, dan informasi statis yang diperbaharui secara periodik seperti profil daerah, profil organisasi, dokumen produk hukum, informasi perizinan, dan sebagainya.

Dalam hal ini, website Pemkab Bengkalis sudah menunjukkan bahwa informasi yang tersedia adalah informasi-informasi yang terbaru. Hal ini dapat dilihat dari penanggalan pada berita-berita ataupun informasi persyaratan perizinan yang dimuat pada website tersebut. Demikian pula halnya dokumen-dokumen unduhan yang tersedia seperti Bengkalis Dalam Angka, RKA, DPA, ataupun APBD merupakan data terbaru berdasarkan waktu terbitannya.

Dimensi Relevansi

Dimensi relevansi diartikan sejauh mana informasi yang tersedia pada website Pemkab Bengkalis relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pengamatan yang dilakukan, terdapat beberapa informasi yang dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya informasi mengenai persyaratan perizinan yang tercantum dalam website menjadikan pengguna layanan dapat mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan sejak awal. Disamping itu juga adanya informasi beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk meringankan biaya sekolah. Hal ini senada dengan penjelasan kepala Subbagian Telematika, Sandi dan Telekomunikasi:

“Menurut kami informasi di website bermanfaat sekali. Misalnya untuk mahasiswa bias mengetahui informasi beasiswa, kemudian jika mahasiswa ingin membuat makalah, di website kita itu ada namanya Bengkalis Dalam Angka”

Makna “bermanfaat” atau “memenuhi kebutuhan” dari suatu informasi sebenarnya bersifat relatif tergantung dari siapa pembacanya. Sebab jika dilihat dari jenis informasinya, tentunya suatu informasi hanya relevan untuk kalangan masyarakat tertentu pula. Misalnya, informasi tentang kegiatan pimpinan daerah akan bermanfaat bagi kalangan media atau kalangan tertentu yang memang mencari data mengenai kegiatan di Pemkab Bengkalis, namun belum tentu berguna bagi masyarakat umum yang memiliki mata pencaharian petani atau pedagang. Demikian pula sebaliknya, informasi mengenai harga-harga komoditas pertanian atau bahan pokok tentunya sangat berguna bagi kalangan petani dan pedagang, namun belum tentu bermanfaat bagi kalangan media atau pelajar. Meskipun demikian, segala informasi yang tersedia di website tentunya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, jika pun tidak bermanfaat secara langsung, paling tidak dapat menambah wawasan pembacanya.

Dimensi Ketersediaan

Dimensi ketersediaan informasi diartikan sejauhmana informasi tersebut dapat diakses kapanpun diperlukan. Website adalah media internet yang seyogyanya dapat diakses setiap saat, walaupun begitu akses ke website mungkin saja terkendala akibat berbagai hal seperti kondisi jaringan, kondisi server, kepadatan lalu lintas jaringan, dan sebagainya. Sepanjang pengamatan yang dilakukan, penulis beberapa kali mendapati error saat mengakses website Pemkab Bengkalis, meskipun hal tersebut tidak berlangsung lama.

Rangkuman hasil temuan yang diperoleh melalui pengamatan website dan wawancara terhadap informan ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5.
 Tabulasi sampel penelitian berdasarkan dimensi kualitas informasi

Dimensi	PDE / Pemkab Bengkalis	Humas	BPMP2T	Dishubkominfo
Akurasi	Setiap dokumen unduhan berasal dari instansi yang resmi. Berita-berita yang bersumber dari surat kabar selalu mencantumkan sumber beritanya.	Berita-berita selalu didukung dengan foto kegiatan.	Informasi mengenai peluang investasi dan perizinan tidak memiliki petunjuk untuk menilai tingkat kebenarannya. Pencantuman dokumen Peraturan Daerah ataupun Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan dapat mendukung akurasi informasi yang	Informasi mengenai persyaratan perizinan tidak memiliki petunjuk tingkat kebenarannya, apakah masih berlaku atau tidak. Sedangkan informasi jadwal penyeberangan ro-ro dapat dinilai berasal dari dokumen resmi dengan nama

			disampaikan.	pejabat dan instansi yang tercantum.
Kelengkapan	Banyak informasi tersedia, seperti informasi beasiswa, statistik daerah, informasi layanan perizinan, ataupun dokumen yang berkaitan dengan anggaran. Namun terdapat link yang bisa diakses pada Menu SIM, submenu SIMPETA.	Informasi yang tersedia sebatas berita-berita kegiatan pimpinan daerah. Belum ada informasi mengenai struktur organisasi Bagian Humas, serta uraian tugas dan fungsi.	Informasi yang tersedia meliputi potensi dan peluang investasi, serta jenis perizinan dan segala persyaratannya. Masih terdapat informasi yang tidak lengkap pada menu Berita submenu International.	Informasi yang tersedia meliputi jenis perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika beserta rincian persyaratan yang dibutuhkan. Masih terdapat link yang tidak bisa diakses yaitu pada menu IP Camera.
Kebaharuan	Dokumen-dokumen unduhan adalah terbitan terbaru, berdasarkan waktu terbit pada setiap dokumen.	Informasi diperbaharui setiap kali ada kegiatan pimpinan daerah, ataupun diambil dari surat kabar harian.	Informasi peluang investasi ter-update bulan Juni 2014 Demikian pula Informasi persyaratan perizinan ter-update pada Mei 2014	Tidak ada petunjuk waktu kapan informasi yang tercantum dibuat, sehingga tidak diketahui apakah informasi tersebut masih berlaku atau tidak.
Relevansi	Informasi yang beragam mulai dari info beasiswa, statistik daerah, <i>event</i> kedaerahan, ataupun data anggaran dapat dimanfaatkan berbagai kalangan termasuk mahasiswa, peneliti, awak media, LSM, ataupun masyarakat umum.	Informasi kegiatan pimpinan daerah dapat bermanfaat bagi kalangan media, maupun masyarakat umum.	Informasi peluang investasi dapat dimanfaatkan oleh para investor dan pengusaha yang ingin menanamkan modalnya. Sedangkan informasi perizinan tentunya bermanfaat bagi masyarakat ataupun badan usaha.	Informasi sangat bermanfaat, diantaranya bagi masyarakat dapat mengetahui jadwal keberangkatan kapal roro. Sedangkan informasi persyaratan perizinan dapat dimanfaatkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang transportasi dan telekomunikasi.
Ketersediaan	Dimensi ketersediaan pada setiap website memiliki tingkat yang sama sebab diakses melalui jaringan internet sehingga informasi dapat dikatakan tersedia setiap saat. Meskipun begitu, faktor lain seperti kondisi jaringan penyedia layanan internet dapat mempengaruhi ketersediaan informasi.			

F. Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan e-government dengan menjelaskan kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kualitas informasi dalam website e-government memiliki peranan penting karena akan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh kanal resmi pemerintah akan dianggap valid oleh masyarakat, sehingga apabila informasi yang disampaikan tidak benar akan berakibat pada menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi terhadap konten website, penerapan e-government di Kabupaten Bengkalis dapat dikategorikan dalam tahap *presence* (informatif) menuju tahap interaktif. Seperti yang disampaikan oleh Baum & Maio (2000), tahap ini mengindikasikan bahwa website Bengkalis masih terbatas pada penyediaan informasi statis, dan belum memberikan ruang bagi publik untuk berinteraksi secara *online* dengan elemen pemerintah.

Kondisi ini memang tidak jauh berbeda dengan sebagian besar website pemerintah daerah yang pada umumnya masih berfungsi sebagai media informatif atau kehumasan, dan belum menjadi media interaktif (Sosiawan, 2015). Meskipun semua website kecuali bagian Humas telah memiliki tautan yang berfungsi untuk menghubungi instansi terkait melalui menu Kontak, namun fitur ini dinilai belum optimal untuk mengakomodir komunikasi yang interaktif.

Adapun dilihat dari perspektif kualitas informasi, dimensi akurasi, kebaruan, relevansi, dan ketersediaan pada keempat website memiliki penilaian yang cukup baik. Kekurangan yang ditemukan ada pada dimensi kelengkapan informasi, dimana pada website utama, Dishubkominfo, dan BPMP2T masih terdapat tautan yang menuju ke halaman kosong. Pada website Bagian Humas, belum terdapat menu-menu yang menjadi standar konten website lembaga pemerintah, seperti struktur organisasi, dan uraian tugas dan fungsi instansi. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa memang ada program yang masih belum dijalankan sehingga menu tersebut masih belum diaktifkan. Misalnya menu IP Camera pada website Dishubkominfo. Tautan ini semestinya berfungsi untuk menampilkan kondisi lalu lintas di beberapa titik di kota Bengkulu. Namun karena instalasi kamera belum dilaksanakan, akibatnya aplikasi *feeding* ke kamera belum diaktifkan. Demikian juga menu Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada website utama, yang dikarenakan sistem tersebut masih dalam proses pengembangan (*development*). Adanya perbedaan kualitas informasi dari keempat website ini dimungkinkan karena masing-masing website dikelola oleh organisasi yang berbeda, yang sudah tentu berbeda pula tingkat kematangan sumber daya pengelolaannya, dari mulai jumlah anggaran pengelolaan, infrastruktur e-government, maupun kualitas dan kuantitas SDM pengelolanya.

Secara garis besar, kualitas informasi dan antarmuka website Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang notabene adalah daerah perbatasan dapat dinilai cukup baik. Demikian pula tersedianya informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat lokal, seperti informasi beasiswa untuk putera/puteri asli daerah, informasi perizinan, peluang investasi, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan website yang baik, serta kemauan dan *political will* dari pimpinan daerah untuk memajukan e-government di Bengkulu. Disamping itu pula penerapan e-government juga didukung oleh anggaran yang mencukupi mengingat Kabupaten Bengkulu adalah daerah penghasil pendapatan asli daerah (PAD) terbesar kedua, dimana pemasukan utama daerah ini berasal dari eksplorasi ladang-ladang minyak bumi yang berada di Kecamatan Duri.

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Bengkulu sudah cukup baik. Kekurangan yang dapat mengurangi nilai kualitas informasi ada pada dimensi kelengkapan informasi, yaitu adanya beberapa tautan yang menuju ke halaman kosong. Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah meningkatkan upaya perbaikan agar dapat melengkapi semua menu dan link yang terdapat pada website dengan informasi yang relevan, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat.

Penelitian ini menjelaskan fenomena empirik terkait dengan kualitas informasi menggunakan 5 (lima) dimensi pengukuran. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan riset ini dapat memperluas area kajian dengan melakukan pengukuran menggunakan dimensi kualitas informasi yang lebih luas lagi.

Ucapan Terima Kasih : Penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu atas data dan informasi yang diperoleh, dan Bapak Hasyim Ali Imran sebagai editor Jurnal Studi dan Komunikasi dan Media (JSKM) atas masukan dan perbaikannya sehingga tulisan ini layak diterbitkan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BAPPENAS. (2015). *Laporan Akhir Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Perbatasan*.
- Bauer, C., & Scharl, A. (2000). Quantitive evaluation of Web site content and structure. *Internet Research, 10*(1), 31–44. <https://doi.org/10.1108/10662240010312138>
- Baum, C., & Maio, A. D. (2000). *Gartner's Four Phases of EGovernment Model*. Stamford: Gartner Group Inc.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: the quest for the dependent variable. *Information System Research, 3*(1), 60–95.
- Henriksson, A., Yi, Y., Frost, B., & Middleton, M. (2006). Evaluation instruments for e-government websites. *Electronic Government An International Journal, 4*(2), 204–226.
- Jogiyanto, H. M. (1990). *Analisis dan Disain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, A. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- KEMKOMINFO. (2016). *Buku Putih Komunikasi dan Informatika 2016*. Jakarta.
- Knight, S., & Burn, J. (2005). Developing a Framework for Assessing Information Quality on the World Wide Web Introduction – The Big Picture What Is Information Quality? *Informing Science Journal, 8*.
- Masyhur, F. (2014). Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Pekommas, 17*(1), 9–14.
- O'Brien, J. A. (2005). *Pengantar Sistem Informasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Panopoulou, E., Tambouris, E., & Tarabanis, K. (2008). A framework for evaluating web sites of public authorities. *Aslib Proceedings, 60*(5), 517–546. <https://doi.org/10.1108/00012530810908229>
- Rieh, S. Y. (2002). Judgment of information quality and cognitive authority in the Web. *Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53*(2), 145–161. <https://doi.org/10.1002/asi.10017>
- Saha, P., Nath, A. K., & Salehi-Sangari, E. (2012). Evaluation of government e-tax websites : an information quality and system quality approach. *Transforming Government: People, Process and Policy, 6*(3), 300–321. <https://doi.org/10.1108/17506161211251281>
- Shankar, G., & Watts, S. (2003). A relevant, believable approach for data quality assessment. In *Proceedings of 8th International Conference on Information Quality* (pp. 178–189).
- Sitokdana, M. N. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. *Jurnal Buana Informatika, 6*(4), 289–300.
- Sosiawan, E. A. (2015). Evaluasi Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen. In *Prosiding Seminar Nasional Informatika* (pp. 88–98).
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wang, R. W., & Strong, D. M. (1996). Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. *Journal of Management Information Systems, 12*, 5. <https://doi.org/10.2307/40398176>
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Kuwatono. (2017). Website Pemerintah Daerah sebagai Sarana Online Public Relations. *Jurnal ASPIKOM, 3*(2), 326–339.

**NETWORK SOCIETY, INTERNET,
DAN AKTIVITAS KOMUNIKASI MASYARAKAT**
(Survei Aktivitas Komunikasi Masyarakat melalui *social Network websites* di Kelurahan
Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)

NETWORK SOCIETY, INTERNET, AND PEOPLE COMMUNICATION ACTIVITY
(Survey of Community Communication Activities through *social Network websites* in Village
Tamalanrea Indah District Tamalanrea of Makassar City in South Sulawesi Province)

Muhammad Rustam

Peneliti pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar
Jalan Prof. Abdurahman Basalama II No.25 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia,
Telp.0411-4660370 Fax.0411-4660084, HP. 081342772451 E-mail : *romo_rustam@yahoo.co.id*
(Naskah diterima 2 Agustus 2017 by email; diperiksa dan diperbaiki menurut koreksi tim redaksi
30 Agustus 2017; disetujui terbit oleh PR 23 Oktober 2017)

ABSTRACT

Network Society is one of the many concepts initiated by experts to describe the phenomenon of community communication activity through use of information and communication technology (ICT) or also known as communication and informatics technology (ICT). This research wants to understand related phenomenon of individual communication activity of society in context Network Society. The phenomenon of activity in question is phenomenon of various activity habits, range of activity targets, level of frequency of activity, and linkage of individual characteristics of users of social network websites with various activities. This research uses positivistic paradigm and through survey method as its data collection technique. The study population were adult residents at 9 RW and 40 RT in Tamalanrea Indah Village, Tamalanrea District. Population population in the region referred to as many as 14,055 inhabitants. Sampling size of this study using accidental sampling, which is 150. Conclusions from this study indicate that (1) the age relationship of MDGs category with type of habit, statistically there is no significant relationship related to age of MDGs respondents with internet access. (2) The correlation between education level and type of habit, statistically related to the relationship between these two variables does not indicate any significant significance. In other words statistically the educational level of the individual tends not to determine the type of habit in social media access.

Keywords: *Network Society, Internet, Communication Activity.*

ABSTRAK

Network Society merupakan salah satu konsep yang banyak digagas para ahli untuk menggambarkan fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui penggunaan *information and communication technology (ICT)* atau dikenal juga dengan teknologi komunikasi dan informatika (TIK). Penelitian ini ingin memahami terkait fenomena aktivitas komunikasi individu masyarakat dalam konteks *Network Society*. Fenomena aktivitas yang dimaksud adalah fenomena ragam kebiasaan beraktivitas, ragam sasaran aktivitas, tingkat keseringan beraktivitas, dan keterkaitan karakteristik individu pengguna *social network websites* dengan ragam aktivitas. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dan melalui metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya. Populasi penelitian adalah para penduduk berusia dewasa di 9 RW dan 40 RT di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea. Populasi penduduk di wilayah dimaksud sebanyak 14.055 jiwa. *Sampling size* penelitian ini menggunakan *Aksidental Sampling*, yakni sebesar 150. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hubungan usia kategori MDGs dengan jenis kebiasaan, secara statistik tidak ada hubungan yang berarti terkait usia MDGs responden dengan akses internet. (2) Hubungan tingkat pendidikan dengan jenis kebiasaan, secara statistik terkait hubungan di antara kedua variabel ini tidak menunjukkan ada signifikansi yang berarti. Dengan kata lain secara statistik tingkat pendidikan individu cenderung tidak menentukan jenis kebiasaan dalam akses media sosial.

Kata Kunci : *Network Society, Internet, Aktivitas Komunikasi.*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Network Society merupakan salah satu konsep yang banyak digagas para ahli untuk menggambarkan fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui penggunaan *information and communication technology (ICT)* atau dikenal juga dengan teknologi

komunikasi dan informatika (TIK)¹. *Network Society* yang dikenal juga dengan masyarakat berjejaringan, fenomenanya secara gradual pertama kali dikenal melalui gagasan Mc Luhan melalui konsep *global village- electronic age*-nya. (dalam Griffin 2003.).

Bertahun-tahun setelah itu, sejalan dengan perkembangan *ICT* konsep ini lalu semakin berkembang dan beragam. Diantaranya ada yang membuat sebuah ide menjadi *the post-industrial society, post-modern society, knowledge society, Telematic Society, Information Revolution, informational capitalism, transnational network capitalism, knowledge industry the 'The Wired Society'*². (Castells, dalam <http://en.wikipedia.org>, diakses 23 Juli 17).

Aktivitas komunikasi individu sendiri dalam konteks *Network Society*, keberlangsungannya dapat terjadi karena fasilitasi dari kemampuan *ICT* tadi, yang dalam istilah December dikenal dengan *Computer mediated communication (CMC)* atau lebih lazim dikenal dengan konsep internet. Internet sendiri berarti : *An interconnected system of networks that connects computers around the world via the TCP/IP protocol.* (<http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/Internet>). Dengan fasilitasi kemampuan internet dimaksud, maka dalam konteks fenomena masyarakat dalam konsep *Network Society* tadi digambarkan, bahwa mereka jadi dapat menciptakan, mendistribusikan, menggunakan dan memanfaatkan informasi untuk kepentingan dalam bidang ekonomi, politik dan aktivitas kebudayaan.³

Salah satu dari sekian banyak bentuk aplikasi yang dapat memfasilitasi anggota masyarakat untuk beraktivitas komunikasi dalam berbagai bentuk kepentingan tadi yaitu melalui aplikasi jejaring sosial (*social network websites*). Konsep yang diperkenalkan profesor J.A. Barnes di tahun 1954 ini diartikan sebagai struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. (<http://www.ridwanforge.net/blog/jejaring-sosial-social-networking>).

Beberapa diantaranya yang banyak dijadikan anggota masyarakat untuk bergabung dengan komunitas online, mengacu pada data *Meta List* buatan Judith Meskill pada 14 Pebruari 2005, yaitu melalui situs MySpace dengan 261,422,883 pengguna terdaftar; Facebook 200,000,000 pengguna terdaftar; Habbo 117,000,000; Friendster 90,000,000; hi5 80,000,000; Flixster 63,000,000; Classmates.com 50,000,000; LinkedIn 42,000,000; Bebo 40,000,000; Adult FriendFinde 33,000,000; Last.fm 30,000,000; imeem 24,000,000; Mixi 20,936,509; LiveJournal 17,564,977; Geni.com 15,000,000 ; dan Multiply 10,000,000.

Banyak layanan jejaring sosial berbasis web yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti chat, messaging, email, video, chat suara, share file, blog, diskusi grup, dan lain-lain. Umumnya jejaring sosial memberikan layanan untuk membuat biodata dirinya. Pengguna dapat meng-upload foto dirinya dan dapat menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk dapat saling sharing didalamnya. (Nawawi et al. 2008). Dari pengertian tersebut, terutama dari cuplikan kalimat "...untuk dapat berinteraksi seperti *chat, dll*", ini menyiratkan bahwa fenomena tadi sebenarnya jauh sebelumnya sudah dikonseptualisasi oleh para teoritis ilmu komunikasi. Levy dan Windahl (1985) yang mempertajam konsep *uses*-nya Katz, Gurevitch dan Hass, mengaktualisasikan dengan konsep *activity*.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini ingin memahami lebih jauh terkait fenomena aktivitas komunikasi individu masyarakat dalam konteks *Network Society*

¹ Terhadap fenomena ini sendiri, oleh John December (1997), dikonseptualisirnya menjadi *Computer mediated communication*. *Computer mediated communication* sendiri dirumuskannya sebagai *a proces of human communication via computers, involving people situated on particular context, engaging in processes to shape media for a variety of purposes.*¹ (komunikasi bermedia komputer adalah sebuah proses komunikasi antar sesama manusia melalui komputer, melibatkan manusia (orang) yang disituasikan di dalam konteks *partikular* (khusus), digabungkan dalam proses untuk membentuk media bagi tujuan yang beragam.

² Manuel Castells, dalam, http://en.wikipedia.org/wiki/Information_society.

³ Diinterpretasikan dari definisi, "*a society in which the creation, distribution, diffusion, use, and manipulation of information is a significant economic, political, and cultural activity.*", dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Information_society.

sebelumnya. Fenomena *activity* akan difokuskan pada fenomena ragam kebiasaan beraktivitas, ragam sasaran aktivitas, tingkat keseringan beraktivitas, dan keterkaitan karakteristik individu pengguna *social network websites* dengan ragam *activity* dimaksud tadi. Dengan fokus dimaksud penelitian ini merumuskan masalahnya menjadi sbb. : Bagaimanakah fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui *social network websites* ?

2. Signifikansi

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada sebelumnya terkait dengan studi *social Network websites* dalam hubungan fenomena *network society*. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan awal dalam melihat gambaran atau potret masyarakat Indonesia dalam konteks *network society*.

II. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Literatur

Berdasarkan data *digital access* yang dikeluarkan *International Telecommunication Union* (ITU) tahun 2002, beberapa negara yang tergolong penggunaannya dalam kadar *high access* internet yaitu : Korea Selatan, Denmark, Irlandia dan Denmark. Sementara yang masuk dalam kategori *upper access* Irlandia, Siprus, Spanyol dan Estonia. Sedang Indonesia bersama sejumlah negara lainnya seperti Thailand, Rumania dan Turki masuk dalam kategori *medium access* dengan skor 0,34. (http://www.itu.int/newsarchive/press_releases/2003/30.html).

Data ITU tersebut hampir sama dengan data resmi *World Internet User Statistics* yang diperbarui 10 Maret 2007 mengenai jumlah pengguna internet di Indonesia. Dengan 18,000,000 pengguna dari populasi 224,481,720 jiwa, Indonesia diketahui menempati urutan ke-15 dunia dengan penetrasi internet sebesar 8 % (1,6 % dari total pengguna internet dunia).⁴ (Imran dan Hoesin, 2007), Dengan demikian, sesuai data tersebut kiranya dapat diartikan bahwa meskipun kemampuan medium internet dalam memfasilitasi aktivitas berkomunikasi itu sudah sangat *super*, akan tetapi dalam kenyataan semua pihak tampak belum memaksimalkan kemampuannya itu, termasuk tentunya di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan upaya menelaah fenomena penggunaan internet sendiri, selain dilakukan cenderung berdasarkan fenomena global oleh institusi seperti ITU, *World Internet User Statistics*, dan *the Pew Research Center*, berdasarkan fakta yang ada ternyata juga dilakukan sejumlah institusi lain berdasarkan fenomena yang lebih fokus. Hal yang demikian diantaranya dilakukan *the Household Internet Use Survey (HIUS)* di Kanada yang fokus pada sampel rumah tangga. Demikian juga seperti yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja di Washington DC USA, mereka memfokuskan penelitiannya khusus terhadap perubahan dalam kaitan penggunaan internet.⁵

Studi mengenai penggunaan internet juga tidak luput dari perhatian kalangan individu akademik. Diantaranya seperti yang dilakukan oleh Manuel Castells dan Maria Isabel Diaz de Isia di Kota Catalonia Spanyol. Dengan menggunakan metode survey, temuan utama mereka yaitu bahwa ada hubungan antara internet dengan kehidupan sosial di Catalonia, Spanyol dan di wilayah-wilayah Spanyol. Karenanya mereka menyarankan untuk dilakukan pengujian terhadap sejumlah hipotesis dari adanya hubungan-hubungan tadi.⁶ Namun, seperti dikatakan oleh Junho Choi *et al* dengan mengacu pada hasil tinjauan pustaka mereka, kebanyakan penelitian survey terhadap para pengguna internet dilakukan hanya sebatas penggambaran siapa para pengguna dan apa yang mereka lakukan pada medium internet. Upaya lebih jauh seperti penyebab para pengguna menggunakan medium internet, masih sangat sedikit perhatian yang diberikan para peneliti. Untuk mengisi kekurangan dimaksud, Choi *et al* sendiri akhirnya mencoba meneliti penggunaan internet dari sisi *why* dengan cara menyelami motif para pengguna internet dalam beraktivitas *online*.⁷

⁴ Hasyim Ali Imran dan Hanif Hoesin, (2007), "Literasi Komputer Masyarakat Pedesaan", dalam *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 11 (2), hm.170, Jakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah II Jakarta.

⁵ Biro Statistik Tenaga Kerja USA dalam News United States Departement of Labor; <http://www.bls.gov/cps/>

⁶ Manuel Castells dan Maria Isabel Diaz de Isia dalam : <http://www.uoc.edu/in3/wp/picwp1201/>

⁷ Choi *et al.*, *Motives of Internet uses : Crosscultural Perspective- The US, The Netherlands, and South Korea.*

Selanjutnya, dari riset Choi *et al* juga diketahui bahwa dalam mempelajari motif-motif penggunaan internet, dalam analisisnya menggunakan pendekatan *Uses and Gratification*. Pendekatan yang mengacu pada petunjuk teori *Uses and Gratification* tersebut, dalam riset Choi *et al* sendiri diadopsi karena dianggap masih tetap relevan hingga kini walaupun diaplikasikan pada media yang bukan tradisional, seperti internet. Sejumlah akademisi terdahulu yang nota bene sudah lebih akrab dengan pendekatan tersebut, juga mengatakan hal yang sama. Sebagaimana dikatakan Katz & Rice (2002); Kraut & Attewell (1977); Perse & Greenberg-Dunn (1998); dan Rice & Webster (2002), bahwa meskipun pendekatan ini sudah biasa dan umum digunakan selama lebih dari 30 tahun untuk penelitian media massa tradisional, namun pendekatan ini tetap relevan digunakan dalam penelitian media komunikasi baru⁸.

Dari tinjauan literatur sebelumnya, terlihat bahwa komentar Choi *et al* terkait penggunaan internet cenderung merefleksikan kekecewaannya terhadap para peneliti yang fokusnya masih cenderung pada sekitar penggambaran siapa para pengguna dan apa yang mereka lakukan pada medium internet. Dengan alasan itu pula makanya Choi *et al* jadi lebih tertarik pada soal motif pengguna dalam studinya.

Dalam kaitannya dengan ‘penggunaan internet’ terkait dengan studi ini, meski studi dimaksud cenderung masih termasuk yang ‘mengecewakan’ Choi *et al*, namun demikian dapat dikatakan cenderung masih memiliki perbedaan dengan studi-studi yang ‘mengecewakan Choi *et al*.

Pembeda studi ini dengan studi Choi *et al* dan yang lainnya tadi, yaitu bahwa studi ini terfokus pada fenomena aktivitas komunikasi yang difokuskan pada *social network websites* sebagai salah satu dari banyak bentuk layanan yang ada di internet. Selain itu fenomena *activity* focusnya hanya pada fenomena aktivitas ‘selama’ mengakses yang dilihat dari empat dimensi, yaitu : dimensi ragam kebiasaan, ragam sasaran, tingkat keseringan dan keterkaitan karakteristik individu pengguna *social network websites* dengan ragam *activity* dimaksud tadi. Dengan demikian riset ini menjadi berbeda dengan riset-riset yang telah ada sebelumnya.

2. Konsep-Konsep Teoritik

Ragam ciri yang terindikasi dalam fenomena penggunaan situs jejaring sosial sebagai bagian dari sejumlah fasilitas yang terdapat dalam medium internet tadi, pada hakikatnya itu sebenarnya menggambarkan bagaimana pola individu dalam menggunakan media (*mass media uses*) seperti dijelaskan Tan (1981 : 297) melalui model teorinya yang disebut *mass media uses and gratification*. Sebuah model teori yang sekaligus juga diketahui menjadi penanda bahwa khalayak yang sebelumnya dianggap pasif dalam versi model jarum hipodermis itu, ternyata aktif dalam penggunaan media. Sementara, aktivitas khalayak sendiri mengandung arti bahwa anggota khalayak itu mengarahkan dirinya sendiri pada proses komunikasi. Asumsi ini memandang bahwa penggunaan media didorong oleh kebutuhan dan tujuan yang didefinisikan sendiri oleh khalayak, dan partisipasi aktif dalam proses komunikasi dapat membantu, membatasi atau bahkan mempengaruhi gratifikasi dan efek yang berkaitan dengan terpaan media (Levy dan Windahl dalam Gayatri, 1997 : 3).

a. *Network society*

Konsep dimaksud pada dasarnya adalah sebuah konsep yang mengabstraksi fenomena komunikasi antarmanusia melalui media baru yang lazim dikenal dengan internet. Walau jauh sebelumnya konsep dimaksud belum diketahui oleh khalayak luas, namun fenomenanya secara futurologi telah digambarkan oleh Mc Luhan melalui konsep *global village-electronic age*-nya (dalam Griffin 2003). Fenomena konsep dimaksud sejalan dengan fenomena perkembangan *ICT*, maka menyebabkannya jadi berkembang dan bervariasi.

Network Society fenomenanya secara gradual pertama kali dikenal melalui gagasan Mc Luhan melalui konsep *global village- electronic age*-nya.(dalam Griffin 2003.). Perkembangan konsep dimaksud diantaranya ditandai melalui pemunculan konsep *information society* sebagaimana dikemukakan Webster (1995). Menurutnya pengertian

⁸ Sebagaimana dikutip oleh Choi *et al.*, dalam riset mereka “*Motives of Internet uses : Crosscultural Perspective- The US, The Netherlands, and South Korea*”.

konsep dimaksud terkait dengan lima konsep, yakni : menurut konsep *technological, economic, occupational, spatial, dan cultural*.

Selain konsep *information society*, ada juga yang menggagasnya menjadi konsep '*The Wired Society*', *the post industrial society*. James Martin (1978) '*The Wired Society*' diartikannya sebagai suatu masyarakat yang terkoneksi dengan massa dan jaringan telekomunikasi. (http://en.wikipedia.org/wiki/Network_society).

Sementara konsep *network societies* sendiri diantaranya diartikan Barney (2004: 25sq). Dalam pengertiannya berarti "*the reproduction and institutionalization throughout (and between) those societies of networks as the basic form of human organization and relationship across a wide range of social, political and economic configurations and associations*". Dengan konseptualisasi serupa sama Barney, Jan Van Dijk (2006) mendefinisikan *network society as a "social formation with an infrastructure of social and media networks enabling its prime mode of organization at all levels (individual, group/organizational and societal* (http://en.wikipedia.org/wiki/Information_society).

b. Internet⁹

Medium internet yang secara konseptual dikenal pada tahun 1970, yang nota bene secara fisik juga dikembangkan dari *software* bernama ARPANET yang dikembangkan pihak militer Amerika Serikat¹⁰, dalam kenyataan juga memiliki banyak definisi. Dalam kamus Merriam-Webster *Online Dictionary* bahwa komputer merupakan *electronic communications network that connects computer networks and organizational computer facilities around the world*. (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet>). Menurut *Your Dictionary*, secara leksikal disebutkan bahwa *internet refers to a collection of networks connected by routers*. (<http://www.yourdictionary.com/internet>). Definisi lainnya yaitu *the global network of public computers running Internet Protocol*.

Dengan definisi leksikal tersebut, maka substansi internet adalah menyangkut komunikasi antarmanusia di seluruh dunia melalui jaringan komunikasi elektronik yang dimungkinkan karena adanya koneksitas jaringan komputer. Dengan kata lain, internet berarti jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berketersambungan. Karenanya, jika sebuah komputer sudah tersambung dengan internet, maka komputer tersebut sudah terkoneksi dengan komputer-komputer lainnya melalui jaringan kabel telepon, kabel dan satelit. *Web, e-mail, chat, dan newsgroups* merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan pada internet¹¹.

Salah satu konsep mutakhir yang ditawarkan untuk melihat internet sebagai media komunikasi adalah konsep "*computer mediated communications*" (CMC). Konsep CMC dari Jhon December (www.december.com) yang dirumuskannya menjadi *a proces of human communication via computers, involving people situated on particular context, engaging in processes to shape media for a variety of purposes*,¹² ini sebenarnya masih bersifat "mentah" dan cenderung menerjemahkan konsep CMC dari alur logika teknis jaringan internet. Apalagi konsep-konsep yang ditawarkan dalam CMC tidak melihat komunikasi melalui internet adalah bersifat virtual (maya). Konsep CMC juga tidak memberi penjelasan tentang level dan konteks komunikasi, unsur-unsur komunikasi yang terlibat serta model yang berlaku dalam komunikasi menggunakan internet.

Internet sebagai *Supermedium for communicating*, berdasarkan indikasi yang ada maka dari segi pemanfaatannya menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, misalnya seperti yang dilaporkan oleh *the Household Internet Use Survey (HIUS)* mengenai rumah tangga yang menggunakan internet di Kanada. Disebutkan, dari tahun 1999 ke tahun 2000 meningkat 1.4 juta rumah tangga (+42%). Dari tahun 2000 ke tahun 2001, meski tidak setajam sebelumnya akan tetapi tetap terjadi peningkatan, yakni meningkat sebanyak 1,1 (+23%) juta rumah tangga yang menggunakan internet secara teratur di rumah. (*The Daily*, dalam : <http://www.statcan.ca/Daily/English/020725/d020725a.htm>).

⁹ Dicuipik dari Hasyim Ali Imran,. 2010. "POLA AKTIVITAS KOMUNIKASI PENGGUNA INTERNET MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol 14 (2). Jakarta. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Jakarta.

¹⁰ <http://www.exampleessays.com/viewpaper/32010.html>

¹¹ (*TekMom's Tech Buzzwords*, dalam : <http://www.tekmom.com/buzzwords/zdinternet.html>).

¹² (<http://fantastic4.blogdetik.com/2009/03/06/friendster-vs-facebook/>)

Namun demikian, fenomenanya tidak sama antar sesama negara di dunia. Penggunaan yang relatif baik umumnya dialami oleh negara-negara yang sudah relatif maju, seperti negara Kanada yang disebutkan barusan. Sementara tingkat penggunaan yang relatif rendah biasanya terjadi di negara-negara berkembang dan terkebelakang.

c. **Aktivitas Komunikasi**

Aktivitas khalayak mengandung arti bahwa anggota khalayak itu mengarahkan dirinya sendiri pada proses komunikasi (dalam , Gayatri , 1997 : 4). Aktivitas khalayak selanjutnya dikatakan Levy dan Windahl (1985) dibagi ke dalam dua dimensi. Pertama, dimensi orientasi khalayak, terdiri dari tiga level, yakni selektifitas, keterlibatan dan pemanfaatan. Sedang dimensi kedua urutan komunikasi, membedakan aktivitas berdasarkan saat terjadinya : sebelum, selama, dan sesudah terpaan media (dalam, Gayatri, 1997:4). Jadi, dalam mengamati aktivitas khalayak dalam hubungannya dengan media, secara garis besar dapat dilakukan melalui dua cara, pertama menurut dimensi orientasi dan kedua menurut dimensi urutan komunikasi.

Selanjutnya, Katz, Gurevitch dan Hass dalam mendefinisikan ‘penggunaan’ media dalam kaitannya dengan konsep *aktivitas khalayak* Levy dan Windahl tadi, mencakup: (1) isi media : berita, opera sabun, drama tv, dll. (2) jenis media : misalnya cetak atau elektronik. (3) terpaan media dan situasinya : di rumah atau di luar rumah, sendiri atau dengan orang lain (Tan, 1981 : 301). Dengan demikian diketahui bahwa menelaah fenomena aktivitas komunikasi melalui *internet/social network websites* dapat dilakukan melalui tiga bagian besar, yakni melalui unsur isi media/*social network websites*, jenis media dan terpaan media serta situasinya.

Jika pengertian konsep penggunaan terkait *activity* sebelumnya dihubungkan dengan persoalan penelitian ini, yang mempertanyakan fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui *social network websites* dengan fokus pada fenomena dimensi ragam kebiasaan, ragam sasaran, dan tingkat keseringan, maka terkait konsep aktivitasnya Levy dan Windahl, ini berarti cenderung menelaah aktivitas dalam dimensi kedua, yakni terkait dengan dimensi urutan komunikasi, terutama pada aktivitas *selama* terjadinya terpaan media. Penelitian ini bermaksud melakukan pengujian hipotesis, namun demikian upaya melakukan keterkaitan antara fenomena *activity* dengan sejumlah karakteristik individu tetap akan dilakukan dalam rangka sebatas upaya melihat potret *activity*.

2. Definisi Konsep dan operasional

Aktivitas khalayak adalah pengarahan diri sendiri anggota khalayak pada proses komunikasi yang sifatnya terkait dengan dimensi kedua yakni menyangkut urutan komunikasi terutama pada fase ‘selama’. Fenomena *activity* difokuskan hanya pada fenomena aktivitas ‘selama’ mengakses yang dilihat dari empat dimensi, yaitu : dimensi ragam kebiasaan, ragam sasaran, dan ragam tingkat keseringan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dan melalui metode survai sebagai teknik pengumpulan datanya. Populasi penelitian adalah para penduduk yang berusia dewasa di 9 RW dan 40 RT di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi penduduk di wilayah dimaksud sebanyak 14.055 jiwa (Pria 6.836; Wanita 7.219) dengan jumlah rumah tangga 5.519 KK dan luas wilayah 4,74 km² sehingga kepadatan penduduk di kelurahan Tamalanrea Indah tersebut adalah 2.965 km². Penelitian ini sendiri *Sampling size*-nya bersifat quota, yakni sebesar 150 dengan pengambilannya yang purposive dengan teknik *aksidental sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh peneliti dengan dibantu anggota pemuda dan aparat Kelurahan Tamalanrea Indah sebagai pendamping untuk kelancaran pelaksanaan proses pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian diedit secara manual dan kemudian diolah secara komputerisasi melalui bantuan aplikasi SPSS. Out put data SPSS menjadi sumber data utama untuk keperluan analisis (deskriptif) dan interpretasi.

4. Penyajian dan Analisis Data

a. Identitas Responden

Temuan penelitian terkait jenis kelamin menunjukkan fenomena distribusi data yang seimbang antara pria dan wanita dari sampel sebanyak 150. Namun usia mereka dalam kategori MDGs lebih dominan yang berkategori *Millenial* (lahir > 1982), mencapai 61.3 %. Cukup banyak juga di antara mereka yang berkategori *Xers* (lahir 1965 - 1982), yakni 34.0 %. Sedikit saja di antara mereka yang masih dari kalangan *Baby Boomers* (lahir 1946 – 1964) (4.7%). Bahkan sudah tidak ada di antara mereka yang berasal dari kalangan Veteran. Dengan demikian responden penelitian ini menjadi ideal dari segi usia dalam kategori konsep MDGs. Diduga mereka itu bisa jadi sebagai responden-responden yang termasuk *pervasive* terkait dengan masyarakat dalam kategori *network society*.

Responden juga diketahui umumnya beragama Islam itu, dari segi tingkat pendidikan juga diketahui bahwa bagian terbesar (53.3%) mereka menamatkan pendidikan SLTA. Cukup berarti juga (25.3%) jumlah mereka yang berlatarbelakangkan pendidikan SLTP. Pendidikan lainnya seperti SD, diploma, sarjana dan pasca sarjana proporsinya relatif kecil, di bawah 10 %.

Lalu, responden riset ini juga diketahui memiliki sepuluh jenis pekerjaan. Namun bagian terbesar (40.7%) mereka itu berasal dari kalangan pegawai swasta. Cukup banyak (36.0%) juga jumlahnya mereka yang masih berstatus Pelajar/Mahasiswa. Sementara responden ibu rumah tangga, meski jumlahnya tidak banyak (10.7%) namun jumlahnya tidak dapat dianggap ‘tidak berarti’ sehubungan jumlah jenis pekerjaan lainnya itu proporsinya relatif kecil, yakni masing-masing < 5 %.

Dalam kaitannya dengan produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti internet, ada indikasi bahwa mereka itu cenderung sudah mengenal akrab. Indikasi ini setidaknya tampak dari pengetahuan mereka tentang eksistensi *social network websites* sebagai salah satu bentuk layanan dalam medium internet. Ada delapan *social network websites* yang terungkap dari pengakuan mereka tahu. Namun demikian, dari delapan *social network websites* tadi, tampak hanya dua *social network websites* yang akunnnya sudah banyak dimiliki responden, yaitu Facebook (100%) dan Twitter (52.7%). Youtube juga termasuk *social network websites* yang akunnnya tidak sedikit (14.7%) telah dimiliki responden. Termasuk Flixster yang pemilik akunnnya sudah ada juga meski jumlahnya baru mencapai 10.0% saja.

b. Aktivitas Komunikasi Melalui situs jejaring sosial

1. Ragam Kebiasaan beraktivitas

Temuan terkait ragam aktivitas responden disajikan dalam tabel 1 berikut. Dari tabel dimaksud distribusi datanya menampakkan bahwa ada 16 ragam jenis aktivitas yang biasa mereka lakukan saat mengakses situs jejaring sosial. Namun demikian tidak semua jenis aktivitas tadi dominan *biasa* dilakukan responden.

Meskipun begitu, hampir semua jenis aktivitas itu secara dominan sudah dilakukan responden. Beragam jenis aktivitas dimaksud yaitu : "Upload Foto diri sendiri"(97.3%); "Mengundang/menerima orang lain jadi teman"(96.0); "Mencari teman lama"(94.7%); "mengomentari pernyataan orang lain dalam situs"(86.7%); "Melihat-lihat profil orang lain" (83.3%); "Dating dengan teman" (71.3%); dan "Main game"(56.7%) termasuk jenis aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh banyak responden. Sementara jenis-jenis aktivitas lainnya seperti "Mendengar musik new entry" dan lain-lain proporsinya masih < 50%. (lihat tabel 1).

Melihat fenomena dominasi sejumlah besar jenis aktivitas pada distribusi data tabel 1 sebelumnya, kiranya itu menunjukkan pencerminan sikap-perilaku yang cenderung bersifat ‘*personal interest*’ dan jauh dari sikap-sikap yang ‘*business interest*’. Masih relatif sedikit di antara responden itu yang ‘sikap-perilaku bermedia jejaring sosial’-nya itu sudah mencerminkan ‘*business interest*’. Proporsi mereka itu baru sebesar 12.7 % saja., di mana aktivitas itu berupa "Menawarkan barang kepada teman online".

Tabel 1
Responden menurut Aktivitas yang biasa dilakukan Saat Online
Melalui situs jejaring sosial
 n : 150

Ragam Kebiasaan Aktivitas	Ya		Tidak		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
1) "Upload Foto diri sendiri"	146	97.3	4	2.7	150	100.0
2) "Download foto orang lain"	58	38.7	92	61.3	150	100.0
3) "Mengundang/menerima orang lain jadi teman"	144	96.0	6	4.0	150	100.0
4) "Menyampaikan uneg-uneg"	134	89.3	16	10.7	150	100.0
5) "Mencari teman lama"	142	94.7	8	5.3	150	100.0
6) "mengomentari pernyataan orang lain dalam situs"	130	86.7	20	13.3	150	100.0
7) "Menawarkan barang kepada teman online"	19	12.7	131	87.3	150	100.0
8) "Dating dengan teman"	107	71.3	43	28.7	150	100.0
9) "Melihat-lihat profil orang lain"	125	83.3	25	16.7	150	100.0
10) "Main game"	85	56.7	65	43.3	150	100.0
11) "Upload video diri sendiri"	23	15.3	127	84.7	150	100.0
12) "Upload video orang lain"	7	4.7	143	95.3	150	100.0
13) "Download musik"	58	38.7	92	61.3	150	100.0
14) "Mendengar musik new entry"	74	49.3	76	50.7	150	100.0
15) "Invitation"	44	29.3	106	70.7	150	100.0
16) "Greeting/ucapan selamat"	74	49.3	76	50.7	150	100.0

Sumber : diolah kembali dari hasil out put SPSS.

2. Ragam Sasaran Aktivitas Komunikasi Melalui Situs Jejaring Sosial

Menyangkut sasaran komunikasi yang biasa menjadi target kalangan responden saat menggunakan situs jejaring sosial (lihat tabel 2), temuan memperlihatkan bahwa responden itu lebih banyak (88.0%) proporsinya yang mengarahkannya "kepada siapa saja (everyone)". Kemudian "hanya kepada teman tertentu" (62.7%). Cukup banyak juga jumlahnya (48.7%) yang mengarahkan "kepada seseorang".

Dengan gambaran pola distribusi data tabel 2 sebelumnya kiranya memperlihatkan bahwa responden riset ini umumnya, bahwa melalui sosial media ingin memperlihatkan hakikat dari suatu proses komunikasi. Hakikat komunikasi dimaksud yaitu diusahakan semaksimal mungkin 'diketahui seluas-luasnya' suatu pesan oleh komunikan.

Tabel 2
Responden Menurut arah/orientasi Aktivitas Komunikasi yang biasa dilakukan Melalui Situs Jejaring Sosial
n : 150

Ragam sasaran pengarah aktivitas	Ya		Tidak		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
"kepada siapa saja (everyone)"	132	88.0	18	12.0	150	100.0
"hanya kepada teman tertentu"	94	62.7	56	37.3	150	100.0
"teman sekelompok"	36	24.0	114	76.0	150	100.0
"kepada seseorang"	73	48.7	77	51.3	150	100.0

Sumber : diolah kembali dari hasil out put SPSS.

3. Tingkat Keseringan Beraktivitas Komunikasi Melalui Ragam Jenis Komunikasi melalui Situs Jejaring Sosial

Gambaran frekuensi kalangan responden dalam beraktivitas terhadap beragam jenis aktivitas terkait media sosial sebelumnya, temuannya disajikan dalam tabel 3 berikut. Dari pola distribusi data pada tabel 3 dimaksud, maka diketahui bahwa terdapat sembilan (9) jenis aktivitas yang respondennya cenderung lebih banyak yang 'tidak pernah' mengakses jenis-jenis aktivitas dimaksud. Proporsinya berkisar 43.3 % - 95.3%. yaitu jenis aktivitas "Main game" dan "Upload video orang lain".

Kemudian, dari jenis-jenis aktivitas yang pernah diakses yang jumlah responden pengaksesnya relatif sedikit tadi, temuan memperlihatkan bahwa *tingkat keseringan* mereka dalam mengakses jenis-jenis aktivitas itu cenderung lebih banyak yang 'jarang'. Misalnya seperti jenis-jenis aktivitas "Mencari teman lama" (67.3%); "Melihat-lihat profil orang lain" (59.3 %); "Upload Foto diri sendiri" (58.0 %); dll. Sementara jumlah responden yang cukup banyak jumlahnya (36.7%) yang sering mengakses yaitu responden pengakses "Mengundang/menerima orang lain jadi teman". Sementara jenis aktivitas "Mendengar musik new entry" menjadi jenis aktivitas yang 'sangat sering' dilakukan sejumlah responden meski dalam proporsi yang tidak banyak (18.0%) dan "Menyampaikan uneg-uneg (14.0%).

Tabel 3
Responden Menurut Tingkat Keseringannya terhadap sejumlah aktivitas yang ada dalam berkomunikasi Melalui Situs Jejaring Sosial
n : 150

Ragam Kebiasaan Aktivitas	Sangat sering		Sering		Jarang		Tidak Pernah		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1) "Upload Foto diri sendiri"	15	10.0	44	29.3	87	58.0	4	2.7	150	100.0
2) "Download foto orang lain"	-	-	10	6.7	49	32.7	91	60.7	150	100.0
3) "Mengundang/menerima orang lain jadi teman"	3	2.0	55	36.7	86	57.3	6	4.0	150	100.0
4) "Menyampaikan uneg-uneg"	21	14.0	52	34.7	61	40.7	16	10.7	150	100.0
5) "Mencari teman lama"	1	.7	40	26.7	101	67.3	8	5.3	150	100.0
6) "mengomentari pernyataan orang lain dalam situs"	15	10.0	51	34.0	64	42.7	20	13.3	150	100.0
7) "Menawarkan barang kepada teman online"	2	1.3	6	4.0	12	8.0	130	86.7	150	100.0

8) "Datang dengan teman"	4	2.7	30	20.0	73	48.7	43	28.7	150	100.0
9) "Melihat-lihat profil orang lain"	7	4.7	29	19.3	89	59.3	25	16.7	150	100.0
10) "Main game"	17	11.3	23	15.3	45	30.0	65	43.3	150	100.0
11) "Upload video diri sendiri"			2	1.3	21	14.0	127	84.7	150	100.0
12) "Upload video orang lain"	1	.7			6	4.0	143	95.3	150	100.0
13) "Download musik"	1	.7	26	17.3	31	20.7	92	61.3	150	100.0
14) "Mendengar musik new entry"	27	18.0	15	10.0	32	21.3	76	50.7	150	100.0
15) "Invitation"			12	8.0	32	21.3	106	70.7	150	100.0
16) "Greeting/ucapan selamat"	2	1.3	14	9.3	58	38.7	76	50.7	150	100.0
17) Berdiskusi dengan anggota group			6	4.0	38	25.3	106	70.7	150	100.0

Sumber : diolah kembali dari hasil out put SPSS.

4. Hubungan Karakteristik Individu dengan Aktivitas Komunikasi

Seperti sudah disinggung sebelumnya di bagian awal, riset ini juga termasuk berupaya mengetahui keterkaitan variabel mayor karakteristik dengan variabel jenis kebiasaan beraktivitas dalam penggunaan *social network media websites*. Tidak semua variabel minor yang tercakup dalam variabel mayor karakteristik dilihat keterkaitannya, namun hanya beberapa saja, yaitu variabel minor 'tingkat pendidikan' dan variabel minor 'usia dalam kategori MDGs'. Terhadap keterkaitan dua variabel dimaksud, pengujian statistiknya dilakukan dengan bantuan aplikasi SPPSS seri 17.0. Hasilnya disajikan dalam tabel 4 dan tabel 5.

a. Hubungan Usia kategori MDGs dengan Jenis Kebiasaan

Sebagaimana diperlihatkan dalam data tabel 4, **Hasil tes Chi square (χ^2)** terhadap data riset (O) = 653 (nilai terbesar). Dibandingkan dengan nilai χ^2 pada tabel distribusinya secara teoritis dengan **df 2 pada α 0.05**, nilai observasi (O) yang sebesar 653 tadi sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai teoritis yang sebesar **5.991. Selisihnya 5.404. Ini artinya hasil riset (O) ini tidak SIGNIFIKAN.** Dengan kata lain, secara scientific tidak ada hubungan yang berarti terkait usia MDGs responden dengan akses internet. Intinya usia dalam kategori MDGs hampir tak berkait dengan mengakses internet (dalam hubungannya dengan jenis-jenis kebiasaan). Mau tua, anak-anak, remaja maupun dewasa, tidak ada kaitannya dengan akses internet. Artinya, semua orang butuh akses aplikasi jejaring sosialnya.

Tabel 4

Statistik Hubungan Usia kategori MDGs dengan Jenis Kebiasaan

Usia MDGs	Pearson Chi-Square	Asymp. Sig. (2-sided)	DF	α	Jenis Kebiasaan	Signifiqansi	
						Ya	Tidak
v	v	.211	2	0,05	Upload Foto diri sendiri		5.991
v	v	.030	2	0,05	Download foto orang lain		5.991
v	v	.033	2	0,05	Mengundang/menerima orang lain jadi teman		5.991
v	v	.000	2	0,05	"Menyampaikan uneg-uneg"		5.991
v	v	.653	2	0,05	Mencari teman lama		5.991
v	v	.002	2	0,05	"mengomentari pernyataan orang lain dalam situs"		5.991

v	v	.055	2	0,05	"Menawarkan barang kepada teman online"	5.991
v	v	.015	2	0,05	"Dating dengan teman"	5.991
v	v	.512	2	0,05	Melihat-lihat profil orang lain	5.991
v	v	.067	2	0,05	Main game	5.991
v	v	.088	2	0,05	Download musik	5.991
v	v	.587	2	0,05	invitation	5.991
v	v	.035	2	0,05	Mendengar musik new entry	5.991
v	v	.128	2	0,05	Greeting/ucapan selamat	5.991

Sumber : diolah kembali dari hasil out put SPSS.

b. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Jenis Kebiasaan

Terkait dengan Hubungan Usia kategori MDGs dengan Jenis Kebiasaan, sebagaimana diperlihatkan data tabel 5, maka hasilnya memperlihatkan bahwa nilai observasi (χ^2) terbesar pada Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Jenis Kebiasaan adalah antara tingkat pendidikan SLTP dengan Download foto orang lain, nilainya sebesar .806. Nilai ini sangat jauh berada di bawah nilai teoritis distribusi *chi square* pada df 2 dengan α 0.05 yang sebesar 9.488. Dengan demikian ini dapat ditafsirkan bahwa secara statistik terkait hubungan di antara kedua variabel ini tidak ada signifikansi yang berarti. Dengan kata lain secara statistik tingkat pendidikan individu cenderung tidak menentukan jenis kebiasaan dalam akses media sosial.

Tabel 5
Statistik Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Jenis Kebiasaan

Tingkat Pendidikan	Pearson Chi-Square	Asymp. Sig. (2-sided)	DF	α	Jenis Kebiasaan	Signifiquansi	
						Ya	Tidak
					Upload Foto diri sendiri		
SD	v	0	0	0,05			0
SLTP	v	.068	4	0,05			9.488
SLTA	v	.000	8	0,05			15.507
Diploma	v	0	0	0,05			0
Sarjana	v	0	0	0,05			0
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05			0
					Download foto orang lain		
SD	v	.634	3	0,05			7.815
SLTP	v	.806	4	0,05			9.488
SLTA	v	.364	8	0,05			15.507
Diploma	v	.132	3	0,05			7.815
Sarjana	v	.362	3	0,05			7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05			0
					Mengundang/menerima orang lain jadi teman		
SD	v	0	0	0,05			0
SLTP	v	.00	4	0,05			9.488

SLTA	v	.040	8	0,05		15.507
Diploma	v	.821	3	0,05		7.815
Sarjana	v	0	0	0,05		0
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					"Menyampaikan uneg- uneg"	
SD	v	.007	3	0,05		7.815
SLTP	v	.000	4	0,05		9.488
SLTA	v	.040	8	0,05		15.507
Diploma	v	.821	3	0,05		7.815
Sarjana	v	0	0	0,05		0
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					Mencari teman lama	
SD	v	0	0	0,05		0
SLTP	v	.000	4	0,05		9.488
SLTA	v	.040	8	0,05		15.507
Diploma	v	.821	3	0,05		7.815
Sarjana	v	0	0	0,05		0
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					"mengomentari pernyataan orang lain dalam situs"	
SD	v	.007	3	0,05		7.815
SLTP	v	.063	4	0,05		9.488
SLTA	v	.028	8	0,05		15.507
Diploma	v	.565	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.046	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					"Menawarkan barang kepada teman online"	
SD	v	.007	3	0,05		7.815
SLTP	v	.723	4	0,05		9.488
SLTA	v	.475	8	0,05		15.507
Diploma	v	.565	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.046	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					"Dating dengan teman"	
SD	v	.176	3	0,05		7.815
SLTP	v	.426	4	0,05		9.488
SLTA	v	.000	8	0,05		15.507
Diploma	v	.565	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.877	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0

					Melihat-lihat profil orang lain	
SD	v	.526	3	0,05		7.815
SLTP	v	.040	4	0,05		9.488
SLTA	v	.447	8	0,05		15.507
Diploma	v	.024	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.046	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					Main game	
SD	v	.323	3	0,05		7.815
SLTP	v	.006	4	0,05		9.488
SLTA	v	.036	8	0,05		15.507
Diploma	v	.380	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.292	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					Upload video diri sendiri	
SD	v	.120	3	0,05		7.815
SLTP	v	.500	4	0,05		9.488
SLTA	v	.968	8	0,05		15.507
Diploma	v	.565	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.046	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					Upload video orang lain	
SD	v	0	0	0,05		0
SLTP	v	.001	4	0,05		9.488
SLTA	v	.287	8	0,05		15.507
Diploma	v	.821	3	0,05		7.815
Sarjana	v	0	0	0,05		0
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					Download musik	
SD	v	.162	3	0,05		7.815
SLTP	v	.187	4	0,05		9.488
SLTA	v	.806	8	0,05		15.507
Diploma	v	.132	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.292	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					invitation	
SD	v	.187	3	0,05		7.815
SLTP	v	.500	4	0,05		9.488
SLTA	v	.539	8	0,05		15.507
Diploma	v	.155	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.362	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0

					Mendengar musik new entry	
SD	v	.409	3	0,05		7.815
SLTP	v	.480	4	0,05		9.488
SLTA	v	.175	8	0,05		15.507
Diploma	v	.060	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.362	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0
					Greeting/ucapan selamat	
SD	v	.117	3	0,05		7.815
SLTP	v	.287	4	0,05		9.488
SLTA	v	.378	8	0,05		15.507
Diploma	v	.307	3	0,05		7.815
Sarjana	v	.410	3	0,05		7.815
PASCA SARJANA	v	0	0	0,05		0

Sumber : Dimodifikasi berdasarkan hasil output SPSS.

5. Diskusi

Penelitian ini berusaha menjawab tentang fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui *social network websites*. Permasalahan difokuskan pada fenomena ragam kebiasaan beraktivitas, ragam sasaran aktivitas, tingkat keseringan beraktivitas, dan keterkaitan karakteristik individu pengguna *social network websites* dengan ragam *activity* dimaksud tadi.

Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa terkait dengan fenomena Ragam Kebiasaan beraktivitas, temuan menunjukkan hampir semua jenis aktivitas itu secara dominan sudah dilakukan responden. Beragam jenis aktivitas dimaksud yaitu : "Upload Foto diri sendiri"(97.3%); "Mengundang/menerima orang lain jadi teman"(96.0); "Mencari teman lama"(94.7%); "mengomentari pernyataan orang lain dalam situs"(86.7%); "Melihat-lihat profil orang lain" (83.3%); "Dating dengan teman" (71.3%); dan "Main game"(56.7%) termasuk jenis aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh banyak responden. Sementara jenis-jenis aktivitas lainnya seperti "Mendengar musik new entry" dan lain-lain proporsinya masih < 50%. Fenomena dominasi sejumlah besar jenis aktivitas ini menunjukkan pencerminan sikap-perilaku yang cenderung bersifat '*personal interest*' dan jauh dari sikap-sikap yang '*business interest*'. Masih relatif sedikit di antara responden itu yang 'sikap-perilaku bermedia jejaring sosial'-nya itu sudah mencerminkan '*business interest*'.

Dalam kaitan dengan fenomena Ragam Sasaran Aktivitas Komunikasi Melalui Situs Jejaring Sosial, temuan menunjukkan bahwa sasaran komunikasi yang biasa menjadi target kalangan responden saat menggunakan situs jejaring sosial temuan memperlihatkan bahwa responden itu lebih banyak proporsinya yang mengarahkannya "kepada siapa saja (everyone)". Kemudian "hanya kepada teman tertentu". Cukup banyak juga jumlahnya yang mengarahkan "kepada seseorang". Dengan gambaran ini kiranya memperlihatkan bahwa responden riset ini umumnya, bahwa melalui sosial media ingin memperlihatkan hakikat dari suatu proses komunikasi. Hakikat komunikasi dimaksud yaitu diusahakan semaksimal mungkin 'diketahui seluas-luasnya' suatu pesan oleh komunikan.

Kemudian menyangkut persoalan Tingkat Keseringan Beraktivitas Komunikasi Melalui Ragam Jenis Komunikasi melalui Situs Jejaring Sosial, maka diketahui bahwa terdapat sembilan (9) jenis aktivitas yang respondennya cenderung lebih banyak yang 'tidak pernah' mengakses jenis-jenis aktivitas dimaksud. Proporsinya berkisar 43.3 % - 95.3%. yaitu jenis aktivitas "Main game" dan "Upload video orang lain". Selanjutnya, dari jenis-jenis aktivitas yang pernah diakses yang jumlah responden pengaksesnya relatif sedikit dimaksud, temuan memperlihatkan bahwa *tingkat keseringan* mereka dalam mengakses jenis-jenis aktivitas itu

cenderung lebih banyak yang 'jarang'. Misalnya seperti jenis-jenis aktivitas "Mencari teman lama"; "Melihat-lihat profil orang lain"; "Upload Foto diri sendiri"; dll. Sementara jumlah responden yang cukup banyak jumlahnya yang sering mengakses yaitu responden mengakses "Mengundang/menerima orang lain jadi teman". Sementara jenis aktivitas "Mendengar musik new entry" menjadi jenis aktivitas yang 'sangat sering' dilakukan sejumlah responden meski dalam proporsi yang tidak banyak dan "Menyampaikan uneg-uneg.

Dengan temuan yang mencerminkan keanekaragaman aktivitas responden (dalam dimensi Kebiasaan beraktivitas; Sasaran Aktivitas Komunikasi dan Tingkat Keseringan Beraktivitas) dalam mengakses internet (media sosial) sebelumnya, kiranya itu dapat menjadi gambaran yang relevan dengan apa yang diasumsikan oleh Levy dan Windahl (1985). Dalam asumsi teori *uses and gratification*, keterjadian ragam aktivitas tadi sendiri juga termasuk menjadi bentuk pencerminan ragam upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya melalui penggunaan media. "...how individuals use mass communication to gratify their needs. "https://www.utwente.nl/en/bms/communication-theories/sorted-by-cluster/Mass%20Media/Uses_and_Gratifications_Approach). Sementara terkait dengan munculnya keragaman aktifitas itu sendiri, dalam asumsi teori ini juga hal itu diantaranya disebabkan faktor variabel anteseden seperti demografi.

Terakhir yaitu menyangkut persoalan Hubungan Karakteristik Individu dengan Aktivitas Komunikasi. Temuan menunjukkan bahwa menyangkut : **a. Hubungan Usia kategori MDGs dengan Jenis Kebiasaan**, secara *scientific* tidak ada hubungan yang signifikan terkait usia MDGs responden dengan akses internet. Intinya usia dalam kategori MDGs hampir tak berkaitan dengan mengakses internet. Mau tua, anak-anak, remaja maupun dewasa, tidak ada kaitannya dengan akses internet. Artinya, semua orang butuh akses aplikasi jejaring sosialnya. Terkait dengan **b. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Jenis Kebiasaan**, secara statistik terkait hubungan di antara keduanya tidak ada signifikansinya yang berarti. Dengan kata lain secara statistik tingkat pendidikan individu cenderung tidak menentukan jenis kebiasaan dalam akses media sosial. Keterjadian hubungan statistik yang demikian, dalam realita ilmiah memang dimungkinkan terjadi. Salah satu diantaranya mungkin karena faktor variabel anteseden atau bisa juga karena faktor variabel intervening. Selain itu, dimungkinkan juga karena faktor metodenya, seperti instrument penelitian yang kurang ideal terkait dengan ratio responden dengan jumlah sel yang ada dalam tabel sesuai dengan tuntutan item-item dalam instrumen.

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Hampir semua jenis aktivitas itu secara dominan sudah dilakukan responden. Beragam jenis aktivitas dimaksud yaitu : "Upload Foto diri sendiri" (97.3%); "Mengundang/menerima orang lain jadi teman" (96.0); "Mencari teman lama" (94.7%); "mengomentari pernyataan orang lain dalam situs" (86.7%); "Melihat-lihat profil orang lain" (83.3%); "Dating dengan teman" (71.3%); dan "Main game" (56.7%) termasuk jenis aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh banyak responden. Sementara jenis-jenis aktivitas lainnya seperti "Mendengar musik new entry" dan lain-lain proporsinya masih < 50%. Fenomena dominasi sejumlah besar jenis aktivitas ini menunjukkan pencerminan sikap-perilaku yang cenderung bersifat '*personal interest*' dan jauh dari sikap-sikap yang '*business interest*'. Masih relatif sedikit di antara responden itu yang 'sikap-perilakunya bermedia jejaring sosial '-nya itu sudah mencerminkan '*business interest*'.

Ragam Sasaran Aktivitas Komunikasi Melalui Situs Jejaring Sosial, temuan menunjukkan bahwa sasaran komunikasi yang biasa menjadi target kalangan responden saat menggunakan situs jejaring sosial (lihat tabel 2), temuan memperlihatkan bahwa responden itu lebih banyak (88.0%) proporsinya yang mengarahkannya "kepada siapa saja (everyone)". Kemudian "hanya kepada teman tertentu" (62.7%). Cukup banyak juga jumlahnya (48.7%) yang mengarahkan "kepada seseorang". Dengan gambaran pola distribusi dalam data tabel 2 sebelumnya kiranya memperlihatkan bahwa responden riset ini umumnya, bahwa melalui sosial media ingin memperlihatkan hakikat dari suatu proses komunikasi. Hakikat komunikasi dimaksud yaitu diusahakan semaksimal mungkin 'diketahui seluas-luasnya' suatu pesan oleh komunikan.

Tingkat Keseringan Beraktivitas Komunikasi Melalui Ragam Jenis Komunikasi melalui Situs Jejaring Sosial, temuan menunjukkan bahwa terdapat sembilan (9) jenis aktivitas yang respondennya cenderung lebih banyak yang 'tidak pernah' mengakses jenis-jenis aktivitas dimaksud.

Dari jenis-jenis aktivitas yang pernah diakses yang jumlah responden pengaksesnya relatif sedikit tadi, temuan memperlihatkan *tingkat keseringan* mereka dalam mengakses jenis-jenis aktivitas itu cenderung lebih banyak yang 'jarang'. Misalnya seperti jenis-jenis aktivitas "Mencari teman lama" (67.3%); "Melihat-lihat profil orang lain" (59.3 %); "Upload Foto diri sendiri" (58.0 %); dll. Sementara jumlah responden yang cukup banyak jumlahnya (36.7%) yang sering mengakses yaitu responden pengakses "Mengundang/menerima orang lain jadi teman". Sementara jenis aktivitas "Mendengar musik new entry" menjadi jenis aktivitas yang 'sangat sering' dilakukan sejumlah responden meski dalam proporsi yang tidak banyak (18.0%) dan "Menyampaikan uneg-uneg" (14.0%).

Temuan menunjukkan bahwa menyangkut : a. Hubungan Usia kategori MDGs dengan Jenis Kebiasaan, secara scientific tidak ada hubungan yang berarti terkait usia MDGs responden dengan akses internet. Terkait dengan b. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Jenis Kebiasaan, secara statistik terkait hubungan di antara kedua variabel ini tidak ada signifikansinya yang berarti. Dengan kata lain secara statistik tingkat pendidikan individu cenderung tidak menentukan jenis kebiasaan dalam akses media sosial.

Ucapan Terimakasih : Penulis mengucapkan terimakasih kepada tim redaksi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut berpartisipasi dalam mengisi JSKM pada edisi kali ini.

Daftar Pustaka:

- Castells, Manuel dan Maria Isabel Diaz de Isia dalam : <http://www.uoc.edu/in3/wp/picwp1201/>.
- Choi *et al*, *Motives of Internet uses : Crosscultural Perspective- The US, The Netherlands, and South Korea*. Tanpa Tahun.
- Imran, Hasyim Ali dan Hoesin, Hanif. 2007., "Literasi Komputer Masyarakat Pedesaan", dalam Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 11 (2), hm.170, Jakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah II Jakarta.
- Imran, Hasyim Ali. 2010. "POLA AKTIVITAS KOMUNIKASI PENGGUNA INTERNET MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL", Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 14 (2). Jakarta. Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika (BPPKI) Jakarta.
- Levy, Mark dan Sven Windahl. 1985 "The Concept of Audience Activity", dalam Rosengren, Werner dan Palmgreen (eds) *Media Gratification Research*. Beverly Hill : Sage.
- Mc Luhan, Marshal. 2003 "Technology Determinism", In *A First Look at Communication Theory*, Fifth Edition, by EM Griffin, New York, McGraw Hill.
- Nawawi, Muhammad Ridwan , Sahnur , Muhammad Irfani dan Dwiyaksa, Dino.2008. "ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI JEJARING SOSIAL PENJUALAN BERBASIS WEB.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Tanpa Nama. Uses And Gratification Theory-dalam, <http://communicationtheory.org/uses-and-gratification-theory/>, (accessed, August, 24, 2015).
- University of Twente.2017."Uses and Gratifications Approach". dalam <https://www.utwente.nl/en/bms/communication-theories>. accessed on August, 15, 2017.
- Webster, Frank. 1995. *Theories of The Information Society*. London and New York. Rout Ledge.

KOMUNIKASI KELOMPOK, *DISKURSIF* DAN *PUBLIC SPACE*
(Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP Daerah Provinsi Bengkulu)

GROUP COMMUNICATION, DISCURSIVE AND PUBLIC SPACE
(A case study of a phenomenon the existence of Discursive environment KIP Area
of Bengkulu Province)

Ari Cahyo Nugroho

Peneliti Bidang Studi Komunikasi dan Media pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta, Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat, . Provinsi DKI Jakarta, Indonesia
Telp. 31922337, aricahyonugroho@gmail.com
(Naskah diterima 8 Mei 2017, revisi pasca editing redaksi 7 Agustus 2017,
disetujui terbit oleh PR 29 September 2017)

ABSTRACT

The qualitative research approach of this case study method wants to know the existence of 'discursive' phenomenon in the institution of KIP (D) of Bengkulu Province. The focus of the problem is the existence of discursive phenomena and the existence of 'discursive' publication activities. The result is the existence of phenomenon of 'discursive' activity in the KIPD environment of Bengkulu Province which show the indication of 'dualism' in practice. This phenomenon arises primarily with regard to a typology of six configurations of organization power is produced. In relation to the existence of the publication of 'discursive' activities, it shows that the KIPD is still not trying to adapt to its environment. In line with that also the KIPD is still relatively less likely to maximize the function of KIPD as a public space or a public place. Looking at some of the weaknesses of KIPD related to its function as a public space, then in a peractis way to maximize its function, the manager of KIPD needs to reduce the influence of 'dualism' factor in discursive activities activity of discursive activity. In addition, KIPD should maximize the publication of 'discursive' activities of KIPD by improving adaptation efforts with its environment, especially as with the media. In relation to these efforts, it is necessary to understand more about the nature of the existence of KIPD in relation to Public Sphere Habermas's normative theory. For academics who are interested in similar issues then to understand more about the phenomenon of existence in question would be necessary to conduct further research with ethnographic methods.

Keywords: Group Communication, Discursive; Public Space; Existence

ABSTRAK

Penelitian pendekatan kualitatif metode studi kasus ini ingin mengetahui eksistensi fenomena 'diskursif' di lingkungan lembaga KIP (D) Provinsi Bengkulu. Fokus permasalahan yaitu eksistensi fenomena diskursif dan eksistensi publikasi aktifitas 'diskursif'. Hasilnya eksistensi fenomena aktifitas 'diskursif' di lingkungan KIPD Provinsi Bengkulu di antaranya menampakkan indikasi 'dualisme' dalam prakteknya. Fenomena ini muncul terutama berkaitan dengan *a typology of six configurations of organization power is produced*. Terkait dengan eksistensi publikasi aktifitas 'diskursif', memperlihatkan bahwa KIPD dimaksud masih kurang berusaha beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu pula pihak KIPD secara relative masih cenderung kurang memaksimalkan fungsi KIPD sebagai *a public space or a public place*. Melihat sejumlah kelemahan KIPD terkait fungsinya sebagai *public space*, maka secara peraktis guna pemaksimalan fungsinya tadi, pihak pengelola KIPD perlu mengurangi pengaruh-pengaruh faktor 'dualisme' dalam aktifitas pemfasilitasan aktifitas diskursif. Selain itu pihak KIPD perlu memaksimalikan publikasi aktifitas 'diskursif' KIPD dengan cara meningkatkan upaya-upaya adaptasi dengan lingkungannya, terutama seperti dengan pihak media. Terkait upaya dimaksud kiranya perlu untuk memahami lebih jauh mengenai hakikat eksistensi KIPD terkait dengan teori normatif *Public Sphere* Habermas. Bagi akademisi yang tertarik persoalan serupa maka untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena eksistensi dimaksud kiranya perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode etnografi.

Kata-kata kunci : Komunikasi Kelompok, *Diskursif*; *Public Space*; Eksistensi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Fenomena komunikasi kelompok keterjadiannya kini mengalami perubahan signifikan. Suatu perubahan signifikan yang dimungkinkan karena kemajuan *Information and Communication Technology (ICT)*. Perubahannya sendiri berupa pelebaran situs-situs dimungkinkannya *setting* keberlangsungan *human communication*. Jika sebelumnya keberlangsungan itu hanya terbatas secara tradisional, maka kini dapat berlangsung secara digital melalui internet.

Secara tradisional, selama ini komunikasi kelompok dikenal hanya melalui sejumlah komunikasi langsung di antara sesama anggota kelompok. Bentuk-bentuk komunikasi yang demikian misalnya berlangsung melalui kelompok-kelompok warga seperti kelompok arisan ibu-ibu atau bapak-bapak. Di samping itu juga bisa berlangsung melalui aktifitas-aktifitas keagamaan warga baik di rumah maupun di mesjid atau di gereja. Namun, terkait dengan perkembangan *ICT* sebelumnya, maka fenomena yang berlangsung secara tradisional tadi, kini berkembang melebar yang keberlangsungannya dapat terjadi melalui medium internet.

Bentuk-bentuk komunikasi kelompok melalui internet itu bahkan jumlah keanggotaannya menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah keanggotaan dalam komunikasi kelompok yang tradisional. Dalam konteks dimaksud, sebut saja misalnya komunikasi kelompok dalam berbagai bentuk komunitas yang ada di media sosial seperti FB. Ini misalnya seperti komunikasi kelompok grup 'Rakyat Bersatu'; PSPS (Pendukung Setia Prabowo Subianto) dengan 173,905 members. SAHABAT GATOT NURMANTYO dengan 119,366 members.

Besarnya jumlah anggota kelompok tadi menurut pengamatan biasanya terjadi terhadap komunitas yang merepresentasikan kepentingan tertentu yang nota bene melibatkan public figur tertentu. Di luar dari konteks dimaksud, tampaknya keanggotaan suatu komunitas itu jumlahnya relatif lebih kecil, ini misalnya komunitas yang sifatnya lebih eksklusif seperti [OFFICIAL GROUP] Xiaomi Mi5/S/S+ Indonesia yang members-nya 53,913.9. Komunikasi-komunikasi kelompok lainnya yang jumlah anggotanya relatif lebih kecil tampaknya banyak terjadi melalui internet dengan fasilitas *gadget*. Ini misalnya melalui fenomena bermunculannya grup-grup WA di *gadget*. Ragam grup-grup WA tersebut kemunculannya sesuai dengan ragam interest pembuat yang terlihat. Namun demikian semua ragam interest tersebut dari segi isi pesan tampaknya secara terminologis dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama interest yang berbasis kategori *Trivia* dan kedua yang berbasis *Polity*.

Fenomena komunikasi kelompok yang berlangsung secara tradisional maupun secara digital melalui internet yang pada hakikatnya berisi pembicaraan menyangkut dua kategori tadi, yakni berbasis isu *Trivia* dan *Polity*, dalam teori Timur sebenarnya telah lama dikonseptualisasikan. Terutama yang terkait dengan isu yang berbau *Polity*. maka fenomenanya dikonseptualisir dengan 'diskursif'. Suatu fenomena yang oleh Habermas keberlangsungannya terjadi melalui sejumlah *publicspace* atau *public place* sebagai bagian dari *public sphere*.

Sebagai bagian dari *public sphere*, selain *public space* seperti mural, warung kopi dan lain sejenisnya, maka *public space* seperti sudah dicontohkan sebelumnya seperti 'Rakyat Bersatu' dan PSPS, maka di Indonesia kini bertambah *public space* lainnya yang difasilitasi pemerintah. *Public space* yang fasilitasnya didasarkan pada Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, dinamakan lembaga Komisi Informasi Publik (Daerah).

Tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi antara warga negara melawan badan publik. Menurut Preelementary riset, banyak ditemukan kekeliruan warga terkait tugas pokok dan fungsi dimaksud. Diantaranya banyak warga yang menganggap bahwa KIP termasuk menyediakan data base informasi public. Banyak juga warga yang tidak mengadu ke KIP (D) terkait kepentingan warga dengan informasi publik. Melihat fenomena ini kiranya eksistensi KIP tadi eksistensinya terlihat relatif masih kurang disadari warga domisili KIP.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini inginmemahami lebih jauh terkait fenomena *diskursif* yang terjadi pada *public space* seperti KIP (D) tadi. Sejalan dengan maksud tersebut, maka penelitian ini merumuskan pertanyaannya menjadi : Bagaimanakah eksistensi fenomena *diskursif* di lingkungan lembaga KIP (D) ?

B. Signifikansi

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada sebelumnya menyangkut komunikasi kelompok, khususnya terkait fenomena komunikasi menyangkut *diskursif* di *public spaces* seperti Komisi Informasi Publik Daerah. Secara praktis diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memahami lebih baik mengenai keberadaan Komisi Informasi Publik Daerah terkait kepentingan *diskursif*.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep-Konsep Teoritik

1. *Public Sphere* dan *Public Space/Public Place*

Dalam realita, media massa yang dalam pengertian Jürgen Habermas disebut menjadi salah satu bentuk dalam pengertian konsep *public space*¹, ternyata bukanlah menjadi satu-satunya *public space* bagi publik untuk mengekspresikan aktifitas diskursifnya dalam konteks *public sphere* yang notabene “*was guided by a norm of rational argumentation and critical discussion in which the strength of one's argument was more important than one's identity*”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Discursive_democracy). Bentuk-bentuk lainnya bisa berupa warung-warung kopi sebagaimana terjadi pada abad 18 di Prancis (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sphere). Tempat-tempat lain yang menjadi konsentrasi publik, misalnya seperti mesjid, gereja, atau *Central Park* di *New York City* yang dirancang pada abad 19 *as a democratic public space*, juga menjadi bentuk lain dari *public space*.

Demikian pula segala hal yang bersifat publik yang difasilitasi di *public space*, juga termasuk aktifitas dalam konteks *public sphere*-nya Habermas. Hal demikian misalnya seperti “*Public art in a public space in Lille, France*” (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_space). Hal serupa ini, juga relatif banyak dapat dijumpai di kota-kota besar di Indonesia, misalnya di Jakarta, maka *public art* seperti di Prancis tadi dapat dijumpai pada lukisan mural yang diekspresikan publik melalui medium tembok, halte, pilar-pilar jalan tol dan lain sejenisnya.

Sebagai salah satu bentuk *public space* bagi ekspresi diskursif individu publik, berdasarkan fenomena wacana intelektual diketahui bahwa media massa seperti surat kabar (*newsprint*) tampak cenderung mendapat perhatian lebih serius dari pada bentuk-bentuk *public space* lainnya seperti *coffee houses*, *intellectual and literary salons*, yang juga menjadi perhatian Habermas pada saat pertama kali dia menggagas konsep *public sphere*-nya. Keseriusan ini sendiri terutama tampak karena sifat-sifat yang berbeda dari ketiga bentuk *public space* tadi, di mana *print media* itu berbeda sangat khas dari pada dua *public space* lainnya, perbedaannya yakni sebagai *public space* yang berpotensi menjadi *structural forces* ketika tumbuh menjadi besar.

2. *Discursif* (diskursif)

Konsep diskursif berasal dari kata Latin *discurrere*, artinya berlari ke sana kemari. Kata ini biasanya diterapkan pada pengetahuan manusia. Pengetahuan diskursif disebut juga pengetahuan penalaran. Secara teoritis konsep diskursus sendiri disarikan dari Demokrasi Deliberatif-nya Jürgen Habermas (Baburrahman, <https://intransinstitute.com>, Accessed, April,28, 2017).

Diskursif merupakan kata sifat dari diskursus. Diskursus sendiri berarti keterlibatan anggota kelompok komunikasi melalui berbagai bentuk komunikasi termasuk seperti KIP D yang difasilitasi oleh negara dalam hal pembicaraan publik.

Pembicaraan publik itu sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori *trivia* dan *polity*. Kategori *trivia* sendiri berarti isu-isu yang berkategori ringan-ringan atau tremeh temeh. Sementara kategori *polity* yaitu isu-isu berkategori berat seperti pembicaraan soal politik, ekonomi, ideologi dan lain sejenisnya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua kategori isu dimaksud tadi, De Fleur dan Fleur & Rokeach (1982 : 173) menyebutnya dengan konsep *low-taste content* dan *high-taste content*.² Dalam pandangan Habermas maka yang termasuk diskursus dalam konteks

¹A *public sphere* or a *public place* is a place where anyone has a right to come without being excluded because of *economic or social* conditions, although this may not always be the case. One of the earliest examples of public spaces are *commons* (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_place).

²*low-taste content* (isi yang sifatnya dapat berkontribusi terhadap penciptaan selera rendah dan perusakan moral, misalnya seperti film pornografi yang seronok, drama-drama kriminal, komik-komik kriminal atau musik sugestif); *high-taste content* : isi media yang bersifat kritis yang disampaikan dengan “in better taste”, misalnya seperti musik serius, drama canggih, diskusi politik dan acara lain yang sifatnya sebagai lawan dari *low-taste content*

public space yaitu warga partisipan komunikasi kelompok yang terlibat berbicara isu polity saja dan tidak termasuk isu yang berkategori trivia.

3. Komisi Informasi³

Sesuai dengan yang tertuang dalam Bab VII UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Komisi Informasi; Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi sendiri terbagi atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara, sedangkan Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Komisi Informasi pertama kali berkerja melalui Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah 2 (dua) tahun diundangkan oleh Pemerintah.

Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sedangkan Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Dalam hal perekrutan anggota Komisi Informasi, terdapat beberapa hal yang wajib dipenuhi, diantaranya memenuhi syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi (warga negara Indonesia; memiliki integritas dan tidak tercela; tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik; memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; bersedia bekerja penuh waktu; berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan sehat jiwa dan raga). Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi juga dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif. Dengan daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi dengan disertai alasan.

Calon anggota Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota, hasil rekrutmen diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang (untuk calon anggota Komisi Informasi Pusat); diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota oleh gubernur/dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon. Untuk kemudian dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan. Anggota Komisi Informasi Pusat; provinsi dan/atau kabupaten/kota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Menyangkut *pemberhentian* keanggotaan Komisi Informasi Pusat; Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota, terdapat beberapa point yakni jika anggota meninggal dunia; telah habis masa jabatannya; mengundurkan diri; dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara; sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang

³ Komisi Informasi, UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi. Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. *Pergantian antarwaktu* anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. *Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil* dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

Dari segi pertanggung jawaban, Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan. Dan Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Untuk ke-3 nya, laporan lengkap pertanggungjawabannya bersifat terbuka untuk umum.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota membentuk Sekretariat⁴. Hal ini sesuai dengan pasal 29 UU KIP. Sekretariat ini berfungsi sebagai dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. Sedangkan Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Dan, sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menyangkut *anggaran*⁵, anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) yang bersangkutan.

Dalam tugasnya secara umum Komisi Informasi: 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; 2) menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan 3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Jika dijabarkan lagi berdasarkan pembagian wilayahnya maka Komisi Informasi Pusat bertugas: 1) menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; 2) menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan 3) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁴ Pasal 29, bagian Ketujuh, Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵ Pasal 29, Point 6, Bagian Ketujuh, Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu waktu jika diminta. *Untuk point ke 2*, jika Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota telah terbentuk maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota, yakni bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota memiliki wewenang yang sama yakni 1) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; 2) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; 3) meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 5) mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan 6) membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota *selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk*. Sedangkan kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Dan kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

4. Eksistensi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa eksistensi merupakan keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sementara menurut Abidin Zaenal (2007:16) eksistensi adalah :“suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere* yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan organisasi dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. (Atmoko. *Dalam etd.repository.ugm.ac.id/*). Faktor internal : tujuan, strategi dan kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan.

Faktor-faktor intern yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi antara lain : a. Perubahan kebijaksanaan pimpinan; b. Perubahan tujuan; c. Pemekaran / perluasan wilayah operasi organisasi; d. Volume kegiatan yang bertambah banyak; e. Tingkat pengetahuan dan keterampilan dari para anggota organisasi; f. Sikap dan perilaku dari para anggota organisasi; g. Berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang berlaku dalam organisasi;

Faktor eksternal : politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Lingkungan ekstern adalah keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Lingkungan ekstern tidak hanya mempengaruhi organisasi tertentu, tetapi juga terhadap semua organisasi yang ada di masyarakat. Faktor - faktor yang termasuk dalam lingkungan ekstern cukup banyak, di antaranya adalah : a. Politik, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan.; b. Hukum, meliputi semua ketentuan yang berlaku yang harus ditaati oleh setiap orang baik secara individu maupun secara kelompok; c. Kebudayaan, meliputi kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial. Kebudayaan material mengenal berbagai macam alat dan barang-barang dengan cara kerja mekanis, listrik, atau elektronik, merupakan faktor yang berpengaruh cukup besar terhadap kehidupan organisasi.; d. Teknologi, segenap hasil kemajuan dan teknik perkembangan industri peralatan modern. Teknologi meliputi tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur, dan fasilitas-fasilitas lain serta mencakup kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkannya; e. Sumber alam, meliputi segenap potensi sumber alam baik di darat, laut maupun udara, berupa tanah, air, energi, flora, fauna dan lain-lain

termasuk pula geografi dan iklim.; f. Demografi, meliputi sumber tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, yang dapat diperinci menurut jenis kelamin, tingkat umur, jumlah dan bagaimana sistem penyebarannya.dan g. Sosiologi, ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok, atau ilmu tentang masyarakat.

Merujuk pada Teori Organisasi Modern dari Daniel Katz (2006), sebuah organisasi adalah merupakan sebuah sistem yang terbuka, bukan lagi sebuah sistem tertutup yang stabil. Jadi, apabila sebuah organisasi ingin mempertahankan dirinya, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Melalui proses adaptasi tersebut, sebuah organisasi akan menemukan masalah-masalah yang kemudian mencari solusi dari tiap permasalahan yang ditemui.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kasus yang prosesnya seperti sebagaimana digambarkan dalam matrik berikut :

no	Sumber Data/unit analisa	Teknik Pengumpulan Data	Proses
1	Pimpinan KIP Daerah	<i>depth interview</i>	Verbatime
2	Stakeholder KIP	<i>depth interview</i>	Verbatime
3	Dokumen	Arsip-arsip KPID	
4	Wartawan Bengkulu Ekspres	<i>depth interview</i>	Verbatime
5	Kepala Dinas (a/n) Dishubkominfo Provinsi Bengkulu	<i>depth interview</i>	Verbatime

C. Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian

1. Eksistensi Fenomena Diskursif

KIP (Komisi Informasi Pusat) berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Sejalan dengan fungsi dari KIP di atas, maka komisi-komisi informasi yang berada di bawahnya secara vertikal seperti Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi-onlitigasi. (<https://www.komisiinformasi.go.id>). Dengan demikian fungsi komisi informasi pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan sengketa terkait informasi publik yang terjadi antara badan-badan publik dengan masyarakat. Dengan begitu KIPD tampak menjadi lembaga yang berfungsi ‘Diskursif’. Namun dalam realita rutinitas kehidupan masyarakat, keberadaan ini cenderung disalahartikan oleh masyarakat. Anggapan masyarakat KIP itu adalah institusi yang mengelola data atau dengan kata lain menjadi lembaga yang menjadi sumber data. Kekeliruan ini terungkap dari salah seorang informan dari KIP Provinsi Bengkulu, sbb.,

“.... Yang datang pada dasarnya mencari informasi. Atau artinya mencari apa sih kantor komisis informasi. Masyarakat pada umumnya dan birokrat pada khususnya menganggap bahwa komisi informasi ini adalah *gudangnya* informasi. Artinya yang ada di komisi informasi bisa diminta dan komisi informasi harus memiliki semua informasi. Ini awalnya. Oleh karena itu kita memberikan pencerahan ke masyarakat bahwa tugas kita pada dasarnya seperti ini. Bukan menjadi ‘gudang informasi’, siapapun mau datang kesini informasi sudah tersedia. Mereka beranggapan seperti itu. Semua dokumen itu harus dimasukkan kesini,. Itu awalnya.”

Secara struktural KPID Bengkulu sebagai salah satu institusi resmi pemerintah dalam hal fasilitasi ‘diskursif’ anggota masyarakat, dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya tampak masih terlihat fenomena ‘dualisme’⁶. Sesuatu yang dalam realitas sifatnya cenderung kontras (dalam hal ini KPID sendiri dan Dinas Kominfo Prov. Bengkulu), sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dengan fenomena tadi, akhirnya cenderung berakibat pada kinerja KPID itu sendiri. Fenomena ini sendiri dapat diketahui dari pengakuan salah satu anggota Komisioner sebagaimana diungkapkan berikut ini, :

“Dari tahun 2014 sudah dibentuk dan memang belum bisa berjalan dengan maksimal. Hingga tahun 2015 sudah mulai bergerak karena difasilitasi oleh pemda. Namun ada sedikit hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tadi. Yakni sekretaris komisi informasi, sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik berada di bawah dinas Kominfo provinsi. Sehingga sekretaris yang ada di komisi informasi belum ada eselonisasinya. Semuanya adalah PLT yang dikeluarkan oleh kadis kominfo provinsi Bengkulu. Kita sudah ke sekeretaris daerah, semuanya terbentur pada aturan tersebut.”

Fenomena dualisme tadi, yang nota bene mengaggu kinerja KPID itu sendiri, dalam realitasnya antara lain itu berkaitan dengan soal ‘power’. *Power* di sini maksudnya ‘titik-titik’ memusatnya kekuasaan yang ada terkait keberadaan KPID. ‘Titik-titik’ kekuasaan dimaksud, seperti dikatakan Mintzberg (dalam <http://amr.aom.org/content/9/2/207.short>) terkait dengan : (1) *by considering relationships of power distribution inside an organization with that around it, a typology of six configurations of organization power is produced*; (2) *by considering intrinsic forces that work within each of these configurations to destroy it, the likely transitions between these configurations are identified*; and (3) *by stringing these transitions together in sequences over time as organizations survive and develop, the model is developed*.

Dengan demikian KPID dalam realitasnya terkait dengan perjalanan fungsinya sebagai fasilitator diskursif anggota masyarakat, cenderung menjadi tidak independen. Ketidakindependenan ini seperti tampak dari pengakuan salah satu informan berikut ini,

“...Di sini sekretaris komisi informasi merupakan jajaran dari dinas kominfo provinsi jambi. Dan KPA di komisi informasi menyatu dengan dinas kominfo provinsi Bengkulu Kami sebagai ketua komisi informasi bukan merupakan KPA. Semua perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang menetapkan kepala dinas kominfo selaku KPA. Dan kepala sekeretarisnya di komisi informasi hanya PLT. Sedangkan KPID, sudah ada eselonnya. Semuanya tergantung SK gubernur, jika melihat sekretaris komisi informasi setara dengan dinas-dinas maka ditetapkan eselonisasi. Kita bandingkan dengan KPID, dibebankan kepada APBD. Sekretaris KPID adalah eselon 3a. Dan ada kepala seksi di bawahnya, yakni eselon 4a. Kami tidak juga mengharapkan agar di komisi informasi setara dengan kepala dinas, kami hanya mengharapkan eselonisasi agar administrasi, tugas kami lancar....”

Di sisi lain, di tengah ketidakindependenan-nya tadi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator *discursif*, dalam realitanya KPID tampak tetap masih berupaya eksis. Dalam hubungan ini malah tampak mendapat respon yang baik dari masyarakat. Ini setidaknya muncul dari seorang wartawan Bengkulu Ekspres, di mana disebutkannya bahwa, sbb. :

“Sudah bagus, kadang membantu menyelesaikan sengketa informasi publik. Baik itu media atau LSM. Saya melihat komisionernya sudah berperan aktif dalam menyelesaikan itu. Dan beberapa kali juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat juga. Kepada media juga.”

Bahkan eksistensi dimaksud sendiri menampakkkan adanya pengembangan. Gejala tersebut seperti sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan berikut ini ;

⁶ doktrin bahwa realitas terdiri dari dua elemen dasar yang berlawanan, yang sering dianggap sebagai pikiran dan materi (atau pikiran dan tubuh), atau kebaikan dan kejahatan. (<https://www.vocabulary.com/dictionary/nl/dualisme>)

“...Peningkatan dari segi penanganan perkara, tiap tahun kasus sudah mulai meningkat. Di tahun 2014, ada 28 perkara. 2015 ada 56 perkara. 2016 di bulan juni terdapat 14 perkara lagi yang masuk”.

Gejala peningkatan aktifitas diskursif yang berwujud dalam ‘perkara’ tadi sendiri, menurut informan bukan karena pihak KPID rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau organisasi masyarakat seperti LSM. Hal ini seperti diakui seorang informan. “.....Kalau LSM, kita belum pernah mendatangi LSM..... kita belum sosialisasi secara aktif kepada masyarakat. Tapi.....”.

Berdasarkan fenomena pengembangan aktifitas diskursif sebelumnya, mengindikasikan bahwa terjadinya pengembangan itu bukan karena proaktif pihak KPID mengenalkan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat melalui sosialisasi. Akan tetapi melalui penjelasan informan ternyata peningkatan aktifitas diskursif itu mungkin karena hasil dari publikasi media massa tentang KPID Provinsi Bengkulu saat pelantikan komisioner KPID, sehingga anggota masyarakat sudah tahu sejak awal. Argumen ini terungkap dari penjelasan seorang informan dari KPID Provinsi Bengkulu, sbb. :

“.....mungkin masyarakat atau LSM *tau* karena memang dari awal pelantikan. Kita dimasukkan ke media massa. Pada saat melakukan kunjungan-kunjungan ke instansi vertikal, baik itu kapolda, kejati, BUMN seperti pelindo, atau PLN mungkin waktu itu karena terpublish ke media. Kemungkinan itu awalnya. Artinya setelah terpublik ke media, ada beberapa orang, atau masyarakat, atau LSM, datang bertanya langsung. Tapi tidak ada yang *menggerakkan* atau *mendorong*.....”.

Terkait dengan dinamika aktifitas pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga diskursif tadi, KIP Provinsi mengakui lebih banyak *menangani* kasus informasi publik yang berkaitan dengan satuan-satuan kerja (Satuan Kerja) negeri, dan hanya relatif kecil yang berasal dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Hal ini sendiri terungkap dari pengakuan salah seorang komisioner saat ditanyakan perihal informasi publik yang disengketakan, sbb. :

“Hampir 90 persen itu negeri. Yang BUMD baru PDAM Tirta Darma”.

Dalam kaitan dominannya instansi negeri tadi, menurut pengakuan informasi lainnya, maka sengketa itu umumnya terjadi antara dinas instansi dengan pihak LSM. Ini terungkap dari pengakuan informan, “....Namun saya melihatnya paling banyak *sengketa itu muncul antara dinas instansi dengan LSM*. Namun dengan media, sangat jarang terjadi sengketa informasi....”.

Kemudian, berkaitan dengan kasus sengketa informasi publik yang diajukan sebelumnya, dalam dinamika realitasnya, meskipun KIPD mengacu pada prinsip ‘keterbukaan informasi’, namun ada kalanya KIPD tidak konsisten dalam melaksanakannya. Ketidakkonsistenan ini menurut informan karena berhubungan dengan hal-hal yang *screat* (rahasia) seperti menyangkut keputusan pengadilan. Fenomena ini sendiri tampak dari salah seorang informan, sebagaimana disajikan berikut ini :

“....Ada beberapa sifatnya yang rahasia. Artinya keputusan kita hanya diberikan kepada orang yang berkepentingan. Yaitu dokumen HGU, yakni berhubungan dengan pt sim, pt agya andalas, dan pt. Wespoirut. Ada dari walhi, karena walhi ini diberikan oleh warga sekitar yang sedang berkonflik dengan lahan HGU itu. Terkait dengan 3 perusahaan tersebut. Kemudian walhi mengajukan permohonan. Dan keputusan kita hanya memberikan kepada orang yang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik bukan untuk disebarluaskan. Pertama keputusan kita dibanding oleh BPN. Dan PN menguatkan keputusan kita. Selanjutnya BPN melakukan kasasi ke MA. Dan kasasi juga turut menguatkan kita. Itu mungkin yang agak secret. Karena hanya diberikan ke yang berkepentingan karena berusaha menyelesaikan konflik di daerah itu. Selebihnya merupakan kaitan dengan LKA, DPA, keputusan kontrak, dan semuanya sudah seharusnya terbuka semestinya.”.

Fenomena ketidakkonsistenan sebelumnya, kiranya itu merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan pihak KIPD. Kesalahan ini berkaitan dengan soal keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHP.

2. Eksistensi Publikasi Aktifitas Diskursif KIPD Provinsi Bengkulu

Aktifitas diskursif yang dilakukan anggota masyarakat dapat berlangsung melalui *public space*. *Public space* dimaksud secara teoritis yakni seperti warung-warung kopi dan termasuk tentunya instansi negeri seperti KIPD Provinsi Bengkulu tadi. Terkait dengan KIPD ini, maka dalam hubungannya dengan upaya KIPD Provinsi Bengkulu untuk mempublikasikan aktifitas diskursifnya, dalam dinamikanya instansi tersebut memang sudah tampak sudah berupaya merealisasikannya. Realisasi dimaksud sebagaimana diakui informan wartawan, biasanya dilakukan KIPD dengan mengundang wartawan atau dengan cara-cara lainnya. Sebagaimana diungkapkan wartawan, sbb. “

“...Biasanya mereka mengundang di acara Konferensi pers. Dan biasanya wawancara sistem cekat. Ketemu dimana lalu wawancara. Itu dilakukan selain pres release. Misalkan janji ketemu dimana, tanya ada informasi apa...”.

Publikasi aktifitas diskursif sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam realita kehidupan masyarakat tampaknya memang sangat perlu dilakukan oleh pihak KIPD. Hal ini mengingat persoalan informasi publik dan KIPD masih relatif kurang populer dikalangan masyarakat luas. Namun dalam realitasnya, tampaknya KIPD belum maksimal melakukan aktifitas dimaksud. Hal ini tercermin dari pengakuan seorang informan. Menurutnyasbb.:

“...Mungkin pernah, namun tampaknya volumenya itu tidak sering. Dan mungkin sangat jarang. Biasanya hanya dalam kegiatan tertentu saja. Kata wartawan saat ditanyakan tentang perlu tidaknya KIPD mempublikasikan aktifitasnya kepada masyarakat luas.....Untuk masyarakat juga banyak yang belum tahu. Untuk media masih kurang meliput..... Animo masyarakat belum cukup besar. Sebagian masyarakat belum paham dan mengetahui. Sejauh ini yang memanfaatkan adalah wartawan mingguan dan LSM. Yang seringkali terlibat sengketa dengan dinas...”.

Fenomena lain yang mengindikasikan bahwa KIPD belum maksimal dalam berupaya memaksimalkan publikasi aktifitas diskursifnya yaitu ditandai dengan belum aktifnya pihak KIPD mengisi rubrik informasi publik yang disediakan oleh Pihak Redaksi Bengkulu Ekspres. Di samping juga tidak mengundang pihak wartawan untuk meliput sidang-sidang perkara sengketa informasi publik. Fenomena ketidakmaksimalan ini sendiri terungkap dari paparan pengakuan seorang informan, sbb. :

“...Sifatnya kerjasama sejauh ini sudah dilakukan. Namun belum diisi oleh KI. Yakni rubrik informasi publik. Ini menyangkut rubrik khusus menyangkut jika ada informasi publik yang ingin disampaikan. Biasanya menyangkut biaya dan sebagainya. Seringkali KI menyatakan belum ada anggaran untuk ke situ.Kalau penawaran ke KI sudah pernah dilakukan oleh pihak PE (marketing). Tapi yang disetujui hanya publikasi kegiatan saja. Mereka ada kegiatan lalu publikasi. Namun jika untuk membuka ruang kepada masyarakat untuk melapor, atau pengumuman di media belum ada. Atau misalkan ada masyarakat yang mau melaporkan kan bisa ke center KI di media. Itu belum ada juga.....

Mengacu pada teori Daniel Katz (2006) sebelumnya tentang organisasi modern, maka terkait temuan belum maksimalnya upaya KIPD Provinsi Bengkulu dalam mempublikasikan aktifitas diskursifnya melalui rubrik yang tersedia di media Bengkulu Ekspres, kiranya ini menandakan bahwa pihak KIPD Provinsi Bengkulu belum berusaha beradaptasi dengan lingkungannya.

D. Diskusi

Pada hakikatnya, sesuai dengan gejala yang ada penelitian ingin berusaha mengetahui eksistensi fenomena ‘diskursif’ di lingkungan lembaga KIP (D) Provinsi Bengkulu. Permasalahannya difokuskan pada dua eksistensi, yaitu eksistensi fenomena diskursif dan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD provinsi Bengkulu.

Eksistensi fenomena aktifitas ‘diskursif’ di lingkungan KIPD Provinsi Bengkulu di antaranya yang sangat menonjol yaitu menampakkan indikasi ‘dualisme’ dalam prakteknya. Fenomena ini tampaknya memang relevan dengan apa yang diasumsikan oleh Mintzberg sebelumnya bahwa itu terutama berkaitan dengan point “1” bahwa : (1) *by considering*

relationships of power distribution inside an organization with that around it, a typology of six configurations of organization power is produced; (2) by considering intrinsic forces that work within each of these configurations to destroy it, the likely transitions between these configurations are identified; and (3) by stringing these transitions together in sequences over time as organizations survive and develop, the model is developed. (dalam <http://amr.aom.org/content/9/2/207.short>).

Terkait dengan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD provinsi Bengkulu, temuan memperlihatkan bahwa KIPD dimaksud tampaknya belum maksimal dalam berupaya mempublikasikan aktifitas diskursifnya. Ketidakmaksimalan ini, dengan mengacu pada teori organisasi modern-nya Daniel Katz (2006), ini mengindikasikan bahwa KIPD dimaksud masih kurang berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu pula maka pihak KIPD Provinsi Bengkulu secara relative masih cenderung kurang memaksimalkan fungsi KIPD sebagai *a public sphere or a public place* yang nota bene menjadi sarana diskursif bagi warga dan pengelola badan-badan publik tentang persengketaan informasi publik.

Tekait fenomena ketidakmaksimalan sebelumnya, maka pihak fasilitator diskursif yang ada di KIPD, maka terkait upaya pemaksimalan publikasi aktifitas diskursifnya tadi, kiranya perlu untuk memahami lebih jauh mengenai hakikat eksistensi KIPD terkait teori normatif *Public Sphere* Habermas.

Selain itu, dari segi riset maka bagi para akademisi yang tertarik terhadap persoalan yang sama, kiranya perlu untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena eksistensi dimaksud dan dalam kaitan itu -kiranya perlu melakukan penelitian lebih lanjut melalui metode etnografi. Dengan metode dimaksud maka akan diperoleh deskripsi terkait dengan ‘pemaknaan’ para fasilitator KIPD dalam fungsinya sebagai instansi ‘diskursif’. Suatu ‘pemaknaan’ yang nota bene tentunya dapat dijadikan bagi pengembangan kualitas KIPD di masa mendatangnya,

III. PENUTUP

Kesimpulan Saran

Pada hakikatnya, sesuai dengan gejala yang ada penelitian ingin berusaha mengetahui eksistensi fenomena ‘diskursif’ di lingkungan lembaga KIP (D) Provinsi Bengkulu. Permasalahannya difokuskan pada dua eksistensi, yaitu eksistensi fenomena diskursif dan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD provinsi Bengkulu.

Eksistensi fenomena aktifitas ‘diskursif’ di lingkungan KIPD Provinsi Bengkulu di antaranya yang sangat menonjol yaitu menampakkan indikasi ‘dualisme’ dalam prakteknya. Fenomena ini muncul terutama berkaitan dengan *a typology of six configurations of organization power is produced;*

Terkait dengan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD Provinsi Bengkulu, maka memperlihatkan bahwa KIPD dimaksud masih kurang berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu pula maka pihak KIPD Provinsi Bengkulu secara relative masih cenderung kurang memaksimalkan fungsi KIPD sebagai *a public space or a public place* yang nota bene menjadi sarana diskursif bagi warga dan pengelola badan-badan publik tentang persengketaan informasi publik.

Melihat sejumlah kelemahan KIPD Provinsi Bengkulu terkait fungsinya sebagai *public space* yang memfasilitasi warga untuk ber-diskursif tentang persengketaan informasi publik, maka secara peraktis guna pemaksimalan fungsinya tadi, kiranya pihak pengelola KIPD perlu meminimalisir pengaruh-pengaruh faktor ‘dualisme’ dalam aktifitas pemfasilitasian aktifitas diskursif. Selain itu, pihak KIPD juga perlu memaksimalisir publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD Provinsi Bengkulu dengan cara meningkatkan upaya-upaya adaptasi dengan lingkungannya, terutama seperti dengan pihak media misalnya. Bagi akademisi yang tertarik persoalan serupa maka untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena eksistensi dimaksud kiranya perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode etnografi.

Ucapan Terima kasih : Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tim Redaksi JSKM, terutama Bapak Hasyim Ali Imran, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk penulis dalam rangka kepentingan perbaikan redaksional.

Daftar Pustaka

- Atmoko, Ismail Jiwo. "ANALISA FAKTOR-FAKTOR EKSISTENSI ORGANISASI , Studi Kasus Konflik Antara Brajamusti dengan The Maident". dalam *etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/87493/.../SI-2015-304919-tableofcontent.pdf*.
- Baburrahman. 2014. "KONSEP-KONSEP DASAR TEORI DISKURSUS", di sarikan dari Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Trans Institute. Di akses 28 April 2017.
- De Fleur, Melvin L. & Rokeach, Sandra-Ball. 1982. *Theories of Mass Communication*, Fourth Edition, New York & London, Longman, 1982.
- Habermas, Jurgen. *The Theory of Communicative Action Vol 1 Reason and The Rationalization of Society*. Boston. Beacon Press.
- Katz, Daniel & Kahn, Robert L. *The Social Psychology of Organizations*. Dalam Becker & Neuhauser *The Efficient Organization*. New York. Elsevier. 2006.
- Komisi Informasi . "category/profil/tugas-dan-fungsi. <https://www.komisiinformasi.go.id>).
- Jalal, Moch. Praktik Diskursif, *The Theory of Truth* Michel Foucault dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa di Indonesia. Surabaya. Universitas Airlangga. *journal.unair.ac.id/filerPDF/Praktik%20Diskursif.pdf*, accessed. April, 28. 20017.
- [Mintzberg](http://amr.aom.org/content/9/2/207.short), Henry . "Power and Organization Life Cycles". <http://amr.aom.org/content/9/2/207.short>, diakses, 10 Juli 2017.
- Zaenal, Abidin. "TINJAUAN PUSTAKA, Pengertian Eksistensi". *digilib.unila.ac.id/4230/14/BAB%20II.pdf*

TELEVISI DAN MASYARAKAT PERKOTAAN
(Survei Kebiasaan Menonton TV Masyarakat Kelurahan Tammamaung
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)

TELEVISION AND URBAN PEOPLE
(Survey on Public TV Watching Habit in Tammamaung Village Community
Sub-district Panakkukang Makassar City South Sulawesi Province)

Rukman Pala

Peneliti Madya pada BBPPKI Makassar

(Naskah diterima melalui submit pertama penulis 23 Agustus 2017; Revisi 6 September 2017;
Disetujui terbit 23 Oktober 2017.)

ABSTRACT

Network Society is one of the many concepts initiated by experts to describe the phenomenon of community communication activity through use of information and communication technology (ICT) or also known as communication and informatics technology (ICT). This research wants to understand related phenomenon of individual communication activity of society in context Network Society. The phenomenon of activity in question is phenomenon of various activity habits, range of activity targets, level of frequency of activity, and linkage of individual characteristics of users of social network websites with various activities. This research uses positivistic paradigm and through survey method as its data collection technique. The study population were adult residents at 9 RW and 40 RT in Tamalanrea Indah Village, Tamalanrea District. Population population in the region referred to as many as 14,055 inhabitants. Sampling size of this study using accidental sampling, which is 150. Conclusions from this study indicate that (1) the age relationship of MDGs category with type of habit, statistically there is no significant relationship related to age of MDGs respondents with internet access. (2) The correlation between education level and type of habit, statistically related to the relationship between these two variables does not indicate any significant significance. In other words statistically the educational level of the individual tends not to determine the type of habit in social media access.

Keywords: *Network Society, Internet, Communication Activity.*

ABSTRAK

Network Society merupakan salah satu konsep yang banyak digagas para ahli untuk menggambarkan fenomena aktivitas komunikasi masyarakat melalui penggunaan *information and communication technology (ICT)* atau dikenal juga dengan teknologi komunikasi dan informatika (TIK). Penelitian ini ingin memahami terkait fenomena aktivitas komunikasi individu masyarakat dalam konteks *Network Society*. Fenomena aktivitas yang dimaksud adalah fenomena ragam kebiasaan beraktivitas, ragam sasaran aktivitas, tingkat keseringan beraktivitas, dan keterkaitan karakteristik individu pengguna *social network websites* dengan ragam aktivitas. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dan melalui metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya. Populasi penelitian adalah para penduduk berusia dewasa di 9 RW dan 40 RT di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea. Populasi penduduk di wilayah dimaksud sebanyak 14.055 jiwa. *Sampling size* penelitian ini menggunakan *Aksidental Sampling*, yakni sebesar 150. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hubungan usia kategori MDGs dengan jenis kebiasaan, secara statistik tidak ada hubungan yang berarti terkait usia MDGs responden dengan akses internet. (2) Hubungan tingkat pendidikan dengan jenis kebiasaan, secara statistik terkait hubungan di antara kedua variabel ini tidak menunjukkan ada signifikansi yang berarti. Dengan kata lain secara statistik tingkat pendidikan individu cenderung tidak menentukan jenis kebiasaan dalam akses media sosial.

Kata Kunci : *Network Society, Internet, Aktivitas Komunikasi.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Asumsi bahwa perubahan budaya dalam kehidupan manusia ditentukan oleh teknologi, dicetuskan oleh McLuhan (dalam Griffin :2003). Pencetusan gagasannya sendiri didasarkan pada pendapatnya mengenai pembagiannya atas periodisasi sejarah manusia yang menjadi empat, di mana periode *electronic age* , selain menjadi periode terakhir juga menjadi salah satu dari keempat periodisasi tadi yang fasenya mencakup *tribal age*, *literacy age*, dan *print age*, Periode pada fase *electronic age* sendiri dimaksudkan McLuhan sebagai zaman elektronik yang ditandai dengan penemuan telegraf, radio dan televisi.

Apa yang telah diasumsikan McLuhan jauh sebelumnya sebelum kehadiran ujung dari fase *electronic age* yang fenomenal saat ini, yaitu internet sebagai alat komunikasi elektronik, dalam realitas kehidupan manusia kekinian, berindikasi memang banyak ditemukan kebenarannya. Salah satu indikasi itu setidaknya tampak dari fenomena persoalan *pervasive computing*.

Pervasive computing bermakna suatu lingkungan di mana sejumlah teknologi (terutama teknologi komputer) digunakan dan menyatu di dalam objek dan aktivitas manusia sehari-hari. Dengan fenomena *pervasive computing* menjadikan perilaku budaya anggota masyarakat terkondisi menjadi berubah dari yang sebelumnya konvensional/analog kini menjadi digitalisasi (mengundang, memberi hadiah, berdiskusi kelompok dan lain sejenisnya melalui internet).

Fenomena *pervasive computing* dalam kaitannya dengan fenomena televisi (*broadcast*) dan *audience*, dalam realitasnya juga cenderung mengindikasikan gejala serupa sebelumnya. Dalam rutinitas kehidupan sehari-hari kerap ditemukan ragam anggota masyarakat dalam mengakses isi program acara televisi. Dari segi menonton, di samping masih banyak memang yang melakukannya dengan cara –cara konvensional, tapi tidak sedikit juga kerap dijumpai melalui cara-cara inkonvensional. Dari segi *broadcast* juga demikian, kalau sebelumnya hanya dilakukan dengan cara-cara analog, kini berubah melalui *cara streaming*.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, lebih jauh penelitian ini bermaksud memahami fenomena perubahan budaya terkait dengan televisi (*broadcast*). Fenomenanya difokuskan pada fenomena penonton (*tv audience*). Sejalan dengan fokus dimaksud, maka penelitian ini merumuskan permasalahannya menjadi sbb.: *Bagaimanakah Kebiasaan Menonton TV Masyarakat ?*

B. Signifikansi

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil-hasil studi sejenis yang telah ada sebelumnya. Sebagai termasuk studi awal terkait dengan fenomena perubahan budaya (komunikasi bermedia), hasil studi ini diharapkan juga dapat menjadi masukan penting (bukti empirikal) dalam upaya memahami fenomena perubahan budaya berkomunikasi dalam masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Konsep-Konsep Teoritik

a. Kebiasaan dan kebiasaan menonton tv

Dalam kamus *Merriam Webster* disebutkan bahwa kebiasaan itu sebagai *habitual* yang berarti *regularly or repeatedly doing or practicing something or acting in some manner*. (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/habitual>). 29Juli 17).

Ini berarti bahwa Kebiasaan sebagai sesuatu yang secara teratur atau berulang kali melakukan atau mempraktikkan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu. Dengan demikian intinya adalah keteraturan atau keberulangan terkait tindakan tertentu.

Lebih jauh juga disebutkan pihak lainnya bahwa “kebiasaan itu merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama (Joko. 2008:24, dalam digilib.unila.ac.id/7451/16/BAB%20II.pdf, accessed July , 28, 2017). Sementara pengertian lainnya yaitu bahwa kebiasaan merupakan pengulangan sesuatu secara terus-menerus atau dalam sebagian besar waktu dengan cara yang sama dan tanpa hubungan akal, atau dia adalah sesuatu yang tertanam di dalam jiwa dari hal-hal yang berulang kali terjadi dan diterima tabiat”. (Sayid 2006:347, dalam digilib.unila.ac.id/7451/16/BAB%20II.pdf, accessed July , 28, 2017). Termasuk juga ada yang mengartikan kebiasaan adalah perbuatan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama, sehingga menjadi adat kebiasaan dan ditaati oleh masyarakat.(Asih, 2010:38, dalam digilib.unila.ac.id/7451/16/BAB%20II.pdf, accessed July , 28, 2017).

Dari sejumlah pengertian mengenai kebiasaan sebelumnya memperlihatkan bahwa dalam ‘kebiasaan’ kesemua pihak pada intinya menekankan adanya pengulangan atas suatu tindakan. Dalam kaitannya dengan konsep menonton tv, maka konsep

kebiasaan menonton dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan yang sifatnya mengandung perulangan terkait dengan aktivitas menonton tv. Kebiasaan ini misalnya seperti meliputi : -dorongan yang biasa utk menonton tv; -jenis tv yang ditonton ; - jenis media yang biasa digunakan ; - frekuensi yang biasa diluapkan nonton tv; -Durasi yang bisa dihabiskan ; -tempat biasa yg digunakan nonton tv; dan -jenis media tv yg biasa digunakan dalam kehidupan rutinitas.

Menyimak sejumlah contoh ‘kebiasaan menonton tv’ sebelumnya kiranya itu menyiratkan fenomena aktivitas khalayak sebagaimana digambarkan Levy dan Windahl (1985) berdasarkan hasil pengembangannya dari konsep *uses* dalam model *theory Uses and Gratification*-nya Kazt, Gurevitch dan Hass. Aktifitas khalayak sendiri berarti anggota khalayak itu mengarahkan dirinya sendiri pada proses komunikasi .

Aktifitas khalayak dijelaskan Levy dan Windahl (1985) dibagi dua dimensi. Pertama, dimensi orientasi khalayak, terdiri dari tiga level, yakni selektifitas, keterlibatan dan pemanfaatan. Dimensi kedua urutan komunikasi, membedakan aktifitas berdasarkan saat terjadinya : sebelum, selama, dan sesudah terpaan media (dalam, Gayatri, 1997:4). Jika aktivitas dimaksud dikaitkan dengan sejumlah indikator fenomena kebiasaan menonton tv sebagaimana dicontohkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa sejumlah indikator itu mencerminkan fenomena aktivitas komunikasi pada dimensi kedua, urutan komunikasi, aktivitas sebelum, selama dan sesudah. Aktivitas khalayak ‘sebelum’ ditandai dengan indikator -dorongan yang biasa utk menonton tv. Aktivitas khalayak ‘selama’ ditandai melalui :-jenis tv yang ditonton ; - jenis media yang biasa digunakan ; - frekuensi yang biasa diluapkan nonton tv; -Durasi yang biasa dihabiskan ; -tempat biasa yg digunakan untuk nonton tv; dan -jenis media tv yg biasa digunakan dalam kehidupan rutinitas. Sementara Aktivitas khalayak ‘sesudah’ tidak menjadi obyek garapan dalam studi ini.

b. *Pervasive computing*

Pervasive computing merupakan sebuah konsep dalam terminologi *ICT* (ilmu komputer). Dengan konsep dimaksud dijelaskan bahwa perkembangan *ICT* menyebabkan kehidupan masyarakat jadi terintegrasi dengan dinamika *ICT*.

Konsep *Pervasive computing* seiring dengan fenomenanya dalam kehidupan masyarakat sempat menggiring wacana tentang bentuk teknologi atau bukannya konsep dimaksud. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk suatu teknologi dan ada juga yang bilang bukan bentuk teknologi. Salah seorang akademisi berpendapat *Pervasive computing* bukan teknologi, tetapi didukung oleh sejumlah teknologi yang setiap saat bisa berubah. *Pervasive Computing* bukan teknologi, tapi suatu lingkungan. *Pervasive computing* adalah suatu lingkungan di mana sejumlah teknologi (terutama teknologi komputer) digunakan dan menyatu di dalam objek dan aktivitas manusia sehari-hari, sehingga kehadirannya tidak dirasakan sebagai sesuatu yang khusus. (<https://kupalima.wordpress.com/2008/04/09/pervasive-computing/>).

Sebagai sebuah bentuk lingkungan, fenomena *Pervasive Computing* pada gilirannya dapat membentuk individu masyarakat menjadi individu yang *perpasive*. Individu yang *perpasive* bermakna individu yang teresapi atau terintegrasi dengan dinamika komputer. *Pervasive Computing* pada awalnya diadopsi dari kata *perpasive*. *Pervasive* sendiri berarti ‘meresap’. (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/pervasive>).

Pengertian meresap dalam kata *pervasive* bahwa teknologi tersebut semakin menyatu kepada pemakai dan lingkungannya, sehingga kehadirannya semakin tidak terasa lagi, menjadi perangkat yang bukan khusus lagi dan tidak disadari kehadirannya oleh kita. Contoh paling sederhana adalah “telpon selular”. Setiap orang sudah tidak melihatnya sebagai suatu perangkat khusus, tetapi itu adalah bagian dari setiap individu di dalam masyarakat modern. (<https://kupalima.wordpress.com/2008/04/09/pervasive-computing/>).

2. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

- a. Kebiasaan adalah sebagai sesuatu tindakan yang sifatnya mengandung perulangan terkait dengan aktivitas menonton tv. Kebiasaan menonton berarti sebagai sesuatu

tindakan yang sifatnya mengandung perulangan terkait dengan aktivitas menonton tv. Kebiasaan ini meliputi : -dorongan yang biasa utk menonton tv; -jenis tv yang ditonton ; - jenis media yang biasa digunakan ; - frekuensi yang biasa diluapkan nonton tv; - Durasi yang bisa dihabiskan ; -tempat biasa yg digunakan nonton tv; dan -jenis media tv yg biasa digunakan dalam kehidupan rutinitas.

- b. *Pervasive computing* adalah suatu lingkungan dimana sejumlah teknologi (terutama teknologi komputer) digunakan dan menyatu di dalam objek dan aktivitas manusia sehari-hari, sehingga kehadirannya tidak dirasakan sebagai sesuatu yang khusus. Fenomena *pervasive computing* dalam kaitannya dengan fenomena televisi (*broadcast*) dan *audience*, dalam realitasnya akan dilihat dari rutinitas kehidupan sehari-hari kehidupan anggota masyarakat terkait dengan aktivitas mengakses isi program acara televisi.

3. Metode Penelitian

Sampling area penelitian ini adalah RW 4 dan RW 5 Kelurahan Tamamaung yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dari populasi RW sebanyak delapan (8). Populasi sampel adalah penduduk di kedua RW sampel dengan jumlah sebanyak 5967 dengan rincian : RW4 = 3074 dan RW 5 = 2893. Penentuan sampel yang dikuota sebanyak 140 ditentukan dengan cara purposive melalui teknik *aksidental sampling*

Propinsi Sulawesi Selatan:

Kota Makassar 1747562 orang

Kecamatan Panakkukang 267541 orang

Kel tamamaung (8 rw) = 4590

RW 5 = 2893 = 576 KK dan

RW 4 = 3074 = 628 KK

----- +

5967 jiwa

4. Penyajian dan Analisis Data

a. Karakteristik Responden

Terkait dengan fenomena karakteristik responden ini, temuan memperlihatkan bahwa mereka itu bagian terbesarnya (56 %) terdiri dari kaum perempuan, jumlahnya sedikit lebih banyak dari pada kaum lelaki yang sebanyak 43,6%. Dari segi usia dalam kategori MDGs, mereka tampak berasal dari empat generasi, namun dari pola distribusi datanya mengindikasikan bahwa kalangan responden ini bagian terbesarnya (48.65%) terdiri dari kalangan generasi *millenium* (tahun Lahir > 1982). Cukup banyak juga jumlahnya yang berasal dari kalangan Xers (Tahun Lahir 1965 - 1982), jumlahnya sebanyak 34.3%. Begitu juga dengan kalangan generasi *Baby Boomers* (Tahun Lahir 1946-1964), jumlahnya pun tidak sedikit juga, yaitu 16.4%. Hanya kalangan *Veteran* (Tahun Lahir < 1946) yang jumlahnya diketahui relatif kecil (0,%) .

Responden yang diketahui umumnya beragama Islam ini, dari segi pendidikan yang mereka tamatkan juga diketahui bahwa mereka itu sebagian besarnya (58,3%) tamat SLTA. Tidak sedikit juga (27.1%) diantaranya yang sudah berpendidikan tinggi. Sementara mereka yang hanya menamatkan SD dan SLTP jumlahnya relatif kecil dengan proporsi antara 4-3 %.

Mereka diketahui juga berkerja pada tujuh jenis pekerjaan. Diketahui tidak jenis pekerjaan yang dominan di kalangan mereka itu. Mereka cenderung hampir berimbang antara yang bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa (22.9%); Ibu rumah tangga (23.6%) dan yang berkerja sebagai pegawai swasta (25,7%). Sementara yang bekerja sebagai Wira usaha jumlahnya juga tidak sedikit, yaitu sebanyak 11.4%. Sedang jenis pekerjaan lainnya seperti Pensiunan, Pedagang dan PNS, poporsinya berkisar 2 hingga 11 %. (lihat tabel 1).

Tabel 1
Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaab		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruh	3	2.1	2.1	2.1
	Pedagang	7	5.0	5.0	7.1
	Wira usaha	16	11.4	11.4	18.6
	PNS	8	5.7	5.7	24.3
	Pegawai Swasta	36	25.7	25.7	50.0
	Pelajar/Mahasiswa	32	22.9	22.9	72.9
	Guru/Dosen	2	1.4	1.4	74.3
	Ibu rumah tangga	33	23.6	23.6	97.9
	Pensiunan	3	2.1	2.1	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Sumber, BBPPKI Makassar, 2016.

b. Kepemilikan produk *ICT*

Dari segi pengeluaran rata-rata per bulan, temuan memeperlihatkan bahwa responden itu bagian terbesarnya (51,4%) mengaku rata-rata mengeluarkan biaya per bulannya sebesar kurang dari 2 (dua) juta rupiah. Cukup banyak juga (27%) yang rata-rata pengeluarannya sebesar > 2 juta - 3 juta. Begitu juga yang pengeluaran rata-rata per bulannya itu > 4 juta rupiah, proporsi respondennya juga tidak sedikit, yaitu 12.9%. Selain itu ada juga (7.9%) yang mengaku pengeluaran rata-rata per bulannya itu antara > 3 juta - 4 juta.

Dalam kaitan gambaran data mengenai pengeluaran per bulan responden sebelumnya, riset ini menemukan bahwa dalam kaitannya dengan kepemilikan produk *ICT* seperti *lapt op*, *PC* dan *gadget*, tampak responden kebanyakan mengaku sudah memiliki *gadget*. Ada sebanyak 82.9 % responden yang mengaku demikian. Namun pada kepemilikan produk *ICT* lainnya seperti *PC* terkoneksi internet dan *Laptop*, tampa kebanyakan responden itu tidak memilikinya. Seperti *PC* terkoneksi internet, 68% responden mengaku belum memiliki produk dimaksud dan sementara *lap top* jumlah yang mengaku belum memiliki juga tak beda banyak juga jumlahnya, yaitu 62.1 %.

Menyangkut keterkaitan kepemilikan produk *ICT* dimaksud, maka dalam kaitan temuan menyangkut pengeluaran rata-rata per bulan responden sebelumnya, secara statistik tampak tidak adanya hubungan yang dignifikan di antara keduanya. Nilai *chi square* observasi dari hubungan menyangkut pemilikan dan pengeluaran rata-rata ini semuanya bernilai jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai *chi square* teoritis pada *df* 3 dengan α 0,05 yang sebesar 7.815.

Tabel 2
Responden Menurut Pengeluaran Rata-rata per bulan

Pengeluaran Rata-rata per bulan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 2 juta	72	51.4	51.4	51.4
	> 2 juta - 3 juta	39	27.9	27.9	79.3
	> 3 juta - 4 juta	11	7.9	7.9	87.1
	> 4 juta	18	12.9	12.9	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Sumber, BBPPKI Makassar, 2016.

c. Kebiasaan Menonton TV

Temuan penelitian memperlihatkan, terkait dengan tayangan isi siaran televisi, hampir semuanya (99.3%) responden mengakui bahwa mereka ‘biasa’ menontonnya. Hampir tidak ada (0.7%) diantaranya yang menyatakan bukan sesuatu hal yang ‘biasa’. Faktor pendorong responden menonton siaran televisi hampir sama banyaknya antara yang karena ‘Mencari dan menemukan informasi’ (43.6%) dan yang karena ‘Mengisi waktu senggang’ (42.9%). Ada juga diantaranya yang menonton tv karena untuk ‘Mengisi waktu senggang’, proporsinya 13.6 %.

Dalam kebiasaan mereka tadi itu, maka yang ditonton itu umumnya (88.6%) biasanya TV Biasa (Konvensional). Hanya sedikit (11.4 %) di antaranya yang mengakui biasa nonton tv online.

Selanjutnya, dari bagian kecil responden yang menyatakan ‘biasa’ nonton tv online tadi, maka media yang biasa digunakan responden jika menonton TV Online itu adalah media ‘Gadget (Handphone terkoneksi internet’ yang menonjol, yaitu sebanyak 8.6% responden yang mengakuinya. Sementara PC terkoneksi internet dan Laptop termasuk sangat sedikit yang biasa menggunakannya, proporsinya 0-2.0%.

Dari segi Frekuensi responden menonton TV dalam seminggu, maka responden bagian terbesarnya (45.0%) melakukannya ‘Hampir setiap hari’. Cukup banyak juga jumlahnya (37.9% yang melakukannya dengan frekuensi ‘setiap hari’. Sementara yang menontonnya dengan ‘sekali-sekali’, ada juga memang, namun jumlahnya tidak banyak, 15.7 %. Namun begitu, ada juga yang mengakui hampir tidak pernah menonton tv dalam seminggu terakhir, 1.4%.

Dalam kaitan durasi setiap kali menonton tv, maka temuan menunjukkan bahwa responden bagian terbesarnya (34.3%) meluangkan waktunya antara > 1 jam - 2 jam. Cukup banyak juga yang meluangkan waktunya antara > 3 jam - 4 jam (30.7%). Ada juga yang meluangkan waktunya antara > 4 jam - 5 jam, jumlahnya 21.4%. Sementara yang meluangkan waktu antara > 5 jam - 10 jam, responden yang termasuk *heavy viewer*, jumlahnya tidak banyak yaitu 7.8%.

Tempat responden biasanya menonton siaran televisi, kebanyakan (92.9%) dilakukan di rumah. Tempat lainnya seperti di luar rumah, di kantor dan di luar kantor, proporsinya berkisar 0.7 hingga 3.6%.

Menyangkut Jenis media yang dalam keseharian biasa digunakan responden untuk menonton siaran televisi, maka sebagian besar responden (88.6%) mengakui ‘Media TV Konvensional’. Sedikit saja (11.4%) diantaranya yang mengakui Media TV Online. Fenomena ini tentu agak mengherankan mengingat mereka itu pada umumnya (80.0%) mengetahui tentang keberadaan tv online saat ini. Sedikit saja (20%) diantaranya tidak mengetahui keberadaan tv online.

d. Hubungan karakteristik dengan Kebiasaan Menonton TV

Terkait hubungan kedua variabel dimaksud, maka hasilnya disajikan pada tabel-tabel berikut : Selanjutnya, dari masing-masing tabel dimaksud, datanya memperlihatkan hubungan yang tidak signifikan karena nilai chi square teoritisnya, pada alfa 0,05 dengan masing-masing df melalui hubungan tyang dua sisi, semuanya bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai chi square observasi.

1. Usia Kategori MDGs dengan Jenis TV yang biasa ditonton

Usia Kategori MDGs	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Signifikansi α 0,05	
			Ya	Tidak
Veteran	0	0	0	0
Baby Boomers	0	0	0	0
Xers	3	.667		7.815
Millenium (2	.324		5.991

Sumber : dimodifikasi dari hasil out put SPSS

2. Usia Kategori MDGs dengan Frekuensi menonton TV dan Jenis TV yang ditonton

Usia Kategori MDGs	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Signifikansi α 0,05	
			Ya	Tidak
Veteran	0	0	0	0
Baby Boomers	0	0	0	0
Xers	3	.667		7.815
Millenium	2	.324		5.991

Sumber : dimodifikasi dari hasil out put SPSS

3. Kepemilikan Produk ICT dan Pengeluaran rata-rata per bulan dengan Jenis TV yang Biasa ditonton

Jenis Produk ICT	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Signifikansi α 0,05	
			Ya	Tidak
Gadget	3	.273		7.815
Laptop	3	.002		7.815
PC terkoneksi internet	3	.325		7.815

Sumber : dimodifikasi dari hasil out put SPSS

4. Jenis Pekerjaan dengan Jenis TV yang biasa ditonton

Jenis Pekerjaan	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Signifikansi α 0,05	
			Ya	Tidak
Buruh	0	0	0	0
Pedagang	0	0	0	0
Wira Usaha	2	.587		5.991
PNS	2	.386		5.991
Pegawai Swasta	3	.207		7.815
Pelajar/Mahasiswa	1	.002		3.841
Guru/Dosen	1	.157		3.841
Ibu rumah tangga	2	.236		5.991

Sumber : dimodifikasi dari hasil out put SPSS

B. Diskusi

Fenomena *pervasive computing* dalam kaitannya dengan fenomena televisi (*broadcast*) dan *audience*, dalam realitasnya juga cenderung mengindikasikan gejala serupa sebelumnya. Dalam rutinitas kehidupan sehari-hari kerap ditemukan ragam anggota masyarakat dalam mengakses isi program acara televisi. Dari segi menonton, di samping

masih banyak memang yang melakukannya dengan cara –cara konvensional, tapi tidak sedikit juga kerap dijumpai melalui cara-cara inkonvensional. Dari segi *broadcast* juga demikian, kalau sebelumnya hanya dilakukan dengan cara-cara analog, kini berubah melalui *cara streaming*.

Berdasarkan latar belakang menyangkut fenomena televisi (*broadcast*) dan *audience* dalam hubungannya dengan fenomena *pervasive computing*, penelitian ini memperlakukan persoalan *Kebiasaan Menonton TV Masyarakat*.

Temuan penelitian terkait kebiasaan memperlihatkan, terkait dengan tayangan isi siaran televisi, hampir semuanya (99.3%) responden mengakui bahwa mereka ‘biasa’ menontonnya. Hampir tidak ada ada (0.7%) diantaranya yang menyatakan bukan sesuatu hal yang ‘biasa’. Faktor pendorong responden menonton siaran televisi hampir sama banyaknya

antara yang karena ‘Mencari dan menemukan informasi’ (43.6%) dan yang karena ‘Mengisi waktu senggang’ (42.9%).

Dalam kebiasaan mereka tadi itu, maka yang ditonton itu umumnya (88.6%) biasanya TV Biasa (Konvensional). Hanya sedikit (11.4 %) di antaranya yang mengakui biasa nonton tv online. Media yang biasa digunakan responden jika menonton TV Online itu adalah media ‘Gadget (Handphone terkoneksi internet’ yang menonjol, responden bagian terbesarnya (45.0%) melakukannya ‘Hampir setiap hari’. Cukup banyak juga jumlahnya (37.9% yang melakukannya dengan frekuensi ‘setiap hari’. Bagian terbesarnya (34.3%) meluangkan waktunya antara > 1 jam - 2 jam. Cukup banyak juga yang meluangkan waktunya antara > 3 jam - 4 jam (30.7%).

Tempat responden biasanya menonton siaran televisi, kebanyakan (92.9%) dilakukan di rumah. Menyangkut Jenis media yang dalam keseharian biasa digunakan responden untuk menonton siaran televisi, maka sebagian besar responden (88.6%) mengakui ‘Media TV Konvensional’. Fenomena ini tentu agak mengherankan mengingat mereka itu pada umumnya (80.0%) mengetahui tentang keberadaan tv online saat ini.

Berdasarkan data empirik terkait fenomena kebiasaan menonton tv sebelumnya, kiranya semuanya itu mengindikasikan adanya variasi dalam aktivitas audience. Variasi mana tentunya ini mencerminkan upaya responden dalam memenuhi kebutuhannya melalui penggunaan media. Gambaran yang tercermin melalui data empirik ini secara teoritis membuktikan relevansinya dengan asumsi yang dibangun oleh teori *uses and gratification*, bahwa dalam penggunaan media anggota khalayak itu mengarahkan dirinya sendiri pada proses komunikasi (Levy dan Windahl.1985)

Terkait dengan fenomena menyangkut Hubungan karakteristik dengan Kebiasaan Menonton TV, di mana secara statistik tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan, maka secara metodologis itu dimungkinkan terjadi oleh karena faktor-faktor tertentu. Diantaranya adalah seperti faktor variabel anteseden, variabel intervening, atau variabel extraneous yang tak terjangkau oleh dalam riset ini.

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan data empirik terkait fenomena kebiasaan menonton tv, kiranya semuanya itu mengindikasikan adanya variasi dalam aktivitas audience menggunakan media tv. Variasi mana tentunya ini mencerminkan upaya responden dalam memenuhi kebutuhannya melalui penggunaan media. Gambaran yang tercermin melalui data empirik ini secara teoritis membuktikan relevansinya dengan asumsi yang dibangun oleh teori *uses and gratification*, bahwa dalam penggunaan media anggota khalayak itu memang mengarahkan dirinya sendiri pada proses komunikasi (Levy dan Windahl.1985).

Terkait dengan fenomena menyangkut Hubungan karakteristik dengan Kebiasaan Menonton TV, di mana secara statistik tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan, maka secara metodologis itu dimungkinkan terjadi oleh karena faktor-faktor tertentu. Diantaranya adalah seperti faktor variabel anteseden, variabel intervening, atau variabel extraneous yang tak terjangkau oleh dalam riset ini.

Ucapan Terimakasih : Penulis mengucapkan terimakasih kepada tim redaksi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut berpartisipasi dalam mengisi JSKM pada edisi kali ini.

Daftar Pustaka :

- Asih, 2010:38, dalam *digilib.unila.ac.id/7451/16/BAB%20II.pdf*, accessed July, 28, 2017).
Joko. 2008., dalam *digilib.unila.ac.id/7451/16/BAB%20II.pdf*, accessed July, 28, 2017).
Levy, Mark dan Sven Windahl. 1985 “The Concept of Audience Activity”, dalam Rosengren, Werner dan Palmgreen (eds) *Media Gratification Research*. Beverly Hill : Sage.

Mc Luhan, Marshal, "Technology Determinism", In *A First Look at Communication Theory*, Fifth Edition, by EM Griffin, New York, McGraw Hill, 2003.

Sayid 2006:347, dalam *digilib.unila.ac.id/7451/16/BAB%20II.pdf*, accessed July , 28, 2017).

Tanpa Nama. Uses And Gratification Theory-dalam, <http://communicationtheory.org/uses-and-gratification-theory/>, (accessed, August, 24, 2015). Gayatri , 1997 : 4).

(<https://www.merriam-webster.com/dictionary/habitual>). 29Juli 17).

(<https://kupalima.wordpress.com/2008/04/09/pervasive-computing/>).

(<https://www.merriam-webster.com/dictionary/pervasive>).

Teori Difusi Inovasi – *Diffusion of innovations*

Teori difusi inovasi yang digagas oleh **Everett M. Rogers** adalah salah satu teori [komunikasi pembangunan](#) dan [teori komunikasi massa](#) yang diadopsi ke dalam ranah komunikasi pemasaran untuk menjelaskan proses suatu produk baru yang menyebar dalam pasar melalui pembelian oleh adopter. Proses melibatkan beberapa tahapan yang masing-masing tahapan memiliki beberapa faktor penting dalam perencanaan komunikasi pemasaran. Menurut Rogers, yang dimaksud dengan difusi adalah proses sebuah inovasi yang dikomunikasikan selama jangka waktu tertentu diantara anggota sebuah sistem sosial. Terdapat 5 (lima) kategori pengadopsi inovasi yaitu :

- **Innovator** – perintis.
- **Early adopters** – pelopor, pemuka pendapat yang berpendidikan tinggi dan terbuka pada ide-ide baru.
- **Early majority** – penganut dini yang bergantung pada sumber-sumber data informal.
- **Late majority** – penganut lambat yaitu mereka yang bersikap skeptis terhadap ide-ide baru dan hanya mengadopsi produk baru untuk alasan-alasan ekonomis dan sosial.
- **Laggards** – kaum kolot yaitu mereka yang menolak ide-ide baru dengan pemikiran yang tertutup dan berprestasi rendah.
Mereka yang perilakunya sebagian besar jatuh pada salah satu kategori di atas akan memiliki perilaku komunikasi yang berbeda seperti penggunaan media dan lain-lain.

REPRESENTASI IDEOLOGI APARATUR NEGARA DALAM MEDIA
(Studi Konstruksi Realitas wartawan Humas Pemda DKI
mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan Website beritajakarta.com)

REPRESENTATION OF STATE APPARATUS IDEOLOGY IN MEDIA
(Study of Construction Reality Pemprov DKI Public Relation Journalist about Environment in
Beritajakarta.com website News)

Launa

Dosen ilmu Politik pada Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta.
 (Naskah diterima 29 Agustus 2017 by email; diperiksa dan direvisi tim redaksi 4 September 2017;
 disetujui terbit oleh PR. 23 Oktober 2017)

ABSTRACT

This research is basically trying to find the ideology represented by state apparatus (Jakarta Public Relation Journalist) through the construction of reality about the environment of Local Government of DKI in news on beritajakarta.com website. From the results of the analysis related to the 'Minor Theme' (frame) and Government Apparatus Discourse, it is concluded that although journalists seem to position Jakarta Provincial Government as a 'positive' party in the construction of reality, they occasionally seem to attempt to position the parties in outside the Provincial Government of DKI in the discourse. Then it is related to the 'Government' interest (DKI) versus 'Public Interest', it is concluded that in reality construction the reporters tend to be more in favor of the Jakarta Provincial Government as their 'master'. Then related to the "Apparatus Ideology Behind the News on the environment of the Local Government of DKI in beritajakarta.com website", then starting from the argument concerning the concept of governance and government, it can be identified and interpreted that: the apparatus ideology behind the news, it seems more representative ideology of government rather than the ideology of governance. Thus, the dominant ideology behind the news on beritajakarta.com website it is a government ideology. Thus, journalists of the state apparatus seem to be more concerned with the interest of the Jakarta Government than the citizens/the public of DKI Jakarta.

Keywords: Representation; Ideology; Media; Ideology of Media; State Apparatus

ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan ideologi yang direpresentasikan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitasnya mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Dari hasil analisis terkait dengan “Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah disimpulkan bahwa meskipun wartawan tampak lebih banyak memposisikan pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang ‘positif’ dalam konstruksi realitasnya, namun mereka sekali-sekali terlihat juga berupaya memposisikan pihak-pihak di luar Pemprov DKI dalam pewartawannya. Kemudian terkait dengan “Kepentingan (*interest*)” Pemerintah (Pemprov DKI) versus “Kepentingan (*interest*) Publik”, disimpulkan bahwa dalam konstruksi realitas wartawan pihak wartawan cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pihak Pemprov DKI sebagai ‘tuannya’. Kemudian terkait dengan “Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com.”, maka bertolak dari argumentasi menyangkut konsep *Governance* dan *Government*, kiranya dapat diidentifikasi dan dimaknai bahwa : Ideologi Aparatur di balik pemberitaan itu, tampaknya lebih merepresentasikan ideologi *government* dari pada ideologi yang *Governance*. Dengan demikian, ideologi yang dominan di balik pemberitaan di website beritajakarta.com. itu adalah ideologi yang berifat *Government*. Jadi, wartawan aparaturnegara tampaknya lebih mementingkan *interest* pihak Pemda DKI dari pada pihak warga/publik DKI Jakarta.

Kata-kata kunci : Representasi ; Ideologi; Media; Ideologi Media; Aparatur Negara.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Kegagalan konsep sentralisasi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan yang semula menekankan pada institusi pemerintah (*government*) menjadi *governance*, yakni suatu konsep yang memandang pemerintahan sebagai suatu proses yang tidak lagi bersifat “*intra bureaucratic anality*”¹ Kinerja pemerintahan harus dilihat dari interaksi dan relasi antara berbagai faktor dan aktor di luar birokrasi (Oyugi Edward, 2000: 67-69, dalam penelitian Anti-Corruption Research).

¹Perspektif yang melihat aktivitas dan kekuasaan pemerintahan di dalam dirinya sendiri.

Konsep *governance* dimunculkan sebagai alternatif model dan metode *governing* (proses pemerintahan) yang lebih mengandalkan pada pelibatan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, semi pemerintah, atau non pemerintah, seperti lembaga bisnis, LSM, komunitas, atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan cara pandang itu, sekat-sekat formalitas negara atau pemerintah menjadi terabaikan.

Lebih jauh, konsep *governance* melihat kegiatan, proses atau *kualitas memerintah*, bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektivitas penerapan kebijakan itu. Kebijakan bukan dibuat oleh seorang pemimpin atau satu kelompok tertentu melainkan muncul dari proses konsultasi antara berbagai pihak yang terkena oleh kebijakan itu (Oyugi, 2000: 30-31). Dengan begitu, berarti prinsip *bottom up* jadi sangat diutamakan dalam aplikasi konsep *governance*.

Dalam konsep ini, sejalan dengan makna *bottom up* tadi, maka pemerintah jadi bukan satu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang kompleks, maka dalam hubungan ini *governance* melibatkan relasi antara berbagai kekuatan dalam negara, yakni pemerintah (*state*), *civil society*, *economic society*, dan *political society* (Corbett 2000: 23-27; Keating, 1999: 40-43).

Mengingat demikian luasnya cakupan substansi permasalahan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks *governance* itu, karenanya penerapan prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini masih menunjuk pada empat indikator utama, yakni seperti sebagaimana dikatakan oleh pihak Bappenas yakni terdiri dari : 1) Transparansi (*Openness and Transparency*); 2) Partisipasi Masyarakat (*Participation*); 3) Akuntabilitas/Tanggung Gugat (*Accountability*); 4) Supremasi Hukum (*Rule of Law*). (Bapenas, 2008: 15). Keempat prinsip tersebutlah yang oleh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik BAPPENAS disebut dengan “*More Administrative Good Governance*”.

Dalam praktiknya, maka guna memenuhi kepentingan pengakomodiran ke empat unsur tadi, maka diantaranya yang terkait dengan publik, diperlukan adanya institusi/lembaga/bagian yang memiliki fungsi sebagai penghubung manajemen dengan pihak publik.²Institusi/lembaga/bagian tersebut idealnya adalah berupa Hubungan Masyarakat (Humas)³ yang lazim juga dikenal dengan istilah *Public Relation* (PR). Dalam kaitan ini, maka Humas itu diharapkan bisa berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara pihak masyarakat dengan pihak Pemerintah atau sebaliknya. Dengan begitu maka Pemerintah atau Humas di sini dapat berperan sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, atau sebaliknya yang berupa informasi berupa *in put*.

Humas Pemerintah (*Government Public Relations*) sendiri, dalam memerankan fungsi sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam mengaplikasikannya itu bisa dilakukan dengan berbagai modus. Diantaranya tersebutlah seperti melalui aktifitas *media relations*, *pembuatan press release*, melaksanakan konferensi pers, pers tour, membuat media-media seperti majalah, bulletin, boklet, radio, atau bahkan membuat *website* khusus guna memenuhi kepentingan publikasi menyangkut institusi beserta aktifitasnya serta menyangkut persoalan dinamika lingkungan institusi.

Salah satu institusi pemerintah yang pihak Humasnya sudah sampai pada tahap pemanfaatan *website* guna memerankan fungsi kehumasannya itu, yaitu pihak Humas Pemda DKI. Aktivitas virtual Humas Pemda DKI sendiri difasilitasi melalui website beritajakarta.com. Kehadiran mana, sebenarnya juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai *Cyber City*⁴.

²Keempat unsur yang diadopsi itu sendiri dilakukan dalam rangka merespon prinsip platform pemerintahan era reformasi yang berbasis penerapan prinsip demokrasi yang seluas-luasnya termasuk bidang pemerintahan.

³Menurut Sam Black dalam bukunya *Practical Public Relations*, mengklasifikasikan humas menjadi “humas pemerintahan pusat (*central government*) dan “humas pemerintahan daerah (*local government*), (dalam Onong Uchjana Effendy. Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis, Remaja Rosdakarya Bandung, 2002, h. 37

⁴Sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah pula memiliki sistem informasi yang menggunakan jaringan komunikasi dunia maya atau berbasis Web antara lain *e-procurement*, website www.jakarta.go.id, sistem informasi keuangan daerah, sistem perencanaan daerah, sistem pajak kendaraan bermotor, produk hukum online, dan lain-lainnya merupakan Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka memerankan fungsi kehumasan pemerintah yang eksis dalam iklim “*governance*” saat ini, Website beritajakarta.com sebagai media resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang nota bene kendalinya berada di tangan para aparat pemerintah, karenanya dengan sendirinya terkondisi dalam situasi menghadapi dua sisi yang kontras saat ini. Disatu sisi, mau tidak mau harus membangun citra positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di sisi lain dalam pemberitaannya harus berorientasi kepada kepentingan publik demi tidak ditinggalkan oleh audiensnya.

Dua sisi kontras menyangkut penunaian dua ‘kepentingan’ yang nota bene eksis dalam iklim pemerintahan yang “*governance*” itu, secara relatif tentu menjadi sulit bagi para aparaturnya pengelola Website beritajakarta.com. Dalam kesulitan yang demikian, apakah para aparat negara yang berperan wartawan itu akan tergelincir pada upaya membela kepentingan publik atau sebaliknya tegelincir pada membela kepentingan pemerintah dalam pewacanaan mereka melalui media Website beritajakarta.com.

Kecurigaan yang demikian itu tentu pantas dimunculkan, terutama jika itu mengacu pada perspektif kritikal. Dalam perspektif kritikal, satu diantaranya yang tergabung di situ misalnya Louis Althusser⁵, maka aparaturnya media itu katanya tidak beda halnya dengan manusia lain, yakni mempunyai watak dasar. Watak dasar manusia itu sendiri menurut Althusser, adalah binatang ideology (Althusser; 2004: 48). Sebagai binatang ideology maka ideology menginterpelasi individu menjadi subjek.(Althusser, 2004:47). Dengan demikian pewacanaan media itu merupakan bentuk atau representasi dari praktik ideologis pengelola media/pemilik media.⁶ Dengan begitu pula maka mereka sebagai *binatang ideology* diarahkan ideology-nya sendiri dalam mewacanakan beragam persoalan. Jadi, ideology merupakan faktor yang menentukan bagaimana suatu fakta diambil, dibuang, dipahami dan dikodefikasi lalu diteksasikan dalam media. Semua proses ini dipandang sebagai konsekuensi dari ideology, bukan sebagai bias atau kesalahan pekerja pers.

Berdasarkan pemaparan argumen pada bagian latar belakang sebelumnya, maka melalui tesis ini akan coba dibongkar tipologi ideology yang berada di balik pewacanaan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitas mereka tentang institusi beserta aktifitasnya serta menyangkut persoalan dinamika lingkungan institusi dalam Website beritajakarta.com. Untuk kepentingan menjawab permasalahan tersebut, maka permasalahan tesis ini dirumuskan menjadi : “Ideologi apakah yang direpresentasikan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitas mereka mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com ?”

B. Signifikansi

Penelitian ini ingin menemukan/mengidentifikasi ideology aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) yang berada di balik peng-konstruksirealitas mereka mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Dari Segi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah memadai bagi penelitian-penelitian ilmu pemerintahan yang berbasiskan komunikasi politik yang ber-paradigma-konstruktivis, terutama yang berkaitan dengan fenomena keterkaitan aparaturnya dengan media pemberitaan. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak aparaturnya pemerintah dan utamanya pihak Humas Pemerintah dalam kaitan dengan aktifitasnya sebagai wartawan yang berposisi ganda dalam iklim pemerintahan yang kini beriklim “*governance*”.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep-Konsep Teoritik

1. Aparatur Negara

⁵Dalam pandangannya, media komunikasi merupakan *communication ISA*. Terkait dengan ini, hal (1980) sebagaimana dikutip Barret dan Newbold (1995: 190) mengatakan bahwa *media as relatively autonomous c*

⁶ Althusser, Louis, Tentang Ideology: Marxisme, Strukturalis, Psikoanalisis dan Cultural Studies, Jalasutra, Yogyakarta, 2004.

Aparatur adalah Perangkat alat negara pemerintah, para pegawai negeri, Negara, alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan, dan kepegawaian yg mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

Aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain seperti uang, alat-alat yang berbasis teknologi misalnya komputer dan internet. Oleh karena itu sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan.

Setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi dengan tanggung jawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya.

Sebuah lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sesuai dengan pendapat Soerwono Handyaningrat yang mengatakan bahwa: Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian (Handyaningrat,1982:154).

Aparatur menurut definisi diatas dikatakan bahwa aparatur merupakan organisasi kepegawaian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau negara dalam melayani masyarakat. Aspek-aspek administrasi merupakan kelembagaan atau organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setyawan Salam dalam buku yang berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan bahwa "Aparatur Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku" (Setyawan, 2004:169).

Berdasarkan pengertian di atas, maka aparatur pemerintahan merupakan seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada. Aparatur suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab, agar terciptanya kualitas suatu kinerja yang optimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya. Suatu instansi pemerintah tidak akan lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan.

Soerwono Handyaningrat mengatakan bahwa: "Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian" (Soewarno,1982:154).

Berdasarkan Pengertian diatas maka Aparatur adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Maka diperlukan aspek-aspek administrasi terutama kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara dibutuhkan suatu alat untuk mencapai tujuan organisasi, maksud alat disini adalah seorang aparatur atau pegawai yang ada dalam suatu pemerintahan atau negara.

2. Wacana Media

Menurut McGregor, wacana mengacu pada pendeskripsian seseorang dalam beberapa kata. Wacana merupakan cara untuk mengetahui, menilai, dan mengalami. Wacana dapat digunakan untuk penegasan kekuasaan dan pengetahuan, dan dapat pula digunakan untuk perlawanan dan kritik.⁷

Cara penyampaiannya, itu bisa dilakukan melalui percakapan lisan maupun tulisan, misalnya melalui media cetak seperti surat kabar lewat pemberitaannya. Dengan demikian, dari pengertian McGregor ini sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa di balik suatu wacana itu sesungguhnya tersimpan maksud-maksud tertentu dari pembuat wacana, misalnya sebagai cara dalam memanifestasikan kekuasaan. Akan tetapi, makna diskursus sebagaimana dimaksudkan McGregor ini, kerap pula tidak dimaknai sejauh itu oleh

⁷ McGregor, Sue L.T., dalam, "Critical Discourse Analysis- A Primer", dalam <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorcd.html>, p. 2.

kalangan awam. Maknanya, sebagaimana disadari secara awam, tidak lebih dari sekedar perbincangan belaka.

Secara etimologi, wacana dalam kamus online Merriam Webster dijelaskan sebagai berikut : "Middle English *discours*, from Medieval Latin & Late Latin *discursus*; Medieval Latin, *argument*, from Late Latin, *conversation*, from Latin, *act of running about*, from *discurrere* to run about, from *dis-*+*currere* to run more at car."⁸ Jadi, wacana sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Latin yang berarti lari kian kemari (yang diturunkan dari *dis-*'dari, dalam arah yang berbeda', dan *currere*'lari'). Lebih jauh, kamus ini juga menjelaskan bahwa diskursus itu juga berarti sebagai suatu pertukaran gagasan melalui bahasa verbal, khususnya dalam suatu percakapan. Disebutkan pula bahwa diskursus berkaitan dengan bahasa lisan atau tulisan. Lebih luas lagi, diskursus diartikan juga sebagai satu unit kebahasaan (sebagai sebuah percakapan atau sebuah sejarah) yang lebih luas dari pada sebuah kalimat⁹. Dengan pengertian terakhir ini, maka secara leksikal memang telah mengindikasikan bahwa diskursus itu bukan sekedar percakapan belaka, namun di dalamnya tercakup juga mengenai nuansa-nuansa yang memunculkannya secara historical.

Sejalan dengan makna diskursus yang lebih dari sekedar sebuah kalimat itu, karenanya kalangan ilmuwan jadi banyak yang tertarik untuk mempelajarinya. Disebutkan, kalangan yang tertarik menggarap wacana sebagai obyek studi itu, yaitu kalangan ilmuwan yang berasal dari beragam disiplin ilmu social¹⁰. Dalam kaitan ini, Menurut Stubb (1983) dan van Dijk (1985) sebagaimana dikutip Fairclough¹⁰ *discourse* merupakan sebuah konsep yang digunakan oleh para analis dan teoritis sosial dan para ahli bahasa. Sebagaimana halnya dengan banyak para ahli bahasa, Fairclough sendiri menggunakan konsep *discourse* ini mengacu pada penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Sementara mengenai sejumlah disiplin ilmu social yang tadi disebutkan tertarik terhadap wacana, yakni mencakup : *linguistics, anthropology, sociology, cognitive psychology, social psychology, international relations communication studies and translation studies*. Dalam menelaah wacana, masing-masing ilmuwan mengikuti asumsi, dimensi analisis dan methodology disiplin ilmunya sendiri.¹¹

Namun begitu, ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan *wacana* sebagai sebuah fenomena yang menjadi obyek studi di lingkungan ilmu sosial, yaitu Zellig Harris. Zellig Harris diketahui sebagai orang pertama yang menerbitkan makalah yang bertema *discourse analysis* pada awal tahun 1952. Upaya ini kemudian berlanjut pada munculnya *discourse analysis* sebagai sebuah ilmu, yakni dimasukkan ke dalam ilmu analisis sub bahasa.¹² Dengan demikian, wacana sesungguhnya telah lama dikenal sebagai sebuah jargon dalam ilmu sosial. Namun begitu, wacana kerap terdengar dalam kehidupan hari-hari hanya sebagai sebuah jargon populer.

Sebagai sebuah jargon populer, wacana kerap dikenal dalam pengertian sebagai pengganti kata perbincangan atau pembahasan mengenai suatu obyek. Bahkan sering digunakan sebagai kata yang mengandung arti wawasan.¹³ Dalam khasanah ilmu pengetahuan konsep diskursus memiliki pengertian yang lebih jauh dari pengertian-pengertian populer, dan setiap disiplin ilmu memberikan pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing disiplin ilmu.¹⁴ Hal demikian, misalnya seperti yang diungkapkan James P. Gee¹⁵. Ia membedakan *discourse* ke dalam dua jenis. Pertama, "*discourse*" (d kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya ("*on site*")

⁸ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/discourse>

⁹ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/discourse>

¹⁰ Fairclough, Norman, (1995), *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 54.

¹¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis

¹² Harris et al. (1989) dan Kittredge & Lehrberger (1982), dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis.

¹³ Rusadi, Udi, "Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa", disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

¹⁴ Rusadi, Udi, "Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa", disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

¹⁵ Dalam, Hamad, Ibnu. *Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi Sebuah Telaah Ringkas* cm .www.um .edu .my Hamad 2007.

untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. Kedua, “*Discourse*” (D besar) yang merangkaikan unsur linguistik pada “*discourse*” (dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik (*non-language “stuff”*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk *non-language “stuff”* ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Komponen *non-language “stuff”* itu juga yang membedakan cara beraksi, berinteraksi, berperasaan, kepercayaan, penilaian satu komunikator dari komunikator lainnya dalam mengenali atau mengakui diri sendiri dan orang lain.¹⁶ Jadi, dalam pandangan Gee ini, terutama dalam pengertian diskursus yang menggunakan D, relevan dengan asumsi yang dikemukakan berdasarkan pengertian leksikal sebelumnya, bahwa diskursus atau wacana itu tidak hanya sekedar bangunan kalimat atau percakapan belaka, melainkan di dalamnya juga mencakup *nuansa-nuansa* yang memunculkan wacana itu sendiri. Terkait dengan pandangan Gee tadi, maka *nuansa-nuansa* yang dapat disebut sebagai komponen *non-language* itu, diantaranya dapat berupa kepentingan ideologi, politik, dan ekonomi. Kepentingan mana, kemudian membedakan pewacana dalam caranya beraksi, berinteraksi, berperasaan, atau berpenilaian dalam suatu pewacanaan.

Sehubungan dengan wacana itu merupakan sesuatu yang sifatnya tidak berdiri sendiri, yakni sebagai representasi dari hasil rangkaian proses simultan antara unsur linguistik dan non linguistik, maka dalam pendefinisian wacana di antara sesama ilmuwan menjadi berbeda pandang dalam mengartikan wacana. Selain tentunya ada yang terfokus dalam kaitannya dengan bahasa¹⁷, maka ada pula yang mengartikan diskursus berdasarkan konteks teori dan filosofis. Hal ini, misalnya seperti yang dikemukakan Foucault¹⁸. Menurutnya diskursus (*discourse*) itu merupakan formasi diskursif (*discursive formation*), yaitu sekelompok pernyataan yang memiliki sistem pembentukan yang tunggal. Dengan demikian, Foucault tampak berupaya mensimplikasi apa yang dikemukakan oleh Gee sebelumnya, yakni dengan cara meredusir rangkaian proses simultan antara unsur linguistik dan non linguistik yang merepresentasikan wacana.

Sehubungan wacana itu secara filosofis merupakan sebuah formasi diskursif yang dalam proses pembentukannya bersifat tunggal, itu berarti dalam memahami sebuah wacana tidak cukup hanya dengan melihat *bagian luar* yang nota bene menjadi sebagai salah satu bagian saja dari sebuah ketunggalan¹⁹. Hal yang demikian karena *bagian luar* dimaksud hanyalah baru sebagian saja dari sebuah pewacanaan. Sedang bagian lainnya, seperti dikatakan Gee sebelumnya, yaitu faktor *non-language “stuff”* berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya yang secara teoritis menyebabkan terbedakannya para pewacana itu dalam caranya beraksi, berinteraksi, berperasaan, atau penilaian dalam suatu pewacanaan, belum bisa diketahui. Pemahaman sebuah wacana dengan cara mengabaikan faktor *non-language “stuff”* karenanya dapat menyebabkan kekeliruan. Munculnya kekeliruan, sebab faktor *non-language “stuff”* yang menurut Gee berupa kepentingan ideologi, politik, dan ekonomi itu tadi, dikatakan Fairclough tidak transparan sifatnya dalam teksasi sebuah pewacanaan sehubungan adanya upaya pengamanan *power* dan *hegemony* dari sang pembuat wacana²⁰ itu sendiri. Sebuah kekeliruan yang di sisi lain, tentunya justru bisa membuat konsumen wacana bisa terpedaya dan jika terus mengabaikan faktor *non-language “stuff”* dalam memahami suatu wacana, maka menurut Luke (1997) itu berarti upaya-upaya penindasan, marjinalisasi yang dilakukan pihak tertentu melalui wacana akan terus berkelanjutan tanpa tantangan.²¹ Karena itu, guna menghambat atau melawannya, maka wacana menurut Luke harus dikritisi.

¹⁶Pandangan Gee ini kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan oleh Guy Cook mengenai wacana. Kalau Gee menggunakan konsep *language “on site”* dan *non-language “stuff”*, Guy Cook (dalam, Sobur, 2001:56) memakai konsep teks dan konteks.

¹⁷Misalnya Teun Van Dijk dan termasuk Fairclough.

¹⁸Rusadi, Udi, “Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa”, disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

¹⁹misalnya rangkaian kalimat dalam sebuah pemberitaan surat kabar atau rangkaian kalimat yang muncul dalam suatu percakapan

²⁰Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse and Society*, 4(2), 133-168.

²¹Sebagaimana dikutip McGregor, Sue L.T., dalam, <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorcd.html>

Dalam pandangan Fairclough, apa yang dimaksudkan Luke itu, dilakukan dengan tujuan untuk membuka kedok atau membongkar asumsi-asumsi *ideological* yang tersembunyi dalam kata-kata dari teks tertulis maupun percakapan lisan guna melawan dan menolaknya sebagai sesuatu yang tidak kita ketahui. Dalam kaitan itu, Fairclough (1993)²² juga menyebutkan bahwa kritisi wacana ini bermaksud untuk menjelajahi secara sistematis mengenai hubungan-hubungan semu (buram) yang sering terjadi di antara praktik diskursif, teks dan peristiwa-peristiwa dan struktur sosial dan budaya yang lebih luas. Upaya kritis yang menurutnya dapat dilakukan dengan metode *Critical Discourse Analysis (CDA)* ini, juga dilakukan dalam rangka usaha untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan yang tidak transparan itu sebagai sebuah factor dalam upaya mengamankan *power dan hegemony* dari sang pembuat wacana. CDA bertujuan menggali secara sistematis, seringnya hubungan yang kabur antara praktek, teks, peristiwa diskursif dengan struktur, relasi, dan proses sosial budaya yang lebih luas. CDA berusaha untuk menggali bagaimana hubungan non-transparan ini menjadi sebuah faktor dalam mengamankan kekuasaan dan hegemony, dan memberikan perhatian pada keseimbangan kekuasaan, ketidakadilan sosial, praktek non-demokratis, dan *injustices* lain dengan harapan mendorong masyarakat untuk bertindak korektif. Ada tiga bidang yang menjadi pusat perhatian dari CDA. Wacana yang dibentuk dan dibangun oleh (a) struktur sosial (kelas, status, umur, identitas etnis, dan jenis kelamin) dan oleh (b) budaya. Ekonomi rumah tangga, terdiri dari anggota dari seluruh struktur sosial (tetapi terutama kulit putih, kelas menengah, perempuan), memiliki budaya profesional, yang membentuk dan memaksa wacananya. Apa yang kita katakan sebagai ekonom rumah tangga, dibentuk oleh budaya profesional kami, kehidupan sosial, dan profil anggota (struktur sosial). (c) wacana (kata-kata dan bahasa yang kami gunakan) membantu membentuk dan memaksa identitas, hubungan, dan sistem pengetahuan dan kepercayaan.²³

Dalam hubungan ini, maka Luke berpendapat bahwa CDA terutama dimaksudkan untuk menggambarkan, menafsirkan, menganalisis dan mengeritik kehidupan sosial sebagaimana tercermin dalam suatu teks. Fokus perhatian CDA terletak pada bagaimana hubungan-hubungan sosial, identitas, pengetahuan dan power itu terkonstruksi melalui bahasa (teks) lisan dan tulisan dalam masyarakat, sekolah, media, dan arena politik. Fairclough (2002), Wodak & Ludwig (1999), sebagai dikutip Luke menilai bahwa wacana selalu melibatkan kekuasaan dan ideologi, terhubung dengan konteks masa lampau dan saat ini (nilai sejarah), dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap orang karena mereka memiliki latar belakang, pengetahuan, dan posisi kekuasaan yang berbeda – karena itu, interpretasi yang ‘benar’ itu tidak ada sedangkan yang mungkin adalah interpretasi yang kurang lebih masuk akal atau cukup dapat diterima.²⁴

Kemudian, dalam hubungan upaya Fairclough²⁵ sebelumnya, karenanya ia mengartikan wacana berdasarkan pembedaan kategori. Dalam pembedaan tersebut, Fairclough membuat dua kategori utama tipe diskursus (*discourses*) yang menjadi unsur pokok dari prosedur diskursus (*order of discourse*), yaitu *genre* dan *discourses*. Diskursus merupakan penggunaan bahasa yang merepresentasikan praktek sosial yang berlaku dari sudut pandang tertentu. Diskursus secara umum berhubungan dengan pengetahuan dan konstruksi pengetahuan. Misalnya praktek sosial politik dibedakan dalam penyajiannya dalam diskursus politik liberal, sosial dan Marxis. Sementara genre merupakan penggunaan bahasa yang berhubungan dengan dan melembaga dalam praktek sosial, misalnya seperti wawancara (*genre interview*) dan komoditi periklanan (*genre periklanan*).

Selanjutnya, menurut Fairclough, analisis terhadap wacana jenis tertentu, termasuk wacana media, melibatkan sebuah selingan antara dua fokus yang serupa dan saling melengkapi, keduanya penting yakni : - peristiwa komunikatif (*communicative event*); -

²²Fairclough, N. (1993). Critical Discourse Analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse and Society*, 4(2), 133-168.

²³Fairclough, N. (2000). *Language and power* (2nd ed.). New York: Longman.

²⁴Luke, A. (1997). Theory and practice in critical science discourse. In L. Saha (Ed.), *International encyclopedia of the sociology of education*. Accessed March 6, 2003. <http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/Luke/SAHA6.html>

²⁵Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 56 dan 76),

susunan wacana (prosedur wacana) (*order of discourse*)²⁶ Tahapan *communicative event* terdiri dari analisis teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Analisis teks bertujuan untuk mengungkap makna dan dilakukan dengan menganalisis bahasa secara kritis. Analisis *discourse practice* dilakukan pada level proses pembuatan teks yang berguna untuk melakukan penafsiran atas teks dan analisis konsumsi teks. Analisis *sociocultural practice* adalah analisis pada level social (*social analysis*) yang berisikan kajian mengenai keadaan social yang mempengaruhi proses pembuatan teks untuk menjelaskan konteks lahirnya sebuah teks.²⁷

Sedangkan tahapan analisis *order of discourse* atau prosedur wacana, berupaya melihat aspek intertekstualitas dan genre. Intertekstualitas merupakan sebuah istilah di mana teks dan ungkapan dibentuk oleh teks yang hadir sebelumnya, saling menanggapi dan salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi bagian lainnya. Intertekstualitas dalam berita dapat dideteksi dari pengutipan narasumber, apakah secara langsung atau tidak langsung. Selain intertekstualitas terdapat pula genre. Genre yaitu cara pemakaian bahasa yang biasanya disesuaikan dengan lingkup praktek sosialnya. Oleh karena itu lewat model analisis *order of discourse* ini Fairclough ingin menegaskan bahwa wacana media sesungguhnya adalah suatu bidang yang kompleks. Apa yang muncul dalam teks yang diteliti sesungguhnya adalah bagian akhir dari suatu proses yang kompleks dari berbagai kekuatan, aturan, regulasi dan negosiasi yang menghasilkan fakta tertentu.²⁸

3. Ideologi

Sebagai sebuah konsepsi bagi setiap individu atau kelompok dalam kehidupan sosialnya, maka itu dapat diartikan bahwa ideologi itu dengan sendirinya cenderung menjadi basis bagi individu maupun kelompok dalam berperilaku sosialnya. Atau, meminjam istilah Seliger, ideologi berperan sebagai pembimbing tindakan.²⁹ Perilaku sosial itu sendiri, seperti dikatakan Gramsci (1971:326) sebagaimana dikutip Fairclough³⁰, baik terkait dengan bidang kehidupan seni, hukum, aktifitas ekonomi maupun dalam manifestasi kehidupan individu dan kolektif. Dengan demikian, ideologi itu memang erat dengan tindakan dan ideologi ditentukan dalam konteks efek-efek sosial mereka ketimbang nilai-nilai kebenaran mereka³¹. Ini berarti bahwa aplikasi suatu ideologi cenderung inheren dengan perilaku orang per orang dalam kehidupan rutin berdasarkan pertimbangan efek yang diinginkan ketimbang berdasarkan kebenaran ideologi itu sendiri. Inilah sebabnya kenapa Althusser memaknai ideologi itu sebagai ketidaksadaran yang begitu mendalam (*profoundly unconsciousness*) yang praktiknya dalam diri manusia berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam praktiknya menurut Althusser ideologi itu seringkali disebarkan melalui struktur sosial seperti yang ia sebut sebagai *ideological state apparatus /ISA* dan *repressive state apparatus /RSA* (Althusser, 1994: 151).

RSA lebih menunjuk pada aktor-aktor yang berperan penting menginterpretasikan sekaligus mengaplikasikan ideologi antar sesama manusia. Pada aspek ini, Althusser memandang RSA sebagai pemilik kuasa represif untuk dengan tegas menerapkannya pada setiap warga negara. ISA mengarah pada ideologi itu sendiri yang masuk ke dalam setiap kehidupan manusia. Ideologi ini terangkum dalam aspek keagamaan, pendidikan, hukum, keluarga, politik, komunikasi, serta moralitas.

²⁶Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 56 .

²⁷Tiamono, Rigakittyndya, 2008, "Analisis Wacana Norman Fairclough", dalam *Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta, Balai Pengkaji dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 151.

²⁸Tiamono, Rigakittyndya, 2008, "Analisis Wacana Norman Fairclough", dalam *Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta, Balai Pengkaji dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 154-155.

²⁹Seliger, dalam John B. Thompson, *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, 2003, Diterjemahkan, Haqqul Yaqin, Yogyakarta, IRCiSoD, hlm. 132.

³⁰Fairclough, Norman, 1995, *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*, London and New York, Longman, p.76.

³¹Lihat, Gramsci, sebagaimana dikutip Fairclough dalam *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*, London and New York, Longman, p.76.

4. Ideologi dan Media

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, eksistensi suatu teks itu dapat muncul di beragam tempat dan salah satunya di media (baca: surat kabar). Media surat kabar sendiri, sebagai sebuah institusi bisnis, juga sekaligus menjadi sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sebuah struktur dan jenjang yang kemudian menjadi pembeda peran dan fungsi bagi setiap orang yang terdapat dalam struktur organisasi. Di sisi lain, hal itu sekaligus juga menjadi pembentuk bagi munculnya sejumlah komunitas dalam suatu keseluruhan organisasi media. Terkait dengan kategori umum media yang dibagi menurut bidang isi yang dikelolanya, yaitu isi bidang redaksi dan isi bidang perusahaan, maka sejumlah komunitas tadi pada dasarnya menjadi terdiri dari dua bagian besar pula, yaitu sejumlah komunitas yang tergabung dalam struktur organisasi perusahaan dan yang tergabung dalam struktur organisasi bidang redaksi.

Dalam kaitan pernyataan sebelumnya bahwa aplikasi suatu ideologi itu cenderung inheren dengan perilaku orang per orang dalam kehidupan rutinnnya, maka setiap anggota komunitas pada sejumlah komunitas yang ada dalam suatu struktur organisasi media, misalnya seperti struktur organisasi redaksi surat kabar, karenanya menjadi berpeluang untuk mempraktikkan ideologinya masing-masing. Terkait dengan teks media, maka praktik ideologi itu diaplikasikan lewat proses teksasi media itu sendiri melalui masing-masing peran individu dalam struktur organisasi redaksi media. Sementara mengenai pentingnya media bagi ajang praktik terhadap ideologi, maka menurut Althusser (1971, dalam Alzastraouw, 2000), sebagaimana dikutip Sobur (2001:30), itu karena media dianggap strategis dalam bekerja secara ideologis guna terbangunnya kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa. Kelompok berkuasa ini, wujudnya bisa berupa negara, pemilik media ataupun sejenisnya. Jadi, media di sini menjadi alat bagi penguasa untuk mengaplikasikan ideologinya melalui teks media demi terwujudnya kepatuhan khalayak, khususnya menyangkut substansi yang diwacanakan dalam teks. Dengan demikian, antara ideologi dan media sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dalam kaitan proses produksi pesan. Keeratan itu, seperti dikatakan Hall³² yakni berupa melekatnya ideologi dominan dalam proses produksi isi media.

Dengan keeratan hubungan antara ideologi dan media yang seperti itu, dalam kaitan tingkatan pengaruh terhadap isi media yang dimodelkan oleh Shoemaker dan Reese³³, diketahui memang bahwa ideologi menjadi faktor paling dominan jika dibandingkan dengan empat faktor lainnya. Faktor lainnya dimaksud yaitu faktor pada level individu, level rutinitas media, level organisasi dan level ekstramedia.³⁴ Dalam hubungan ini dikatakan bahwa ideologi menjadi faktor pengaruh yang paling menyeluruh dari semua pengaruh yang ada dalam proses mediasi. Ideologi di sini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai individu untuk melihat realita dan bagaimana mereka menghadapinya³⁵

³²Gurevith, Michael, Tony Bennett, James Curran and Woollacott, Culture, Society and The Media. Methuen London and New York, 1982, 263.

³³Shoemaker, Pamela J., Reese dan Reese, Stephen D., 1996, *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*, NY, Longman Publishers USA, p. 223.

³⁴Faktor pada level individu berartikan faktor individu pembuat keputusan dan individu-individu pekerja media yang mempengaruhi produksi isi media. Faktor rutinitas media (*media routines*), yaitu isi media dipengaruhi oleh kegiatan seleksi-seleksi yang dilakukan oleh wartawan sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang), *deadline* atau batas waktu, keterbatasan *space* untuk menyajikan berita, struktur piramida terbalik dalam penulisan berita dan kepercayaan reporter terhadap sumber resmi berita. Faktor organisasi, seperti peranan yang diemban pekerja media, struktur dan bentuk dari organisasi serta pemilik media yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan kebijakan organisasi media, akan mempengaruhi terhadap produk isi media. Dalam kaitan faktor pengaruh ekstramedia atau pengaruh dari luar organisasi media, Shoemaker dan Reese mengkategorikan lima bentuk *ekstramedia* yang mempengaruhi isi media. Pertama adalah sumber informasi, yaitu mereka yang di observasi atau di wawancara jurnalis. Kedua adalah sumber-sumber pendapatan seperti pemasangan iklan dan khalayak. Ketiga, institusi sosial seperti kalangan bisnis. Keempat pengawasan pemerintah berupa peraturan-peraturan pers. Kelima adalah pasar.

³⁵Terkait dengan ini, Raymond Williams mendefinisikan ideologi sebagai sebuah bentuk relatif formal dan mengartikulasikan sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan, ataupun semacamnya yang diabstraksikan sebagai sebuah "pandangan dunia" atau "pandangan kelas" (Williams, 1977, p 109). Menurut Samuel becker (1984; p 69), ideologi merupakan "cara kita mempersepsi dunia kita dan diri kita; ideologi mengontrol apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang "natural" atau "obvious". "Sebuah ideologi merupakan suatu bentuk setting, diintegrasikan dalam bingkai referensi, di mana di dalamnya melewati

Jika faktor-faktor lain yang sifatnya lebih konkrit, misalnya seperti dari faktor level individual yang diantaranya berbentuk karakteristik pekerja, maka level ideologi itu dengan demikian sifatnya *abstrak*. Meskipun demikian, para akademisi di USA misalnya, maka dalam upayanya mengkonkritkan keabstrakan ideologi, itu dilakukan dengan cara mengenal potensi-potensi dasar yang memunculkan ideologi itu sendiri. Dalam kaitan ini maka yang menjadi potensi dasar bagi munculnya suatu ideologi di USA secara fundamental yaitu berupa kepercayaan akan nilai-nilai sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan pribadi, keuntungan pengusaha, dan pasar bebas (Shoemaker dan Reese, 1996:222). Dengan demikian, keabstrakan suatu ideologi sebenarnya memiliki peluang untuk dapat diidentifikasi menjadi konkrit, dan itu bisa dilakukan melalui upaya pengenalan terhadap potensi-potensi dasar yang memunculkan ideologi itu sendiri.

Sebagai faktor paling dominan dalam proses mediasi, maka dalam perspektif Timur (kritis) karenanya ideologi media tadi menjadi penting untuk diketahui. Dalam pandangan Fairclough, sebagaimana sudah disinggung-singgung sebelumnya, maka kepentingan itu terutama untuk membuka kedok atau membongkar asumsi-asumsi *ideological* yang tersembunyi dalam kata-kata dari teks tertulis maupun percakapan lisan guna melawan dan menolaknya sebagai sesuatu yang tidak kita ketahui. Dalam hubungan ini maka asumsi-asumsi *ideological* yang tersembunyi itu secara teoritis diasumsikan Altschull sebagai ideologi yang merefleksikan ideologi pihak yang membiayai mereka. "..... *media reflect the ideology of those finance them, or "pay the piper."* Demikian Altschull sebagaimana dikutip Shoemaker dan Reese, (1996:231).

Terkait dengan soal pembiayaan tadi maka Altschull (1984, p.254) mengategorikannya menjadi empat yaitu: *Pertama*, di dalam pola yang formal, media dikendalikan oleh Negara, (seperti halnya di banyak negara-negara komunis). *Kedua*, di dalam pola komersial, media merefleksikan ideologi para pengiklan dan pemilik media. *Ketiga*, di bawah pola kepentingan atau *interest*, isi media merefleksikan ideologi kelompok finansial yang membiayai media, misalnya seperti partai politik atau kelompok keagamaan. *Keempat* di dalam pola yang informal, isi media merefleksikan tujuan para individu kontributor yang ingin mempromosikan pandangan-pandangan mereka (Shoemaker, Pamela J dan Reese, Stephen D., 1996: 231). Dengan demikian, ideologi media pada dasarnya berbasis pada soal pembiayaan operasionalisasi media yang berdasarkan sumbernya diidentifikasi bervariasi pada empat pola yang terdiri dari pola formal (merefleksikan negara), komersial (merefleksikan pengiklan dan pemilik media), kepentingan (*interest*) (merefleksikan kepentingan partai politik atau kelompok keagamaan), dan informal (merefleksikan kontributor).

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing, yang berupaya melihat konstruksi realitas kepentingan publik yang dibangun oleh media online yang dimiliki Humas Pemerintah, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam kelompok penelitian dengan paradigma interpretif pada jenis paradigma penelitian konstruktivisme.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis framing yang memfokuskan diri pada konstruksi realitas wartawan menyangkut pemberitaan di wilayah Pemprov DKI Jakarta. Hal ini diantaranya menyangkut masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta, pelayanan kesehatan; dan masalah banjir. Konstruksi realitas yang menjadi objek yaitu pemberitaan wartawan melalui website beritajakarta.com.

Framing sendiri merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Untuk kepentingan ini maka Analisis framing yang dipakai yaitu model analisis Gamson dan Modigliani. Selain itu, guna efektifitas penggunaan model analisis dimaksud, maka dalam penerapannya dilakukan dengan bantuan model pemahaman. Dilthey yang berbasis author dalam memahami teks (dalam. Radford : 2005).

Teknik yang digunakan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada rumusan model Gamson dan Modigliani³⁶ yang didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media informasi dari website yang terdiri atas *package* interpretatif yang mengandung konstruksi makna tertentu.

C. Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah riset ini sebelumnya, riset tersebut mencoba menemukan ideologi yang direpresentasikan aparat negara yang dalam hal ini wartawan Humas Pemda DKI, melalui pewacanaan mereka dalam konstruksi realitas mengenai lingkungan pemerintahan DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Pemaparan dalam bagaian ini sendiri dibagi menurut : Konstruksi Realitas **website beritajakarta.com** Mengenai Lingkungan Pemerintahan DKI; *Frame* Kepentingan Pemerintah Versus Kepentingan Publik ; Dominasi Kepentingan Pemerintah (Pemprov DKI) atas Kepentingan Publik; Representasi ideologi aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI).

1. Konstruksi Realitas [website beritajakarta.com](http://beritajakarta.com) Mengenai Lingkungan Pemerintahan DKI

Website beritajakarta.com memberitakan masalah lingkungan pemerintahan DKI Jakarta antara tanggal 1 Agustus 2012 hingga 5 Desember 2012. Total peng-*upload*-an berita dalam kurun waktu tersebut sebanyak 12 kali. Dari total pemberitaan ini, maka realitas yang dikonstruksi wartawan terlihat lebih banyak (**8**) yang sifatnya menyangkut kepentingan publik yang sumbernya berasal dari arus atas (*Top down*). Sementara yang sifatnya menyangkut kepentingan publik yang sumbernya berasal dari kalangan arus bawah (*grassroot*) sebanyak empat (4) kali.

Terhadap ragam realitas tadi, kalangan wartawan [website beritajakarta.com](http://beritajakarta.com) , secara subjektive tentunya memiliki cara-caranya sendiri dalam mengkonstruksikannya melalui pemberitaan. Namun demikian, dari frame-frame-nya mengindikasikan bahwa wartawan dalam konstruksinya itu cenderung tetap berpihak kepada publik dalam mengkonstruksi realitas menyangkut lingkungan Pemda DKI tersebut. Yang membedakannya hanya sumber asal masalah lingkungan itu, yakni lebih banyak berasal dari kalangan atas (Top Down) ketimbang dari kalangan bawah (*bottom up*) itu sendiri. Artinya, dalam kaitan pengkonstruksian realitas menyangkut lingkungan Pemda DKI itu, wartawan tampak lebih banyak menyuarakan kepentingan kalangan atas yang dalam hal ini pihak Pemprov DKI daripada kalangan bawah atau publik/warga DKI itu sendiri.

Dari hasil analisis terhadap konstruksi realitas wartawan dalam pemberitaan melalui perangkat analisis Model *Framing* Gamson dan Modigliani sendiri, berhasil ditemukan 12 frame. Dari sini pula diketahui wacana yang diusungoleh para aparaturnya itu serta tipologi ideologi yang melekat di dalamnya.

Hasil penelitian selengkapnyanya selanjutnya disajikan melalui tabel-tabel berikut.: Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, [website beritajakarta.com](http://beritajakarta.com) memediakan berita menyangkut lingkungan Pemda DKI selama kurun waktu 1 Agustus 2012 - 5 Desember 2012 menyangkut berbagai masalah, tidak terkonsentrasi pada satu masalah kepentingan publik saja. Dari ragam masalah kepentingan publik dimaksud, maka konstruksinya tentunya menjadi 12 bentuk konstruksi. Hasilnya disummary menjadi sebagai berikut :

³⁶ Gamson dan Modigliani mendefinisikan frame sebagai pusat mengorganisasikan gagasan atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. Frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut *package*. *Framing analysis* yang dikembangkan Gamson dan Modigliani memahami wacana media sebagai suatu gugusan perspektif interpretasi (*interpretative package*) saat mengkonstruksi dan memberi makna suatu isu. (Sobur, 2004:177).

1. Konstruksi Wartawan tentang realitas Dalam Pemberitaan
Tabel 1
Konstruksi Wartawan

Judul Berita	Sumber	Frame	Wacana	Ideologi
e. DKI Bagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun	website beritajakarta.com, 01-08-2012	Pemprov DKI Bagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun.	Wajib Belajar 12 Tahun	Pro Pemerintah (Government).
b. : Warga Nikmati Layanan Kesehatan Gratis	website beritajakarta.com, 18-09-2012	Pemprov DKI berikan layanan kesehatan gratis.	Layanan Kesehatan Gratis	Pro Pemerintah (Government).
c. <i>Contra Flow</i> di Jl Yos Sudarso Efektif Cairkan Lalin	(website beritajakarta.com, 22-09-2012)	Satlantas Atasi Kepadatan lalulintas dengan Strategi Contra Flow	Solusi kepadatan lalulintas	Pro Pemerintah (Government)
d. Relokasi Sekolah Bukan Solusi Atasi Tawuran	(website beritajakarta.com, 25-09-2012)	Pemda DKI dan DPRD DKI bahas solusi Tawuran Pelajar Di Jakarta	Solusi tawuran Pelajar	Pro Pemerintah (Government)
e. 2013, Dinkes Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap	(website beritajakarta.com, 27-09-2012)	Pemda DKI Rencanakan Tambah Puskesmas Berfasilitas Rawat Inap	Penambahan Puskesmas berfasilitas rawat inap	Pro Pemerintah (Government.)
f. DPRD: Stop Kegiatan MOS di Sekolah	(website beritajakarta.com, 28-09-2012)	Pemprov DKI dan DPRD DKI Bentuk Tim Khusus Tangani Tawuran Pelajar	Penyetopan kegiatan MOS	Pro Pemerintah (Government.)
g. Besok, KRL Khusus Wanita Beroperasi	(website beritajakarta.com, 30-09-2012)	Kaum Wanita Diperlakukan Istimewa oleh PT KAI	Pengistimewaan Kaum Wanita/emansipasi wanita	Pro Pemerintah (Government.)
h. Kebutuhan Air Bersih Korban Banjir Terjamin	(website beritajakarta.com, 06-11-2012)	Pemprov DKI Jamin Kebutuhan Air Bersih Korban Banjir	Pemprov DKI Peduli korban banjir	Pro Pemerintah (Government).
i. 514 Warga Tambora Terima Kartu Jakarta Sehat	(website beritajakarta.com, 10-11-2012)	Pemkot DKI Bagikan Kartu Jakarta Sehat.	Pemda DKI Peduli Kesehatan warga	Pro Pemerintah (Government.)
j. Ribuan Sayuran Mati Terendam Air	(website beritajakarta.com, 05-12-2012)	Petani Sayur di Jakarta Keluhkan Banjir	Derita petani sayur Jakarta akibat banjir	Pro publik (Governance)

k. Kali Cakunglamba Meluap, Puluhan Rumah Tergenang	(website beritajakarta.com, 06-12-2012)	Luapan Kali Banjiri Puluhan Rumah	Disfungsi nalisasi Saluran air sebabkan banjir	Pro publik (Governance)
l. Putaran Di Kolong Tol Jorr W1 Picu Kemacetan	(website beritajakarta.com, 4 -12-2012)	Kecewaan Warga terhadap keberadaan putaran dikolong tol JORR W1	Kesemrawutan lalu lintas	Pro publik (Governance)

2. Frame Kepentingan Pemerintah Versus Kepentingan Publik (Tema Minor (Frame), Wacana, Kepentingan Wacana dan Ideologi Wartawan dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com

Untuk mengetahui kecenderungan wartawan dalam pewartawannya melalui *frame-frame* menyangkut masalah-masalah lingkungan (*environment*) Pemda DKI Jakarta, ini dapat dilihat dari tema-tema minor yang mereka munculkan dalam *frame-frame* yang terbentuk melalui hasil konstruksi realitas mereka dalam pemberitaan. Guna maksud tersebut, maka **langkah pertama** yang ditempuh adalah dengan cara mengidentifikasi tema-tema minor yang muncul dalam *frame-frame* yang dibentuk wartawan melalui konstruksi-konstruksi mereka atas suatu realitas. Lalu **langkah kedua**, mengidentifikasi wacana yang muncul dalam *frame-frame* yang dibentuk wartawan melalui konstruksi-konstruksi mereka atas suatu realitas. **Langkah ketiga**, yaitu mengidentifikasi ideology yang melekat dalam wacana yang mereka kemukakan melalui konstruksi realitas mengenai berbagai masalah lingkungan (*environment*) Pemda DKI.

Guna menjawab masalah tersebut, pemaparannya akan dilakukan dalam sub bab ini. Pemaparan langkah-langkah tadi dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel 1 sebagai berikut melalui pembagian sub bab berikut : a) Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah Dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com; b) Kepentingan (*interest*) Pemerintah (Pemprov DKI) Versus Kepentingan (*interest*) Publik; c) Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan(*environment*) Pemda DKI dalam **website beritajakarta.com**.

Tabel 2
Tema Minor (Frame), Wacana, Kepentingan Wacana dan Ideologi Wartawan dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com

Nomor;Berita; Judul; Edisi	Tema Minor/Frame beritajakarta.com	Wacana	Wacana terkait dengan Kepentingan			Ideologi	
			Pemerintah		Warga DKI Jakarta	Gover-nance	Gover-ment
			Pemkot DKI Jakarta	Institusi Pemerintah lainnya			
1. Judul: DKI Bagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun (website beritajakarta.com, 01-08-2012)	Pemprov DKI Bagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun	1) Waji Belajar 12 Tahun	V				V

2. Judul: Warga Nikmati Layanan Kesehatan Gratis (Bottom up) (website beritajakarta.com, 18-09-2012)	Pemprov DKI berikan warga layanan kesehatan gratis.	2) Layanan Kesehatan Gratis	V			V	
3. Judul: Contra Flow di Jl Yos Sudarso Efektif Cairkan Lalin (website beritajakarta.com, 22-09-2012) Top down	Satlantas Atasi Kepadatan lalu lintas dengan Strategi <i>Contra Flow</i>	3) Solusi kepadatan lalulintas		V			V
4. Judul: Relokasi Sekolah Bukan Solusi Atasi Tawuran (Top down) (website beritajakarta.com, 25-09-2012)	Pemda DKI dan DPRD DKI bahas solusi Tawuran Pelajar di Jakarta	4) Solusi tawuran Pelajar.	V				V
5. Judul : 2013, Dinkes Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap (website beritajakarta.com, 27-09-2012) top down	Pemda DKI Rencanakan Tambah Puskesmas Berfasilisas Rawat Inap	5) Penambahan Puskesmas berfasilitas rawat inap	V				V
6. Judul: DPRD: Stop Kegiatan MOS di Sekolah (website beritajakarta.com, 28-09-2012)	Pemprov DKI dan DPRD DKI Bentuk Tim Khusus Tangani Tawuran Pelajar	6) Penyetopan kegiatan MOS	V				V
7. Judul: Besok, KRL Khusus Wanita Beroperasi (Top down) (website beritajakarta.com, 30-09-2012)	Kaum Wanita Diperlakukan Istimewa oleh PT KAI	7) Pengistimewaan Kaum Wanita/eman sipasi wanita		V			V
8. Judul: Kebutuhan Air Bersih Korban Banjir Terjamin (Top down) (website beritajakarta.com, 06-11-2012)	Pemprov DKI Jamin Kebutuhan Air Bersih Korban Banjir	8) Pemprov DKI Peduli korban banjir	V				V
9. Judul : 514 Warga Tambora Terima Kartu Jakar-ta Sehat (website beritajakarta.com, 10-11-2012) top down	Pemkot DKI Bagikan Kartu Jakarta Sehat	9) Pemda DKI Peduli Kesehatan warga	V				V

10. Judul : Judul : Ribuan Sayuran Mati Terendam Air (website beritajakarta.com, 05-12-2012) Bottom up	Petani Sayur di Jakarta Keluhkan Banjir	10) Derita petani sayur Jakarta akibat banjir			V	V	
11. Judul : Kali Cakunglana Meluap, Puluhan Rumah Tergenang (website beritajakarta.com, 06-12-2012) bottom up	Luapan Kali Banjiri Puluhan Rumah	11) Disfungsionalisasi Saluran air sebabkan banjir			V	V	
12. Judul : Putaran Di Kolong Tol Jorr W1 Picu Kemacetan (website beritajakarta.com, 4 -12-2012)	Kekecewaan Warga terhadap keberadaan putaran di kolong tol JORR W1	12) Kesemrawutan lalu lintas	7 (tujuh)	2 (dua)	3 (tiga) V	V	

a. Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com

Mengacu pada sekumpulan wacana yang muncul dari tema-tema minor seperti terlihat dalam tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pihak yang paling kerap dimunculkan sebagai wacana oleh wartawan yaitu pihak Pemprov DKI (7 kali). Dari kekerapan ini, sosok pihak Pemprov DKI pewartawannya dimunculkan wartawan dari beragam realitas. Pertama kali, pewartawanan Pemprov DKI muncul melalui realitas pembagian Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun. Di sini, pihak Pemprov DKI diwacanakan sebagai pihak yang peduli kepada masalah pendidikan rakyat (positiv). Pewartawanan Pemprov DKI kemudian muncul melalui realitas ‘layanan kesehatan gratis’. Di sini pun pihak Pemprov DKI diwacanakan sebagai pihak yang peduli terhadap masalah kesehatan warga tak mampu (positiv).

Pewartawanan berikut dimunculkan wartawan melalui konstruksi realitas tentang masalah ‘tawuran Pelajar di Jakarta’. Di sini pihak Pemprov. DKI diwacanakan sebagai pihak yang tidak “tinggal diam” dalam mengatasi masalah tawuran di kalangan pelajar di DKI. (positiv). Begitu pula pada konstruksi realitas menyangkut ‘Rencana penambahan Puskesmas Berfasilitas Rawat Inap di DKI’, pihak Pemprov DKI juga diwacanakan sebagai pihak yang peduli terhadap masalah kesejahteraan masyarakat (positiv).

Kemudian, wartawan beranjak kepada realitas lain, yaitu menyagkut realitas pasca banjir. Melalui konstruksi realitasnya, dari *frame*-nya wartawan tampak berupaya membangun wacana bahwa pihak Pemprov DKI sebagai pihak “yang baik hati” dan bertanggung jawab terhadap warganya yang terkena musibah banjir dengan cara menjamin terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih warga Korban Banjir (positiv).

Pada edisi berikutnya, tampak wartawan kembali mengangkat realitas 'kesehatan masyarakat, yakni pembagian kartu sehat' sebagai objek konstruksinya. Untuk itu, maka di sini wartawan mencoba membangun wacana bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang mempedulikan masalah kesejahteraan masyarakat di bidang kehidupan kesehatan. Jadi, pihak Pemprov tetap diwacanakan secara positif.

Meskipun wartawan tampak lebih banyak memosisikan pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang positif dalam konstruksi realitasnya menyangkut masalah realitas di lingkungan Pemda DKI, namun tidak berarti mereka itu secara 'melulu' mewacanakan pihak Pemprov DKI dalam konstruksi realitasnya. Akan tetapi, mereka sekali-sekali terlihat juga berupaya memosisikan pihak-pihak di luar Pemprov DKI dalam pewartawannya. Pihak-pihak dimaksud yaitu pihak pemerintah juga, namun instansi pemerintah yang sifatnya non Pemprov DKI Jakarta. Pihak-pihak dimaksud yaitu seperti Pihak Satlantas Jakarta Utara. Pewartawanan pihak tersebut muncul melalui '*Frame*: Satlantas Atasi Kepadatan lalu lintas dengan Strategi *Contra Flow*'. Pihak Satlantas sendiri dalam pewartawanan itu, diposisikan sebagai pihak yang positif. Wacananya sendiri berupa wacana "Solusi kepadatan lalu lintas".

Selain pihak Satlantas, maka pihak pemerintah lainnya yang turut diwacanakan adalah Pihak PT KAI, sebuah perusahaan BUMN di bawah naungan Kementerian Perhubungan RI. Dalam pewartawanan, pihak ini dimunculkan wartawan melalui konstruksi realitas wartawan mengenai 'beroperasinya KRL Khusus Wanita'. Dengan *frame* bahwa 'Kaum Wanita Diperlakukan Istimewa oleh PT KAI', maka di sini, melalui wacana yang coba mereka munculkan, bahwa 'PT KAI istimewa wanita dalam bertransportasi', terlihat pihak PT KAI diposisikan juga sebagai pihak yang positif dalam hal 'memperlakukan kaum perempuan'.

Jika sebelumnya sudah dipaparkan temuan-temuan menyangkut posisi pihak-pihak pemerintah dalam pewartawanan melalui konstruksi wartawan mengenai realitas berbagai masalah menyangkut lingkungan Pemda DKI, maka temuan lainnya juga memperlihatkan adanya beberapa pemosisian pihak publik (warga) dalam pewartawanan.

Pemosisian pertama pihak publik/warga dalam pewartawanan, pertama kali dimunculkan wartawan melalui konstruksi realitas mereka mengenai 'matinya sayur karena terendam air banjir'. Konstruksi realitas tersebut mereka lakukan melalui pemberitaan berjudul 'Ribuan Sayuran Mati Terendam Air', website beritajakarta.com, 05-12-2012. Dengan konstruksi ini *frame* yang dimunculkan yaitu 'Petani Sayur di Jakarta Keluhkan Banjir'. Lalu, dari *frame* tersebut pihak publik/warga diwacanakan sebagai pihak yang menjadi korban dalam realitas tersebut. Wacananya sendiri berupa '**Derita petani sayur Jakarta akibat banjir**'.

Wacana lain yang dimunculkan wartawan menyangkut pihak publik/warga tersebut, yaitu wacana yang dimunculkan melalui konstruksi realitas mereka mengenai 'keberadaan Putaran Di Kolong Tol Jorr W1 yang memacetkan'. Realitas ini sendiri mereka konstruksikan melalui pemberitaan berjudul 'Putaran Di Kolong Tol Jorr W1 Picu Kemacetan' (website beritajakarta.com, 4-12-2012).

Berdasarkan konstruksi mereka, terlihat *frame*-nya berupa "Kekecewaan Warga terhadap keberadaan putaran di kolong tol JORR W1". Dari *frame* tersebut, terlihat mereka berupaya mewacanakan pihak publik/warga pemanfaat lalu lintas itu sebagai pihak yang berposisi tidak menguntungkan atau jadi korban akibat keberadaan putaran di kolong tol JORR W1 itu. Wacananya sendiri berupa, "Kesemrawutan lalu lintas".

Kemudian, wacana terakhir yang dimunculkan wartawan menyangkut pihak publik/warga tersebut, yaitu wacana yang dimunculkan melalui

konstruksi realitas mereka mengenai ‘Luapan Kali Cakunglana yang membanjiri Puluhan Rumah’. Wacananya sendiri berupa “Disfungsionalisasi Saluran air sebabkan banjir”. Jadi di sini, dengan pewacanaan tersebut, kepentingan pihak publik/warga, cenderung “disuarakan” sendiri oleh wartawan, bukan “disuarakan” oleh publik/warga yang dimediasi oleh wartawan melalui konstruksi realitas yang ia buat dalam pemberitaan.

b. Kepentingan (*interest*) Pemerintah (Pemprov DKI) versus Kepentingan (*interest*) Publik

Mengacu pada hasil analisis sebelumnya menyangkut arah pewacanaan wartawan sebagaimana tampak dalam format-format frame yang terbangun melalui konstruksinya mengenai berbagai realitas kepentingan publik, dengan mana memperlihatkan adanya keberagaman pihak-pihak yang mereka wacanakan, yakni bukan hanya pihak Pemprov DKI, maka ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Althusser (2004:47). bahwa watak dasar manusia itu adalah sebagai binatang ideology, menjadi benar adanya. Status binatang ideology sebagai mana disandang wartawan atau awak media ([website beritajakarta.com](http://www.websiteberitajakarta.com)), dalam pandangan Althusser, ideology yang diembannya itu diartikan sebagai ketidaksadaran yang begitu mendalam (*profoundly unconsciousness*) yang dalam praktiknya dalam diri manusia berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. (Althusser, 1994: 151). Dalam kaitan rutinitas wartawan atau awak media seperti [website beritajakarta.com](http://www.websiteberitajakarta.com), keberlangsungannya tentu persis seperti apa yang digambarkan oleh Althusser tadi. Dalam keadaan seperti itu, makanya para wartawan itu dalam mengkonstruksi realitas mengenai kepentingan publik, temuan penelitian menunjukkan tidak hanya pihak Pemprov DKI saja yang mereka wacanakan, namun termasuk pula pihak-pihak yang bukan pihak Pemprov DKI, seperti pihak Satlantas Polri, PT KAI dan pihak publik/warga DKI.

Lebih jauh, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, di mana pihak Pemprov DKI (Pemerintah) sendiri terlihat menjadi pihak yang paling **dominan** dimunculkan wartawan dalam pewacanaan mereka secara positif. Dilihat dari sini, maka ini dapat diartikan bahwa pihak media terindikasi pula sebagai pihak yang memainkan fungsinya secara ideal. Disebut ideal karena para awak media [website beritajakarta.com](http://www.websiteberitajakarta.com) itu memang merupakan bagian dari bentuk *ideologicalstateapparatus* /ISA sebagaimana dimaksudkan oleh Althusser³⁷.

Dengan memainkan fungsinya secara ideal itu, maka pihak awak media di sini, berdasarkan pandangan Sam Black³⁸ menyangkut fungsi humas pemerintah, mereka berarti telah mewujudkan dua dari empat tujuan Humas Pemerintah itu sendiri, yaitu menyangkut tujuan : 1). *To keep citizens informed of the council's policy and its day-by-day activities* (memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari); dan 3). *To enlighten citizens on the way in which the systems of local government works and inform them of their rights and responsibilities* (memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka).

Seiring dengan berjalannya dua tujuan Humas Pemerintah tadi, maka terkait pendapat Eriyanto (Eriyanto, 2002 : 167) yang mengutip pendapat Edelman mengenai pentingnya peranan bahasa dalam pembentukan sebuah citra, maka temuan penelitian ini yang menunjukkan begitu dominannya pihak

³⁷Althusser melihat bahwa ideology seringkali disebarkan oleh struktur sosial seperti yang ia sebut sebagai *ideologicalstateapparatus* /ISA dan *repressive state apparatus*/RSA (Althusser, 1994: 151). Dalam kaitan pendapat Althusser yang menilai bahwa media juga merupakan bentuk dari ISA tadi, itu berarti media di sini bisa menjadi “badan ideologis” yang dapat digunakan sebagai alat praktek ideologis oleh para pihak ISA.

³⁸ Onong Uchjana Effendy. Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis, Remaja Rosdakarya Bandung, 2002, h. 37

Pemprov DKI muncul dalam pewacanaan secara positif, dengan sendirinya pewacanaan ini bertendensi akan dapat membentuk citra positif Pemprov DKI dalam kaitan realitas kepentingan publik di wilayah DKI Jakarta.

Jika sebelumnya telah ditunjukkan bahwa wartawan dalam konstruksinya itu lebih dominan mewacanakan pihak Pemprov DKI secara positif, di sisi lain pihak wartawan tampak juga berupaya mewacanakan pihak-pihak lain di luar pihak Pemprov DKI, yang sifatnya juga cenderung positif. Ini dialami oleh pihak Polri cq pihak Satlantas Pemkot Jakarta Utara. Termasuk pula di sini dialami pihak PT KAI. Keduanya termasuk pihak yang diuntungkan oleh pihak wartawan dalam pewacanaan media sehubungan pihak wartawan tanpa sadar terjebak memainkan fungsi yang dalam bahasa Althusser tadi disebut sebagai “binatang ideologis”.

Selanjutnya, jika ditelaah menyangkut kepentingan publik/warga sendiri, dari temuan penelitian menunjukkan bahwa kalangan wartawan tampak memarginalisir kalangan publik/warga Jakarta dalam pewacanaannya. Indikasi marginalisasi itu terlihat dari begitu sedikitnya kalangan warga/publik dimunculkan dalam pewacanaan wartawan. Tercatat, kalangan warga/publik ini hanya dimunculkan wartawan dua kali dalam pewacanaan. Pertama pada konstruksi realitas menyangkut realitas ‘Derita yang dialami petani sayur Di DKI Jakarta’ dan kedua pada realitas menyangkut ‘Luapan Kali Cakung lama yang banjir puluhan rumah warga’. Jadi, dengan minimnya pewacanaan pihak publik/warga ini dalam pewacanaan wartawan melalui konstruksi realitas menyangkut masalah ‘kepentingan publik’, dengan sendirinya ini membuktikan bahwa dalam konstruksi realitas wartawan menyangkut masalah-masalah lingkungan Pemda DKI itu, pihak wartawan berindikasi cenderung lebih berpihak kepada pihak Pemprov DKI itu sendiri sebagai “tuannya”.

c. Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com.

“Governance means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented).” – UNESCAP, 2013. Tata kelola (*governance*) merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan tersebut akan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). (<http://indowhiz.blogspot.com/2013/02/konsep-government-pemerintah>, diakses 17 April pk 15.00).

Dari segi administrasi pembangunan, *good governance* didefinisikan sebagai berikut: *An overall institutional framework within which its citizens are allowed to interact and transact freely, at different levels, to fulfil its political, economic and social aspirations. Basically, good governance has three aspects: (i) The ability of citizens to express views and access decision making freely (kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan dan mengakses kebijakan pemerintah secara lebih bebas/mudah) ; (ii) The capacity of the government agencies (both political and bureaucratic) to translate these views into realistic plans and to implement them cost effectively (kapasitas agen pemerintah (baik politik dan birokrasi) untuk menerjemahkan pandangan mereka menjadi rencana yang sesuai dengan kenyataan dan mengimplementasikannya secara efektif (dari sisi biaya); and; (iii) The ability of citizens and institutions to compare what has been asked for with what has been planned, and to compare what has been planned with what has been implemented” (kemampuan masyarakat dan institusi untuk membandingkan antara apa yang diharapkan dengan apa yang direncanakan, dan kemudian membandingkannya dengan apa yang telah direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan). (lihat : <http://lawyersinbali.wordpress.com/2011/04/27/pengertian-good-governance/>, diakses 17 April 14*

jam 14.00. Dengan demikian, secara mendasar *good governance* itu mencakup tiga aspek.

Lebih jauh, sebagaimana sudah disinggung di bagian awal tesis ini, konsep *governance* lebih melihat kegiatan, proses atau *kualitas memerintah*, bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektivitas penerapan kebijakan itu. Kebijakan bukan dibuat oleh seorang pemimpin atau satu kelompok tertentu melainkan muncul dari proses konsultasi antara berbagai pihak yang terkena oleh kebijakan itu (Oyugi, 2000: 30-31). Dengan begitu, berarti prinsip *bottom up* jadi sangat diutamakan dalam aplikasi konsep *governance*.

Dalam konsep ini, sejalan dengan makna *bottom up* tadi, maka pemerintah jadi bukan satu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang kompleks, maka dalam hubungan ini *governance* melibatkan relasi antara berbagai kekuatan dalam negara, yakni pemerintah (*state*), *civil society*, *economic society*, dan *political society* (Corbett 2000: 23-27; Keating, 1999: 40-43).

Sementara itu, konsep *Government* memiliki makna berbeda dengan *Governance*. Konsep *Government* diantaranya didefinisikan bahwa “*Government is a group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state.*” – Business Dictionary, 2013. Pemerintah (*Government*) adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Yang menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara. (<http://indowhiz.blogspot.com/2013/02/konsep-government-pemerintah>, diakses 17 April pk 15.00).

Dengan membandingkan dua konsep sebelumnya, maka terlihat perbedaan yang sangat kontras diantara kedua konsep, perbedaan itu terutama terletak pada orientasi yang mendasari terselenggarakannya pemerintahan itu. Jika pada konsep *Governance* cenderung lebih didasari oleh prinsip kebersamaan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam konsep *Government* lebih didasarkan pada prinsip ketunggalan, yaitu organisasi pemerintahan sebagai pemangku tunggal penyelenggara pemerintahan.

Bertolak dari argumentasi sebelumnya menyangkut konsep *Governance* dan *Government*, maka jika dikaitkan dengan temuan penelitian ini sebagaimana dipaparkan dalam tabel 1 sebelumnya, kiranya dapat diidentifikasi dan dimaknai bahwa : Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com. itu, tampaknya secara relatif lebih merepresentasikan ideologi *government* (8) dari pada ideologi yang *Governance* (4).

Mengacu pada temuan di atas maka dengan mengaitkannya pada pendapat (Althuser; 2004: 48) bahwa aparatur media itu katanya tidak beda halnya dengan manusia lain, yakni mempunyai watak dasar, dengan mana watak dasar manusia itu sendiri sebagai binatang ideology (Althuser; 2004: 48), maka kecurigaan terhadap aparatur negara yang bekerja di media pemerintah seperti website beritajakarta.com milik Pemda DKI dalam iklim pemerintahan yang *Governance* saat ini, kiranya sudah terjawab kini.

Kecurigaan awal tesis ini sendiri yaitu, bahwa dalam iklim *Governance* saat ini, wartawan aparatur negara pada **Website beritajakarta.com** akan kesulitan dalam menuaikan tugasnya sebagai wartawan dalam hubungan ‘penuaian’ kepentingan. Kesulitan ‘penuaian’ itu yaitu berupa ‘tarik-menarik’ antara menuaikan kepentingan Pemerintah atau kepentingan warga/publik. Dengan mengacu pada temuan penelitian ini sendiri, ternyata menunjukkan

bahwa bandul *power of interest* itu ternyata lebih mengarah pada upaya merepresentasikan ideologi *government* dari pada ideologi *Governance* yang lebih 'memfasilitasi' warga dalam berjalannya operasi pemerintahan.

Dengan begitu, ini tentu dapat pula diartikan bahwa Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com. itu, tampaknya cenderung lebih diwarnai oleh ideologi yang bersifat *government*. Ideologi yang demikian tentunya jadi kurang sesuai dengan harapan pemerintah dalam konteks konsep *Governance* yang nota bene telah diimplementasikan oleh pihak BAPPENAS sebelumnya. Dalam konteks tersebut, aplikasinya seperti sebagaimana dikatakan oleh pihak Bappenas sebelumnya yakni terdiri dari : 1) Transparansi (*Openness and Transparency*); 2) Partisipasi Masyarakat (*Participation*); 3) Akuntabilitas/Tanggung Gugat (*Accountability*); 4) Supremasi Hukum (*Rule of Law*). (Bapenas, 2008: 15). Keempat prinsip tersebutlah yang oleh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS disebut dengan "*More Administrative Good Governance*".

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan ideologi yang direpresentasikan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitasnya mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Dari hasil analisis terkait dengan "Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah Dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com" dapat disimpulkan bahwa meskipun wartawan tampak lebih banyak memposisikan pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang 'positif' dalam konstruksi realitasnya menyangkut masalah realitas di lingkungan Pemda DKI, namun mereka sekali-sekali terlihat juga berupaya memposisikan pihak-pihak di luar Pemprov DKI dalam pewartawannya. Kemudian terkait dengan "Kepentingan (*interest*) Pemerintah (Pemprov DKI) versus Kepentingan (*interest*) Publik", dapat disimpulkan bahwa dalam konstruksi realitas wartawan menyangkut masalah-masalah lingkungan Pemda DKI itu, pihak wartawan berindikasi cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pihak Pemprov DKI itu sendiri sebagai "tuannya". Kemudian terkait dengan "Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com.", maka bertolak dari argumentasi menyangkut konsep *Governance* dan *Government*, kiranya dapat diidentifikasi dan dimaknai bahwa : Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com. itu, tampaknya secara relatif lebih merepresentasikan ideologi *government* (8) dari pada ideologi yang *Governance* (4). Dengan demikian, ideologi yang dominan di balik pemberitaan di website beritajakarta.com. itu adalah ideologi yang berifat *Government*. Jadi, wartawan aparat negara tampaknya cenderung lebih mementingkan *interest* pihak Pemda DKI dari pada pihak warga/publik DKI Jakarta dalam aktifitas pemberitaannya di website beritajakarta.com.

Secara praktis, maka berdasarkan temuan penelitian yang memperlihatkan bahwa pihak aparat negara dalam aktifitas kewartawanannya cenderung masih berpihak kepada pihak pemerintah, kiranya ini menjadi tidak ideal di tengah-tengah iklim pemerintahan yang '*Governance*' yang nota bene kini sedang digalak-galakkan pemerintah. Bagi para pihak aparat negara dan utamanya aparat negara yang memainkan fungsi wartawan di website beritajakarta.com, kiranya ini menjadi masukan penting dalam rangka memperbaiki kualitas wartawan dalam era pemerintahan yang '*Governance*'.

Sementara secara akademis, sehubungan dengan kelemahan penelitian ini yang tidak didukung oleh aktifitas wawancara mendalam terhadap subyek penelitian, dan di samping juga tidak dilakukannya suatu studi sejarah dan dokumentasi terkait dengan subyek penelitian dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, utamanya terkait dengan konsep *government* dan *governance*, maka bagi para pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis di masa mendatang, hendaknya penelitian itu dilakukan dengan mengisi kekurangan-kekurangan yang tidak dilakukan dalam penelitian ini. Dengan melakukan itu tentunya diharapkan bahwa unsur-unsur 'how' dan 'why' terkait ideologi aparat negara tadi dapat terungkap dalam penelitian itu.

Ucapan terimakasih : Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada tim redaksi atas dimuatnya KTI ini pada JSKM edisi 21 (2) tahun 2017.

Daftar Pustaka

- Althusser, Louis, *Tentang Ideologi :MarxismeStrukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, 2008, Bandung, Jalasutra.
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.187
- Fairclough, Norman, 1995, *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*, London and New York, Longman, p.76.
- Gamson, William A. *Media Discourse as a Framing Resource*: dalam Ann N. Crigler (ed) *The Psychology of Political Communication*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 1996
- Gurevith, Michael, Tony Bennett, James Curran and Woollacott, *Culture, Society and The Media*. Methuen London and New York, 1982, 263.
- Hamad, Ibnu. *Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi Sebuah Telaah Ringkas* www.um.edu.my Hamad 2007.
- Harris et al. (1989) dan Kittredge & Lehrberger (1982), dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analisis.
- Luke, A. (1997). Theory and practice in critical science discourse. In L. Saha (Ed.), *International encyclopedia of the sociology of education*. Accessed March 6, 2003. <http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/Luke/SAHA6.html>
- McGregor, Sue L.T., dalam, “Critical Discourse Analysis- A Primer”, dalam <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorcd.html>.
- Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Rusadi, Udi, “Diskursus Kerusakan Sosial Dalam Media Massa”, disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.
- Radford, Gary P. 2005. *On the Philosophy of Communication*. Thomson Wadsworth
- Seliger, dalam John B. Thompson, *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, 2003, Diterjemahkan, Haqul Yaqin, Yogyakarta, IRCiSoD, hlm. 132.
- Shoemaker, Pamela J., Reese dan Reese, Stephen D., 1996, *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*, NY, Longman Publishers USA, p. 223.
- Tiamono, Rigakittyndya, 2008, “Analisis Wacana Norman Fairclough”, dalam *Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 151.
- Veeber., J.K , *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* , Jakarta, Gramedia, 1993. H, 171.

Website :

- <http://www.thefreedictionary.com/ideology>
- <http://www.allwords.com/word-ideology.html>
- http://atheism.about.com/library/glossary/general/bldef_ideology.htm
- <http://www.freelists.org/archives/ppi/03-2006/msg00142.html>
- http://atheism.about.com/library/glossary/general/bldef_ideology.htm
- <http://www.thefreedictionary.com/ideology>; <http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi>;

Teori Belajar Sosial – *Social Learning Theory*

Para peneliti sosial sepakat bahwa sebagian sikap, tata nilai, serta perilaku setiap individu dapat dikembangkan melalui pengamatan atau pengamatan terhadap model. Teori belajar sosial yang digagas oleh **Albert Bandura** adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku yang baru dapat diperoleh melalui pengamatan dan meniru orang lain. Dalam artian, pembelajaran adalah sebuah proses kognitif yang terjadi dalam suatu konteks sosial dan dapat terjadi melalui pengamatan langsung. Pembelajaran juga dapat terjadi melalui konsep *reward and punishment* atau proses penguatan.

VALENCE ISU DAN SURVEILLANCE MEDIA
(*Content Analysis Surat kabar mengenai Valence Issue melalui Headline-nya pada Edisi Juli 2017*)

VALENCE ISSUE AND SURVEILLANCE MEDIA
(*Content Analysis of the newspaper on the Valence Issue through its Headline in July 2017 Edition*)

Felix Tawaang

Peneliti Bidang Studi Komunikasi dan Media pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta, Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat, . Provinsi DKI Jakarta, Indonesia
HP 081290305475, feltashome@yahoo.co.id;

(Naskah diterima by email 22 Maret 2017; revisi sesuai catatan redaksi 30 Agustus 2017;

Disetujui terbit oleh PR 23 Oktober 2017)

ABSTRACT

This research is basically trying to find answers about the phenomenon of valence issue in the agenda of the Newspaper. Referring to the analysis and discussion of the valence phenomenon both in the context of physical Content and Content (actor) presumably it shows the phenomenon of emphasis by media organizations. The mass media emphasizes certain issues and according to the findings it appears that the four newspapers tend not to be as much emphasized on the issues of the environment. The phenomenon of this phenomenon itself has been assumed by the agenda setting theory, that what is considered important by the reader in view of the editor then that is made object of emphasis by the media. Thus among the media has a relative meaning of 'interest' on various issues. On the other hand, the findings related to the valence phenomenon also serve as evidence that the variation phenomena occurring in terms of valence among the four newspapers has also mirrored the results of the media organization's calculations in its encoding process.

Keywords: Media; Media Agenda; Surveillance; Headline; Newspaper, Valence.

ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan jawaban mengenai fenomena *valence issue* dalam pengagendaaan Surat kabar Ibu kota. Mengacu pada analisis dan diskusi terhadap fenomena valence baik dalam konteks Konten fisik dan Konten (aktor) kiranya itu memperlihatkan fenomena penekanan oleh organisasi media. Media massa memberi penekanan pada isu-isu tertentu dan sesuai temuan tadi tampak di antara keempat surat kabar itu cenderung tidak sama penekannya atas isu-isu yang ada di lingkungannya. Keterjadian fenomena ini sendiri memang sudah diasumsikan oleh teori agenda setting, bahwa apa yang dianggap penting oleh pembaca dalam pandangan redaksi maka itulah yang dijadikan objek penekanan oleh pihak media. Dengan demikian di antara sesama media memiliki makna 'kepentingan' yang relatif atas berbagai issue. Di sisi lain, temuan terkait fenomena *valence* dimaksud juga menjadi bukti bahwa fenomena variasi yang terjadi dalam hal *valence* di antara keempat surat kabar tadi juga menjadi cermin hasil perhitungan pihak organisasi media dalam proses enkoding-nya.

Kata-kata kunci : Media; Agenda Media; Surveillance; Headline; Surat kabar.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Dinamika kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, secara relatif dalam realitasnya dapat dipantau, direkam dan disampaikan kepada khalayak. Dengan demikian khalayak dalam posisinya sebagai rakyat menjadi tahu dan mengerti masalah dinamika tadi.

Dalam konteks 'penyampai dan penerima dinamika' tadi, maka dalam terminologi ilmu komunikasi sendiri, itu disebut sebagai *human communication* dalam setting/level *mass* (massa). Suatu level yang menurut De Fleur & Rokeach (1982 : 8) termasuk yang paling kompleks sehubungan dalam prosesnya tercakup banyak aspek interpersonal, kelompok, publik dan komunikasi organisasi.

Human communication dalam setting/level *mass* (massa) itu sendiri dalam realitanya lazim dilakukan oleh suatu organisasi melalui media massa seperti surat kabar. Komunikasi dalam *setting/konteks* massa sendiri, atau lazim dikenal dengan komunikasi massa, telah banyak didefinisikan akademisi. Diantaranya dikemukakan Bittner, bahwa komunikasi massa yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah

besar orang (*Mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people*) (dalam Rakhmat, 1985 : 176). Definisi ini menyiratkan makna bahwa komunikasi massa pada hakikatnya adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi media massa kepada khalayak luas yang anonim. Littlejohn menyebut proses komunikasi yang demikian dengan konsep *media encoding*, yaitu proses di mana organisasi media memediakan pesannya kepada khalayak.

Organisasi media sendiri melakukan aktivitas tadi berdasarkan *Early conceptualizations of journalism's functions*, terkait dengan upaya mereka untuk memerankan fungsi media terutama fungsi *surveillance* selain fungsi-fungsi lainnya seperti *correlation, transmission, and entertainment* (Lasswell, 1948; Wright, 1988). *Surveillance* yaitu suatu fungsi yang berhubungan dengan *Handling News* terkait dengan lingkungan media. Wujudnya ada yang berupa *hard news* atau *soft news*.

Terkait dengan tujuan, maka terdapat sejumlah tujuan organisasi media dalam proses penyelenggaraan komunikasi massa tadi. Dalam kaitan media massa cetak misalnya, maka tujuan itu, berdasarkan identifikasi Cooley (1909) terhadap media massa pada bentuk-bentuk awal seperti surat kabar, majalah dan buku (dalam, De Fleur & Rokeach, 1982 : 9), secara umum yaitu berupa usaha pengikisan hambatan isolasi di antara penduduk di dunia dan menghasilkan perubahan penting dalam organisasi dan fungsi masyarakat. Jadi, ini mengindikasikan bahwa ada dua tujuan organisasi media dalam berkomunikasi dengan khalayaknya, pertama dalam rangka membuka isolasi komunikasi antar penduduk dunia dan kedua untuk perubahan penting dalam organisasi dan fungsi masyarakat. Perubahan dimaksud, sebagaimana dikatakan Cooley (dalam De Fleur & Rokeach, 1982 : 9) terkait dengan kehidupan dalam bidang, “...commerce, in politics, in education, even in mere sociability and gossip ..”.

Di sisi lain, pernyataan Cooley itu menegaskan, bahwa meskipun pada saat itu media massa masih terbatas pada media cetak, namun proses komunikasi massa melalui media tersebut sudah menunjukkan implikasi sosialnya yang begitu luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks yang sama, ini berarti dapat pula diasumsikan, bahwa ragam media yang tercipta berkat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, pada hakikatnya keragaman itu hanya berfungsi sebagai perluasan fasilitasi saja bagi munculnya implikasi-implikasi sebagaimana dimiliki media cetak pada awal kemunculannya tadi.

Terkait khusus dengan komunikasi massa melalui media cetak surat kabar, terutama dalam hubungannya dengan tujuan seperti terlihat dari implikasi yang digambarkan Cooley sebelumnya, berdasarkan aplikasinya, tujuan komunikasi massa itu berindikasi lebih banyak difokuskan pada soal-soal implikasi komersial, politik, pendidikan dan termasuk menyangkut gosip. Namun demikian, dalam operasionalisasinya, bagaimana kualifikasi organisasi media berkomunikasi dengan khalayak dalam konteks penciptaan sejumlah implikasi tadi, maka menurut teori normatif (lihat, Mc Quail, 1994) itu berkaitan dengan iklim politik di mana pers itu beroperasi.

Meskipun dalam operasionalisasinya organisasi media menurut teori normatif tadi tergantung pada iklim politik domisilinya, namun komponen-komponen sistem dalam operasionalisasi bekerjanya organisasi media dalam upaya penciptaan berbagai implikasi sosial, maka mengacu pada pandangan bahwa media massa sebagai sistem sosial (De Fleur & Rokeach, 1982) , itu cenderung memiliki jumlah yang konstan dalam suatu totalitas sistem yang saling berketergantungan. Komponen-komponen ini terdiri dari : *audiences, research organizations, distributors, producers and their sponsors, advertising agencies and subsystems of control* (De Fleur & Rokeach, 1982 : 173-175).

Dari sejumlah komponen itu, diketahui bahwa komponen *audience* diidentifikasi sebagai salah satu komponen (baca : variabel yang mempengaruhi enkoding media) utama yang sangat rumit dalam sistem sosial komunikasi massa. Kerumitan mana, berdasarkan studi bertahun-tahun para ilmuwan sosial, itu karena khalayak sifatnya yang berjenjang, berbeda-beda dan saling berkaitan melalui banyak cara. Terkait dengan ini, dijelaskan oleh De Fleur & Rokeach (1982 : 174) bahwa, “*Some of the major variables that play a part in determining how this component will operate within the system are the major needs and interests of audience members, the various social categories represented in audience, and the nature of the social relationships between audience members. These variables point to behavioral*

mechanisms that determine the patterns of attention, interpretation, and response of an audience with respect to content of a given type”.

Pemaparan De Fleur & Rokeach itu kiranya menjelaskan bahwa dalam kaitan komponen *audiens*, terutama dalam hubungannya dengan variabel-variabel *the major needs and interests, social categories, and the social relationships*, pihak organisasi media sangat memperhitungkannya ketika mereka melakukan proses enkoding dalam upaya mengikis hambatan isolasi di antara penduduk di dunia dan menghasilkan perubahan penting dalam organisasi dan fungsi masyarakat tadi.

Representasi hasil “perhitungan“ organisasi media itu sendiri, maka terkait dengan fungsi surveilence sebelumnya, maka dalam terminologi jurnalistik lazimnya dapat dilihat dari bagaimana organisasi redaksi menyajikan isi medianya kepada khalayak. Dalam hubungan ini, jenis-jenis tersebut diketahui tercakup dalam tiga kategori, terdiri dari : *low-taste content* (isi yang sifatnya dapat berkontribusi terhadap penciptaan selera rendah dan perusakan moral, misalnya seperti film pornografi yang seronok, drama-drama kriminal, komik-komik kriminal atau musik sugestif); *nondebated content* (isi yang sifatnya tidak mengancam standard moralitas, misalnya laporan ramalan cuaca atau musik simpony yang tidak populer; *high-taste content* : isi media yang bersifat kritis yang disampaikan dengan “*in better taste*”, misalnya seperti musik serius, drama canggih, diskusi politik dan acara lain yang sifatnya sebagai lawan dari *low-taste content*.(lihat, De Fleur & Rokeach 1982 : 173). Dengan pengkategorian tersebut, ini berarti bahwa dalam proses enkoding secara teoritis organisasi redaksi suatu media bermain pada tiga alternatif kategori isi dimaksud.

Deskripsi menyangkut fenomena yang disebut Litlejohn dengan konsep *media encoding* sebelumnya, di mana dalam prosesnya juga diketahui terkait dengan faktor ‘perhitungan’ media terhadap audience, maka aktivitas dimaksud dalam terminologi ilmu komunikasi dikenal juga melalui konsep lainnya. Fenomena dimaksud dikonseptualisasi dengan *media agenda setting*.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini akan berupaya lebih jauh mempelajari fenomena *media agenda setting* tadi. Persoalannya akan difokuskan pada fenomena level satu yaitu fenomena agenda media, dan lebih khusus lagi pada fenomena *valence*. Dengan demikian permasalahan penelitian ini dirumuskan menjadi, Bagaimana *valence issue* Surat kabar Ibu kota dalam peng-agendaannya ?

B. Signifikansi

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat melegkapi hasil-hasil studi yang telah menyangkut fenomena agenda media. Secara praktis diharapkan dapat menjadi *in put* yang bermanfaat dalam memahami lebih jauh terkait fenomena agenda setting, khususnya terkait dengan agenda media.

III. PEMBAHASAN

A. 1. Konsep-Konsep Teoritik

Teori Agenda-Setting

Teori Agenda-Setting ditemukan oleh McComb dan Donald L. Shaw sekitar 1968. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu penting karena media menganggap isu itu penting juga (Griffin, 2003:390). Teori agenda-setting mempunyai kesamaan dengan Teori Peluru yang menganggap media mempunyai kekuatan memengaruhi khalayak. Bedanya, Teori Peluru memfokuskan pada sikap (afektif), pendapat atau bahkan perilaku. Agenda-Setting memfokuskan pada kesadaran dan pengetahuan (kognitif). Teori ini akhirnya berkembang dan banyak riset dilakukan untuk membuktikan hipotesis teori ini. Pada 1972 misalnya, teori ini digunakan untuk meriset efek kampanye presiden di North California. Hasilnya, media cetak terbukti mendukung hipotesis riset agenda-setting, sedangkan media elektronik hasilnya tidak mendukung. Kurt Lang pada 1983 juga telah melakukan pengujian yang sama, hasilnya mereka menyimpulkan bahwa pemberitaan media memang menjadi variabel penentu yang memengaruhi apa yang dianggap penting dan dibicarakan publik.

De Fleur dan Ball Rokeach (1982) mengemukakan bahwa yang berkaitan dengan gagasan teori *Agenda-Setting* adalah paradigma psikologis, khususnya mengenai orientasi kognitif. Ciri paradigma itu menurut De Fleur dan Ball Rokeach pada intinya ialah bahwa secara perorangan anggota masyarakat menerima secara aktif masukan-masukan berupa stimuli-stimuli tertentu melalui proses kognitif. Melalui proses kognitif inilah seseorang mengarahkan perilakunya (termasuk persepsi, imaji, sistem kepercayaan, sikap, nilai, mengingat, berfikir, dan perilaku lainnya) yang juga merupakan hasil dari proses belajar terhadap pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, persepsi kita terhadap dunia di sekeliling kita, merupakan persepsi yang dihasilkan selama proses kognitif, dan persepsi tersebut bisa saja berbeda dari realitas dunia yang sebenarnya.

Teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori *Agenda-Setting*. Teori ini berkaitan dengan dampak media massa terhadap pengetahuan dan pendapat khalayak terhadap suatu isu. Teori ini berintikan bahwa apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap penting pula oleh khalayak. Media massa memberi penekanan pada isu-isu tertentu. Penekanan itu mengakibatkan khalayak menganggap bahwa isu yang ditekankan oleh media massa tersebut merupakan isu yang penting, menjadi bahan pemikiran, dan pembicaraan masyarakat. Jadi, ada keterkaitan antara isu yang ditekankan oleh media massa dengan isu yang dipikirkan dan dibicarakan masyarakat.

Melalui *agenda-setting* khalayak tidak hanya mempelajari isu-isu yang muncul di pemberitaan media massa, tetapi juga mempelajari seberapa penting isu atau topik tersebut dengan melihat cara media massa memberi penekanan terhadap isu atau topik tersebut. Hal-hal yang dipandang penting oleh media akan dianggap penting pula oleh publik sehingga menjadi agenda publik. Kalau media massa menganggap suatu isu sangat penting, maka isu itu akan dianggap sangat penting oleh publik. Demikian juga halnya kalau media menganggap suatu isu kurang penting, maka publik pun akan menganggap isu itu kurang penting (McCombs dan Shaw, dalam Griffin, 2003).

Agenda Setting Theory digagas oleh McCombs & Shaw pada 1972. *Agenda Setting* adalah suatu jenis penelitian yang difokuskan pada pendapar umum, bukan pada persuasi dan perubahan sikap, tetapi pada bagaimana frekuensi isu (*salience issue*) atau relevansi isu dengan khalayak (*prominence issue*) atas sesuatu isu yang diagendakan media. Termasuk pula menyangkut bagaimana cara suatu isu disajikan media (*valence*), misalnya apakah suatu isu disajikan dengan cara menarik atau tidak. Dalam tradisi studi agenda setting, upaya memahamai fenomena ketiga konsep tadi dikenal dengan studi agenda media.

Agenda Setting Theory kemudian berkembang tidak sebatas riset konten analisis menyangkut ketiga konsep sebelumnya, melainkan bergerak pada upaya memahami bagaimana agenda publik. Dengan agenda publik dimaksudkan, akan dapat diketahui bagaimana persepsi khalayak terhadap urutan-urutan isu yang dianggap penting. Upaya untuk mengetahui persepsi khalayak tadi, dilakukan dengan penelitian survey.

Upaya selanjutnya dalam rangka pengembangan teori agenda setting adalah, yakni upaya memahami agenda kebijakan. Dalam upaya tersebut, dimaksudkan supaya diketahui apakah suatu kebijakan tertentu diambil oleh pengambil keputusan itu berhubungan dengan agenda publik yang notabene diperolehnya dari isu yang sebelumnya diagendakan media.

Menurut banyak akademisi, sulit membuktikan secara ilmiah tentang adanya hubungan antara agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan. Salah satu kelemahannya yaitu karena proses bekerjanya ketiga agenda tadi memakan waktu yang panjang sehingga menjadi relatif sulit untuk melacak keakurasian data ilmiahnya. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, proses yang demikian itu sudah relatif sering dialami.

2. Agenda Media

Konsep agenda media merupakan salah satu dari tiga konsep yang ada dalam tradisi studi agenda setting. Sebagai salah satu konsep, secara teoritis dijelaskan bahwa konsep ini fokus dalam berupaya mempelajari bagaimana organisasi media memediakan pesannya kepada khalayak pembaca. Terkait dengan ini maka dijelaskan bahwa variabel mayor agenda media itu mencakup tiga variabel minor, yaitu *salience issue*, *prominence issue* dan *valence*. *Salience issue* yaitu terkait dengan bagaimana frekuensi suatu isu yang

diagendakan. *Prominence issue* terkait dengan relevansi suatu isu yang diagendakan media dengan khalayak. Sementara variabel minor *valence* yaitu menyangkut bagaimana cara suatu isu disajikan media, misalnya apakah suatu isu disajikan dengan cara menarik atau tidak, melalui *headline* atau tidak, di halaman depan, dalam atau belakang dan lain sejenisnya. Jadi pada intinya adalah bahwa *Saliency issue* (Frekuensi); *Prominence issue* (Relevansi) dan *Valence issue* (cara). Penelitian ini sendiri, tanpa mengurangi arti dari fenomena lainnya, namun akan lebih difokuskan lagi terhadap fenomena *valence issue* saja.

3. Definisi kategori

Studi agenda media dalam penelitian ini akan ditelusuri melalui konsep-konsep *valence*. *Valence issue* adalah deskripsi mengenai cara suatu isu dalam pengagendaan media. Issue adalah persoalan yang menurut pihak media paling penting dianggap oleh khalayak media. Fenomenanya akan dilihat dari bagaimana media menyajikan suatu isu atau melihat dengan cara bagaimana suatu isu disajikan oleh media. Cara dimaksud mencakup :

a. Konten fisik

1. Judul headline (Headline- Non Headline)
2. Luas Cm kolom penyajian issue
3. Tipologi Isu (Tripartite – Polity)
4. Bidang masalah issue yang disajikan
5. Topik issue yang disajikan
6. Prinsip "Both side" dalam pemberitaan (diterapkan-tidak diterapkan)

b. Konten (aktor)

7. issue yang disajikan menurut sumber beritanya (Pemerintah-Non Pemerintah) (komunikator)
8. issue yang disajikan menurut predikat Sumber Berita (Kalangan Pemerintah-Non Pemerintah) (komunikator)
9. issue yang disajikan menurut predikat Sasaran Komunikasi (Pemerintah-Non Pemerintah) (komunikasikan)
10. Struktur Politik Sasaran Komunikasi (Suprastruktur politik- Infrastruktur politik) (komunikasikan)

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan metode *content analysis* dalam upaya pengumpulan datanya. *Recording unit* penelitian ini adalah semua berita headline pada surat kabar Media Indonesia, Kompas, Rakyat Merdeka dan Republika. Data dikumpulkan dengan menggunakan *coding sheet* yang sebelumnya telah melalui Holsti reliability test.

B. Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian

Valence issue Dalam Agenda Media

a. Konten fisik

Penelitian ini menentukan obyeknya sebagai *recording unit* adalah empat surat kabar terbitan Ibukota. Keempatnya yaitu Media Indonesia, Kompas, Rakyat Merdeka, dan Republika. Ada 28 isu yang kesemuanya disajikan oleh keempat surat kabar tadi dalam bentuk *headline* surat kabar di halaman satu. Dari ke-28 isu tadi, dapat dikatakan hampir tidak terdapat kesamaan¹ isu di antara sesama surat kabar ibukota dalam hal cara (*valence*) mengagendakan isu di lingkungannya (*surveillance*). Kesamaan secara relatif hanya dijumpai pada isu dalam hubungannya dengan sifat, yaitu antara issue bersifat Polity-Trivial, dengan mana isu bersifat Polity menjadi pilihan semua organisasi dalam pengagendannya.

¹ Dari 28 isu, hanya 4 di antaranya yang relatif sama, yaitu terkait dengan persoalan Perpu. Ini terdiri dari : HTI Dulu, Baru FPI; Jaga Kebebasan Berserikat; Pasal Pemidanaan Perpu Ormas Dikritisi; dan Perpu Upaya Selamatkan Bangsa

Ke-28 isu tadi, dalam pengagendannya disajikan oleh organisasi media dalam ruangan surat kabar yang bervariasi antara 201 -1.000 Cm kolom. Namun paling banyak disajikan dengan 201 – 400 Cm kolom, yakni dilakukan oleh organisasi redaksi Media Indonesia (71.4%). Sementara paling sedikit dilakukan oleh organisasi redaksi Kompas (14.3%) dengan 801 - 1.000 Cm kolom dalam penyajiannya.

Selanjutnya, keempat sampel surat kabar yang juga diketahui semuanya memilih issue ‘polity’ dalam pengagendannya melalui *headline*, maka terkait dengan ‘Bidang Masalah’ yang dipilih dalam pengagendannya, datanya mengindikasikan bahwa ‘Bidang Masalah’ yang lolos dalam proses pengagendaan mereka itu adalah ‘Politik’. ‘Bidang Masalah’ ‘Politik’ ini masing-masing mendapat pilihan oleh masing-masing organisasi redaksi sebanyak 42.9%. ‘Bidang Masalah’ lain yang juga cukup banyak mendapat pilihan redaksi yaitu ‘Hukum’. Untuk bidang masalah ini maka organisasi redaksi Rakyat Merdeka yang paling banyak memilihnya, yaitu sebanyak 57.1%. Sementara organisasi redaksi lainnya proporsinya sama besar, yaitu 28.6%. Sedang ‘Bidang Masalah’ lain yang ada juga organisasi redaksi yang memilihnya dalam pengagendaan namun tidak banyak jumlahnya, yaitu bidang masalah Ekonomi dan hukum. Untuk ‘Ekonomi’, maka Kompas yang terbanyak (28.6%), sementara Media Indonesia dan Republika masing-masing sama yaitu 14.3% dan Rakyat Merdeka bahkan sama sekali tidak ada. (lihat tabel 1)

Tabel 1
 Bidang masalah * Nama Surat Kabar Crosstabulation

			Nama Surat Kabar				Total
			Media Indonesia	Kompas	Rakyat Merdeka	Republika	
Bidang masalah	Politik	Count	3	3	3	3	12
		%	42.9%	42.9%	42.9%	42.9%	42.9%
		% of Total	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	42.9%
	Ekonomi	Count	1	2	0	1	4
		%	14.3%	28.6%	.0%	14.3%	14.3%
		% of Total	3.6%	7.1%	.0%	3.6%	14.3%
	Budaya	Count	1	0	0	0	1
		%	14.3%	.0%	.0%	.0%	3.6%
		% of Total	3.6%	.0%	.0%	.0%	3.6%
	Hukum	Count	2	2	4	2	10
		%	28.6%	28.6%	57.1%	28.6%	35.7%
		% of Total	7.1%	7.1%	14.3%	7.1%	35.7%
	Lain-lain (hiburan, kriminal, lingkungan hidup, dst)	Count	0	0	0	1	1
		%	.0%	.0%	.0%	14.3%	3.6%
		% of Total	.0%	.0%	.0%	3.6%	3.6%
Total	Count	7	7	7	7	28	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.0%	

Kemudian terkait dengan ‘topik’, keempat surat kabar sampel yang juga diketahui tidak memandang sama akan makna ‘*both sides* dalam pemberitaan², berdasarkan temuan memperlihatkan terdapat dua issue yang masing-masing mendapat pilihan oleh organisasi redaksi dalam pengagendannya. Kedua issue dimaksud terkait dengan topik ‘Setya Novanto Tersangka Kasus E-KTP’ dan ‘Pemberlakuan Perpu Ormas HTI’. Masing-masing organisasi redaksi surat kabar mengagendakan issue dimaksud sebanyak 14.3%. Dengan demikian kedua issue dimaksud dalam kurun waktu yang sama dianggap sama pentingnya oleh organisasi redaksi surat kabar bagi para khalayaknya.

² Media Indonesia dan Kompas proporsi berita yang sajiannya mengandung prinsip *both sides* lebih besar dari pada yang tidak. Sementara Rakyat Merdeka dan Republika sebaliknya.

b. Konten (actor=komunikator)

Dalam pengagendannya, maka dalam konteks *valence* tampak pihak organisasi media masing-masing memfasilitasi aktor dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah dalam penyajian agendanya. Dari segi aktor dari kalangan pemerintah, mak umumnya aktor yang berposisi sebagai nara sumber itu difasilitasi pihak redaksi hanya satu kali saja. Namun demikian ada juga sejumlah aktor yang difasilitasi antara 2 hingga 4 kali. Aktor-aktor dimaksud yaitu aktor seperti : Fadli Zon; Agus Rahardjo; Wiranto; Sri Mulyani; Agus Hermanto; Pratikno; Jusuf Kalla; Idrus Marham; dan Hidayat Nur Wahid. Sementara aktor dari kalangan pemerintah, temuan memperlihatkan jumlahnya ada 35 orang. Hampir seluruhnya aktor-aktor itu difasilitasi satu kali saja oleh pihak organisasi redaksi, terkecuali hanya satu aktor saja yaitu Amin Rais, mendapat dua kali fasilitasi.

Terkait aktor dari kalangan pemerintah sebelumnya, ditemukan juga data menyangkut Status/predikat mereka di jajaran institusi pemerintah. Sesuai data yang ditemukan maka predikat para aktor itu umumnya disebutkan redaksi hanya satu kali. Namun ada juga di antaranya yang disebut antara 2 hingga 4 kali. Predikat-predikat itu adalah Ketua Fraksi PKS/DPR; Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Ketua Umum Partai Nasdem; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Sekretaris Negara; Sekjen Partai Golkar; Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra; Wakil Presiden; Menteri Keuangan; Menteri Luar Negeri; dan Ketua KPK.

Sementara itu, para aktor (sumber berita) dari kalangan non pemerintah, temuan memperlihatkan umumnya para aktor itu hanya satu disebutkan organisasi redaksi surat kabar. Terkecuali aktor politikus dari Parpol PAN, predikatnya sebagai Ketua Majelis Kehormatan PAN, disebut dua kali oleh redaksi tertentu.

c. Konten (aktor=komunikasikan)

Terkait dengan sasaran aktor komunikator melalui fasilitasi media dengan pengagendannya, maka temuan menunjukkan bahwa yang berstatus/predikat anggota masyarakat (individu atau mewakili kelompok masyarakat) itu menjadi yang paling banyak (68.6%) dijadikan aktor sebagai sasaran komunikasinya. Tidak sedikit juga (52.4%) yang dijadikan sasaran komunikasi itu berasal dari kalangan yang berstatus Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, MPR, MK, MA, KY). Sementara sasaran yang berasal dari kalangan yang berstatus lainnya, proporsinya berkisar 2.9%-28.6%. (lihat tabel 2).

Selanjutnya, dari segi system politik juga diketahui bahwa para sasaran komunikasi dari komunikator tadi berasal dari dua komponen sub system. Namun sesuai dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa para sasaran komunikasi lebih banyak merupakan para pihak yang ada di komponen Suprastruktur politik (64.3%). Sedikit saja diantaranya (35.7%) yang sasarannya itu berasal dari kalangan komponen Infrastruktur politik.

Tabel 2
Status/predikat Sasaran Komunikasi * Asal Sasaran Komunikasi Crosstabulation

			Asal Sasaran Komunikasi		Total
			Pemerintah	Non pemerintah	
Status/predikat Sasaran Komunikasi	Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, MPR, MK, MA, KY).	Count	33	0	33
		%	52.4%	.0%	33.7%
		% of Total	33.7%	.0%	33.7%
	Lembaga Independen U, KPI, Komisi Perempuan,	Count	5	0	5
		%	7.9%	.0%	5.1%
		% of Total	5.1%	.0%	5.1%
	Lembaga Ngo (LSM-LSM)	Count	0	1	1
		%	.0%	2.9%	1.0%
		% of Total	.0%	1.0%	1.0%

	Lembaga Asosiasi/Serikat-serikat (SBI, dll..)	Count	3	10	13
		%	4.8%	28.6%	13.3%
		% of Total	3.1%	10.2%	13.3%
	Lembaga pemerintah setingkat Kementerian s/d Kelurahan)	Count	8	0	8
		%	12.7%	.0%	8.2%
		% of Total	8.2%	.0%	8.2%
	Lembaga-lembaga Parpol (parpol angg legislatif/bukan)	Count	14	0	14
		%	22.2%	.0%	14.3%
		% of Total	14.3%	.0%	14.3%
	Anggota masyarakat (individu atau mewakili kel. masyarakat)	Count	0	24	24
		%	.0%	68.6%	24.5%
		% of Total	.0%	24.5%	24.5%
Total		Count	63	35	98
		%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	64.3%	35.7%	100.0%

C. Diskusi

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan jawaban mengenai fenomena *valence issue* dalam peng-agendaan Surat kabar Ibu kota. Sesuai dengan definisi kategori yang dikemukakan dalam riset ini, temuan memperlihatkan bahwa terkait dengan ‘konten fisik’ maka ada 28 isu yang kesemuanya disajikan keempat surat kabar dalam bentuk *headline* di halaman satu. Dari ke-28 isu tadi, secara relatif tidak terdapat kesamaanis di antara sesama surat kabar ibukota dalam hal cara (*valence*) pengagendaan isu di lingkungannya (*surveilence*). Kesamaan secara relatif hanya dijumpai pada isu dalam hubungannya dengan sifat, semua surat kabar hanya menyajikan issue yang bersifat *Polity*. Ke-28 isu tadi, juga diketahui disajikan oleh organisasi media dalam ruangan surat kabar yang bervariasi antara 201 -1.000 Cm kolom. Namun paling banyak disajikan dengan 201 – 400 Cm kolom, dilakukan organisasi redaksi Media Indonesia dan paling sedikit dilakukan organisasi redaksi Kompas dengan 801 - 1.000 Cm kolom dalam penyajiannya.

Selanjutnya, terkait dengan ‘Bidang Masalah’ yang dipilih dalam pengagendaannya, datanya mengindikasikan bahwa ‘Bidang Masalah’ yang lolos dalam proses pengagendaan mereka itu adalah ‘Politik’. ‘Bidang Masalah’ ‘Politik’ ini masing-masing mendapat pilihan oleh masing-masing organisasi redaksi sebanyak 42.9%. ‘Bidang Masalah’ lain yang juga cukup banyak mendapat pilihan redaksi yaitu ‘Hukum’. Untuk bidang masalah ini maka organisasi redaksi Rakyat Merdeka yang paling banyak memilihnya, yaitu sebanyak 57.1%. Sementara organisasi redaksi lainnya proporsinya sama besar, yaitu 28.6%. Sedang ‘Bidang Masalah’ lain yang ada juga organisasi redaksi yang memilihnya dalam pengagendaan namun tidak banyak jumlahnya, yaitu bidang masalah Ekonomi dan hukum. Untuk ‘Ekonomi’, maka Kompas yang terbanyak (28.6%), sementara Media Indonesia dan Republika masing-masing sama yaitu 14.3% dan Rakyat Merdeka bahkan sama sekali tidak ada.

Kemudian terkait dengan ‘topik’, keempat surat kabar sampel yang juga diketahui tidak memandang sama akan makna ‘*both sides* dalam pemberitaan’ berdasarkan temuan memperlihatkan terdapat dua issue yang masing-masing mendapat pilihan oleh organisasi redaksi dalam pengagendaannya. Kedua issue dimaksud terkait dengan topik ‘Setya Novanto Tersangka Kasus E-KTP’ dan ‘Pemberlakuan Perpu Ormas HTI’. Masing-masing organisasi redaksi surat kabar mengagendakan issue dimaksud sebanyak 14.3%. Dengan demikian kedua issue dimaksud dalam kurun waktu yang sama dianggap sama pentingnya oleh organisasi redaksi surat kabar bagi para khalayaknya.

Sementara terkait dengan fenomena Konten (aktor=komunikator), temuan memperlihatkan bahwa dalam konteks *valence* tampak pihak organisasi media masing-masing memfasilitasi aktor dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah dalam penyajian agendanya. Dari segi aktor dari kalangan pemerintah, mak umumnya aktor yang berposisi sebagai nara sumber itu difasilitasi pihak redaksi hanya satu kali saja. Namun demikian ada juga sejumlah aktor yang difasilitasi antara 2 hingga 4 kali. Aktor-aktor dimaksud yaitu aktor

seperti : Fadli Zon; Agus Rahardjo; Wiranto; Sri Mulyani; Agus Hermanto; Pratikno; Jusuf Kalla; Idrus Marham; dan Hidayat Nur Wahid. Sementara aktor dari kalangan pemerintah, temuan memperlihatkan jumlahnya ada 35 orang. Hampir seluruhnya aktor-aktor itu difasilitasi satu kali saja oleh pihak organisasi redaksi, terkecuali hanya satu aktor saja yaitu Amin Rais, men dapat dua kali fasilitasi.

Terkait aktor dari kalangan pemerintah sebelumnya, ditemukan juga data menyangkut Status/predikat mereka di jajaran institusi pemerintah. Sesuai data yang ditemukan maka predikat para aktor itu umumnya disebutkan redak hanya satu kali. Namun ada juga di antaranya yang disebut antara 2 hingga 4 kali. Predikat-predikat itu adalah Ketua Fraksi PKS/DPR; Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Ketua Umum Partai Nasdem; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Sekretaris Negara; Sekjen Partai Golkar; Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra; Wakil Presiden; Menteri Keuangan; Menteri Luar Negeri; dan Ketua KPK.

Sementara itu, para aktor (sumber berita) dari kalangan non pemerintah, temuan memperlihatkan umumnya para aktor itu hanya satu disebutkan organisasi redaksi surat kabar. Terkecuali aktor politikus dari Parpol PAN, predikatnya sebagai Ketua Majelis Kehormatan PAN, disebut dua kali oleh redaksi tertentu.

Kemudian terkait dengan fenomena Konten (aktor=komunikan), maka temuan menunjukkan bahwa yang berstatus/predikat anggota masyarakat (individu atau mewakili kelompok masyarakat) itu menjadi yang paling banyak (68.6%) dijadikan aktor sebagai sasaran komunikasinya. Tidak sedikit juga (52.4%) yang dijadikan sasaran komunikasi itu berasal dari kalangan yang berstatus Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, MPR, MK, MA, KY). Sementara sasaran yang berasal dari kalangan yang berstatus lainnya, proporsinya berkisar 2.9%-28.6%.

Selanjutnya, dari segi system politik juga diketahui bahwa para sasaran komunikasi dari komunikator tadi berasal dari dua komponen sub system. Namun sesuai dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa para sasaran komunikasi lebih banyak merupakan para pihak yang ada di komponen Suprastruktur politik (64.3%). Sedikit saja diantaranya (35.7%) yang sasarannya itu berasal dari kalangan komponen Infrastruktur politik.

Temuan terkait dengan fenomena valence sebagaimana dipaparkan sebelumnya baik dalam konteks Konten fisik dan Konten (aktor) kiranya memperlihatkan fenomena penekanan oleh organisasi media. Media massa memberi penekanan pada isu-isu tertentu dan sesuai temuan tadi tampak di antara keempat surat kabar itu cenderung tidak sama penekanannya atas isu-isu yang ada di lingkungannya. Keterjadian fenomena ini sendiri memang sudah diasumsikan oleh teori agenda setting, bahwa apa yang dianggap penting oleh pembaca maka itulah yang menjadi objek penekanan oleh pihak media. Teori ini berintikan bahwa apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap penting pula oleh khalayak. (McCombs dan Shaw, dalam Griffin, 2003). Dengan demikian di antara sesama media memiliki makna 'kepentingan' yang relatif atas berbagai issue. Ini pulalah sebabnya mengapa di antara sesama media cenderung berbeda dalam fenomena *valence* dalam proses peng-agenda media-annya tadi.

Temuan terkait dengan fenomena *valence* sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka dengan mengacu pada pendapat De Fleur & Rokeach, di sisi lain kiranya itu juga dapat menjadi bukti bahwa fenomena variasi yang terjadi dalam hal *valence* di antara keempat surat kabar tadi juga dapat menjadi cermin hasil perhitungan pihak organisasi media dalam proses encoding-nya.

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan jawaban mengenai fenomena *valence issue* dalam peng-agendaan Surat kabar Ibu kota. Sesuai dengan definisi kategori yang dikemukakan dalam riset ini, maka mengacu pada analisis dan diskusi terhadap fenomena *valence* baik dalam konteks Konten fisik dan Konten (aktor) kiranya itu memperlihatkan fenomena penekanan oleh organisasi media. Media massa memberi penekanan pada isu-isu tertentu dan sesuai temuan tadi tampak di antara keempat surat kabar itu cenderung tidak sama

penekanannya atas isu-isu yang ada di lingkungannya. Keterjadian fenomena ini sendiri memang sudah diasumsikan oleh teori agenda setting, bahwa apa yang dianggap penting oleh pembaca dalam pandangan redaksi maka itulah yang dijadikan objek penekanan oleh pihak media. Dengan demikian di antara sesama media memiliki makna ‘kepentingan’ yang relatif atas berbagai issue. Ini pulalah sebabnya mengapa di antara sesama media cenderung berbeda dalam fenomena *valence* dalam proses peng-agenda media-annya tadi. Temuan terkait dengan fenomena *valence* dimaksud, di sisi lain juga menjadi bukti bahwa fenomena variasi yang terjadi dalam hal *valence* di antara keempat surat kabar tadi juga menjadi cermin hasil perhitungan pihak organisasi media dalam proses encoding-nya.

Ucapan Terima Kasih : Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasyim Ali Imran sebagai editor Jurnal Studi dan Komunikasi dan Media (JSKM) atas masukan dan perbaikannya sehingga tulisan ini layak diterbitkan.

Daftar Pustaka

Buku :

- De Fleur, Melvin L. & Rokeach, Sandra-Ball, *Theories of Mass Communication*, Fourth Edition, New York & London, Longman, 1982, p. 173.
- Griffin, EM, 2003, *A First Look at Communication Theory*, Fifth Edition, New York, McGraw Hill.
- Littlejohn, Stephen W., *Theories of Human Communication*, eighth edition, Thomson Learning Inc., Wadsworth, Belmont, USA, 2005.
- Mc Quail, Denis, 1994. *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, edisi kedua, Terjemahan Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Jakarta, Penerbit Erlangga,
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remadja Karya, CV, 1985:1.
- Rivers, William L., Jay W. Jansen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, edisi kedua, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta, Prenada Media, 2003:33.
- Wright, Charles R. 1988, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Ed. Jalaluddin Rakhmat, Bandung, Remadja Karya
- “*Functional Analysis and Mass Communication*”. dalam <https://www.rese-archgate.net/publication/> accessed. Agts, 9. 2017.

**BAHASA DAN KEKUASAAN
(Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu)**

***LANGUAGE AND POWER
(Symbolic Instrument To Power in Bourdieu)***

Karman

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)-Balitbang SDM,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Pegangsaan Timur 19 B, Menteng-Jakarta Pusat.
Telp/Faks : 021-31922337, e-mail : karman@kominfo.go.id
(Naskah diterima 27 April 2017; direvisi 13 Agustus 2017; disetujui terbit 29 September 2017)

ABSTRACT

Many scientists position and tend to one of two opposing positions in epistemology: idealism-materialism, rationalism-empiricism, subjectivism-objectivism, micro-macro, agency-structure, freedom-determinism. Bourdieu escaped out of the debate by introducing habitus which agency and structure merge with. It encompasses languages, which are important as a symbolic system and capital. Languages don't only transmit message but also make-up symbolic instrument to power and keep dominating. This article deals with the usage of language as an instrument to power, and discusses about languages as capital and habitus besides as power mechanism, namely symbolic instrument system i.e., structuring-structures, structured-structures, domination instrument. This mechanism results in two syntheses regarding symbolic system: structuring symbols and structured symbols. We conclude bourdieu's concepts of capitals have key role in class differentiation and class struggle although don't emphasize economic capital. Economic one is important because of its conversability into other capitals. New technology (internet) gives an implication that economic capital is not always dominant anymore. Social capital can be dominant and important one because it can be changed into other capital.

Keywords: *Language, power, symbolic instrument.*

ABSTRAK

Banyak ilmuwan memosisikan atau cenderung kepada salah satu dari dua posisi yang bertentangan dalam diskursus epistemologi, seperti idealisme-materialisme, rasionalisme-empirisme, subjektivisme-objektivisme, mikro-makro, agensi-struktur, kebebasan-determinisme. Bourdieu -ilmuan sosial Prancis- keluar dari perdebatan tersebut dan mengadirkan konsep *habitus* yang meleburkan agensi dan struktur. *Habitus* mencakup bahasa, yang berperan sebagai sistem simbolik dan kapital. Ia bukan hanya bagian dalam transmisi pesan saja tetapi juga sebagai instrumen/mekanisme simbolik untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan dominasi. Artikel ini akan membahas bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen simbolik untuk memperoleh kekuasaan. Artikel ini juga mendiskusikan bahasa sebagai kapital dan *habitus*, selain sebagai mekanisme kekuasaan, yaitu sistem instrumental simbolik yang mencakup struktur-yang-menstruktur, struktur-yang-distruktur, instrumen dominasi. Mekanisme ini menghasilkan dua sintesa tentang sistem simbolik: "*structuring symbols*" dan "*structured symbols*". Kami menyimpulkan bahwa walaupun tidak menekankan aspek ekonomi, kapital Bourdieu mempunyai peran penting dalam pertarungan kelas dan perbedaan kelas. Kapital ekonomi memegang perang penting karena dapat dikonversi ke kapital lainnya. Perkembangan teknologi internet memberikan implikasi bahwa kapital ekonomi tidak selalu dominan. Kapital sosial justru menjadi kapital yang dominan dan dapat dipertukarkan dengan kapital lainnya.

Kata-kata Kunci: Bahasa, kekuasaan, instrumen simbolik.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Fokus Masalah

Ilmu pengetahuan memiliki serangkaian oposisi: subjektivisme-objektivisme, mikro-makro, kebebasan-determinisme, idealisme-materialisme. Ini menjadi perdebatan epistemologi dalam diskursus epistemologi khususnya dalam ilmu-ilmu sosial yang terjadi sejak lama. Pemikiran tersebut memiliki kecenderungan menekankan "struktur dan objektivitas" pada satu sisi dan menekankan pada "aktor atau agen dan subjektivitas" pada sisi lain. Pandangan yang menekankan pada struktur dicetuskan antara lain oleh Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguis asal Swedia yang dipandang sebagai salah satu tokoh semiotika (Lodge & Wood, 2008, p. 42; Wintle, 2002, p. 467). Ia membedakan tanda bahasa (*signe linguistique*) menjadi dua aspek: *signifiant* dan *signifié*. Sistem tanda dapat dibagi menjadi dua unsur: (1) *langue*

(bahasa): sistem abstrak yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat yang menggunakannya sebagai alat komunikasi; (2) *parole* (ujaran): realisasi individual atas sistem bahasa.

Pandangan yang menekankan pada aktor/agen adalah pandangan intelektual Frankfurt School. Pemikirannya menekankan pada hermeneutika yang memberikan keleluasaan agen untuk melakukan interpretasi terhadap struktur, baik level mikro (bahasa) dan makro (lembaga). Teori-teori wacana, teori tanda/semiotika, konstruksi sosial, interaksi simbolik mencakup hermeneutika di dalamnya. Hermeneutika dapat ditemui dalam karya Dannheucer berjudul “*hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum*”. Hermeneutika bermula dari pertanyaan universal mengenai bagaimana pemahaman manusia dan bagaimana ia terjadi. Ia mengajukan dua teori pemahaman hermeneutika: (1) pemahaman ketata-bahasa (grammatical understanding) terhadap semua ekspresi; (2) pemahaman psikologis pengarang. Schleiermacher mengembangkan apa yang disebut *intuitive understanding* yang merupakan suatu kerja rekonstruksi. Hermeneutika lalu dikembangkan oleh Dilthey dan Gadamer untuk kajian ilmu sosial budaya, bukan lagi pada literatur suci atau *sacrarum litterarum* (Zarkasyi, 2009).

Bagi Dilthey (1833-1911), hermeneutika adalah “teknik memahami ekspresi tentang kehidupan yang tersusun dalam bentuk tulisan”. Peristiwa dan karya-karya sejarah merupakan ekspresi pengalaman hidup di masa lalu. Untuk memahami pengalaman tersebut, penafsir harus memiliki kesamaan yang *intens* dengan pengarang. Hermeneutika Dilthey dikembangkan lagi oleh Martin Heidegger (1889-1976) ke arah kajian ontologis. Heidegger menghubungkan kajian tentang kesejarahan dengan makna kehidupan. Teks memerlukan pemahaman terhadap kehidupan, situasi pengarang dan *audience*-nya (Radford, 2005; Zarkasyi, 2009).

Gagasan Hermeneutika Gadamer adalah “berbicara bukan pada ranah ‘saya’ tapi ranah ‘kita’ (*speaking does not belong in the sphere of the “I” but in the sphere of the “we”*). Perilaku komunikasi yang muncul dalam percakapan *genuine* bukan hasil pikiran kamu atau pikiran saya sebagai individu, tapi diciptakan secara bersama oleh pihak yang berinteraksi. Gadamer mengakui bahwa masalah pemahaman berkaitan dengan memahami pesan bukan memahami orang. Namun, teks yang sama memiliki makna yang berbeda. Memahami teks adalah memahami diri kita dan mengaitkannya dengan teks-teks lainnya. Kita tidak menerima makna dari teks tapi kita lah yang menciptakan makna ketika bersentuhan dengan teks. Memahami teks bukan dengan transmisi, tapi dialog (Radford, 2005, p. 174).

Perbedaan pendekatan hermeneutika model Dilthey dan Gadamer terletak pada konteks teks. Dilthey menegaskan pentingnya memahami (*verstehen*) *mental state* pengarang untuk kemudian menafsirkan sesuai dengan konteksnya. Makanya, ketika menafsirkan teks, perlu melihat latar belakang atau biografi pengarang. Hermeneutika Dilthey menekankan konteks “dulu & di-sana” dalam memahami teks. Sementara itu, Gadamer menekankan pada konteks “kini & di-sini”. Pengarang lepas dari pembaca. *The dead of author*, kata Derrida. Gadamer mengatakan, kesadaran individu dipengaruhi oleh sejarah (*historically-affected consciousness*), tidak ada pengetahuan milik saya, yang ada pengetahuan milik kita (Radford, 2005, p. 175; Zarkasyi, 2009).

Bourdieu melakukan inovasi konseptual untuk menghindari oposisi tadi dengan cara membuat konsep-konsep baru, yaitu: *habitus*, kapital, kekerasan simbolik (*symbolic violence*), kekuasaan simbolik (*symbolic power*), arena (*field*), dan *distinction*. Pemikiran Bourdieu tersebut bermula pada konsep *habitus* (bahasa Latin) atau *hexis* (Bahasa Yunani). Bahasa yang dipakai dalam aktivitas komunikasi manusia adalah *habitus* manusia itu sendiri. Pandangan dominan terkait dengan aktivitas komunikasi melalui didominasi pandangan transmisi yang menjelaskan proses transmisi pesan dari komunikator ke komunikan.

Padahal, bahasa bisa juga berfungsi sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan. Bahasa mengandung mekanisme untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan (*power*), dominasi, dan hegemoni. Bahasa adalah materi ideologis. Bahasa merupakan hubungan komunikasi yang kompleks, pertukaran linguistik, dan hubungan kuasa simbolik antara pembicara dengan lawan bicara. Bahasa tidak pernah bebas nilai. Penerima pesan akan

menangkap maksud tersebut secara berbeda. Setiap kata dan ekspresi memiliki ancaman antagonis yang dicerminkan oleh cara yang hanya dipahami si pengirim dan penerima pesan. Dalam setiap percakapan ada pihak yang mendominasi dan didominasi (Bourdieu, 1991, p. 39).

Artikel ini menjelaskan bagaimana mekanisme bahasa sebagai *habitus* dan kapital digunakan sebagai instrumen simbolik untuk meraih kekuasaan. Fokus tulisan ini adalah (*pertama*) bahasa sebagai *habitus*. *Kedua*, mekanisme bahasa sebagai instrumen simbolik untuk meraih kekuasaan.

B. Signifikansi

Akademik. Pemikiran Bourdieu tentang kuasa simbolik menghadirkan perspektif kritis dalam memahami bahasa. Bahasa bukan hanya sebagai alat untuk transmisi pesan dengan bertukar simbol linguistik. Bahasa tidak cukup dipahami hanya dari isinya saja atau mengamati pertukaran elemen linguistiknya saja. Ia perlu dipahami sebagai sebuah instrumen kekuasaan

Praktis. Tulisan ini memberikan pemahaman tentang (*pertama*) hierarki kuasa dalam praktik penggunaan bahasa. Keragaman bahasa di Indonesia mencerminkan juga bagaimana hierarki kuasa dalam budaya di Indonesia. Fenomen ini nampak dalam struktur budaya pada masyarakat suku tertentu di Indonesia, seperti suku Jawa dan Sunda. Bahasa Jawa –misalnya- mengenal hirarki kelas: *Bahasa Ngoko* (digunakan untuk orang yang status sosialnya di bawah), *Bahasa Krama* (untuk orang Sederajat), *bahasa Inggil* (untuk orang yang status sosialnya di atas atau untuk orang tua). *Kedua*: membantu untuk mengasah kepekaan praktik intimidasi dan kekerasan simbolik lewat dominasi bahasa, antara lain dalam bentuk percakapan, iklan, pidato, pesan di media sosial atau *messaging group*.

Namun, orang tidak sadar akan adanya intimidasi dan kekerasan simbolik lewat dominasi bahasa. Ucapan tidak hanya disampaikan untuk dipahami tetapi juga sebagai tanda kekayaan yang harus dievaluasi dan diapresiasi dan juga sebagai tanda otoritas yang harus diyakini dan dipatuhi.

II. PEMBAHASAN

Bourdieu (1930-2002) adalah intelektual Prancis dalam ilmu sosiologi dan filsafat. Ia mendapat pengaruh dari Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Marx, Durkheim, Ferdinand de Saussure, Levi Strauss, Wittgenstein, Heidegger (Lubis, 2015, p. 92). Pengaruh kuat berasal dari Karl Marx dan Max Weber. Pemikiran Marx Weber memberikannya kesadaran tentang pentingnya dominasi dan sistem simbolik dalam kehidupan sosial, serta gagasan tatanan sosial. Pemikiran tersebut -dalam Bourdieu- bertransformasi menjadi Teori Arena (*fields*), tindakan bermakna, yaitu tindakan terkait dengan reaksi atau perilaku orang lain. Penjelasan sosial harus selalu memperhitungkan dimensi simbolis yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan (tradisional, karismatik, legal-rasional) (Haryatmoko, 2010, p. 3; lihat juga Lubis, 2015).

Karl Marx memberikan pengaruh pada Bourdieu dalam merumuskan konsep kapital. Bourdieu mengembangkan konsep tersebut menjadi kapital sosial, budaya, simbolik, dan kapital ekonomi. Keempat kapital tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat untuk memajukan kelas di masyarakat dengan cara pengendalian berbagai bentuk modal: ekonomi, sosial, budaya dan simbolis (Borthwick, Boyce, & Nancarrow, 2015).

Kontribusinya pada ilmu pengetahuan dilakukan melalui sosial budaya kritis sebagai kritik atas positivisme logis atau empirisme logis atau rasional, dan Neo-positivisme yang dikembangkan oleh Lingkaran Wina (*Vienna Circle*) dan dianggap sebagai satu-satunya metode yang menyatukan semua jenis ilmu pengetahuan dan mengontrol perkembangan masyarakat modern. Positivisme memang berambisi untuk mencari kebenaran (*The Truth*) sementara paradigma alternatif melahirkan kebenaran (*a truth*).

Bourdieu menekankan otonomi sebagai prinsip kebebasan sosial berhadapan dengan dominasi dan diskriminasi yang dinyatakan dalam kekuasaan simbolik (lihat Poespowardjojo & Seran, 2016, p. 192). *Power* (kekuasaan atau kekuatan) menjadi titik tolak dalam diskursus teori-teori kritis. Tatanan sosial secara alamiah menciptakan distribusi kekuasaan dan terdistorsinya komunikasi. Kesadaran adanya ideologi dominan menjadi dorongan untuk bertransformasi untuk mencapai kepentingan emansipatoris (Poespowardjojo & Seran, 2015, p. 271).

A. Bahasa sebagai *Habitus* dan Kapital

Bahasa dimaknai sebagai *habitus* (bahasa Latin) atau *hexis* (Bahasa Yunani). *Habitus* adalah: “*a set of dispositions that incline agents to act and react in certain ways, orienting their worldview even while not determining it*” (Bourdieu, 1977), sistem pembawaan yang berlangsung lama dan dapat dipindahkan, sebagai kumpulan prinsip yang menghasilkan dan menata praktik dan representasi yang secara objektif diadaptasi ke hasil akhir praktik/representasi mereka tanpa menentukan sebelumnya tindakan-tindakan yang memiliki tujuan yang disadari atau penguasaan khusus dari tindakan tersebut yang diperlukan agar mendapatkannya (Bourdieu, 1990, p. 53).

Habitus merupakan mediasi antara dunia subjektivitas individu dan dunia sosio-kultural individu, tempat individu itu lahir berbagi dunia subjektivitasnya dengan lainnya (McDonald, 2013). *Habitus* sama dengan *internalized disposition* atau internalisasi kondisi sosial ekonomi yang sudah pasti yang secara tidak sadar menentukan strategi-strategi yang dikejar oleh agen atau aktor (Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 105). *Habitus* mengoreksi paham strukturalisme yang memahami *habitus* sebagai kenyataan objektif, bukan sebagai sebuah *practical knowledge* atau *theory of practice* (Poespowardjojo & Seran, 2016, p. 194).

Banyak tokoh yang berkontribusi dalam konseptualisasi *habitus*. Mereka adalah:

1. Aristoteles tentang *hexis*, yang diubah oleh Thomas Aquinas dalam kaitannya dengan proses belajar dan memori;
2. Hegel yang berbicara tentang geneologi dalam konstruksi budaya;
3. Durkheim tentang proses sosialisasi individu dengan merujuk ke orang banyak;
4. Weber tentang *ethos* dan dampaknya terhadap kejiwaan seseorang;
5. Mauss tentang logika pemberian dan teknik tubuh yang berkaitan dengan nilai simbolik;
6. Panofsky tentang pembentukan kebiasaan dalam pengajaran;
7. Schultz tentang interpretasi transmisi dalam sejarah kehidupan via sosialisasi;
8. Dewey tentang refleksi terhadap pengaruh pembentukan kebiasaan
(lihat Silva, 2016)

Habitus distruktur oleh kondisi objektif seseorang yang meliputi kultural, ekonomi, kapital sosial orang tuanya. Kondisi ini objektif menanamkan predisposisi dan posisi seseorang di ruang sosial. Kecenderungan ini membentuk tindakan subjektif (*subjective actions*) dan pengalaman. Kecenderungan ini juga mereproduksi kondisi objektif yang melahirkan *habitus* (lihat Hallet, 2007). Konteks struktur (institusi, praktik, wacana, dan *habitus*) bersifat cair (McDonald, 2013). Karakteristik pemikiran Bourdieu bersifat dualitas, bukan dualisme. Dalam konsep dualitas, agen & struktur melebur. Interaksi sosial memproduksi dan mereproduksi hubungan dominasi antarindividu dan antarkelompok. Bahasa adalah instrumen untuk mempertahankan dominasi atau mendapatkan kekuasaan. Sebagai *habitus*, bahasa adalah peleburan dari hal-hal yang bersifat personal dengan hal-hal yang bersifat sistematis/sosial (Jenkins, 2004, p. 108).

Di Indonesia, legitimasi terjadi melalui kekuasaan sangat terlihat pada era Suharto. Kala ia berkuasa, Suharto selalui mengucapkan akhiran (*suffix*) “kan” dengan ucapan “ken” dengan fonem “e” taling. Cara pengucapan fonem model Suharto tersebut menjadi populer, diterima menjadi *habitus*. Kultur birokrasi di Indonesia didominasi oleh kultur Jawa (*njawani*) (Setiawan, 1998, pp. 176–177) dan mistisisme Jawa (Mulder, 2001, p. 70). Dominasi kapital tertentu (dalam konteks ini bahasa/kapital budaya) bertahan karena supremasinya tidak lagi diperhatikan atau dipertanyakan (lihat penjelasan tentang ini pada Madoc-Jones, Jones, Parry, & Dubberley, 2015).

Dari sini tentu dapat dipahami mengapa bahasa, wacana (*discourse*) selalu berubah berdialektika dengan relasi konstelasi kekuatan atau kekuasaan yang ada (Fairclough, 1989b, 2001, 2013). Bahasa dan wacana *berubah* seiring perubahan ideologi dominan karena bahasa dan wacana, dan media melakukan marketisasi ideologi kelompok yang dominan (Fairclough, 1993). Bahasa dan wacana berperan dalam produksi, pelanggengan, dan perubahan relasi kuasa sosial (*the role of language/discourse in the production, maintenance and change of social relations of power*). Jadi, bahasa dan wacana penting bagi *power struggle* (Fairclough, 1989a, p. 74).

Pandangan Bourdieu- tidak hanya memberikan pemahaman tetapi juga menunjukkan tanda kekayaan yang harus diapresiasi dan sebagai tanda otoritas yang harus diyakini dan dipatuhi. Nilai ucapan dalam konteks dan logika pasar dicirikan melalui hukum formasi harga: “semakin banyak kapital yang dimiliki seseorang saat berbicara, mereka dapat lebih memanfaatkan perbedaan serta mendapatkan keuntungan dari perbedaan kapital” (lihat Bourdieu, 1991, p. 66). Di era sekarang, mereka yang memiliki kekuasaan dan uang lebih berpeluang didengar karena kepemilikan kapital ekonominya tersebut. Uang menjadi daya tarik atau *fetish*.

Bahasa sebagai Kapital. Bourdieu mendapatkan inspirasi dari Marx ketika menjelaskan tatanan sosial dari perspektif *kapital* juga dalam hal isu dominasi dan pertentangan kelas. *Capital* tidak sama dengan uang (*money*). Dalam Marx, *capital* adalah (pertama) akumulasi uang dan *capital* tidak akan pernah muncul dalam sejarah sampai adanya sirkulasi komoditas. Kedua, perbedaan antara uang yang menjadi kapital, dan uang yang bersifat uang saja (*money-only*) terletak dari perbedaannya dalam hal sirkulasi. Uang digunakan untuk membeli sesuatu atau memfasilitasi pertukaran komoditas. *Capital* adalah uang yang digunakan untuk membeli sesuatu untuk menjual kembali, atau uang yang dikembangkan dalam proses beli-jual untuk mendapatkannya kembali. Ketiga, uang bisa juga berfungsi sebagai kapital saja (*capital-only*) jika uang untuk membeli barang yang konsumsinya menyebabkan peningkatan nilai komoditas. (Martin, n.d.). Kapital lebih maju daripada uang (Marx, 1887, p. 98).

Pemikiran Marx tersebut bersifat determinisme ekonomi seperti yang tercermin juga dalam Teori Nilai Tambah (*value-added theory*) dan konsep produksi. Ekonomi menjadi dasar untuk menganalisis kehidupan sosial. Kepemilikan sarana produksi atau kapital menentukan pemikiran dan relasi sosial. Ketika mengembangkan dan mengambil ideologi untuk mengabsahkan dominasinya, kelas dominan tersebut mempunyai kendali atas sarana produksi intelektual dan menentukan kesadaran masyarakat. Dominasi ini seringkali disembunyikan. Untuk mengetahuinya diperlukan perspektif/teori kritis (Littlejohn, 2002, p. 46; Littlejohn & Foss, 2005, pp. 46–48).

Walaupun terpengaruh oleh Marx, Bourdieu memiliki konsep yang berbeda dalam memahami kapital yang tidak sebatas ekonomi saja. Ia memperluasnya menjadi kapital sosial, budaya, dan simbolik. Kapital ekonomi merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Kapital budaya bisa berupa ijasah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Kapital sosial merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial. *Social capital* juga mampu menjembatani disiplin-disiplin ilmu sosial walaupun mengalami banyak perubahan perspektif terhadap konsep "kapital" ini. Sementara itu, kapital simbolik menghasilkan kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor prestise, gelar, status tinggi, nama keluarga ternama. Kapital simbolik adalah semua bentuk pengakuan oleh kelompok baik secara institusional atau tidak (Bourdieu, 1986; lihat penjelasannya pada Haryatmoko, 2010; Robison, Schmid, & Siles, 2002).

Konsep kapital Bourdieu menekankan dominasi dan kapital dalam konteks budaya dan simbolis. Ada keterputusan dengan ekonomisme Marx yang mereduksi bidang sosial hanya pada hubungan produksi ekonomi. Ekonom membagi kapital menjadi tiga bentuk: *physical capital*, *human capital*, dan *natural capital*. Bourdieu melengkapinya dengan kapital budaya (Throsby, 1999). Reduksi bidang sosial ke ekonomi itu menyebabkan pembagian kelas mengabaikan kondisi objektif. Teori Marx tentang kelas tidak mencukupi karena tidak memperhitungkan perbedaan objektif yang ditentukan oleh akumulasi kapital ekonomi, budaya, simbolik, dan sosial (lihat Haryatmoko, 2010).

Diantara keempat kapital tersebut, kapital ekonomi paling mudah dikonversikan ke kapital-kapital lain. Seseorang yang memiliki kapital ekonomi ia akan mudah memperoleh kapital budaya, misalnya memperoleh pendidikan. Dengan kapital ekonomi, seseorang bisa memperluas jaringan sosial. Begitu juga dengan kapital ekonomi seseorang dapat dengan mudah mendapatkan kapital simbolik (mobil mewah, rumah elit dsb). Bourdieu mengkritik Marx karena mendefinisikan posisi sosial dengan mengacu hanya pada satu posisi dalam hubungan produksi ekonomi dan mengabaikan hubungan produksi budaya. Pertentangan sosial tidak dapat

direduksi ke oposisi antara pemilik dan bukan pemilik sarana produksi ekonomi tapi mengacu pada produksi budaya (Bourdieu, 1984, pp. 3, 9).

B. Bahasa Instrumen Meraih Kekuasaan

Bahasa merupakan instrumen kekuasaan simbolik. Pertukaran bahasa selalu berhubungan dengan kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991, p. 37). Bourdieu mengkritik Saussure yang memandang bahasa pada isi kandungannya saja. Mereka yang menguasai kapital akan menjadi kelas yang dominan, *vice versa*. Untuk menjadi pihak yang mendominasi, seseorang harus memahami arena (*field*) yang ada dan menempatkan kapital sesuai dengan arena. Dalam arena politik, kapital yang amat berperan adalah kapital sosial dan ekonomi (uang). Dalam forum sosialita, kapital yang berperan adalah kapital simbolik (mobil jenis tertentu, tas, jam tangan merek tertentu).

Kekuasaan simbolik berjalan melalui mekanisme sistem instrumental simbolik, yaitu: (1) sistem simbolik sebagai “struktur-yang-menstruktur” (structuring structures); (2) sistem simbolik sebagai “struktur-yang-distruktur” (structured structures); dan (3) produksi simbolik sebagai instrumen dominasi (Bourdieu, 1991, pp. 166–168).

Pertama, sistem simbolik sebagai “structuring structures”. Konsep ini berakar pada tradisi Neo-Kantian. Para pemikir yang berkontribusi terhadap konsep ini adalah Humboldt-Cassires, Sapir-Whorf dan Durkheim. Konsep ini menegaskan bahwa dunia simbol (mitos, seni, bahasa, agama) yang berbeda-beda dianggap sebagai instrumen untuk mengetahui dan mengonstruksi dunia objek, dan dianggap sebagai bentuk simbol. Bahasa sebagai struktur yang menstruktur berangkat dari pengalaman sosialisasi kelas tertentu di keluarga dan teman pergaulan (peer-group) Bahasa adalah modus operandi aktivitas produksi kesadaran (Bourdieu, 1991, p. 164; Swartz, 1997, p. 102).

Kedua, sistem simbolik sebagai “structured structures”. Bahasa merupakan sistem simbolik sebagai “struktur yang distruktur”. Tradisi strukturalis menekankan peran sistem simbolik sebagai pada opus operatum. Saussure (ahli semiotika asal Prancis, 1857-1913) tergolong dalam jajaran pemikir strukturalis ini. Ia memandang bahasa sebagai sistem yang distruktur. *Langue* dianggap sebagai inteligibilitas wicara (intelligibility of speech) atau parole. *Langue* secara fundamental ditempatkan sebagai medium terstruktur yang harus direkonstruksi untuk mengukur hubungan antara suara dan makna (Bourdieu, 1991, pp. 166, 167).

Saussure merumuskan tiga prinsip dasar dalam memahami kebudayaan (tanda). Dalam bahasa, tanda terdiri atas penanda (signifiant, signifier, signifié) dan petanda (signified). Struktur simbolik dapat menjadi struktur yang menstruktur hanya jika struktur simbolik itu distruktur. Kekuasaan simbolik dapat mengonstruksi realitas bahkan cenderung memapankan tatanan makna dunia sosial yang tergantung kepada logical conformism: konsep yang homogen mengenai waktu, tempat, jumlah, dan sebab. Simbol merupakan instrumen par-excellance bagi terciptanya integrasi sosial. Bahkan, simbol bisa memungkinkan terwujudnya konsensus (Bourdieu, 1991, p. 164).

Ketiga, sistem simbolik sebagai instrumen dominasi. Tradisi fungsionalisme ini menjelaskan keterkaitan produksi simbol dengan kepentingan kelas dominan, ideologi kelompok tertentu yang di-share ke masyarakat luas. Kultur dominan membentuk bukan hanya integrasi diantara kelompok atau kelas dominan melainkan juga integrasi masyarakat yang semu, kesadaran palsu, legitimasi aturan yang sudah mapan. Kultur dominan menciptakan perbedaan hirarkis dan melegitimasi perbedaan ini. Dalam pola seperti ini, muncullah monopoli khususnya dari kaum profesional yang memiliki kompetensi yang menjadi kapital simbolik. Kompetensi mereka adalah kemampuan orator, inisiasi, penguasaan hal praktis. Produksi ide mengenai dunia sosial tunduk pada logika kekuasaan (Bourdieu, 1991, p. 166).

Kapital politik merupakan bentuk kapital simbolik. Unsur penting dalam kapital politik adalah reputasi yang terdapat pada kepercayaan dan pengakuan masyarakat kepada politikus tersebut. Ini sekaligus menunjukkan ambiguitas dari kepercayaan pada kekuasaan objektif. Kekuasaan objektif ini yang dibuktikan dengan adanya simbol, tahta dan sebagainya merupakan produk kekuasaan subjektif, yaitu pengakuan. Kredibilitas terletak pada dan melalui representasi, kepercayaan, dan kepatuhan (Bourdieu, 1991).

Sementara itu, kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang diberikan orang lain untuk dilaksanakan. Kekuasaan simbolik adalah kepercayaan orang lain terhadap penguasa sehingga memiliki otoritas. Ia laksana memiliki kekuatan magis. Kekuasaan pada level individu dapat

berbentuk ketenaran/pengakuan dan sejumlah kualifikasi tertentu sehingga memiliki reputasi yang baik. Perlu ditekankan di sini perbedaan antara kapital yang dimiliki profesional dengan kapital individu. Kelompok profesional tercipta karena proses yang terus menerus. Akumulasi kemampuan yang terbangun dalam rentang waktu tertentu. Sementara itu, kapital personal melekat pada individu, karisma, heroisme/profetik. Bourdieu menyebut kapital politik ini dengan istilah *delegate capital*, yang lazim dimiliki oleh pemimpin informal. Mereka memiliki pengakuan dari masyarakat sekaligus memperoleh loyalitas dari masyarakat (Bourdieu, 1991).

Peran pemimpin informal yang memiliki *delegate capital* dapat dilihat pada rangkaian peristiwa pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pemimpin informal (ulama) berpendapat bahwa pernyataan gubernur Jakarta terkait surat Al-Maidah:51 adalah penodaan terhadap Al-Quran dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam (MUI, 2017). Pemimpin informal (dewan keluarga masjid, kelompok majelis ta'lim atau pengajian, kyai pondok pesantren) melaksanakan rangkaian aksi pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016 (aksi 411), dan 2 Desember 2016 (aksi 212). Saat pemilihan gubernur DKI Jakarta, pemimpin informal ini memproduksi wacana memilih pemimpin atas dasar seiman. Kuasa pemimpin informal ini adalah hasil dari kuasa simbolik. Dalam rentang sejarah, pemilik kekuasaan simbolik yang tergolong *delegate capital* ini mampu menggerakkan massa, simpatisan, loyalis, kaum militan.

Pendelegasian kapital politik memiliki dugaan bahwa objektivikasi jenis kapital ini dalam institusi bersifat permanen, materialisasi dalam mesin politik, pekerjaan dan instrumen mobilisasi, dan reproduksi berkelanjutan melalui mekanisme dan strategi. Objektivikasi kapital politik mengamankan kebebasan dari sanksi akibat pemilihan dengan mengganti dominasi individu langsung dan strategi investasi personal dengan dominasi. Definisi ini membawa pada karakteristik baru dalam kapital politik. Karakteristik yang dimaksud adalah kapital politik terus menerus terinstitusionalisasi dalam bentuk pekerjaan yang tersedia, dan ini kian menguntungkan.

Ada dua sintesa yang dihasilkan dari tiga mekanisme sistem instrumental simbolik tersebut. Pertama, sintesa pertama ini hasil dari sistem simbolik sebagai *structuring symbols* dan *structured symbols*. Sebagai alat pengetahuan dan komunikasi, bahasa adalah struktur simbolik yang berfungsi untuk membuat struktur. Struktur simbolik dapat memiliki kuasa untuk menstruktur karena struktur itu telah distruktur. Kuasa simbolik adalah kuasa untuk mengonstruksi realitas dan membangun tatanan makna dunia sosial atau kompromis. Simbol adalah alat par excellence dari integrasi sosial. Simbol memungkinkan adanya makna yang sama di dunia sosial atau konsensus yang berkontribusi terhadap aturan sosial. Ini sama artinya dengan *doxa*. Objektivitas makna atau rasionalisme dunia diterjemahkan oleh persetujuan dari para subjek yang memiliki daya menstruktur. Bahasa juga merupakan instrumen simbolik sebagai alat mendominasi (Bourdieu, 1991, p. 166).

Tradisi Marxist bersandar pada fungsi politis sistem simbolik yang merupakan fungsi makna dunia sosial. Fungsionalisme ini menjelaskan produksi simbolik dengan cara menghubungkannya dengan keinginan kelas dominan. Tidak seperti mitos yang berkontribusi terhadap produk kolektif, ideologi menyandarkan keinginan tertentu secara utuh. Budaya dominan berkontribusi pada integrasi kelas dominan. Budaya dominan juga berkontribusi pada integrasi masyarakat secara utuh dan ketidaksadaran terhadap kelompok kelas dan juga berkontribusi pada hirarki dan legitimasi perbedaan ini (*ibid*).

Sintesa kedua, gabungan antara bahasa sebagai alat untuk mendominasi dan sintesis pertama. Hubungan kuasa yang bergantung pada materi dan kuasa simbolik yang diakumulasi oleh agen (institusi) yang terlibat dalam hubungan ini dan memungkinkan kuasa simbolik diakumulasi. Sintesis pertama ditambah dengan teori bahasa sebagai instrumen dominasi dapat merumuskan bahasa sebagai sistem kode yang kompleks dan multifungsi, berfungsi sebagai alat praktik komunikasi dan menyamakan persepsi dunia objektif untuk masuk ke konsensus. Namun, konsensus itu dapat dialihfungsikan sebagai alat praktik untuk mengekspresikan ideologi dan kuasa tertentu yang terbuka lebar terjadinya pemaksaan pandangan mengenai realitas (1991, p. 167).

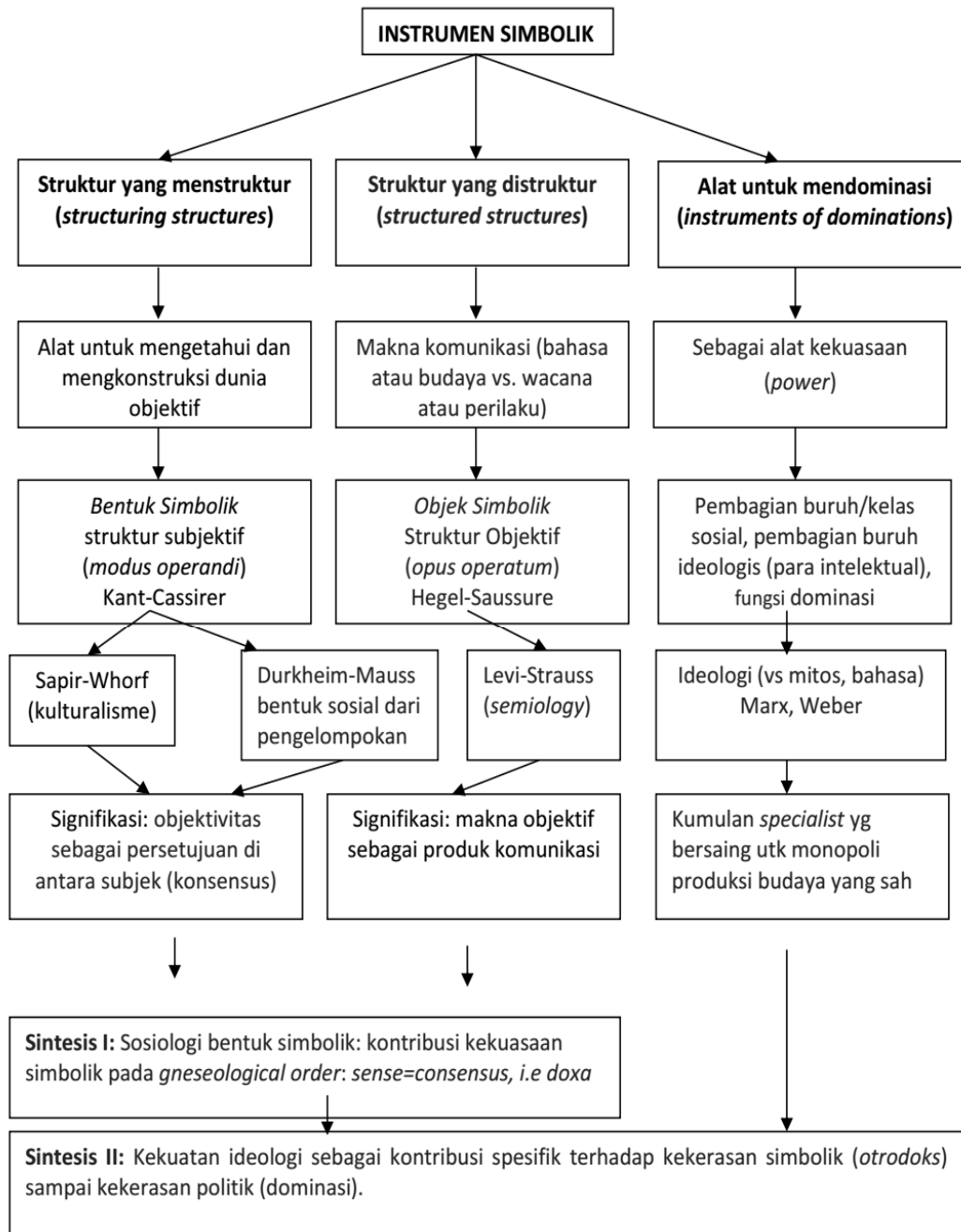
Sintesis kedua merupakan titik utama pandangan Bourdieu bahwa bahasa sebagai alat sosial memiliki muatan ideologis politis, dan simbol kekuasaan dari suatu identitas kultural tertentu. Masyarakat memaknainya sebagai hal yang sah, alami dan tak ada bentuk kesewenang-

wenangan. Kuasa simbolik adalah kuasa yang diberikan melalui pengucapan untuk membuat orang melihat dan percaya, memperkuat/mengubah cara pandang terhadap dunia. Singkatnya, kuasa simbolik adalah kuasa yang dialihkan, dapat disalahpahami, dialihpukan dan dilegitimasi dari bentuk-bentuk kuasa yang lain (Lihat bagan tentang “Bagan Instrumen Simbolik” dalam Bourdieu, 1991, p. 165).

Dominasi dengan bahasa bisa dilakukan dengan cara *condescendence* (turun bersama-sama). Fenomena strategi *condescendence* ini dapat dimetaforakan dengan menekan balon udara ke dasar kolom air. Bila dilepas, balon akan ke atas bahkan melebihi permukaan air kolam. Seseorang yang merendahkan dirinya bisa dimaknai sebagai usaha untuk melejitkan diri untuk menang dalam kontestasi politik (Bourdieu, 1991). Di Indonesia, aktor politik menggunakan strategi ini untuk memperoleh kekuasaan politik. Ini terlihat misalnya dari aktivitas ‘*blusukan*’ ke daerah kumuh, atau makan di tempat yang biasa dipakai orang kebanyakan. Aktivitas yang jarang dilakukan pejabat/politisi ini dapat meningkatkan citra aktor politik. Orang akan berkesimpulan bahwa aktor politik tersebut adalah calon pemimpin bersahaja.

Cara lain adalah dengan strategi eufemisasi, yaitu menghaluskan bahasa, atau juga dengan melakukan sensor yang berasal dari struktur linguistik. Dominasi dilakukan dengan menciptakan eufemisme. Dalam beberapa tingkat tertentu, ini terinspirasi oleh kepedulian untuk berbicara dengan baik, pantas, atau untuk menghasilkan produk yang merespon tuntutan pasar. Eufemisasi adalah formasi kompromi yang dihasilkan dari transaksi antara kepentingan ekspresif dan sensor yang melekat khususnya pada hubungan produksi linguistik sensor kepada pembicara/penulis yang memiliki kompetensi (Bourdieu, 1991, pp. 78–79).

Kuasa simbolik adalah kekuasaan yang tidak nampak yang dapat diterapkan hanya dengan keterlibatan mereka sebagai subjek (korban) atau bahkan pelaku kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991). Kekuasaan simbolik berfungsi dengan syarat: adanya agen yang menggunakan kekuasaan simbolik dan ada pihak yang menjadi objek atau sasaran tindakan aktor; sasaran tersebut tidak tahu bahwa mereka menjadi sasaran; agen bisa sadar atau bahkan tak sadar bahwa mereka menjalankan kekuasaan simbolik.



Sumber: (Bourdieu, 1991, p. 165).

C. Diskusi

Diantara keempat kapital tersebut, Bourdieu tampaknya masih memosisikan ekonomi sebagai kapital yang paling penting. Alasannya adalah kapital ini dapat dikonversi ke kapital-kapital lain (budaya, sosial, dan simbolik). Dengan kapital ekonomi, seseorang bisa memperoleh kapital-kapital lainnya dengan mengonversi kapital ekonomi yang dimilikinya. Kepemilikan kapital ekonomi bisa dikonversi untuk memperoleh kapital budaya antara lain mengikuti pendidikan.

Dalam perspektif teknologi baru, kondisi tidak selalu menempatkan kapital ekonomi sebagai kapital yang paling utama. Sebaliknya, kapital sosial yang justru yang memegang peran

penting untuk mendapatkan kapital lainnya (kapital ekonomi, budaya, simbolik). Kapital sosial yang dimaksud berupa jaringan pertemanan di media sosial. Di media sosial seseorang bisa menjadi selebriti dengan banyaknya mereka yang melakukan pertemanan, mengikuti, berlangganan. Seseorang yang memiliki jaringan pertemanan di media sosial dalam jumlah tertentu akan menarik pengiklan (baca: uang), termasuk iklan politik. Banyak orang mendadak menjadi terkenal (penyanyi, komedian, bintang iklan) setelah populer di media sosial. Dalam politik, popularitas menjadi hal penting. Mekanisme pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah yang utama bukan karena paling kaya tapi atas dasar popularitasnya. Komposisi pasangan calon presiden & wakil presiden dicalonkan bukan hanya karena faktor kekayaan melainkan juga popularitasnya.

Ketua umum partai bisa berlangsung lama karena memiliki bukan hanya kapital ekonomi melainkan juga kapital simbolik yang dimilikinya, seperti keturunan biologis dari pendiri bangsa, atau karisma yang melekat pada diri seseorang. Kapital simbolik ini tidak bisa terwujud dengan mengonversi kapital ekonomi. Kapital ekonomi tidak selalu dapat dikonversi ke kapital lainnya (sosial, budaya, simbolik). Pada kondisi tertentu, kapital sosial menentukan perolehan kapital lainnya. Ini menjadi penting dan relevan untuk konteks dan interaksi manusia di dunia siber seperti media sosial, dsb.

Walaupun kapital berbeda-beda (ekonomi, sosial, budaya, simbolik), peran keempat kapital tersebut sama saja yaitu sama-sama menciptakan perbedaan (*distinction*). Perbedaan kepemilikan kapital-kapital tadi akan menciptakan perbedaan bukan hanya pada aspek ekonomi melainkan juga budaya (Hall, Evans, & Nixon, 2013, p. 246). Perbedaan kapital dalam Marx akan menghasilkan perbedaan kelas (*bourgeoise* dan proletar) dan perjuangan kelas. Dalam Bourdieu perbedaan bukan hanya itu tapi perbedaan dalam hal kepemilikan kapital sosial, budaya, dan simbolik.

Keterbatasan pemikiran Bourdieu adalah bagaimana dan kapital apa saja yang diperlukan oleh seseorang pada posisi sebagai lemah, misalnya sebagai korban kekerasan simbolik, atau korban kekuasaan simbolik. Bagaimana melakukan perjuangan berbasis budaya. Bourdieu fokus membahas perjuangan dalam arti *struggle-to* bukan *struggle-over*. Apakah perjuangan *struggle-over* cukup dengan empat kapital versi Bourdieu. *Power* tidak selalu perjuangan yang bersifat *zero-sum* (Bonikowski, 2015), bisa juga sebaliknya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok.

Konsepsi Bourdieu tentang kapital sosial perlu juga dipertanyakan. Kapital sosial adalah jaringan sosial (*social network*) atau hubungan sosial (*relationship*). Namun, Bourdieu menempatkan kapital sosial sama seperti kepemilikan kapital lainnya seperti sertifikat pendidikan, uang dan lain sebagainya. Kapital sosial sesungguhnya berbeda dengan kapital lainnya. Kapital sosial tidak dimiliki oleh seseorang secara personal seperti halnya memiliki uang, kendaraan, atau sertifikat pendidikan, namun, kapital sosial dimiliki secara bersama (*share*) oleh mereka yang terhubung dalam satu relasi atau *social network* tertentu.

Sebagai data yang dimanfaatkan dalam riset, kapital sosial berbeda dengan kapital lainnya (ekonomi, budaya, simbolik). Data kapital sosial bersifat relasional. Sebaliknya data kapital ekonomi, budaya, simbolik bersifat atributif dan ideasional. Menurut Monge (1987, p. 241), hubungan sosial bukanlah properti individu. Karakteristik hubungan sosial merujuk ketika terjadinya hubungan dua orang secara bersama, bukan hanya individu. Dengan demikian, kapital sosial bukan milik individu tapi milik individu-individu yang terhubung dalam jaringan sosial.

III. PENUTUP

Terkait dengan bahasa sebagai *habitus*, bahasa dibentuk oleh *habitus* yang memiliki peran sebagai instrumen kekuasaan simbolik. Bahasa meleburkan pandangan bahwa ia sebagai struktur yang distruktur sekaligus menstruktur, dan sebagai instrumen kekuasaan simbolik. Bahasa adalah kapital untuk berkuasa. Tujuan meraih kekuasaan tidak serta merta dengan pendekatan yang bersifat ekonomistik. Konsep kapital Bourdieu adalah upaya untuk melakukan tafsir ulang, reaktualisasi, rekontekstualisasi konsep kapital yang ekonomistik menjadi kapital yang bertitik tolak dari perspektif sosial-budaya, dan simbol.

Bahasa dipahami sebagai kunci pertarungan kelas dalam setiap arena dan antar-agen. Dominasi dalam arena memerlukan banyak kapital termasuk bahasa. Walaupun berbeda jenis,

kapital memberikan dampak yang sama, yaitu menciptakan perbedaan atas dasar kepemilikan kapital. Bukan hanya kapital ekonomi, kapital sosial, budaya, dan simbolik juga bisa menciptakan perbedaan di masyarakat.

Terkait dengan mekanisme bahasa sebagai sistem instrumental simbolik, dihasilkan dua sintesa, yaitu: sistem simbolik sebagai “*structuring symbols*” dan “*structured symbols*”. Sintesa ini merupakan titik utama pandangan Bourdieu bahwa bahasa sebagai alat sosial yang memiliki muatan ideologis, politis. Bahasa adalah simbol kekuasaan dari suatu identitas kultural tertentu. Kekuasaan simbolik berjalan melalui mekanisme sistem instrumental simbolik, yaitu: sebagai struktur-menstruktur (*structuring structures*) atau *modus operandi* dan sebagai struktur-distruktur (*structured structures*) atau *modus operatum*; dan sebagai instrumen dominasi dan meraih kekuasaan. Bahasa bukan hanya transmisi pesan atau transaksi linguistik tapi transmisi kuasa.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa pemikiran Bourdieu yang berusaha keluar perdebatan dikotomi agen dan struktur memiliki keterbatasan. Bourdieu fokus ke penjelasan tentang kontestasi dan dominasi dan perjuangan (*struggle to*). Ia kurang memberikan penjelasan teoretik bagaimana melakukan perjuangan (*struggle-over*) di saat individu lemah dalam hal kepemilikan kapital sosial, budaya, simbol. Bourdieu juga menyamakan kapital sosial yang bersifat relasional dan bukan properti milik individu dengan kapital lainnya yang bersifat atributif.

Implikasi

Tulisan ini berimplikasi perlunya membaca ulang konsep, teori, dan pemikiran para ilmuwan terdahulu yang bisa jadi tidak atau kurang relevan untuk era sekarang. Era internet yang berkembang menuju tahapan yang lebih *sophisticated*, seperti *internet of thing*. Teknologi internet melahirkan perspektif baru (jaringan) yang memberikan implikasi pada konsep, teori. Pemikiran ilmuwan perlu dikaji, dievaluasi. Sejumlah pertanyaan menyangkut relevansi konsep, teori, dan pemikiran Bourdieu dapat diketengahkan: apakah keluarga masih menjadi utama (fungsi primer) dalam proses habituasasi atau internalisasi nilai dengan adanya teknologi internet yang memapar individu. Internet mengondisikan dan mendorong relasi sosial atau jaringan skala global sehingga kapital sosial menjadi penting dan sulit dikatakan ini di bawah kapital ekonomi. Jadi, relevansi konsep erat dengan konteks, baik waktu dan tempat.

Ucapan Terima Kasih : Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kepada Dewan Redaksi “*Jurnal Studi Komunikasi dan Media*” BPPKI DKI Jakarta atas kritik dan saran untuk perbaikan tulisan.

Daftar Pustaka

- Bonikowski, B. (2015). The promise of Bourdieusian political sociology. *Theory and Society*, 44(4), 385–391. <https://doi.org/10.1007/s11186-015-9246-7>
- Bourdieu. (1984). *Distinction: A Social Critique of Judgment of Taste*. (R. Nice, Ed.). Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press.
- Bourdieu. (1986). The Forms of Capital. In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–255). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bourdieu. (1990). *The Logic of Practice : Stanford University Press*. (R. Nice, Ed.). California: Stanford University Press.
- Bourdieu. (1991). *Language and Symbolic Power*. (M. Raymond, Gino., Adamson, Ed.) (1st ed.). Cambridge-UK: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice, Translated by R. Nice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, & Wacquant. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Fairclough, N. (1989a). *Language and Power*. London and New York: Longman.
- Fairclough, N. (1989b). *Language and Power. Language in social life series*. <https://doi.org/10.2307/329335>
- Fairclough, N. (1993). Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public Discourse. *Discourse & Society*, 4(2), 133–168. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002002>
- Fairclough, N. (2001). The Dialectics of Discourse. *Textus*, 14(2), 231–242.

- <https://doi.org/10.1017/S0047404500019539>
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177–197. <https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239>
- Hall, S., Evans, J., & Nixon, S. (2013). *Representation*. California: SAGE Publication Inc.
- Hallet, T. (2007). Between Deference and Distinction: Interaction Ritual Through Symbolic Power in an Educational Institution. *Social Psychology Quarterly*, 70(2), 148–171.
- Haryatmoko. (2010). Habitus dan Kapital Dalam Strategi Kekuasaan. In *Seminar Paska-Sarjana Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2010*. Jakarta.
- Jenkins, R. (2004). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. (Nurhadi, Ed.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Littlejohn, W. S. (2002). *Theories of Human Communication* (7th ed.). Belmont-California: Wadsworth Group.
- Littlejohn, W. S., & Foss, K. A. (2005). *Theories of Human Communication* (8th ed.). Belmont-California: Wadsworth Group.
- Lodge, D., & Wood, N. (2008). *Modern Criticism and Theory: A Reader* (3rd ed.). London and New York: Routledge.
- Lubis, Y. A. (2015). *Filsafat Ilmu, Klasik Hingga Kontemporer* (1st ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Madoc-Jones, I., Jones, D., Parry, O., & Dubberley, S. (2015). “Dangerous conversations”: a case study involving language. *Equality, Diversity & Inclusion*, 34(5), 439–451. <https://doi.org/10.1108/EDI-10-2014-0073>
- Martin, A. dkk. (n.d.). Marxists Internet Archive. Retrieved January 9, 2017, from <https://www.marxists.org/glossary/terms/c/a.htm#capital>
- Marx, K. (1887). *Capital A Critique of Political Economy Volume I Book One: The Process of Production of Capital*. (F. Engels, Ed.). Moscow: Progress Publishers.
- McDonald, M. (2013). Foreign policy internationalism and political possibility. *International Politics*, 50(1), 97–117. <https://doi.org/10.1057/ip.2012.30>
- Monge, P. R. (1987). The Network Level of Analysis. In C. R. B. and S. H. Chaffe (Ed.), *Handbook of Communication Science*. California: Sage Publication Ltd.
- MUI. (2017). Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI terkait Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama.
- Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Poespowardjojo, S., & Seran, A. (2015). *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (1st ed.). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Poespowardjojo, S., & Seran, A. (2016). *Diskursus Teori-Teori Kritis: Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer* (1st ed.). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Radford, G. (2005). *On the Philosophy of Communication*. California: Thomson Wadsworth.
- Robison, L. J., Schmid, A., & Siles, M. E. (2002). Is Social Capital Really Capital? *Review of Social Economy*, 60(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/00346760110127074>
- Setiawan, A. (1998). *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silva, E. B. (2016). Habitus: Beyond sociology. *Sociological Review*, 64(1), 73–92. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.12345>
- Swartz, D. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago & London: The University of Chicago.
- Throsby, D. (1999). Cultural Capital. *Journal of Cultural Economics*, 23, 3–12. <https://doi.org/10.1108/09513579910283440>
- Wintle, J. (2002). *Makers of modern Culture*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Zarkasyi, H. F. (2009). Hermeneutika Sebagai Produk Pandangan Hidup. In *A Two Day Workshop: On Islamic Civilization Studies* (pp. 1–15). Bandung-Jawa Tengah: Universitas Islam Sultan Agung.

**REALITAS PENELITIAN KOMUNIKASI BERBASIS INTERNET
(Sebuah Tinjauan)**

***REALITY OF INTERNET BASED COMMUNICATIONS RESEARCH
(An Overview)***

Bambang Mudjiyanto

Peneliti bidang *media and network society* pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta. Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia,
HP : 08129065226, bamb037@kominfo.go.id
(Naskah diterima 13 Oktober 2017; direvisi 16 Oktober 2017;
disetujui terbit 15 November 2017)

ABSTRACT

KTI examines the problem of communication research implementation of quantitative and qualitative approach which is based on the internet. From the discussion shows that the internet is a very rich source of data for the purposes of conducting research with quantitative approach and qualitative approach. Making internet as a source of research data, awareness of the various channels of communication that exist in the medium of the Internet becomes very necessary.

Keywords: Reality; Communication Research; Internet.

ABSTRAK

KTI ini menelaah persoalan pelaksanaan penelitian komunikasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lokusnya berbasis internet. Dari hasil bahasan memperlihatkan bahwa internet merupakan sumber data yang sangat kaya bagi keperluan pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Menjadikan internet sebagai sumber data penelitian maka kesadaran akan berbagai saluran komunikasi yang ada pada medium internet menjadi sangat diperlukan.

Kata-kata kunci :Realitas; Penelitian Komunikasi; Internet.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Diskusi tentang realitas penelitian komunikasi terkait medium internet, secara praktis dalam konteks filosofis ilmu ini berarti menjadi sebuah upaya untuk menelaah persoalan dimaksud tadi secara ontologi dan epistemologi. Secara ontologi telaahnya berkaitan dengan internet sebagai obyek kajian dan secara epistemologi berkaitan dengan upaya-upaya atau cara-cara ilmiah dalam mempelajari obyek kajian tadi.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini sendiri akan berupaya menyajikan kedua topik sebagaimana dimaksud sebelumnya. Bahasan terhadap dua topik dimaksud difokuskan pada persoalan pelaksanaan penelitian komunikasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lokusnya berbasis internet. Pelaksanaan mana, tentu akan dilihat dari yang dilakukan oleh para akademisi, baik dengan latar belakang peneliti maupun akademis, Bahasannya sendiri akan dimulai dari :
A. penelitian komunikasi dengan pendekatan kuantitatif, lalu diakhiri dengan pembahasan tentang B. penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif.; C. Realitas Penelitian Komunikasi Berbasis Internet, Cuplikan Sejumlah Contoh.

B. Signifikansi

Secara praktis KTI ini diharapkan dapat berfungsi menjadi pelen gkap at5au mungkin menjadi pembuka bagi wacana tentang penelitian Komunikasi berbasis internet. Secara akademis tentu diharapkan dapat menjadi pelengkap informasi ilmiah yang telah ada sebelumnya terkait dengan topik KTI ini. Dalam kaitan itu tentu KTI dimaksud secara maksimal diharapkan dapat membantu para akademisi.

II. PEMBAHASAN

A. Pendekatan Kuantitatif

Sebelum lebih jauh membahas tentang realita pelaksanaan riset komunikasi berbasis internet, maka guna me-refresh pengetahuan kita ada baiknya kita terlebih dahulu melihat peluang pelaksanaan penelitian komunikasi dengan pendekatan kuantitatif pada medium internet. Ini bertujuan agar pengetahuan kita tentang hal dimaksud yang bersifat akumulatif itu, bisa tetap terjaga relevansi. Dengan demikian diharapkan kita memperoleh pemahaman yang utuh terkait topik dimaksud.

Guna maksud tersebut, maka salah satu acuan yang tepat untuk kita gunakan yaitu terkait fenomena komunikasi pada medium internet yang dilihat dari berbagai konteks komunikasi yang terjadi sesuai ragam saluran komunikasi yang dikandungnya.

Terkait dengan argumentasi terakhir, maka dalam konteks bahasan ini, kita akan coba sajikan kembali hasil pemetaan contoh fenomenanya sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya pada Bab I. Hasil pemetaan contoh fenomena dimaksud, yaitu yang berkaitan dengan contoh *channel* komunikasi dalam medium internet, disajikan dalam tabel.1 berikut:

Tabel 1
Contoh Channel Komunikasi dalam Internet

Setting Komunikasi	Nama Ragam Jenis Channel	Contoh Channel	Partisipan Komunikasi	Sifat Komunikasi
Interpersonal	<i>Chatt Rooms</i>	Yahoo Messenger; Gtalk; Gadget : Path; BBM; Line; WA; Wechat; Messenger.	Individu <-> Individu	Komunikasi Langsung Bermedia
Groups	<i>Groups Discussion dalam Internet</i>	<i>Groups Discussion dalam Fb-Twitter; Groups Discussion dalam Gadget (Misal WA: Path; BBM; Line; WA; Wechat)</i>	Anggota Kelompok <-> Anggota Kelompok	Komunikasi Langsung Bermedia
Public	<i>Social Network Sites,Blog, Website</i>	Face Book; <i>Twitter; Youtube; Instagram</i> (Khusus Visual)	-Individu Tertentu (Misal Tokoh Politik) →Banyak Orang-Konstituen (Public) -Individu Biasa <->Publik	Komunikasi Public Tokoh Tertentu – Cenderung Searah -Cenderung Interaktif
Organizational	<i>1) Groups Discussion dalam Internet</i>	<i>1)Groups Discussion dalam Fb-Twitter; Groups Discussion dalam Gadget (Misal WA)</i>	1) Individu Anggota Organisasi <-> IndividuAnggota Organisasi	Komunikasi Langsung Bermedia
	<i>2) Website;</i>	2)Websites Organisasi	2) Organisasi <->Anggota Masyarakat Nasabah-Stakeholder Organisasi	
	<i>3) Blog</i>	3) Blog Organisasi	3) Organisasi <->Anggota Masyarakat Nasabah-Stakeholder Organisasi	

Massa	1) Surat kabar Online;	1) Kompas Cyber Media, Republika Online, Tribun.Timur com, dls.	Organisasi Media → Khalayak Massa	Cenderung Searah
	2) TVOnline;	2) RCTI, SCTV, Indosiar, Trans TV, ANTEVE Online	Organisasi Media → Khalayak Massa	
	3)TVStreaming	3) RCTI, SCTV, Indosiar, Trans TV, ANTEVE Online Streaming	Organisasi Media → Khalayak Massa	

Dari paparan data pada tabel 1 sebelumnya, itu mengindikasikan bahwa semua fenomena komunikasi (*human communication*) yang terjadi pada semua saluran komunikasi yang dikandung oleh medium internet itu dapat diteliti melalui penelitian komunikasi dengan pendekatan kuantitatif. Namun yang membedakannya adalah pada type penelitiannya, yaitu antara type penelitian korelatif dan penelitian type deskriptif. Karena apa, ya, ini karena berkaitan sifat samplingnya. Sifat sampling penelitian komunikasi yang berbasis internet cenderung memiliki dua kemungkinan, yaitu antara sampel yang bersifat representatif dan sampel yang sifatnya tidak representatif. Mengenai hal ini sebenarnya sudah dibahas dalam Bab II sebelumnya. Jadi tentunya tidak akan dibahas lagi disini.

Selanjutnya, terkait dengan dua kemungkinansifat sampel sebelumnya, maka ini berkonsekuensi pada aplikasi statistik dalam penelitian komunikasi pendekatan kuantitatif. Sifat sampel yang tidak representatif tentu sebaran datanya pasti tidak normal dan dengan demikian statistik yang digunakan dalam pengolahan dan analisis datanyapun harus menggunakan statistik deskriptif dan karena itu pula hasil penelitiannya hanya berlaku pada sampel itu sendiri. Sementara pada sampel yang representatif, pasti mengindikasikan distribusi yang normal sebarannya pada populasi dan dengan begitu maka data penelitiannya dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan statistik inferensial (*to infer*=memasukkan) dalam proses mengolah dan penganalisisannya. Dengan pengaplikasian statistik dimaksud, maka hasilnya bisa diberlakukan, atau bisa dimasukkan keberlakuannya pada populasi sebagai sumber sampel.

Masih terkait dengan sifat sampel tadi, maka sehubungan hasil penelitian fenomena komunikasi interpersonal pada medium internet seperti yang berlangsung melalui berbagai saluran seperti Yahoo Messenger; Gtalk; Gadget (Path; BBM; Line; WA; Wechat; Messenger) masih sulit dijumpai, maka secara fiktif akan coba disajikan disini tentang bagaimana kira-kira bentuk penelitian komunikasi pendekatan interpersonal sebagaimana dimaksud tadi. Dalam hubungan ini, maka kita misalnya melihat beragam cara orang dalam berkomunikasi melalui internet. Ada yang melalui Yahoo Messenger; Gtalk; dan Gadget. Melalui gadget juga, kita melihat beragam cara orang dalam berkomunikasi, ada yang melaui Line, ada yang melalui WA dan ada juga yang melalui BBM atau Path.

Secara teoritis pola komunikasi yang berkaitan dengan fenomenapenggunaan media sendiri jauh-jauh sebelumnya sebenarnya sudah dipelajari dan dikonseptualisir dengan konsep penggunaan media oleh Elihu dan Kazt. Konsep ini sendiri mereka jadikan sebagai salah satu konsep dari dua konsep yang ada dalam model teori mereka yaitu *Uses and Gratification Theory*.

Jadi dengan mengacu pada konsep teoritik *Uses* pada *Uses and Gratification Theory* dalam mengkonseptualisasi fenomena penggunaan saluran komunikasi pada medium internet di kalangan anggota masyarakat tadi, maka kini kita dapat merumuskan permasalahan komunikasi. Dengan latar belakang tadi maka rumusannya menjadi, : Bagaimana Pola Penggunaan Masyarakat terhadap Saluran Komunikasi yang Ada dalam Internet ? Faktor Apa yang Mempengaruhi Pola Penggunaan Masyarakat terhadap Saluran Komunikasi yang Ada dalam Internet ? Seberapa Besarkah Signifikansi Korelasi Faktor-Faktor tersebut dengan Pola Penggunaan Masyarakat terhadap Saluran Komunikasi yang Ada dalam Internet ?

Dengan rumusan masalah tersebut, maka format penelitian bisa dijabarkan menjadi dalam tabel 1.asbb.:

Tabel 1.a
Contoh Penelitian Pendekatan Kuantitatif
Setting Komunikasi Interpersonal dalam Internet

Judul Penelitian	Paradigma Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Populasi
MASYARAKAT DAN INTERNET (Survei Pola Penggunaan Saluran Komunikasi Interpersonal dalam Internet pada Masyarakat Perkotaan)	Positivistik	(1) Bagaimana Pola Penggunaan Masyarakat terhadap Saluran Komunikasi yang Ada dalam Internet ?(2) Faktor Apa yang Mempengaruhi Pola Penggunaan Masyarakat terhadap Saluran Komunikasi yang Ada dalam Internet ? (3) Seberapa Besarkah Signifikansi Korelasi Faktor-Faktor tersebut dengan Pola Penggunaan Masyarakat terhadap Saluran Komunikasi yang Ada dalam Internet ?	Survey	Anggota Masyarakat Pemilih Dalam DPT KPU di Wilayah Perkotaan yang Jadi Sampel

Itu contoh fiktif penelitian pada konteks interpersonal dalam internet melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Sekarang kita lanjutkan pada penelitian real yang telah pernah dilaksanakan beberapa tahun lalu. Penelitian ini terkait penelitian yang sudah penulis lakukan sendiri, yakni fenomena dalam konteks massa. Judulnya sendiri , STUDI AGENDA PADA MEDIA *ONLINE* (Studi Kasus Pada www.jambiexpres.co.id; www.bangkapos.com; dan www.bengkuluexpress.com) .

Dalam penelitiannya, peneliti ini mempertanyakan tiga pertanyaan penelitian; 1) Seperti Apakah Agenda Media yang Ada pada Media Online (www.jambiexpres.co.id; www.bangkapos.com; dan www.bengkuluexpress.com) ?; 2) Bagaimanakah Proses Pembentukan Agenda Media tersebut?; dan 3) Mengapa Agenda Media tersebut Terbentuk ? . Dengan tiga pertanyaan dimaksud, penelitian bertujuan : 1) Ingin Mengetahui Gambaran Pengagendaan dalam www.jambiexpres.co.id; www.bangkapos.com; dan www.bengkuluexpress.com ; 2) Ingin Mengetahui www.jambiexpres.co.id; www.bangkapos.com; dan www.bengkuluexpress.com dalam Proses (Cara) Pembentukan Agenda Media; 3) Ingin Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Media Online dalam Proses (Cara) Pembentukan Agenda Media.

Fenomena empirikal menyangkut pengagendaan media dalam riset ini akan diteliti berdasarkan konsep-konsep yang terdapat dalam *Agenda Setting Theory* yang digagas McCombs & Shaw pada tahun 1972. Agenda Setting adalah suatu jenis penelitian yang difokuskan pada pendapat umum, bukan pada persuasi dan perubahan sikap, tetapi pada bagaimana frekuensi isu (*salience issue*) atau relevansi isu dengan khalayak (*prominence issue*) atas sesuatu isu yang diagendakan media. Termasuk pula menyangkut bagaimana cara suatu isu disajikan media (*valence*), misalnya apakah suatu isu disajikan dengan cara menarik atau tidak. Dalam tradisi studi agenda setting, upaya memahami fenomena ketiga konsep tadi dikenal dengan studi *agenda media*.¹

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui studi *content analysis* dalam tradisi studi agenda media guna menemukan jawaban atas permasalahan pertama penelitian. Sedang untuk menjawab permasalahan kedua dan ketiga, yakni guna menemukan jawaban *how and why*, riset ini akan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *case study*.

¹ Griffin, EM, 2003, *A First Look At Communication Theory*, Fifth edition, New York, Mc Graw Hill, chapter 28, p. 392.

B. Pendekatan Kualitatif

Data untuk permasalahan pertama akan dikumpulkan melalui penganalisisan isi media online terpilih dengan menggunakan alat ukur yang reliabel dalam takaran Holsti². Sementara untuk permasalahan kedua dikumpulkan melalui, diantaranya *depth interview* terhadap awak media yang relevan dengan permasalahan penelitian dan melakukan observasi di ruang redaksi media online.

Sumber data untuk permasalahan pertama yaitu :www.jambiexpres.co.id; www.bangkaupos.com; dan www.bengkuluexpress.com, yang dipilih secara acak sederhana. *Recording unit*nya adalah berita-berita utama pada ketiga media online tersebut pada terbitan bulan Maret 2010 yang ditentukan dengan teknik *sampling kalender*³. Proses *sampling* ini menghasilkan sampel edisi terbit media online sebagaimana terlampir. Selanjutnya, dari masing-masing sampel edisi tersebut diambil lima (5) berita sampel (ditentukan secara acak sederhana) untuk dijadikan *recording unit*. Pengolahan data kuantitatif menyangkut permasalahan pertama ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer melalui aplikasi program SPSS.

Selanjutnya, menyangkut pendekatan kualitatif⁴ dengan metode *case study*⁵ untuk menjawab permasalahan penelitian kedua dan ketiga. Desain studi kasus dalam penelitian ini sendiri merupakan studi kasus tunggal terpancang (multi unit analisis). Menurut Yin jenis desain ini merupakan desain di mana untuk mengungkapkan suatu kasus dari suatu konsep tertentu menggunakan unit analisis yang berbeda (Yin, 1997 :51). Unit analisis ini berbeda baik dari segi kelompok maupun tingkatan. Sehingga data yang dihasilkan lebih kaya dan hasilnya bukan hanya gambaran umum namun juga bentuk-bentuk kekhususan data tersendiri.

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi kasus yang dilakukan akan diterapkan beberapa cara pengumpulan data seperti ditunjukkan dalam tabel 2.a sbb :

Tabel 2.a
Teknik Pengumpulan Data Studi Kasus

No.	Teknik Pengumpulan Data	Unit Analisa	Output
1	Analisis Data (<i>Content Analysis</i>)	Content Berita dalam Website yang Terpilih sebagai Sampel.	Data Kuantitatif mengenai Kecendrungan Pemberitaan sebagai Bahan Membuat Kategori.
2	Indepth Interview	Pimpinan Redaksi dan Wartawan serta Staff usaha	Verbatim/ Transkrip Wawancara
3	Observasi	Rapat Redaksi; Proses Produksi; Proses <i>Uploading</i>	Verbatim Hasil Observasi
4	Studi Dokumen	Press Release; Surat Tugas dan Dokumen Perintah Peliputan	Hasil Studi Dokumen dan Foto-Foto

² Uji keandalan koding dalam kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan rumus Holsti :

$$R = \frac{2 \times M}{N1 + N2}$$

. Nilai reliability terendah dalam studi ini ditetapkan sebesar 0,80.

³ Sampling edisi terbit dilaksanakan dengan teknik *Rotated sampling* atau dikenal juga dengan sistem kalender, yakni sampling yang berusaha mendapatkan representasi nama-nama hari terbit dalam minggu pada setiap bulan. Prosesnya, yakni dengan cara mengundi tanggalan pada masing-masing bulan edisi terbit untuk menentukan sampel pertama edisi (nama hari terbit surat kabar online). Sampling berikutnya dilakukan dengan cara mengikuti urutan hari setelah sampel pertama. (Lihat, Stempel III, Guido H., *Analisis Isi*, diterjemahkan oleh Drs. Jalaluddin Rakhmat Msc dan Drs. Arko Kasta S, Penerbit Arai Komunikasi, Bandung, 1983).

⁴ Peneliti yang menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif pada dasarnya menurut Lindlof dan Taylor dalam buku *Qualitative Communication Research Methods* (2002), berusaha mencari untuk mengabadikan dan menganalisa bentuk-bentuk yang tersituasi, isi dan pengalaman dari tindakan sosial ketimbang menjadikannya subjek yang matematis ... (Lindlof dan Taylor 2000;18).

⁵ Seperti dikutip Nishbet dan Watt dari Adelman mendefinisikan studi kasus sebagai serangkaian metode penelitian yang memumpunkan pada penelaahan seputar suatu kejadian (Nishbet dan Watt : 1994: 4). Robert K Yin mengatakan studi kasus sebagai sebuah riset lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin 1997, : 1).

5	Catatan Harian	Bagaimana Pandangan Peneliti dalam Keseharian Masa Kerja Pengumpulan Data di Lapangan	Transkrip Catatan Harian
---	----------------	---	--------------------------

2) Unit Analisa

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah tiga website media lokal dikawasan Provinsi Jambi, Bengkulu dan Kep. Bangka Belitung, yakni www.jambiexpres.co.id; www.bangkapos.com; dan [www. Bengkulu ekspres. com](http://www.Bengkulu.ekspres.com). Dari ketiga website atau institusi penyedia layanan berita website ini akan dilihat secara fokus pada beberapa unit analisa sesuai kebutuhan data. Unit analisa yang akan dianalisis adalah terlihat dalam tabel 2.b sebagai berikut :

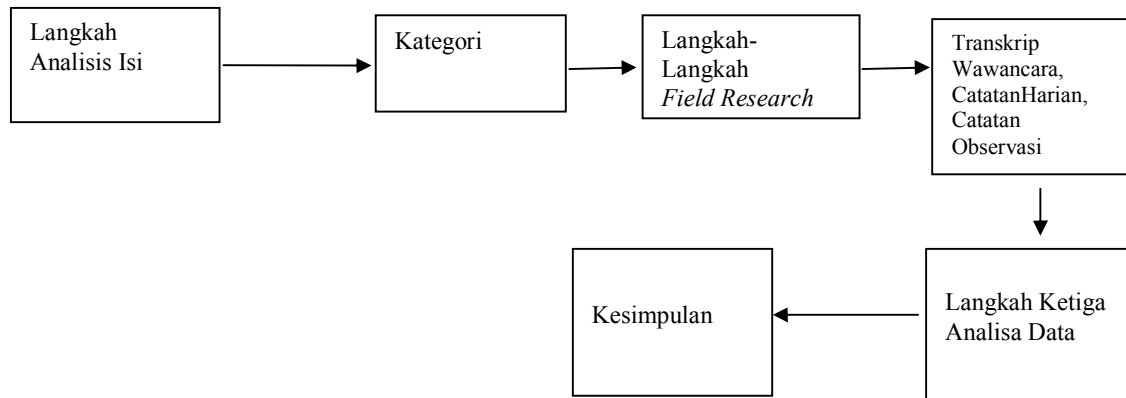
Tabel 2.b
Unit Analisis www.jambiexpres.co.id;
www.bangkapos.com; dan www.bengkuluexpress.com

No	Unit Analisa	Keterangan
1	Isi Media	Kliping Isi Media dari Website Jumlahnya Sesuai Sistem Sampling yang Dilakukan Yaitu Menggunakan Sampling Sistem Kalender (<i>Rotated Sampling</i>) dan Simple Random Sampling.
2	Pimpinan Redaksi	Kepala Redaksi; Redaksi Pelaksana, Redaktur
3	Staff Redaksi	Wartawan; Sekretaris Redaksi
4	Bagian Usaha	Bagian Iklan
5	Dokumen	-Press Release -Laporan Keuangan -Surat -Surat Undangan Peliputan -Surat Somasi dan Legal Menyangkut Pemberitaan (Non Usaha atau Jual Beli) -Laporan Pendapatan Iklan -Surat Aduan Masyarakat (Semua Berupa Copy)

3) Analisa Data dan Urutan Langkah Pekerjaan

- Dalam penelitian ini model analisa yang dipakai adalah model perbandingan tetap seperti yang dikonsepsikan oleh Glaser & Strauss. Metode perbandingan tetap ini menganalisis data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain dan membandingkan kategori dengan kategori yang lain (Maleong 2004 : 288).
- Langkah penelitian dijelaskan dalam bagan gambar `1 di bawah ini :

Gambar 1
Urutan Langkah Pekerjaan Analisis Data



- Langkah pertama, melakukan analisis isi, ini akan menghasilkan suatu rekomendasi atas kecenderungan tertentu untuk merumuskan kategori. Langkah kedua, berupa *field research* dimana pengumpulan data dilakukan di lapangan. Ini terdiri dari aktivitas observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan pembuatan catatan harian. Kemudian data-data hasil penelitian lapangan diubah kedalam data-data yang siap dianalisa seperti dalam bentuk *verbatim* atau transkrip dan dokumen dijadikan klasifikasi, serta catatan harian dikodifikasi. Langkah ketiga, semua data yang sudah dikategorikan dianalisa dan kemudian menghasilkan kesimpulan.
- Berikut ini akan disajikan cuplikan penyajian dan analisis data penelitian dimaksud.

C. Realitas Penelitian Komunikasi Berbasis Internet, Cuplikan Sejumlah Contoh.

1. Contoh : Cuplikan Hasil Penelitian STUDI AGENDA PADA MEDIA *ONLINE* (Studi Kasus pada www.jambiexpress.co.id; www.bangkapos.com; dan www.bengkuluexpress.com).

Deskripsi Pengagendaan Media pada www.jambiexpress.co.id; www.bangkapos.com; dan www.bengkuluexpress.com.

1) Kemenonjolan Berita/Prominent/Visibility

Mengacu pada data (tabel 3.6), terlihat bahwa selama periode Bulan Maret 2010, terdapat perbedaan dalam total penyajian berita pada ketigamedia online, yakni Jambi Ekspres Online, Bangka Pos Online, dan Bengkulu Ekspres Online. Berdasarkan urutan terbanyaknya, Bangka Pos Online menyajikan 35 berita, Bengkulu Ekspres Online 30 berita, dan Jambi Ekspres Online menyajikan 25 berita. Dengan demikian Bangka Pos Online lebih banyak menyajikan berita dibandingkan dengan Bengkulu Ekspres Online dan Jambi Ekspres Online.

2) *Salience*

Terkait dengan pihak yang kebutuhannya relevan dengan isu yang dibahas dalam media online yang ditampilkan dalam (tabel 3.29), pihak Pemerintah merupakan pihak dengan jumlah terbanyak yang kebutuhannya relevan dengan isu yang dibahas oleh media www.jambiexpress.co.id (48%). Sedangkan pada media www.bangkapos.com masyarakat merupakan pihak yang paling besar jumlahnya yang kebutuhannya relevan dengan isu yang dibahas sebanyak (37,1%). Di www.bengkuluexpress.com masyarakat juga menjadi pihak yang paling relevan kebutuhannya dengan isu yang dibahas sebanyak (50%). Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan pihak yang kebutuhannya relevan dengan isu yang dibahas pada media www.bangkapos.com dan www.bengkuluexpress.com, sedangkan media www.jambiexpress.co.id pihak Pemerintah yang kebutuhannya paling relevan dengan isu yang dibahas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga media online cenderung berbeda dalam hal pengutamakan pihak-pihak yang kebutuhannya berelevansi dengan isu yang dibahas dalam berita. Pada media www.bangkapos.com dan www.bengkuluexpress.com, relevansi

kebutuhan masyarakat cenderung lebih menjadi utama, sementara www.jambiexpress.co.id kebutuhan pihak Pemerintah, relevansinya tampak menjadi lebih utama.

2. Contoh Penelitian Pendekatan Kualitatif: Cuplikan Hasil Penelitian GAYA BICARA, GENDER MEDIA SOSIAL (Konten Analisis terhadap Aplikasi Status dalam Akun FB)

Dengan judul ini penelitiannya mempermasalahkan 1) Bagaimanakah Gaya Berbicara Pemilik Akun FB dari Segi Gender ? ; 2) Apakah Perbedaan Gender Pemilik Akun FB Membedakan Mereka dalam Gaya Berbicara ?. Secara akademik hasil penelitian diharapkan signifikan dalam membangun “*Genderlect Style*” theory dan secara aplikatif diharapkan dapat membantu para pihak sebagai acuan baru untuk berkomunikasi berdasarkan gender.

Cuplikan hasil penelitiannya disajikan berikut ini :

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat belakangan ini, telah berdampak terhadap proses keberlangsungan komunikasi antarmanusia. Dari sebelumnya hanya terbatas pada lima konteks (*setting*) secara konvensional, kini keberlangsungannya itu menjadi berubah pada lima konteks dalam tataran digital.

Salah satu bentuk media komunikasi digital yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi sebagai mana dimaksud tadi, yaitu apa yang lazim dikenal orang dengan media sosial (*social networking sites*)

Berdasarkan fenomena berkomunikasi melalui media sosial (khususnya melalui *Facebook =FB*) sebelumnya, peneliti ini secara khusus akan lebih jauh menelaah fenomena pengekspresian diri melalui komunikasi verbal sebagaimana tampak melalui fitur “Status”. Sekaitan dengan itu, maka permasalahan ini dirumuskan menjadi sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Gaya Berbicara Pemilik Akun FB dari Segi Gender ? ; 2) Apakah Perbedaan Gender Pemilik Akun FB Membedakan Mereka dalam Gaya Berbicara ?

2. Pembahasan: Konsep Teoritik (*Genderlect Style Theory*)

Deborah Tannen mencoba melihat perbedaan dialek antara laki-laki dan perempuan saat berkomunikasi itu berdasarkan lima konsep yang menjelaskan gambaran situasi proses komunikasi, terdiri dari :1) Percakapan Publik Versus Percakapan Pribadi; 2) Menyampaikan Cerita; 3) Mendengarkan ;4) Mengajukan Pertanyaan dan 5) Konflik.

Bagi pria hidup adalah ibarat sebuah kontes dan karenanya pria merasa lebih nyaman dengan konflik. Sebaliknya dengan wanita, kaum wanita ini cenderung menghindari konflik.

3. Temuan dan Analisis Data

A. Gaya Berbicara Pemilik Akun FB dari Segi Gender

Untuk melihat lebih jauh tentang fenomena gaya berbicara dimaksud, makalah ini mencoba memaparkan hasil observasi dari sejumlah pesan dalam status akun facebook yang link (terkoneksi) dengan penulis. Namun demikian secara terbatas observasi dimaksud hanya dilakukan terhadap dua konsep saja, yaitu fenomena konsep percakapan publik versus percakapan pribadi dan fenomena percakapan yang mengandung konflik. Hasilnya disajikan dalam (tabel 3.85) berikut:

Tabel 3.85
Gaya Berbicara Pemilik Akun FB Menurut Gender

Gender	Gaya Berbicara				Temuan
	Publik	Pri--badi	Konflik		
			Ya	Tidak	
Pria	V	-	-	V	1) Jika kamu merasa mengalami kesulitan tidur di malam hari, penting bagi kamu untuk mengetahui penyebabnya secara pasti.(Akun Rustam Masse-Status FB diakses pk 07 20012015)
	V	-	-	V	2) Sembilan manfaat mengejutkan yang dimiliki oleh pohon kersen - yang ditemukan pada buah, batang, daun, dan akarnya. Semoga bermanfaat bagi kesehatan dari pohon kersen, SELAMAT MENCoba..... (Akun Rustam Masse-Status FB diakses pk 07 20012015)
	V	-	V	-	3)Berdasarkan buku Jelajah Kabupaten Sidrap, sejarah penamaan desa Lise berdasarkan cerita tutur kata Tau Mallise yang dalam bahasa Bugis Sidenreng Rappang berarti Manusia Berisi (manusia yang memiliki kelebihan karena pengetahuan yang tinggi). (Akun Rustam Masse-Status FB diakses pk 07 20012015)
	V	-	-	V	4) Jakarta, tepatnya di Sarinah, hari ini mendapat teror bom dan baku tembak. Syukur, teror tersebut dalam hitungan jam dapat diatasi Polri dan TNI. Warga Jakarta juga tampak tegar menghadapi teror tersebut. Ini tentu jadi modal bagus untuk melawan aneka teror, sekaligus pesan bagi peneror bahwa warga Jakarta tak mudah untuk di takut-takuti.(Akun Jamluddin Ritonga, diakses pk 07 20012015).
	V	-	V	-	5) Setuju banget dengan pendapat Yusril. Aneh memang, negara memungut uang dari rakyatnya. Mungkin ada yang tahu apa ada negara lain yang memungut uang dari rakyatnya ? (Akun Jamluddin Ritonga, diakses pk 07 20012015).
	V	-	V	-	6) Hari ini umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak memperingatinya sekedar seremonial, tapi sungguh-sungguh mencontoh dan mengamalkan sikap dan perilaku Nabi Muhammad. .(Akun Jamluddin Ritonga, diakses pk 07 20012015).
	V	-	V	-	7) <u>Hasyim Ali Imran</u> melihat fenomena politik belakangan ini sepertinya diperlukan re-revolusi mental sebelum konsep revolusi mental itu sendiri semakin kabur... He he he(Akun, <u>Hasyim Ali Imran</u> diakses pk 07 20012015).
	V	-	V	-	8) Setelah mendengar pengakuan secara de facto dari politisi yang juga anggota anggota DPR RI inisial DWP, tertangkap basah dalam OTT yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu. Beliau mengatakan Gaji saya minus.....dan seterusnya. Persoalannya adalah indikasi atau penyebab melakukan tindakan korupsi ?. Menurut persepsi saya sebagai pengamat komunikasi politik adalah: 1. Tidak benar KPK selalu tebang pilih dalam menentukan sasaran OTT nya. 2. Apakah Parpol juga punya and... .(Akun, <u>Ramon Kabandi</u> diakses pk 07 20012015).
	V	-	V	-	9) 'Blast in Sarinah', kesempatan bagi Kapolri untuk membuka rahasia bahwa ada 9 gerakan radikal yg membahayakan.....(TVone.Kabar Pagi, 20.01.16) <u>Rusdi Muchtar</u> , diakses pk 07 20012015).

	V	-	V	-	10) Sosialisasi....kata yg sangat sering saya dengar dari mulut pejabat pemerintah dan biar kedengaran keren....dan dalam bahasa Indonesianya adl 'memasyarakatkan'.....!! Maksudnya telah menjelaskan suatu program atau kebijakan kepada masyarakat luas..... Tapi benar ngga masyarakat luas itu sudah tahu/mengerti..... Ternyata kegiatan 'sosialisasi' itu hanya sekedar saja (untuk menghabiskan dana??)...pada kenyataanya sebagian besar warga masyarakat belum/tidak tahu....!! Mungkin... See More Rusdi Muchtar, Yesterday at 7:33am ; diakses pk 07 20012015).
Jumlah	10	0	7	3	
Wanita	V	-	-	V	1) Aw! Arigato, jeng meeett... sukaaakk!!! Alhamdl, akhirnya meja saya berkalender juga..maap, thn ini kita gak kiriiimm, huhuhuhu.. (akun FB Erika Arumdati, diakses pk 07. 20012015)
	-	V	-	V	2) Love this! Teruntuk semua yg udh jd mommy and enjoying every moment of it! @ (akun FB Erika Arumdati, diakses pk 07. 20012015)
	-	V	-	V	3) Sedih (BANGET) itu kalo miss sekolah br blg, acara perform anak2 ternyata brg sama jadwal busstrip [?] pdhl si baby girl jd narator cerita, yg buka dan tutup acara play nya.. [?] Di rumah udh bulak balik bantuin ngapalin, masa giliran performnya, gak nonton??? [?] Pagi2 udah sedih gak keruan niy.. (akun FB Erika Arumdati, diakses pk 07. 20012015)
	V	-	V	-	4) Ujian macam apa ini??? [?] Akibat tmpt duduk yg udh ditek didudukin si mas-mas, biarpun kepental jauh di dpn, msh bs 'nyontek' berkat kecanggihan gadget.[?](akun FB Erika Arumdati, diakses pk 07. 20012015)
	-	V	-	V	5) <i>pengen dong kaya orang2 , ada cowonya yang menyayangi sepenuh hat</i> (akun fb Mila Sartika, acceseed pk 07. 20012015)
	V	-	-	V	6) [BACA PELAN-PELAN DENGAN SEKSAMA] □□Jangan baring ketika adzan, nanti jenazah kita berat." Rasulullah S.A.W bersabda "Sebarkan Walaupun.. (akun fb Dwiyati Martosenjoyo , acceseed pk 07. 20012015)
	V	-	V	-	7) Pemerintah Dinilai Tak Kompak soal Keberadaan ISIS di Indonesia(akun fb Dwiyati Martosenjoyo , acceseed pk 07. 20012015)
	V	-	V	-	8) Polisi Pastikan Ada Sianida Dalam Kopi Mirna(akun fb Dwiyati Martosenjoyo , acceseed pk 07. 20012015)
	V	-	V	-	9) 22 Tahun Jadi Pendeta, Petrus Masuk Islam, Gerejaanya Di Sulawesi akan Dijadikan Masjid(akun fb Dwiyati Martosenjoyo , acceseed pk 07. 20012015)
	V	-	-	V	10) <i>Ibu Hebat Bekerja Jadi Buruh Cuci, Kuliahkan Anak Sampai S3 ke Jepang</i> (akun fb Femy Febi Umboh https://www.facebook.com/dwiyati.martosenjoyo?fref=nf , acceseed pk 07. 20012015)
Jumlah	7	3	4	6	-

- a) Percakapan Publik versus Percakapan Pribadi
 b) Pembicaraan Konflik

B. Diskusi

Temuan data di atas kiranya menyangkut sajian data tentang gaya bicara pemilik akun fb menyangkut fenomena konsep pembicaraan publik vs pribadi dan pembicaraan konflik. Dari hasil analisis temuan data sebelumnya mengindikasikan bahwa menyangkut fenomena : a) Percakapan Publik Versus Percakapan Pribadi , maka dapat disimpulkan bahwa pemilik akun fb pria umumnya berkandungan pesan bersifat pembicaraan publik. Demikian juga pemilik akun fb wanita, juga cenderung mengandung pesan yang bersifat pembicaraan publik. Sementara terkait dengan pesan yang mengandung b) Pembicaraan Konflik, disimpulkan bahwa pemilik akun fb pria cenderung pesannya bersifat konflik dan sementara kalangan pemilik akun wanita pesannya cenderung bersifat non konflik meski cukup banyak juga diantaranya yang bersifat konflik.

. Kesimpulan dan Saran

Pemilik akun fb pria umumnya berkandungan pesan bersifat pembicaraan publik. Demikian juga pemilik akun fb wanita, juga cenderung mengandung pesan yang bersifat pembicaraan publik. Sementara terkait dengan pesan yang mengandung “Pembicaraan Konflik”, pemilik akun fb pria cenderung pesannya bersifat konflik dan pemilik akun wanita pesannya cenderung bersifat non konflik meski cukup banyak juga diantaranya yang bersifat konflik. Sementara terkait dengan kesimpulan menyangkut fenomena “Pembicaraan Konflik”, di mana pemilik akun fb pria cenderung pesannya bersifat konflik dan pemilik akun wanita cenderung bersifat non konflik meski cukup banyak diantaranya yang bersifat konflik, maka ini masih relatif sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh Deborah Tannen, terutama terkait dengan pemilik akun fb pria, di mana mereka itu cenderung lebih suka “berkonflik” dalam berbicara. Sementara pada pemilik akun wanita, tampaknya ada kecenderungan ketidaksesuaian dengan asumsi Deborah Tannen sehubungan adanya temuan yang relatif signifikan bahwa kalangan wanita itu juga ternyata banyak yang “menyenangi” konflik. Ada sejumlah kemungkinan mengapa fenomena tadi muncul saat ini. Pertama terkait dengan era komunikasi dan kedua faktor budaya komunikasi.

Secara prospektif terkait dengan teori taxonominya Tannen, maka kiranya perlu dilakukan studi yang menyeluruh menyangkut konsep-konsep yang ada dalam teori tadi. Melalui studi relatif terbatas seperti yang dilakukan dalam buku ini, setidaknya memberikan indikasi bahwa teori *Genderlect Style* terutama menyangkut konsep “Percakapan Publik versus Percakapan Pribadi” dan “Pembicaraan Konflik”, secara empiris sudah tidak/kurang mendukung asumsi-asumsi yang dikemukakan Tannen. Terkait dengan ini, bagi para peneliti yang tertarik dengan penelitian sejenis, maka kedepan dalam penelitiannya hendaknya melakukan studi *Content Analysis* yang lebih komprehensif terhadap media sosial seperti fb guna menemukan kebenaran yang lebih akurat terkait pengujian teori *Genderlect*.

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Demikianlah dua contoh real mengenai hasil pelaksanaan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang berbasiskan internet baru saja disajikan. Dalam hal ini fenomena komunikasi dalam setting massa yang keterjadiannya melalui medium internet. Dengan contoh ini, tentu menjadi bukti empirikal bahwa studi komunikasi kuantitatif berbasis internet itu bukanlah sesuatu yang asing sebenarnya, akan tetapi sesuatu yang real dan visible untuk dilakukan dan mungkin lebih mudah dalam menemukan datanya. Dengan contoh ini pula, seyogya hendaknya dapat menjadi contoh bagi para akademisi lainnya ke depan dalam melakukan riset-riset komunikasi pendekatan kuantitatif. Masih tersedia lahan yang begitu banyak bagi kajian-kajian studi komunikasi yang belum digarap oleh akademisi komunikasi bagi pengembangan ilmu komunikasi ke depannya. Tidak berbeda halnya dengan penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif, maka pada penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif juga begitu, di mana internet sebagai basis bagi pelaksanaan penelitian, juga menjadi relatif mudah untuk dilaksanakan. Relatif mudah dimaksud sehubungan data penelitian komunikasi dari sumber internet itu, sejalan dengan sifat penelitian pendekatan kualitatif, sifatnya unscanning yang yang tidak memerlukan representativnes. Karena itu, sumber datanya berserak di berbagai saluran komunikasi yang ada dalam internet.

Ucapan Terimakasih : Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tim Redaksi JSKM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut berpartisipasi dalam mengisi konten JSKM edisi 21 (2) Desember 2017 ini.

Daftar Pustaka

- Aisy, Abu dan Abu Haizum. 2014. *Adab-adab Seseorang dalam Menggunakan Sosial Media*. Jakarta : Syariah Publishing.
- Briggs, Asa. 2010. *Sejarah Sosial Mediadari Gutenberg sampai Internet*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Konstruksi Media Sosial*. Yogyakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Christakis, Nicholas A. dan James H. Flower. 2013. *Dahsyatnya Kekuatan Jejaring Sosial Mengubah Hidup Mereka*. Jakarta : Graha Media.
- Fahmi, Abu Bakar. 2011. *Mencerna Situs Jejaring Sosial*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Imran, Hasyim Ali. *Pola Aktifitas Komunikasi Pengguna Internet melalui Situs Jejaring Sosial*. Jurnal Studi Komunuikasi dan Media, Vol. 14 (2) 2010. Jakarta: BPPKI Jakarta, Kemkominfo.
- Imran, Hasyim Ali. *Genderlect Styles dan Fenomena Komunikasi*. INSANI, ISSN : 02160552No.15/2/Desember/2013 pada situs http://stisipwiduri.ac.id/File/N/Full/2534-INSANI%20STISIP%20Widuri%20Desember%202013_Hasyim%20Ali%20Imran.pdf diakses pada tanggal 06 Desember 2015 pukul 13.00 WITA
- Maryani, Eni. 2014. *Media dan Perubahan Sosial*. Jakarta : ROSDA.
- Nasrullah, Rulli. 2011. *Teori Media Sosial Perspektif Komunikasi, Kultur, dan Sosio Teknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Tannen, Deborah. In Chapter 33, p. 463-473. 2003. *A First Look at Communication Theory, Fifth Edition*. EM Griffin, New York : McGraw Hill.
- Kramarae, C. 1981. *Women and men speaking*. Rowley, MA: Newbury House.
- Tannen, D. 1990. *You just don't understand*. New York: Ballantine. Pada situs <http://www.alex.com/topsites/countries/ID> diakses pada tanggal 5 Januari 2016.

Petunjuk Penulisan naskah :

A. Umum :

Jurnal Studi Komunikasi dan Media adalah jurnal yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena komunikasi dan media sebagai salah satu bidang kekhususan dari salah satu sub bidang Ilmu Jurnalistik, Komunikasi dan Media pada Bidang Ilmu Jurnalistik, Perputakaan dan Kurator. Rincian substansi isi jurnal meliputi : (a) Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena komunikasi dan informasi bermedia, baik media konvensional dan inkonvensional; (b) Kajian terhadap konsep-konsep ilmiah yang terkandung dalam fenomena komunikasi dan informasi bermedia; (c) Obituari tokoh ilmuwan dalam bidang komunikasi dan informasi bermedia. Redaksi menerima sumbangan naskah dari kalangan peneliti, akademisi, pengamat dan praktisi. Naskah yang disumbangkan harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media lain (ditulis dalam bahasa Indonesia mengacu pada EYD). Jurnal ini terbit dua nomor dalam setahun. Nomor 1 terbit setiap Juli, nomor 2 terbit Desember. Proses penerbitan nomor 1 berlangsung sejak Awal Januari hingga Juni. Proses penerbitan nomor 2 berlangsung sejak Juli hingga Desember. Redaksi menyediakan cetak lepas bagi para penulis yang artikelnya dimuat.

B. Khusus :

Format Penulisan : Naskah diketik dengan Times New Roman font 12 di atas kertas A4 satu spasi melalui program *MS Word* 2003. Naskah yang dikirim minimal 10 dan maksimal 20 halaman dalam bentuk *single lay out*. Per halaman rata-rata sekitar 429 kata hingga 460 kata. Pengiriman dilakukan melalui pendaftaran lebih dahulu di jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm. Naskah mengacu pada sistematika sbb. :

Judul; Nama Penulis (*termasuk alamat instansi, nomor hp/faxs, e-mail*); Abstrak, Kata Kunci; PENDAHULUAN; PEMBAHASAN; PENUTUP, *Acknowledgement*/Ucapan terimakasih, dan Daftar Pustaka.

Penjelasan format penulisan:

Judul : Ditulis dengan singkat padat, maksimal 4 baris. Isinya mencerminkan masalah pokok dan metode penelitian. Misal : masalah pokok “Bagaimana agenda media surat kabar Kompas mengenai pemberitaan Ketua DPR Akbar Tanjung yang terlibat kasus korupsi dana non budgeter Bulog?”. Judul menjadi, Agenda Media Mengenai Isu Politik (Analisis Isi Terhadap Berita Mengenai Status Kepemimpinan Akbar Tanjung di DPR RI dalam Surat kabar Kompas).

Nama Penulis (*termasuk alamat instansi, nomor hp/faxs, e-mail, tgl. kirim naskah*) : Contoh :

Purwanto, S. Andy Cahyono dan Sunaryo
Balai Penelitian Kehutanan Solo
Jl. Jend. Ahmad Yani Pabelan PO Box. 295, Solo-57102
Telp. (0271) 716709 Fax (0271) 716959

Abstrak : Ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, maksimal 200 kata tanpa paragraph. Isinya harus mencerminkan latar belakang dan permasalahan, metode, hasil dan implikasi.

Kata Kunci : Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris di bawah abstrak. Contoh judul : Membangun Format Kemitraan Media Dalam Rangka Diseminasi Informasi. **Kata-kata kunci :** Kemitraan Media , Diseminasi Informasi.

PENDAHULUAN : *Bagian pertama* berisi tentang latar belakang masalah yang mencerminkan konseptualisasi gejala dan pentingnya permasalahan tersebut untuk diteliti lebih jauh; rumusan masalah; *Bagian kedua* signifikansi penelitian (teoritis-praktis).

Paparannya berupa : I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang dan Permasalahan
- B. Signifikansi

PEMBAHASAN : Secara substansial isinya mencakup jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam *bagian pertama* **PENDAHULUAN**. Materinya *pertama* berupa tinjauan literatur yang berkaitan dengan studi yang bersangkutan. Sumber tinjauan berupa hasil-hasil penelitian, makalah, diskusi dan lain sejenisnya. Hasil tinjauan harus mengemukakan *The State of the Arts*. Format sajiannya sebagai berikut :

II. PEMBAHASAN

- A. KERANGKA TEORI
 - 1. Tinjauan Literatur
 - 2. Konsep-Konsep Teoritik
 - 3.
- B. Methode Penelitian
- C. Hasil Penelitian
 - 1.
 - 2.
- D. Diskusi

PENUTUP : Isinya mencakup kesimpulan dan saran (akademis dan praktis). Formatnya sbb.:

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Acknowledgement/Ucapan terimakasih : Jika diperlukan, berisi tentang ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi kepada penulis dalam penyelesaian naskah dimaksud.

Daftar Pustaka : Daftar pustaka ditulis dengan mengacu pada Standard Chicago.

- Contoh : 1. Buku (satu penulis)
Doniger, Wendy. *Splitting the Difference*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
Dalam naskah ditulis : (Doniger 1999, 65)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Doniger, Wendy. 1999. *Splitting the difference*. Chicago: University of Chicago Press.
2. Buku (Dua Penulis)
Cowlshaw, Guy, and Robin Dunbar. *Primate Conservation Biology*. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
Dalam naskah ditulis : (Cowlshaw and Dunbar 2000, 104–7)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Cowlshaw, Guy, and Robin Dunbar. 2000. *Primate conservation biology*. Chicago: University of Chicago Press.
3. Buku (empat atau lebih penulis)
Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael, and Stuart Michaels. *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Dalam naskah ditulis : (Laumann et al. 1994, 262)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael, and Stuart Michaels. 1994. *The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States*. Chicago: University of Chicago Press.
4. Editor, translator, or compiler instead of author
Richmond Lattimore, trans., *The Iliad of Homer* (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91–92.
Dalam naskah ditulis : (Lattimore 1951, 91–92)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Lattimore, Richmond, trans. 1951. *The Iliad of Homer*. Chicago: University of Chicago Press.
5. Editor, translator, or compiler in addition to author
Yves Bonnefoy, *New and Selected Poems*, ed. John Naughton and Anthony Rudolf (Chicago: University of Chicago Press, 1995), 22.
Dalam naskah ditulis : (Bonnefoy 1995, 22)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Bonnefoy, Yves. 1995. *New and selected poems*. Ed. John Naughton and Anthony Rudolf. Chicago: University of Chicago Press.
6. Chapter or other part of a book
Andrew Wiese, “The House I Live In’: Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States,” in *The New Suburban History*, ed. Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 101–2.
Dalam naskah ditulis : (Wiese 2006, 101–2)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Wiese, Andrew. 2006. “The house I live in”: Race, class, and African American suburban dreams in the postwar United States. In *The new suburban history*, ed. Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue, 99–119. Chicago: University of Chicago Press.
7. Buku yang dipublikasi secara elektronik
Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders’ Constitution* (Chicago: University of Chicago Press, 1987), <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/> (accessed June 27, 2006).
Dalam naskah ditulis : (Kurland and Lerner 1987)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. *The founders’ Constitution*. Chicago: University of Chicago Press. <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>.
8. Artikel Jurnal (Dalam Cetak)
John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” *Nature* 393 (1998): 639.
Dalam naskah ditulis : (Smith 1998, 639)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Smith, John Maynard. 1998. The origin of altruism. *Nature* 393: 639–40.
9. Artikel dalam jurnal online
Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric Vittinghoff, Penny Sharp, and Mary A. Whooley. "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial." *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (February 6, 2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo>.
Dalam naskah ditulis : (Hlatky et al. 2002)
Dalam Daftar Pustaka ditulis : Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric Vittinghoff, Penny Sharp, and Mary A. Whooley. 2002. Quality-of-life and depressive symptoms in postmenopausal women after receiving

hormone therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) trial. *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (February 6), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/full/joc10108.html#aainfo> (accessed January 7, 2004).

10. Artikel Majalah Populer

Steve Martin, "Sports-Interview Shocker," *New Yorker*, May 6, 2002, 84.

Dalam naskah ditulis : (Martin 2002, 84)

Dalam Daftar Pustaka ditulis : Martin, Steve. 2002. Sports-interview shocker. *New Yorker*, May 6.

11. Artikel Surat kabar

William S. Niederkorn, "A Scholar Recants on His 'Shakespeare' Discovery," *New York Times*, June 20, 2002, Arts section, Midwest edition.

Dalam naskah ditulis : (Niederkorn 2002)

Dalam Daftar Pustaka ditulis : Niederkorn, William S. 2002. A scholar recants on his "Shakespeare" discovery. *New York Times*, June 20, Arts section, Midwest edition.

12. Book review

James Gorman, "Endangered Species," review of *The Last American Man*, by Elizabeth Gilbert, *New York Times Book Review*, June 2, 2002, 16.

Dalam naskah ditulis : Gorman 2002, 16)

Dalam Daftar Pustaka ditulis : Gorman, James. 2002. Endangered species. Review of *The last American man*, by Elizabeth Gilbert. *New York Times Book Review*, June 2.

13. Tesis atau Disertasi

M. Amundin, "Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, *Phocoena phocoena*" (PhD diss., Stockholm University, 1991), 22–29, 35.

Dalam naskah ditulis : (Amundin 1991, 22–29, 35)

Dalam Daftar Pustaka ditulis : Amundin, M. 1991. Click repetition rate patterns in communicative sounds from the harbour porpoise, *Phocoena phocoena*. PhD diss., Stockholm University.

14. Paper presented at a meeting or conference

Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (paper presented at the annual international meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, June 19–22, 2002).

Dalam naskah ditulis : (Doyle 2002)

Dalam Daftar Pustaka ditulis : Doyle, Brian. 2002. Howling like dogs: Metaphorical language in Psalm 59. Paper presented at the annual international meeting for the Society of Biblical Literature, June 19–22, in Berlin, Germany.

15. Web site

Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html>.

Dalam naskah ditulis : (Evanston Public Library Board of Trustees)

Dalam Daftar Pustaka ditulis : Evanston Public Library Board of Trustees. "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach." Evanston Public Library. <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (accessed June 1, 2005).

Penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis.

Redaksi Jurnal Studi Komunikasi dan Media mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada lima Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan mutu Jurnal Studi Komunikasi dan Media ini. Kelima Mitra Bestari dimaksud yaitu :

1. Prof. Dr. Harsono Suwardi, M.A. (Program Doktoral Ilmu Komunikasi Usahid Jakarta)
2. Ir. Dana Indra Sensuse, MLIS, PhD (Staf Akademik Magister Teknologi Informasi
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia)
3. Drs. M. Jamiluddin Ritonga, MS (Dosen Metodologi Penelitian di Universitas Esa Unggul
Jakarta dan Konsultan Komunikasi)
4. Dr. Halomoan Harahap, M.Si (Dosen FIKOM di Universitas Esa Unggul Jakarta)
5. Eko Nugroho, S.Sos, M.Si (Dosen FIKOM di UPDM(B) Jakarta)

Kelanjutan kesediaan kelima Mitra Bestari untuk tetap berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas Jurnal Studi Komunikasi dan Media melalui edisi-edisi berikutnya, tentu menjadi pengharapan besar Dewan Redaksi Jurnal Studi Komunikasi dan Media.

Nomor ID : 1417747767

Tanggal permohonan : Jumat, 5 Desember 2014

Nama terbitan : Jurnal Studi Komunikasi dan Media (e-Journal)

Sinopsis : Jurnal Studi Komunikasi dan Media adalah Jurnal yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap Komunikasi dan Media pada Bidang ilmu Jurnalistik, perpustakaan dan Kurator.

Pengelola : Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi
» <http://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm>

Kontak : Drs. Hasyim Ali Imran, M.Si.
Jalan Pegangsaan Timur 19 B, Menteng Jakarta Pusat. 10230
» Tel / fax : (021) 31922337 / (021) 31922337

Penerbit : Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
» <http://jurnal.kominfo.go.id/jskm>

Frekwensi terbitan : 6 bulanan

Nomor ISSN : 2407-6015 (media online)

Keterangan : » Kategori umum
» SK no. 0005.092/JI.3.2/SK.ISSN/2014.12 - 9 Desember 2014 (mulai edisi Vol. 18, No. 2, Des. 2014)



» Sampul depan [203.322 bita]